TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SINTANG

RENCANA PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)

Kabupaten Sintang

Tahun

2023-2026

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023-2026

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dalam konteks ini kemiskinan merupakan salah satu persoalan bangsa Indonesia yang perlu mendapatkan fokus dan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan termasuk di daerah;

b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dinyatakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026.

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomr 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden...

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 – 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2.Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang.

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan progam pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian progam dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta progam dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.

7. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya disingkat RAT merupakan dokumen penjabaran RPKD secara tahunan.

8. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat LP2KD merupakan dokumen yang memuat hasil evaluasi dan monitoring kinerja penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah secara tahunan

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten, selanjutnya disingkat TKPKD merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan kebijakan daerah dan wujud dari konsensus politik para pemangku kepentingan pembangunan di daerah dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

a. mendorong sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, TKPKD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan;
b. membangun konsensus bersama untuk menangani kemiskinan dengan berbasis data dan informasi dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tepat sasaran;
c. mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah; dan
d. mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2015-2030, yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

BAB III
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 4

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, progam dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 5

RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
d. BAB IV : Prioritas Program;
e. BAB V : Lokasi Prioritas;
f. BAB VI : Kelembagaan dan Sistem Monitoring Evaluasi;
g. BAB VII : Penutup.

Pasal 6

(1) Bab I Pendahuluan memuat mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, dan sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang.
(2) Bab II Kondisi Umum Daerah memuat memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
(3) Bab III Profil Kemiskinan Daerah memuat mengenai kondisi kemiskinan Konsumsi, kondisi kemiskinan multidimensi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan mikro dan analisis kemiskinan berdasarkan klaster wilayah.
(4) Bab IV Prioritas Program memuat tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang, determinan kemiskinan, isu strategis dan arah kebijakan.

(5)BAB V...

(5) Bab V Lokasi Prioritas memuat analisis prioritas wilayah intervensi strategi penanggulangan kemiskinan.
(6) Bab VI Kelembagaan dan Sistem Monitoring Evaluasi memuat uraian mengenai kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan kebutuhan sistem monitoring evaluasi dalam rangka peningkatan efektifitas program penanggulangan kemiskinan.
(7) Bab VII Penutup memuat mengenai harapan dukungan dan komitmen *stakeholders* terkait dalam implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 7

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ditetapkan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) yang merupakan penjabaran RPKD setiap tahun.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Pembiayaan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi dari RPKD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang.
(2) Anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan berpedoman pada RKPD.

Pasal 10

(1) Pembiayaan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintahan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan kewenangan desa.
(2) Berdasarkan peraturan perundangan, perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur tahapan perencanaan dan penganggaran desa

Pasal 11

(1) Pembiayaan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari pendanaan lain berupa APBN, APBD Provinsi, dan lain-lain pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melalui TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2) Dalam melaksanakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) pada setiap akhir tahun sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan RPKD.
(3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati Sintang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR 16

SAMBUTAN KETUA TKPK KABUPATEN SINTANG

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Esa, atas rahmat dan kuasa-Nya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui berbagai program kegiatan baik sektoral maupun lintas bidang pembangunan. Oleh karena itu kemiskinan harus menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana strategis pembangu nan nasional maupun pembangunan daerah yaitu dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Rumusan masalah tersebut dijabarkan kedalam suatu dokumen strategis kebijakan daerah yang memuat upaya dan strategi percepatan penanggulangan kemiskin an daerah, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

RPKD merupakan dokumen rencanapenanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. RPKD ini disusun dalam upaya membantu pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam menentukan upaya- upaya konkrit serta strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam menanggulangi kemiskinan.

Bersama ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen RPKD ini khususya kepada Tim Penyusun dan Tim USAID ERAT yang telah mendampingi serta menfasilitasi dalam penyusunannya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 secara sinergi dan terkoordinasi.

Sintang, Januari 2023

WAKIL BUPATI SINTANG
Selaku Ketua TKPK Kabupaten Sintang

MELKIANUS, S.Sos.

KATA PENGANTAR

Salam Damai Sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas perkenan-Nya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 dapat disusun sebagai bagian dari tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kabupaten Sintang.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang akan terus menjadi agendakrusial dalam program pembangunan sosial dan ekonomi, yang memerlukan langkah- langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi dan peran TKPK Daerah adalah sangat penting dalam rangka koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, TKPK Kabupaten Sintang menjalankan fungsi diantaranya melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang merupakan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

RPKD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020 ini antara lain memuat uraian tentang: Kondisi Umum Daerah Kabupaten Sintang, Profil Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang, Prioritas Program dan Lokasi Prioritas, serta Kelembagaan dan Sistem Monitoring Evaluasi. Oleh karena itu RPKD ini diharapkan dapat terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sintang yang telah disusun khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan. Sebagai implikasinya, maka berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan didalam RPKD ini agar dapat tercermin didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang dan memperoleh dukungan pembiayaan melalui APBD setiap tahun secara proporsional.

Bersama ini juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RPKD Kabupaten Sintang ini, baik Tim Penyusun yang melibatkan OPD teknis terkait maupun USAID ERAT sebagai fasilitator dalam penyusunan RPKD ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026.

Sintang, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINTANG
Selaku Sekretaris TKPK Kabupaten Sintang

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA SINTANG

KARTIYUS, SH. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680826 199303 1 004

DAFTAR ISI

Sambutan
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-3
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II KONDISI UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Daerah II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-6
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-21

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH III-1
3.1. Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan III-1
3.2 Kondisi Kemiskinan III-4
3.3 Karakteristik Kemiskinan Berdasarkan Klaster Wilayah III-55

BAB IV PRIORITAS PROGRAM IV-1
4.1 Permasalahan dan Isu Strategis Kemiskinan IV-1
4.2 Determinan Kemiskinan IV-7
4.3 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sintang IV-30

BAB V LOKASI PRIORITAS V-1
5.1 Strategi Pelayanan Dasar V-2
5.2 Strategi Perlindungan Sosial V-14
5.3 Strategi Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan V-18

BAB VI KELEMBAGAAN DAN SISTEM MONITORING EVALUASI VI-1
6.1. Kelembagaan VI-1
6.2. Sistem Monitoring dan Evaluasi VI-7
6.3. Struktur Kelembagaan dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi VI-9
6.4. Metode Pemantauan dan Evaluasi VI-10

BAB VII PENUTUP VII-1

LAMPIRAN I ..... Lampiran I-1
MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SINTANG ..... Lampiran I-1

LAMPIRAN II ..... Lampiran II-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa di Kabupaten Sintang	II-2
Tabel 2.2	Penduduk Kabupaten Sintang, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2021	II-4
Tabel 2.3	Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin (209-2021)	II-4
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang	II-5
Tabel 2.5	PDRB Kabupaten Sintang	II-8
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang	II-8
Tabel 2.7	Perkembangan Capaian APK dan APM Tahun 2018-2021	II-14
Tabel 2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sintang 2018-2021	II-19
Tabel 2.9	Indeks Desa Membangun (IDM) status Mandiri Tahun 2021	II-20
Tabel 2.10	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang	II-22
Tabel 2.11	Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Perkerasan	II-23
Tabel 2.12	Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan	II-23
Tabel 2.13	Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2020	II-23
Tabel 2.14	Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang	II-24
Tabel 2.15	Kondisi Perumahan Permukiman Kabupaten Sintang	II-24
Tabel 2.16	Bencana Banjir dan Karhutla Kabupaten Sintang Tahun 2020	II-25
Tabel 3.1	Sebaran Sarana Sanitasi	III-19
Tabel 3.2	Perkembangan Kondisi Jalan	III-25
Tabel 3.3	Sebaran Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	III-29
Tabel 3.4	Jumlah PPKS Tahun 2022	III-35
Tabel 3.5	Jumlah BTS Menurut Kecamatan	III-41
Tabel 3.6	Jumlah Hotspot Menurut Kecamatan	III-44
Tabel 3.7	Desa Menurut Status IDM	III-50
Tabel 3.8	Jumlah Individu DTKS Kabupaten Sintang Tahun 2022	III-55
Tabel 5.1	Target Angka Kemiskinan Tahun 2023	V-1

Tabel 6.1 Kriteria Notifikasi Capaian Kinerja VI-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Sintang	II-1
Gambar 2.2	Luas Kecamatan di Kabupaten Sintang (Km2)	II-2
Gambar 2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	II-6
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang	II-7
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2016-2021	II-10
Gambar 2.6	Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Barat	II-11
Gambar 2.7	Indeks Gini Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2021	II-11
Gambar 2.8	IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat & Nasional (2017-2021)	II-12
Gambar 2.9	Grafik Perkembangan Capaian RLS dan RLS	II-14
Gambar 2.10	Kasus Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Tahun 2020	II-15
Gambar 2.11	Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2020	II-16
Gambar 2.12	Perkembangan Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2021	II-16
Gambar 2.13	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2021	II-18
Gambar 2.14	Perkembangan TPT dan TPAK	II-19
Gambar 2.15	Jumlah Desa Menurut Status IDM (2017-2021)	II-20
Gambar 2.16	Perkembangan Jumlah Desa Mandiri	II-20
Gambar 3.1	Konsep Kemiskinan Ekstrem	III-3
Gambar 3.2	Tiga Pilar Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	III-4
Gambar 3.3	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sintang	III-5
Gambar 3.4	Perkembangan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang	III-6
Gambar 3.5	Perkembangan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang	III-6
Gambar 3.6	Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Sintang	III-7
Gambar 3.7	Pengeluaran Per Kapita Menurut Persentil	III-8
Gambar 3.8	Capaian Pembelajaran Tahun 2022 Menurut Kuantil	III-9
Gambar 3.9	Tingkat Keberlanjutan Sekolah Menurut Usia Sekolah	III-9
Gambar 3.10	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sintang Tahun 2022	III-10
Gambar 3.11	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2022	III-10

Gambar 3.12	Angka Melek Huruf Kabupaten Sintang Tahun 2022	III-10
Gambar 3.13	Jumlah Kasus Kematian Bayi	III-12
Gambar 3.14	Hasil Pemantauan Status Gizi Masyarakat	III-15
Gambar 3.15	Capaian Peserta KB Baru	III-17
Gambar 3.16	Capaian Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi	III-17
Gambar 3.17	Peserta KB Aktif	III-18
Gambar 3.18	Persentase Penduduk Miskin Bersanitasi Menurut Kuintil	III-20
Gambar 3.19	Persentase Akses Sanitasi Tahun 2017-2021	III-21
Gambar 3.20	Persentase Cakupan Air Minum Aman	III-21
Gambar 3.21	Persentase Jaringan Perpipaan Tahun 2017-2021	III-22
Gambar 3.22	Sebaran RTLH Menurut Kecamatan	III-23
Gambar 3.23	Perkembangan Jumlah RT Pelanggan Listrik PLN	III-24
Gambar 3.24	Persentase Rumah Tangga Miskin Berakses Listrik	III-24
Gambar 3.25	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kondisi Jalan	III-25
Gambar 3.26	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha	III-26
Gambar 3.27	Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha	III-26
Gambar 3.28	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha	III-27
Gambar 3.29	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor Usaha	III-28
Gambar 3.30	Tingkat Pendidikan Penduduk Bekerja	III-28
Gambar 3.31	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	III-28
Gambar 3.32	Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan	III-28
Gambar 3.33	Perkembangan TPT Kabupaten Sintang	III-29
Gambar 3.34	Persentase Penduduk Menganggur Menurut Kelompok Usia	III-30
Gambar 3.35	Jumlah Penduduk Menganggur Menurut Kelompok Usia	III-30
Gambar 3.36	Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin	III-31
Gambar 3.37	Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin	III-31
Gambar 3.38	Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan	III-32
Gambar 3.39	Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan	III-32
Gambar 3.40	Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Klasifikasi Keterampilan	III-32

Gambar 3.41	Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Klasifikasi Keterampilan	III-33
Gambar 3.42	Perkembangan TPAK Kabupaten Sintang	III-33
Gambar 3.43	Persentase Produktivitas Sektor Ekonomi Utama	III-34
Gambar 3.44	Jumlah DTKS dan PPKS Tahun 2022	III-35
Gambar 3.45	Persentase Kepemilikan Perlindungan Sosial Menurut Kuantil Masyarakat Miskin	III-36
Gambar 3.46	Persentase Kepemilikan Jamkes Menurut Kuantil Masyarakat Miskin	III-36
Gambar 3.47	Persentase Ruas Jalan Menurut Kondisi Tahun 2020	III-37
Gambar 3.48	Persentase Masyarakat Miskin yang memiliki akses trayek transportasi publik	III-38
Gambar 3.49	Peta Sebaran Potensi Bencana Banjir	III-43
Gambar 3.50	Peta Sebaran Potensi Kerawanan Kebakaran Hutan	III-45
Gambar 3.51	Peta Kerawanan Pangan	III-47
Gambar 3.52	Sebaran rasio jumlah sarpras penyedia pangan	III-47
Gambar 3.53	Komoditi Penyumbang Inflasi	III-49
Gambar 3.54	Persentase Jumlah Individu DTKS di Desa Tertinggal	III-50
Gambar 3.55	Persentase Penduduk Miskin Desa Dalam Kawasan Hutan	III-51
Gambar 3.56	Persentase Kemiskinan Ekstrem di Indonesia	III-52
Gambar 3.57	Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Provinsi Tahun 2020	III-52
Gambar 3.58	Jumlah Individu dan Keluarga P3KE Kabupaten Sintang Tahun 2022	III-54
Gambar 3.59	Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Hutan	III-56
Gambar 3.60	Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Sungai	III-57
Gambar 3.61	Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Pertanian dan Perkebunan	III-58
Gambar 3.62	Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Perkotaan	III-59
Gambar 3.63	Photomapping Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang	III-60
Gambar 4.1	Determinan Kemiskinan Aspek Pertumbuhan Ekonomi	IV-8
Gambar 4.2	Determinan Kemiskinan Aspek Pengangguran Dampak Pandemi Covid-19	IV-9
Gambar 4.3	Determinan Kemiskinan Aspek Pendidikan	IV-10
Gambar 4.4	Determinan Kemiskinan Aspek Kesehatan	IV-13
Gambar 4.5	Determinan Kemiskinan Aspek Ketahanan Pangan	IV-16
Gambar 4.6	Determinan Kemiskinan Aspek Infrastruktur Dasar	IV-17

Gambar 4.7	Determinan Kemiskinan Aspek Sosial	IV-19
Gambar 4.8	Determinan Kemiskinan Aspek Kebencanaan	IV-20
Gambar 4.9	Determinan Kemiskinan Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-21
Gambar 4.10	Determinan Kemiskinan Aspek Ketenagakerjaan	IV-24
Gambar 4.11	Determinan Kemiskinan Aspek KUKM	IV-25
Gambar 4.12	Determinan Kemiskinan Aspek Kawasan Hutan	IV-26
Gambar 4.13	Determinan Kemiskinan Aspek Perencanaan dan Penganggaran	IV-28
Gambar 4.14	Determinan Kemiskinan Aspek Sistem Pendukung Kebijakan PK	IV-29
Gambar 4.15	Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sintang	IV-31
Gambar 5.1	Sebaran Lokasi Prioritas Program Pendaftaran Penduduk	V-3
Gambar 5.2	Sebaran Lokasi Prioritas Program Pencatatan Sipil	V-4
Gambar 5.3	Sebaran Lokasi Prioritas Program PAUD	V-5
Gambar 5.4	Sebaran Lokasi Prioritas Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	V-6
Gambar 5.5	Sebaran Lokasi Prioritas Program Pelayanan Komplikasi Kebidanan	V-6
Gambar 5.6	Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Nifas KF-3	V-7
Gambar 5.7	Sebaran Lokasi Prioritas Program Pelayanan Bayi	V-8
Gambar 5.8	Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Balita	V-8
Gambar 5.9	Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Neonatal	V-9
Gambar 5.10	Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Bersalin	V-9
Gambar 5.11	Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Hamil KEK	V-10
Gambar 5.12	Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Hamil Anemia	V-11
Gambar 5.13	Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Balita Gizi Kurang	V-11
Gambar 5.14	Sebaran Lokasi Prioritas Penanganan Kasus TBC	V-12
Gambar 5.15	Sebaran Lokasi Prioritas Pembinaan Posyandu Tidak Aktif	V-13
Gambar 5.16	Sebaran Lokasi Prioritas Penanganan Jalan Desa	V-14
Gambar 5.17	Sebaran Lokasi Prioritas Program Perlindungan Sosial	V-15
Gambar 5.18	Sebaran Lokasi Prioritas Penanggulangan Kebencanaan	V-17
Gambar 5.19	Sebaran Lokasi Prioritas Program Ketenagakerjaan	V-19
Gambar 5.20	Sebaran Lokasi Prioritas Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat	V-22

Gambar 5.21	Sebaran Lokasi Prioritas Program Penanganan Kerawanan Pangan	V-23
Gambar 5.22	Sebaran Lokasi Prioritas Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	V-24
Gambar 5.23	Sebaran Lokasi Prioritas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Kawasan Hutan	V-25
Gambar 6.1	Struktur Organisasi dan Kelembagaan TKPK Kabupaten Sintang	VI-5
Gambar 6.2	Fokus dan Indikator Pemantauan	VI-10
Gambar 6.3	Model Pernyataan Kondisi "If-Then"	VI-11

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat, yaitu dengan luas 21.635 Km^2, setelah Kabupaten Ketapang (31.241 Km^2) dan Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 Km^2). Disamping memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, Kabupaten Sintang menjadi wilayah yang sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat melalui upaya pemanfaatan posisi geografis yang sangat strategis tersebut. Tentunya tujuan akhir dari upaya tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui berbagai indikator kinerja pembangunan, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, dimana dari tahun ke tahun menjadi isu global,nasional bahkan lokal. Implikasi permasalahan kemiskinan sangat mempengaruhi berbagai aspek/dinamika kehidupan manusia secara keseluruhan, sehingga akan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia dari berbagai bidang, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan, untuk itu masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan, yang bertumpu pada beberapa nilai dasar filosofi yaitu rasa, karsa dan cipta sebagai kata kunci dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial (Redmond & Johnson, 1992; Sumodiningrat, 2008).

Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diimplementasikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, namun saat ini laju penurunan kemiskinan yang melambat, kerentanan penduduk miskin yang masih sangat tinggi dan ketimpangan yang masih sulit diturunkan masih menjadi permasalahan kemiskinan saat ini. Selain itu, kejadian pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penurunan kemiskinan. Penyebaran wabah Covid-19 hingga saat ini sangat berdampak terhadap pencapaian tingkat kemiskinan. Pada September 2020, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin secara Nasional yaitu tercatat sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 poin terhadap Maret 2022. Seiring dengan melandainya angka penyebaran wabah COVID-19, angka kemiskinan secara nasional dapat ditekan kembali menjadi 9,71 persen pada September 2021 dan terus turun hingga 9,54 persen pada Maret 2022. Di Kabupaten Sintang sendiri, persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 9,28 persen, meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,27 persen. Akan tetapi, angka tersebut masih jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 7,17 persen pada tahun 2020 dan 7,15 persen pada tahun 2021.

Kemiskinan bukan hanya permasalahan Kabupaten Sintang ataupun Kalimantan Barat dan Indonesia, namun juga persoalan global yang menjadi salah satu aspek dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda internasional. Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Konsep pengembangan TPB/SDGs di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dikategorikan menjadi pilar yaitu: (1) Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Pilar Pembangunan Sosial dalam konsep TPB/SDGs sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan, yang mencakup tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender. Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDGs, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus karena membiarkan kemiskinan sama saja dengan menggadaikan nilai-nilai martabat bangsa, dimana masyarakat yang miskin akan menjadi titik lemah dalam pelaksanaan pembangunan. Kemiskinan menjadi isu yang penyelesaiannya memerlukan penanganan multi sektor. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang masih menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pembangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, bahwa untuk mencapai visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026" ditetapkan 6 (enam) misi, yang diukur dalam 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama pembangunan, salah satunya adalah Angka Kemiskinan.

Untuk itu, dalam rangka memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan di daerah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dimana daerah dalam hal ini TKPK diamanatkan untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang dituangkan kedalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) serta Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pengentasan kemiskinan di daerah di Kabupaten Sintang sangat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, serta pelibatan berbagai unsur stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 maka upaya mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama, serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah selama kurun waktu 4 tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2021);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).
12. Keputusan Bupati Sintang Nomor 401/680/KEP-BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2022;
13. Surat Perintah Tugas Bupati Sintang Nomor 094/5275/SPT/III-Bappeda/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja di daerah.
2. Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang.
3. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 4 (empat) tahun kedepan;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sintang;
3. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN**, memuat mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, dan sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang.

BAB II. **KONDISI UMUM DAERAH**, memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

BAB III. **PROFIL KEMISKINAN DAERAH**, memuat mengenai kondisi kemiskinan Konsumsi, kondisi kemiskinan multidimensi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan mikro dan analisis kemiskinan berdasarkan klaster wilayah.

BAB IV. **PRIORITAS PROGRAM**, memuat tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang, determinan kemiskinan, isu strategis dan arah kebijakan.

BAB V. **LOKASI PRIORITAS**, memuat analisis prioritas wilayah intervensi strategi penanggulangan kemiskinan.

BAB VI. **KELEMBAGAAN DAN SISTEM MONITORING EVALUASI**, memuat uraian mengenai kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan kebutuhan sistem monitoring evaluasi dalam rangka peningkatan efektifitas program penanggulangan kemiskinan.

BAB VII. **PENUTUP**, memuat mengenai harapan dukungan dan komitmen *stakeholders* terkait dalam implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang.

BAB 2

KONDISI UMUM DAERAH

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

Luas wilayah Kabupaten Sintang adalah 21.635 km² dan menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu

Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Tengah

Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu

Barat : Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau.

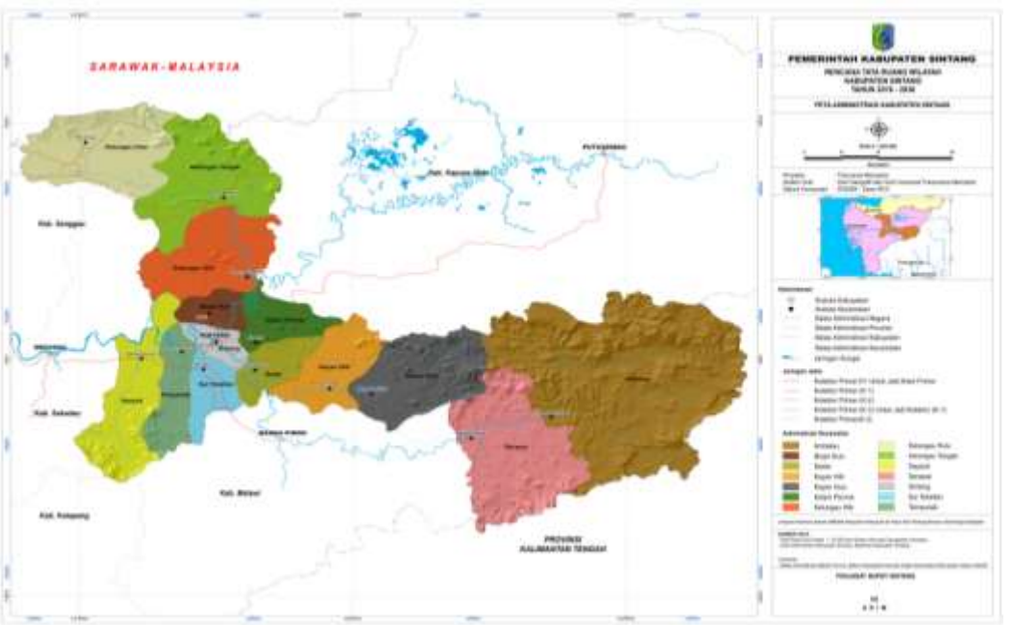

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terdiri atas 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 km² atau sebesar 29,52% dari luas Kabupaten Sintang. Sementara kecamatan kedua terluas di Kabupaten Sintang adalah Kecamatan Serawai dengan luas 2.127,50 km² atau sebesar 9,84% dari luas Kabupaten Sintang. Dua belas kecamatan lainnya tidak mencapai 10% dari total luas kabupaten. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sintang dengan luas 277,05 km² atau hanya 1,28% dari total luas kabupaten.

Secara administrasi Kabupaten Sintang terbagi atas 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa, secara rinci luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah, Jumlah Desa di Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km²)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Serawai	38	-	2.127,50	9,84
2.	Ambalau	33	-	6.386,40	29,52
3.	Kayan Hulu	31	-	937,50	4,33
4.	Sepauk	40	-	1.825,70	8,44
5.	Tempunak	26	-	1.027,00	4,75
6.	Sungai Tebelian	26	-	526,50	2,43
7.	Sintang	13	16	277,05	1,28
8.	Dedai	31	-	694,10	3,21
9.	Kayan Hilir	43	-	1.136,70	5,25
10.	Kelam Permai	17	-	523,80	2,42
11.	Binjai Hulu	11	-	307,65	1,42
12.	Ketungau Hilir	24	-	1.544,50	7,14
13.	Ketungau Tengah	29	-	2.182,40	10,09
14	Ketungau Hulu	29	-	2.138,20	9,88
Jumlah		**391**	**16**	**21.635,00**	**100**

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2022

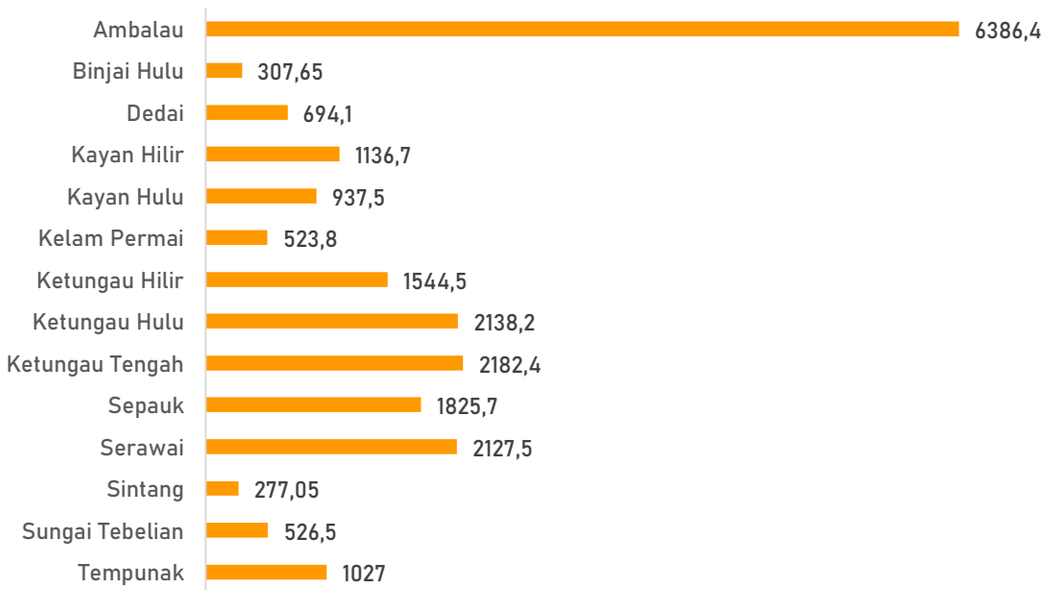

Gambar 2.2 Luas Kecamatan di Kabupaten Sintang (Km²)

Posisi letak geografis Kabupaten Sintang berada diantara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°51' sampai 113°20' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Kabupaten Sintang berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi.

2.1.2. Aspek Topografi

Kabupaten Sintang mempunyai topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yakni datar, berombak, bergelombang dan terjal dengan kemiringan rata- rata 15 – 44 %. Wilayah Kabupaten Sintang apabila ditinjau dari aspek topografinya terdiri dari daerah datar sampai bergelombang dan ada beberapa daerah yang berbukit bahkan menyerupai gunung. Berdasarkan Bentuk permukaan bumi Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas 13.573,75 km^2 atau 62,74 %.

Berdasarkan tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan. Sepanjang tahun 2019, rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 259,72 mm dengan jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu 432 mm3 dengan jumlah 17 hari hujan dalam satu bulan. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 68 mm3, dengan jumlah 6 hari hujan dalam sebulan. Menurut Pos Pengamatan Meteorologi Tebelian, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi.

Hingga tahun 2019, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.206.994,65 ha dimana penggunaannya secara umum untuk belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, pelabuhan udara/laut, pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, semak/belukar, tanah terbuka, transmigrasi dan tubuh air. Penggunaan lahan tertinggi yaitu pada pertanian lahan kering campuran sebesar 983.502,51 ha sedangkan penggunaan lahan terendah yaitu pada pelabuhan darat/laut sebesar 23,23 ha.

2.1.3. Aspek Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang berjumlah 423.674 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2020-2021 tercatat rata-rata sebesar 0,75 persen. Angka ini lebih tinggi jika di bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2010-2019) yang besarnya rata-rata 1,31 persenper tahun. Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi

yaitu sebesar 78.352 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,79 persen selama kurun waktu 2020-2021, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 53.466 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2020-2021 sebesar 0,54 persen, yang menjadi urutan ketiga adalah Kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk sebesar 34.909 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 0,89 persen.

Tabel 2.2
Penduduk Kabupaten Sintang, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	KECAMATAN	Laju Pertumbuhan Penduduk Per 2020-2021 (%)	Persentase Penduduk (%)	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	0,05	5,38	22.779
2.	Ambalau	0,01	3,13	13.260
3.	Kayan Hulu	0,08	5,37	22.771
4.	Sepauk	0,54	12,62	53.466
5.	Tempunak	0,39	7,14	30.252
6.	Sungai Tebelian	0,89	8,24	34.909
7.	Sintang	1,79	18,49	78.352
8.	Dedai	1,06	7,13	30.225
9.	Kayan Hilir	0,59	6,53	27.683
10.	Kelam Permai	1,06	4,39	18.579
11.	Binjai Hulu	1,15	3,31	14.030
12.	Ketungau Hilir	0,69	5,72	24.224
13.	Ketungau Tengah	0,36	7,20	30.496
14.	Ketungau Hulu	0,51	5,35	22.648
Kabupaten Sintang		**0,75**	**100**	**423.674**

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2022

Penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2021 dengan golongan umur terbanyak adalah golongan umur sepuluh tahun sampai dengan empat belas tahun yang berjumlah 37.888 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah golongan umur di atas 75 tahun sebesar 5.313 jiwa, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin (209-2021)

Kelompok Umur	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Total		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
0-4	21.717	19.174	19.110	20.942	186.602	18.551	42.659	37.776	37.661
5-9	21.875	19.175	19.031	21.088	18.587	18.468	42.963	37.762	37.499
10-14	19.704	19.746	19.516	18.399	18.541	18.372	38.103	38.287	37.888
15-19	18.441	18.926	18.748	17.626	17.399	17.223	36.067	36.325	35.971
20-24	19.082	18.993	18.831	18.326	17.596	17.458	37.408	36.589	36.289
25-29	18.525	19.115	19.032	18.194	18.152	18.129	36.719	37.267	37.161
30-34	17.929	18.965	18.962	17.526	17.861	17.887	35.455	36.826	36.849
35-39	16.146	17.209	17.326	15.617	16.151	16.294	31.763	33.360	33.620
40-44	14.847	16.090	16.246	13.659	15.117	15.301	28.506	31.207	31.547
45-49	12.548	13.597	13.851	11.252	12.330	12.609	23.800	25.927	26.460
50-54	10.258	11.126	11.442	9.517	9.990	10.286	19.775	21.116	21.728

55-59	8.453	8.828	9.076	7.908	7.797	8.056	16.361	16.625	17.132
60-64	6.546	6.593	6.842	5.746	5.966	6.218	12.292	12.559	13.060
65-69	4.261	4.754	4.986	3.663	4.359	4.587	7.924	9.113	9.573
70-74	2.553	2.887	3.144	2.072	2.556	2.779	4.625	5.446	5.923
75+	2.321	2.743	2.835	2.044	2.378	2.478	4.365	5.121	5.313

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2022

Kepadatan penduduk Kabupaten Sintang tahun 2021 adalah 19,58 penduduk per km², kepadatan seperti tersebut maka daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang. Jika dibandingkan dengan hasil proyeksi tahun sebelumnya rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan mengalami peningkatan.

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sintang (220,31 jiwa/km²) dengan rata-rata kepadatan penduduk perdesa/ kelurahan sebanyak 2.701,79 jiwa dan terendah berada di kecamatan Ambalau (2,21 jiwa/km²) dengan rata-rata jumlah penduduk per desa sebanyak 401,82 jiwa.

Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Luas Area (Km²)	Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk	
					Per Km²	Per Desa
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*
1.	Serawai	2.261,37	38	22.779	10,07	599,45
2.	Ambalau	5.991,97	33	13.260	2,21	401,82
3.	Kayan Hulu	1.790,01	31	22.771	12,72	734,55
4.	Sepauk	1.502,71	40	53.466	35,58	1.336,65
5.	Tempunak	873,89	26	30.252	34,62	1.163,54
6.	SungaiTebelian	597,64	26	34.909	58,41	1.342,65
7.	Sintang	355,65	29	78.352	220,31	2.701,79
8.	Dedai	599,53	31	30.225	50,41	975,00
9.	Kayan Hilir	1.050,46	43	27.683	26.35	643,79
10.	Kelam Permai	642,11	17	18.579	28,93	1.092,88
11.	Binjai Hulu	377,48	11	14.030	37,17	1.275,45
12.	Ketungau Hilir	1.630,88	24	24.224	14,85	1.009,33
13.	Ketungau	1.970,41	29	30.496	15,48	1.051,59
14.	Ketungau Hulu	1.993,89	29	22.648	11,36	780,97
Jumlah		**21.638**	**407**	**423.674**	**19,58**	**1.040,97**

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2022

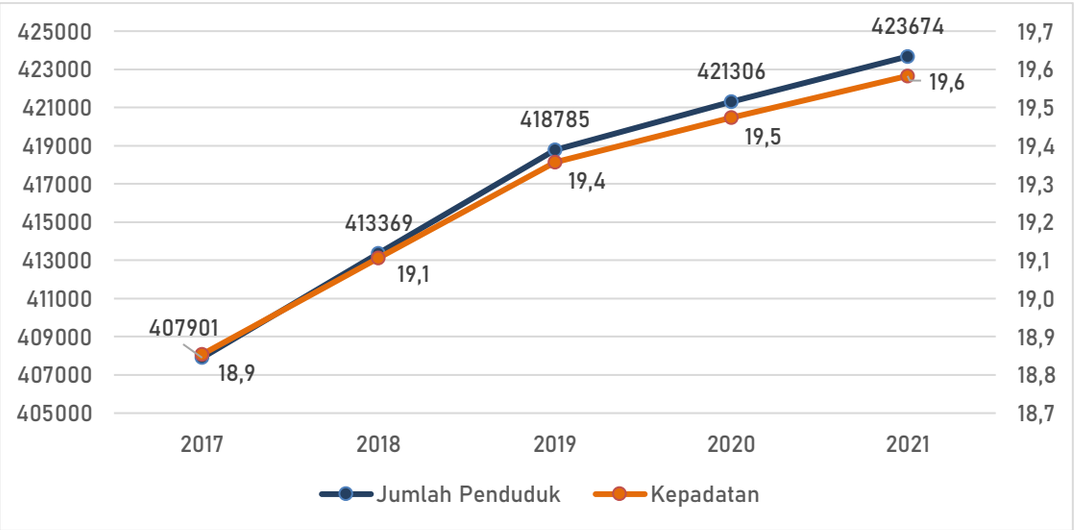

Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Perekonomian

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah seringkali menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Hipotesis kerja yang digunakan adalah jika angka PDRB meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat begitu pula sebaliknya. Akibat pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar 2,19 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (5,09 persen). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2020 juga lebih dalam (negatifnya lebih besar) dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (-2,07 persen) dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (-1,82 persen). Padahal sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan Barat, sebagaimana tampak pada grafik berikut.

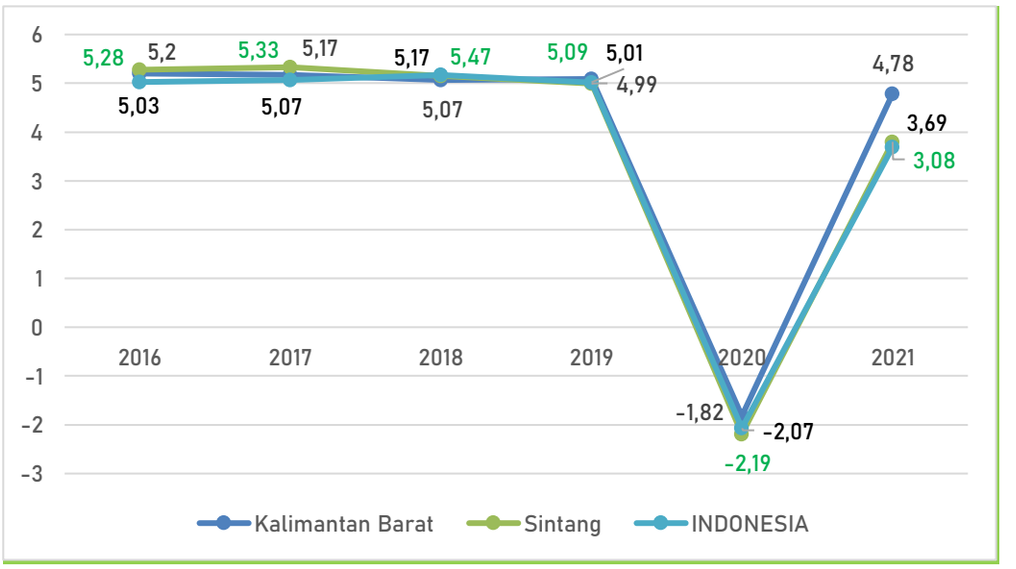

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang

Ada dua sektor besar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terkontraksi agak dalam, yaitu sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan yang share-nya masing-masing sekitar 15 persen, namun tumbuh negatif masing-masing sebesar -8,59 persen dan -10,60 persen. Sementara dilihat dari besaran pertumbuhannya, ternyata pertumbuhan terendah dialami oleh sektor Penyediaan akomodasi makanan dan minuman (-18,79 persen) dan sektor jasa lainnya (-17,68 persen). Sebaliknya pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (26,01 persen). Untunglah dua sektor primer yang masih menjadi andalan Kabupaten Sintang, yaitu sektor pertanian dan pertambangan masih tumbuh positif meskipun kecil, yaitu masing-masing sebesar 2,76 persen dan 3,88 persen.

b. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB ADHK merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik dan stabil. Tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHK sebesar Rp. 9.378.535,08 juta mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 9.624.621,57 juta. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Sintang sebagai berikut.

Tabel 2.5
PDRB Kabupaten Sintang

Sektor PDRB	PDRB atas harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2160422.14	2191580.90	2301670.97	2445033.02	2512575.81
B. Pertambangan dan Penggalian	580241.68	616500.83	645145.38	657999.96	683558.87
C. Industri Pengolahan	782310.95	810454.71	831964.52	871630.24	854741.29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1854.80	1945.19.00	1999.98	2077.86	2358.18.00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5150.51.00	5373.18.00	5539.35.00	5736.48.00	5956.23.00
F. Konstruksi	996482.95	1110059.67	1187875.70	1241723.68	1135000.13
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1487353.56	1569259.81	1645269.05	1709866.71	1528545.12
H. Transportasi dan Pergudangan	159983.99	167710.31	179489.73	191357.39	175060.99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	196558.51	208302.50	223568.31	236330.23	191925.65
J. Informasi dan Komunikasi	476315.95	533808.78	586084.25	638298.55	685364.72
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	226275.60	254309.91	279160.35	270952.05	267561.63
L. Real Estate	233660.58	242512.69	252815.06	256501.50	257560.57
M,N.Jasa Perusahaan	35751.50	37350.21	38826.65	39537.94	37831.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	259816.15	271919.23	292521.61	308624.81	311893.69
P. Jasa Pendidikan	391942.52	401514.37	411333.26	423548.88	395571.65
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187504.03	194828.94	206110.37	217197.69	273691.39
R,S,T,U. Jasa lainnya	62112.28	65938.72	69356.05	72079.03	59337.88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8243737.69	8683369.95	9158730.58	9588496.01	9378535.08

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel, struktur lapangan usaha masyarakat Kabupaten Sintang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sekitar 27 persen. Nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Secara rinci perkembangan nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,11	0,07	0,21	0,27	0,14
B. Pertambangan dan Penggalian	0,22	0,27	0,21	0,13	0,19
C. Industri Pengolahan	0,11	0,17	0,13	0,23	-1.94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,77	0,23	0,14	0,19	0,58

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,23	0,19	0,13	0,19	0,18
F. Konstruksi	0,49	0,49	0,29	0,24	-8.59
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	0,25	0,24	0,23	5,00	-10.60
H. Transportasi dan Pergudangan	0,24	0,22	0,29	0,34	-8.52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,28	0,31	0,34	-18.79
J. Informasi dan Komunikasi	0,52	0,50	0,43	0,30	0,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,53	0,43	-2.63	-1.25
L. Real Estate	0,23	0,18	0,18	0,14	0,03
M,N.Jasa Perusahaan	0,17	0,20	0,19	0,15	-4.32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	0,18	0,21	0,33	0,23	0,05
P. Jasa Pendidikan	0,14	0,11	0,11	0,14	-6.61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,12	0,19	0,26	0,27	1,08
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,18	0,26	0,22	0,21	-17.68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	0,23	0,23	0,24	0,21	-2.19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Sebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian Kabupaten Sintang didominasi oleh sektor pertanian dengan share sebesar 22,72 persen, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan share sebesar 15,68 persen dan usaha Konstruksi dengan share juga sebesar 15,86 persen.

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per kapita. Namun karena pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian daerah yang menyebabkan menurunnya PDRB Kabupaten Sintang, maka menjadi bias jika kita menggunakan data PDRB tahun 2020 untuk menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk Sintang. Oleh karena itu, analisis kesejahteraan penduduk Sintang dilakukan dengan menggunakan data PDRB per kapita tahun 2015-2019 yang lebih stabil. PDRB per kapita Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp 35.16 juta rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di tahun 2019 sebesar Rp 22.98 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 3,73 persen.

c. Inflasi

Inflasi dapat dipahami sebagai menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Sejalan dengan itu maka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah maka harga barang dan jasa akan semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli

masyarakat sehingga perekonomian daerah semakin stabil. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Sintang sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah 6,90 persen tahun 2015, kemudian 5,2 persen tahun 2016 dan 5,4 persen pada tahun 2017. Namun data inflasi tahun 2015 sampai dengan 2017 masih bersifat sementara yang bersumber dari kajian dan bukan merupakan data publikasi BPS karena BPS baru mulai publikasi data inflasi Kabupaten Sintang sejak tahun 2020. Adapun tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 sebesar 3,25 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,85 persen.

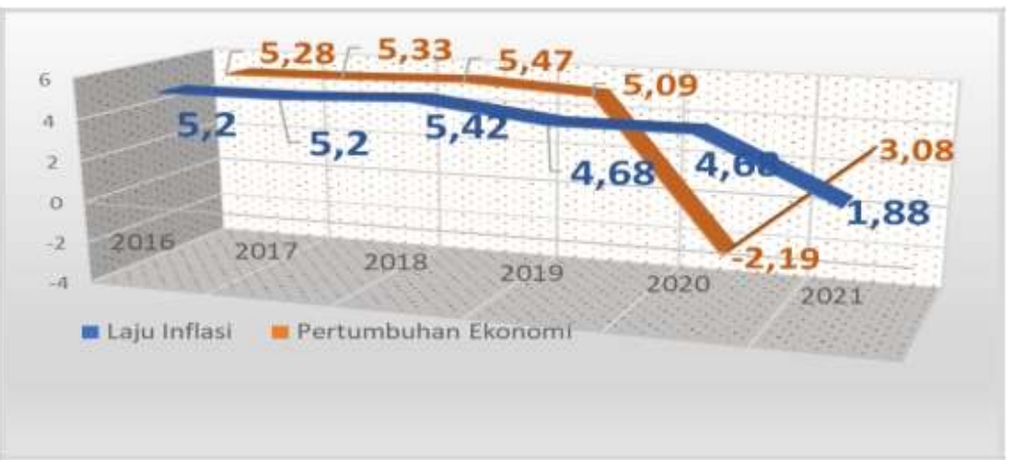

Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2016-2021

Namun berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kabupaten Sintang pada Februari 2021 justru telah terjadi deflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,78 pada Januari 2021 menjadi 111,64 pada Februari 2021. Tingkat deflasi tahun kalender Februari 2021 sebesar 0,55 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,74 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran.

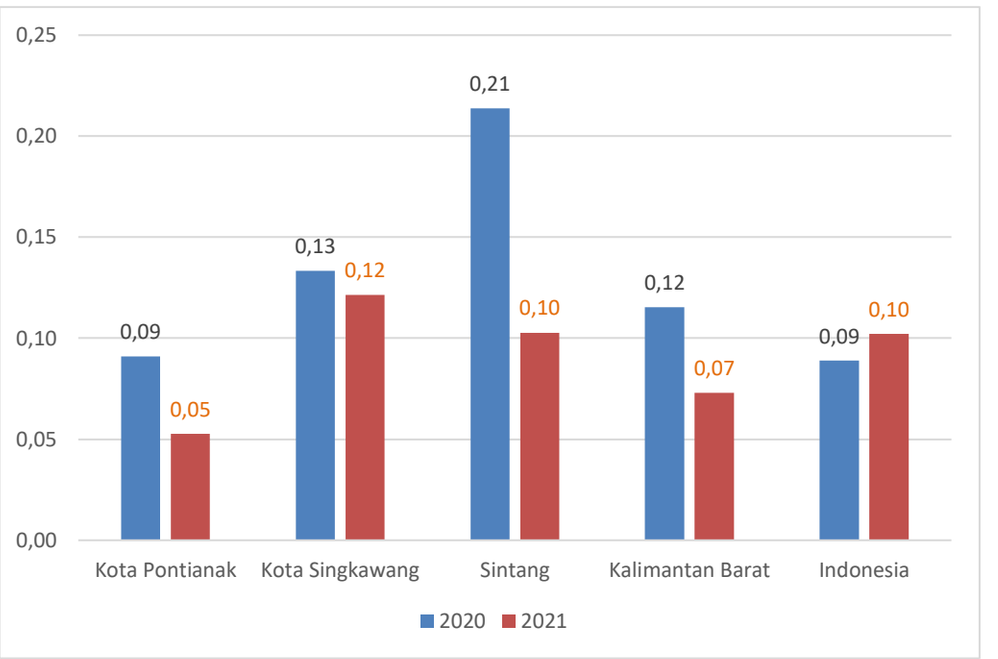

Gambar 2.6 Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Barat

d. Rasio Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1, artinya jika Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan pendapatan secara sempurna demikian pula sebaliknya jika Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna di masyarakat. Dengan demikian semakin Indeks Gini mendekati nilai 0 maka kondisi pemerataan pendapatan semakin baik. Sampai dengan tahun 2020 nilai Indeks Gini Kabupaten Sintang tercatat sebesar 0,260 mengalami perbaikan dari tahun 2019 sebesar 0,01. Berdasarkan capaian tersebut maka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sintang tergolong cukup baik, terlebih jika dibandingkan indeks gini provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 0,317 dan Nasional yang sebesar 0,381.

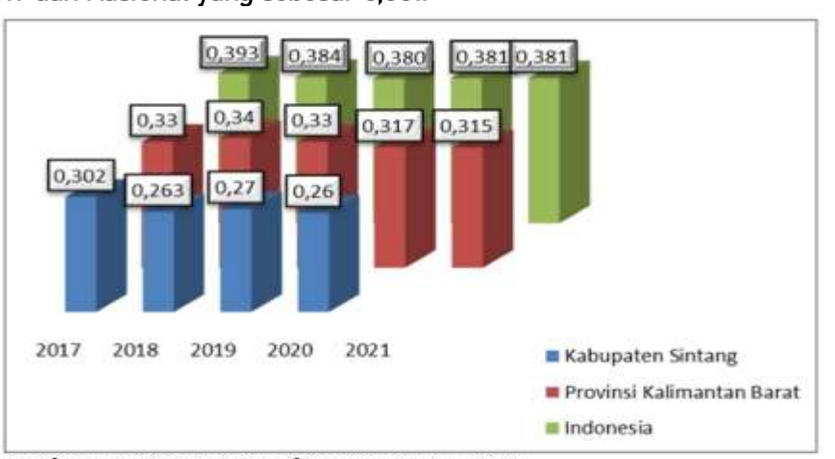

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2021

Berdasarkan grafik di atas secara umum Indeks Gini Kabupaten Sintang pada tahun 2017-2020 sedikit lebih baik dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian jika kita asumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang bercirikan perdesaan, maka Indeks Gini-nya pada September 2020 sekitar 0,273 sedikit lebih tinggi dari kondisi Maret 2020 (0,260), namun masih berada dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Informasi lain yang diperoleh dari publikasi BPS terkait dengan ketimpangan pendapatan adalah tentang distribusi pengeluaran. Dimana pada September 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sintang yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2017-2021 bergerak sangat lambat. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,81% per tahun. Namun secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu 2017–2021, pembangunan manusia di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Sintang adalah sebesar 65,16 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,93 pada tahun 2021 IPM dengan peningkatan pada seluruh variable komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Sintang secara umum lebih rendah dari IPM Nasional yang sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 67,90 ditahun 2021.

Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 2.8 IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat & Nasional (2017-2021)

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sintang adalah dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,07 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS provinsi (7,37 tahun) dan berada di ranking 7 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,03 tahun masih lebih rendah dari HLS Provinsi (12,60 tahun), berada di ranking 9 dari 14 Kabupaten. Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun sebesar 2,30% dibanding tahun 2019 menjadi Rp. 8,73 juta. Laju pertumbuhannya kurang dari 2% per tahun dan berada pada rangking 6 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2021 disebabkan menurunnya kinerja perekonomian sebagai akibat pandemi covid-19.

b. Pendidikan

Hingga 2020, Kabupaten Sintang belum terbebas dari masalah buta huruf, meskipun jumlahnya berkurang dibanding tahun sebelumnya. Ini terlihat dari peningkatan AMH. Pada tahun 2016, AMH (dapat membaca dan menulis) penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 90,52% dan pada tahun 2020 AMH bertambah menjadi 92,75%. Ini berarti, hingga tahun 2020, masih terdapat sekitar 7,25% yang buta huruf. Bila ditelusuri berdasarkan umur, mereka yang buta huruf ini berumur 30 tahun ke atas, dan yang terbesar (21%) berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas.

Keadaan paradoksal terjadi pada bidang pendidikan di Kabupaten Sintang. Saat APM dan APK menurun dalam dua tahun terakhir, justru RLS penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat signifikan. Pada tahun 2016 – 2020, RLS hanya bertambah 0,07 poin per tahun. Pada tahun 2020 RLS meningkat signifikan sebesar 0,36 point dari 6,89 tahun (2019) menjadi 7,07 tahun (2020). Peningkatan RLS sebesar 0,35 poin selama lima tahun, tergolong lambat. RLS hanya bertambah 0,07 poin per tahun.

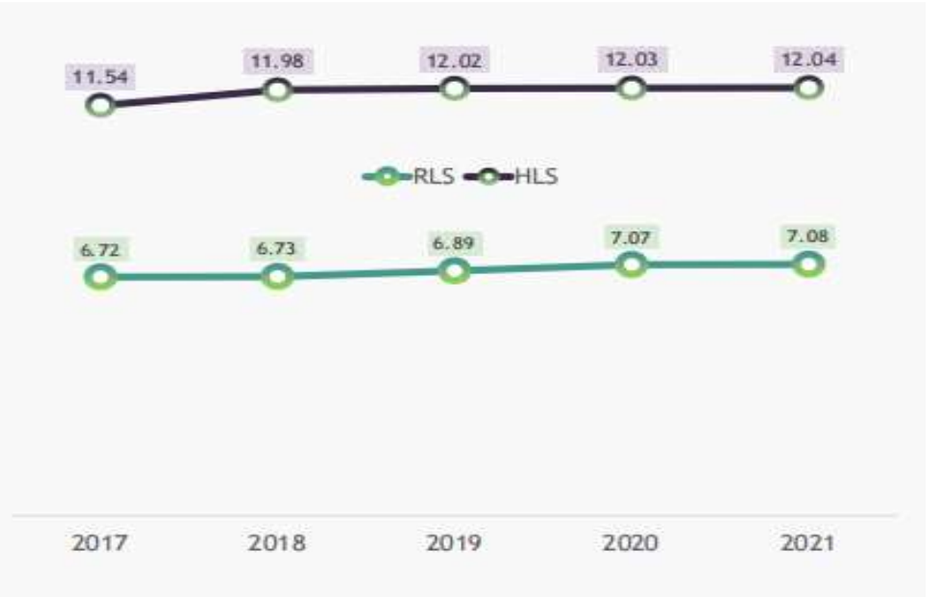

Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Capaian RLS dan RLS

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sintang cenderung menurun pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI mengalami kenaikan sedikit dari 97,80% pada tahun 2018 menjadi 98,68% pada tahun 2021. APM SMP/MTs juga naik 54,73% menjadi 57,63% pada periode yang sama. Demikian pula halnya APM SMA/SMK/MA mengalami kenaikan sedikit dari 45,00% (2018) menjadi 45,09% (2021). APM SMA/SMK/MA sebesar 45,09 mengandung arti bahwa tiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, hanya 45 orang yang mengenyam Pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2021, selebihnya (55 orang) diduga tidak melanjut, atau bekerja atau menganggur.

Sama seperti APM yang cenderung naik, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sintang pada semua jenjang pendidikan juga mengalami kenaikan. APK SD/MI tergolong baik, capaiannya sudah jauh melebihi 100% meskipun berfluktuatif. Capaiannya mengalami kenaiikan dari 114,88% (2018) menjadi 115,24% (2021). Sebaliknya APK SMP/MTs menurun sebesar 0,53% dari 74,32% (2018) menjadi 73,79% (2021). APK SMA/SMK/MA juga menurun pada tahun yang sama yaitu dari 82,89% (2018) menjadi 82,36% (2021).

Tabel 2.7
Perkembangan Capaian APK dan APM Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,88	116,36	114,58	115,24

2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	74,32	70,77	71,46	73,79
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	82,89	80,06	80,08	82,36
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,80	97,60	98,42	98,68
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	54,73	53,80	54,63	57,63
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	45,00	44,77	44,79	45,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalbar, 2022

Hingga tahun 2020, persentase penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Sintang yang Tidak punya ijazah SD sebesar 21,32%, menurun dibanding tahun 2019 (25,38%). Penduduk yang tidak punya ijazah SD ini kebanyakan perempuan (24,61%) dan sebagian besar (27,72%) berasal dari kelompok pengeluaran 40% terbawah (penduduk miskin). Sedangkan yang memiliki ijazah SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat, masing-masing adalah 30,61%, 22,01% dan 26,06%. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 29,40% pada SD/Sederajat, 21,47% pada SMP sederajat dan 23,75% pada SMA/sederajat.

c. Kesehatan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah angka yang menunjukkan peluang bayi mencapai umur 1 (satu) tahun. AKHB di Kabupaten Sintang ditandai dengan kasus kematian bayi cenderung menurun. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi adalah 86 kasus, kemudian naik menjadi 89 kasus (2017), turun lagi menjadi 44 kasus (2019), dan naik lagi di tahun 2020 menjadi 48 kasus. (AKB 5 per 1000 kelahiran hidup). Berdasarkan laporan Audit Maternal Perinatal Dinkes Kab. Sintang, AKB Kabupaten Sintang masuk pada kategori rendah (AKB < 10). Penurunan AKB dari waktu ke waktu mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup, pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Data perkembangan Kematian Neonatus, Bayi dan Balita serta data Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

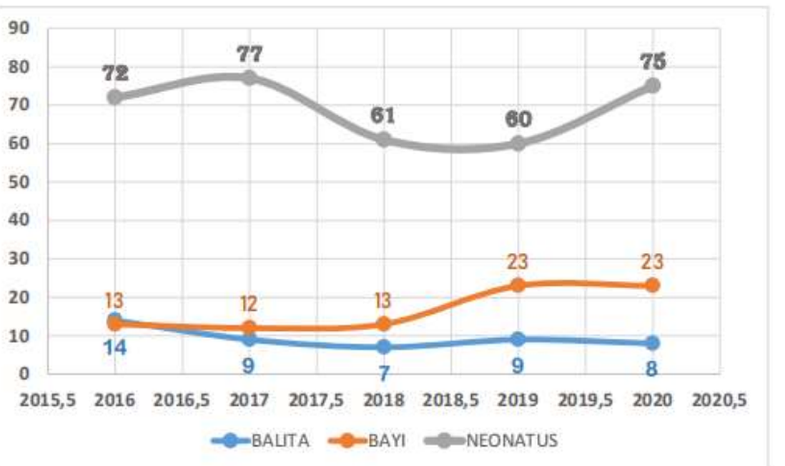

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Gambar 2.10 Kasus Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Tahun 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Gambar 2.11 Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2020

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sintang meningkat setiap tahunnya dan lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat. UHH Kabupaten Sintang tahun 2020 adalah 71,71 tahun, lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat (70,69 tahun), lihat Tabel 2.22. Capaian ini mengungkapkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Sintang pada tahun 2020, diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia antara 71 - 72 tahun.

Gambar 2.12 Perkembangan Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2021

Perkembangan balita gizi buruk di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan. Keadaan gizi tahun 2017 mengungkapkan terdapat 3,28% balita Gizi Buruk dan 15,39% Gizi Kurang. BBLR yang dilaporkan 214 (4,48%) dari 7.286 bayi baru

lahir, menurun dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 221 atau 3,03% dari 7.543 bayi baru lahir. Bayi yang lahir dengan kondisi BBLR dan Gizi Buruk dalam proses pertumbuhan fisik dan otak, dapat berakibat pada stunting (perawakan lebih pendek dari anak normal dalam usia 0 - 23 bulan (baduta) dan 0 – 59 bulan (balita). Perkembangan jumlah stunting sangat pendek dan pendek usia 0-59 dalam tiga tahun terakhir cenderung bertambah. Stunting (sangat pendek) tahun 2017 sebanyak 944 orang kemudian bertambah menjadi 1.422 orang tahun 2018 dan 1.685 orang tahun 2019. Sedangkan Stunting (pendek) pada tahun yang sama cenderung turun dari 3.168 orang tahun 2017 menjadi 2.166 orang tahun 2018 dan 2.778 orang tahun 2019.

d. Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang mencari kerja. Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah AK bertambah setiap tahunnya meskipun pertambahannya tergolong rendah, yakni rata-rata 0,52% per tahun selama periode 2015-2020. Jumlah AK bertambah dari 203.754 jiwa (2015) menjadi 309.918 jiwa (2020) terdiri dari laki-laki 58,2% dan perempuan 41,8%. Angkatan Kerja di tahun 2020, sebagian besar (95,5%) sudah bekerja. Laki-laki yang bekerja (58,5%) lebih banyak dari perempuan yang bekerja (41,5%). Kualitas AK yang bekerja tergolong rendah. Sekitar 55,7% berlatar belakang pendidikan SD ke bawah dan SMP (15,1%), selebihnya (29,2%) bependidikan SMA dan Perguruan Tinggi.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2017-2021 cenderung meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. TPT Kabupaten Sintang dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2020 mencapai angka 4,5 persen, tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 3,95 persen. Peningkatan TPT tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang

mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.

Secara umum TPT Kabupaten Sintang tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 5,82 persen dan tingkat pengangguran nasional yang sebesar 6,49 persen.

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2022

Gambar 2.13 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2021

Pada saat yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 71,64% (2018) menjadi 77,78% (2021). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi Angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi Angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam linhgkup Kabupaten Sintang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif dan akhirnya pada tahun 2021 sebesar 77,78 persen. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 77,78 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu.

Gambar 2.14 Perkembangan TPT dan TPAK

Perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Sintang dan perbandingannya dengan Provinsi dari tahun 2018 hingga 2021 secara lengkap tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sintang 2018-2021

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang
2018	4,26	1,81	68,65	71,64
2019	4,45	2,99	68,3	71,77
2020	5,81	4,50	68,83	75,57
2021	5,82	3,95	68,45	77,78

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2022

e. Pembangunan Desa

Perkembangan pembangunan dan kemajuan desa salah satunya adalah dapat dilihat dari perkembangan status desa berdasarkan perkembangan capaian Indeks Desa Membangun (IDM).Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu desa dalam membangun sumber daya manusia dan ekonomi lokal. IDM ini digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran. Perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM di Kabupaten Sintang dari tahun 2017-2021 adalah sebagaimana data berikut.

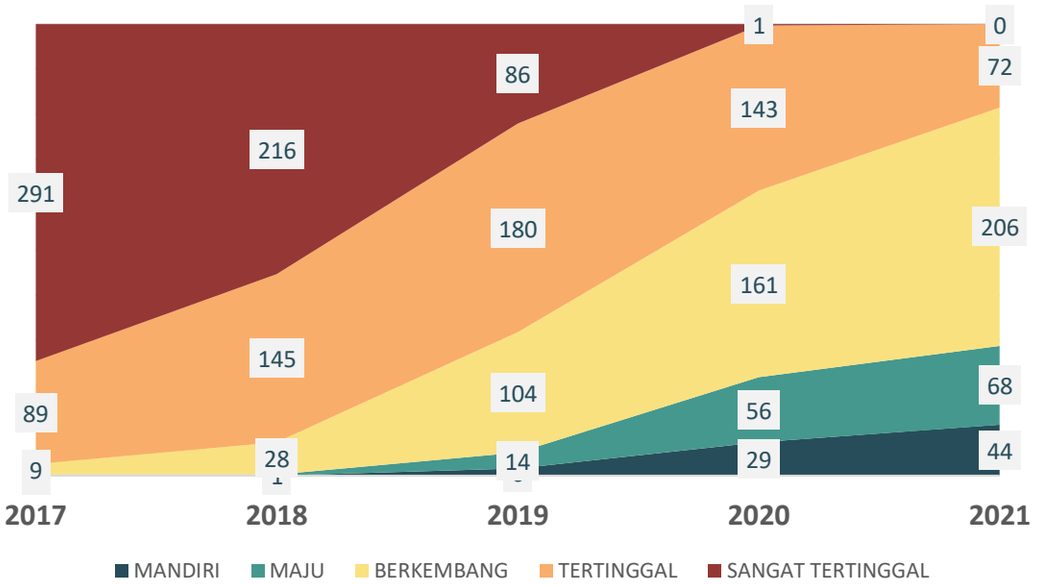

Gambar 2.15 Jumlah Desa Menurut Status IDM (2017-2021)

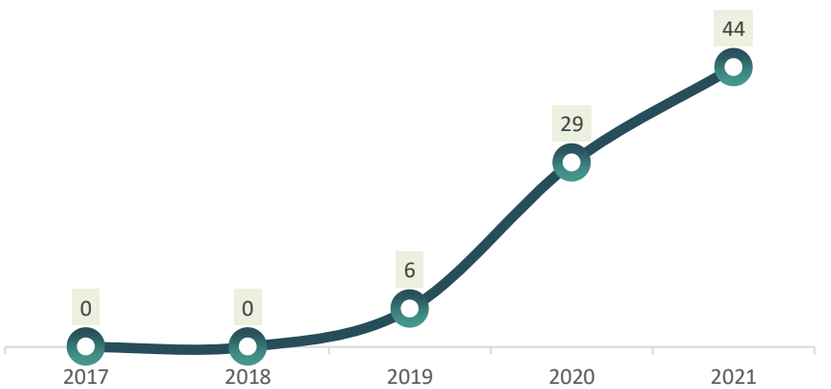

Sumber : Dinas PMPD Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 2.16 Perkembangan Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan data dari Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang, Desa dengan Status Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun 2021 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Indeks Desa Membangun (IDM) status Mandiri Tahun 2021

No	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	STATUS IDM 2021
1	AMBALAU	6105152001	NANGA KEMANGAI	MANDIRI
2	BINJAI HULU	6105212004	BINJAI HILIR	MANDIRI
3	BINJAI HULU	6105212005	BINJAI HULU	MANDIRI
4	BINJAI HULU	6105212007	DAK JAYA	MANDIRI
5	BINJAI HULU	6105212006	SUNGAI RISAP	MANDIRI
6	BINJAI HULU	6105212003	TELAGA DUA	MANDIRI
7	DEDAI	6105072014	EMPARU BARU	MANDIRI
8	KAYAN HILIR	6105082001	NANGA MAU	MANDIRI
9	KAYAN HILIR	6105082009	NANGA TIKAN	MANDIRI

10	KAYAN HULU	6105092006	ENTOGONG	MANDIRI
11	KAYAN HULU	6105092001	NANGA TEBIDAH	MANDIRI
12	KELAM PERMAI	6105192004	BANING PANJANG	MANDIRI
13	KELAM PERMAI	6105192005	ENSAID PANJANG	MANDIRI
14	KELAM PERMAI	6105192011	GEMBA RAYA	MANDIRI
15	KELAM PERMAI	6105192003	KEBONG	MANDIRI
16	KELAM PERMAI	6105192008	SUNGAI PUKAT	MANDIRI
17	KETUNGAU HILIR	6105042001	NANGA KETUNGAU	MANDIRI
18	KETUNGAU HILIR	6105042013	SEMAJAU MEKAR	MANDIRI
19	KETUNGAU HULU	6105062005	SUNGAI SERIA	MANDIRI
20	SEPAUK	6105032009	MAIT HILIR	MANDIRI
21	SEPAUK	6105032006	MANIS RAYA	MANDIRI
22	SEPAUK	6105032003	SEKUBANG	MANDIRI
23	SEPAUK	6105032030	SEPULUT	MANDIRI
24	SEPAUK	6105032015	SINAR PEKAYAU	MANDIRI
25	SEPAUK	6105032023	TANJUNG HULU	MANDIRI
26	SEPAUK	6105032002	TANJUNG RIA	MANDIRI
27	SEPAUK	6105032019	TAWANG SARI	MANDIRI
28	SEPAUK	6105032018	TEMAWANG MUNTAI	MANDIRI
29	SINTANG	6105012014	ANGGAH JAYA	MANDIRI
30	SINTANG	6105012007	BANING KOTA	MANDIRI
31	SINTANG	6105012028	JERORA SATU	MANDIRI
32	SINTANG	6105012027	MAIL JAMPONG	MANDIRI
33	SINTANG	6105012012	MERTI GUNA	MANDIRI
34	SINTANG	6105012009	MUNGGUK BANTOK	MANDIRI
35	SINTANG	6105012011	SUNGAI ANA	MANDIRI
36	SINTANG	6105012008	TERTUNG	MANDIRI
37	SUNGAI TEBELIAN	6105202007	GURUNG KEMPADIK	MANDIRI
38	SUNGAI TEBELIAN	6105202006	KAJANG BARU	MANDIRI
39	SUNGAI TEBELIAN	6105202005	MERARAI DUA	MANDIRI
40	SUNGAI TEBELIAN	6105202004	MERARAI SATU	MANDIRI
41	SUNGAI TEBELIAN	6105202018	RARAI	MANDIRI
42	TEMPUNAK	6105022018	BALAI HARAPAN	MANDIRI
43	TEMPUNAK	6105022009	KENYABUR BARU	MANDIRI
44	TEMPUNAK	6105022001	NANGA TEMPUNAK	MANDIRI

Sumber : IDM.Kemendesa.go.id, 2022

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Infrastruktur Pendidikan

Selama periode 2016-2020, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang SD/MI semakin menurun dari 176 (2016) menjadi 124 (2020). Angka ini tergolong rendah, sebagai dampak dari keberhasilan program KB dimana rata-rata jumlah anak per rumah tangga antara 2 – 3 jiwa. Keadaan yang sama juga terjadi pada jenjang SMP/MTs, rasio sekolah – murid, yakni berkurang dari 211 (2016) menjadi 193 (2019). Rasio guru/murid di Kabupaten Sintang tidak ada perubahan dan masih tergolong rendah, jauh di bawah tingkat nasional. Rasio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tetap pada angka 17 selama periode 2016-2020. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang SMA/SMK/MA,

justru meningkat dari 255 (2016) menjadi 298 (2020). Rasio guru/murid pendidikan menengah meningkat dari 15 pada tahun 2016 menjadi 18 di tahun 2020.

Tabel 2.10
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang

Sarana - Prasarana Pendidikan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Sekolah (unit)	410	430	121	127	63	62
Guru (orang)	4.304	3.150	1.493	1.357	1.145	1.015
Murid (orang)	72.030	53.592	25.564	21.456	17.798	18.489
Rasio Murid-Guru	**17**	**17**	**17**	**15**	**15**	**18**
Rasio Murid-Sekolah	**176**	**124**	**211**	**255**	**298**	**298**

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.2. Infrastruktur Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus berlangsung di Kabupaten Sintang. Hal ini tampak pada penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan. Hingga 2020, terdapat Rumah Sakit Umum 5 unit dan 1 unit Rumah Sakit Bersalin. Puskesmas rawat inap sebanyak 19 unit dan Puskesmas Non Rawat Inap 1 unit. Klinik Pratama sebanyak 22 unit. Jumah Posyandu berkurang dari 536 unit (2019) menjadi 504 unit (2020). Fasilitas dan sarana kesehatan (Puskesmas Rawat Inap dan Posyandu) sudah tersedia di setiap kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sintang. Jumlah Apotek bertambah 4 unit menjadi 15 unit. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) pada tahun 2020 tergolong tinggi, yaitu 3.405. Demikian juga keberadaan rumah sakit yang 6 unit, terasa masih sangat kurang dalam melayani penduduk Kabupaten Sintang yang berjumlah 421.306 jiwa.

Jumlah tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pembangunan kesehatan masyarakat dalam 4 tahun terakhir terus bertambah. Tenaga Kesehatan Paramedis (Bidan, Perawat, Farmasi dan Ahli Gizi) bertambah dari 986 orang (2016) menjadi 1.050 orang (2019). Demikian juga tenaga Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis) jumlahnya bertambah dari 70 orang (2016) menjadi 90 orang (2019). Rasio dokter per satuan penduduk 1 berbanding 5.952. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 510. Rasio ini masih tergolong tinggi dan masih perlu penambahan dokter dan paramedis lainnya.

2.3.3. Infrastruktur Wilayah

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kondisi jalan yang dibagi atas baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat didasarkan pada nilai Road Condition Index (RCI), International Roughness Index (IRI) dan besarnya

Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dalam satuan mobil penumpang (smp) per hari berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjan Umum Nomor 13 Tahun 2011. Berdasarkan luasan kerusakan, kondisi jalan Baik (B) adalah dimana prosentase kerusakan < 6 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan. Kondisi Sedang (S) adalah dimana prosentase kerusakan 6 – < 11 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan. Kondisi Rusak Ringan (RR) adalah dimana prosentase kerusakan 11 – < 15 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah dimana prosentase kerusakan > 15 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan.

Panjang jalan menurut jenis perkerasannya berdasarkan data tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.11, sedangkan panjang jalan menurut kondisi jalan berdasarkan data tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.11
Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Perkerasan

No	Jenis Permukaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal	377,10	391,21	218,11	258,81	285,02
2	Rigid/Beton	29,33	31,62	32,05	42,58	47,62
3	Telford/Kerikil	140,33	178,00	771,53	1.201,01	1.198,75
4	Tanah	1.37,00	1.783,99	883,04	881,50	852,42
	Total	**2.383,76**	**2.384,81**	**1.904,73**	**2.383,90**	**2.383,82**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, 2021

Tabel 2.12
Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan

No	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	812,44	820,22	203,81	249,83	296,17
2	Sedang	403,32	423,44	749,83	1.187,72	1.112,00
3	Rusak Ringan	222,26	237,52	464,89	454,34	446,45
4	Rusak Berat	945,74	903,63	486,19	492,01	529,20
	Total	**2.383,76**	**2.384,81**	**1.904,73**	**2.383,90**	**2.383,82**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, 2021

Kondisi jembatan yang berlokasi pada jaringan jalan Kabupaten di Kabupaten Sintang berdasarkan data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Jumlah Jembatan	Aspek	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)	Runtuh (%)
371	Kondisi Bangunan Atas	74,12	16,98	7,01	1,08	0,81
	Kondisi Bangunan Bawah	71,16	21,56	5,39	1,35	0,54
	Kondisi Fondasi	75,74	20,22	2,43	1,62	0,00
	Kondisi Lantai	53,37	28,03	11,86	6,20	0,54

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, 2021

Rencana pola ruang wilayah di kabupaten Sintang direncanakan dengan mendistribusikan ruang dalam wilayah Kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Luas kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Sintang berdasarkan SK Kementerian Kehutanan Nomor 936 mencapai 1.326.435,63 Ha

(59,39 %) dari luas Kabupaten Sintang. Luas rencana kawasan lindung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14
Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang

NO	Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung (HL)	472.205,37	65,27
2	Taman Nasional (TN)	67.969,98	9,40
3	Taman Wisata Alam (TWA)	1.304,26	0,19
4	Danau	734,79	0,10
5	Gambut	40.543,27	5,60
6	Sungai dan Sempadan Sungai	74.696,63	10,33
7	Kemiringan	65.924,08	9,11

Sumber : SK Kemenhut No. 733 Tahun 2014 dalam RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036

2.3.4. Infrastruktur Dasar

Perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu sistem yang terdiri dari pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi jumlah rumah tak layak huni. persentase pengguna air bersih. sanitasi dan penduduk berakses air minum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Kondisi Perumahan Permukiman Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
1	Rumah tak layak huni	Unit	9.773	10.322	5.685	3.920
2	Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan	%	9.32	14.65	14.92	29.59
3	Rumah tangga bersanitasi	%	62.57	64.94	65.5	75.31
4	Persentase penduduk berakses air minum	%	25.66	33.63	39.59	45.79
5	Jumlah konsumen yang menggunakan air bersih yang diproduksi oleh PDAM	Konsumen	6768	7428	9889	9975
6	Rumah tangga pengguna listrik	%	74.8	80.66	64.2	68.96
7	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS	Unit	5159	15376	3122	35.707*

Catatan : * Sumber Survei Bappeda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Sintang, PDAM Tirta Senentang, Kabupaten Dalam Angka 2022, 2021

Pada aspek pembangunan infrastruktur terdapat pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum pada dokumen RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036 antara lain berupa :

a. Pemeliharaan dan perluasan jaringan irigasi;
b. Pengembangan waduk-waduk penampungan air baku baru untuk penyediaan irigasi permukaan dan irigasi rawa lebak dan air minum;
c. Pemantapan dan pengembangan daerah irigasi meliputi bendung/embung, daerah irigasi; dan
d. Pemantapan dan pengembangan sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai.

2.3.5. Penanggulangan Bencana

Kondisi alam serta geografis wilayah kabupaten sintang dengan intensitas curah hujan yang tinggi, lereng yang curam di daerah hulu disertai dengan perubahan ekosistem dan tanaman tahunan atau tanaman berakar dalam ke tanaman semusim berakar dangkal mengakibatkan berkurangnya air yang disimpan dalam tanah, memperbesar aliran permukaan serta menyebabkan terjadinya tanah longsor. Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang singkat dan tidak dapat di serap tanah akan di lepas sebagai aliran permukaan yang akhirnya menimbulkan banjir. Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan juga masih menjadi perhatian dalam penanganan aspek kebencanaan. Kebakaran Hutan dan Lahan biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus, sedangkan pada bulan September titik api sudah mulai berkurang karena hujan sudah mulai turun. Kejadian ini berlangsung di setiap tahun dengan sebaran titik api yang beragam.

Tabel 2.16
Bencana Banjir dan Karhutla Kabupaten Sintang Tahun 2020

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	JUMLAH KEJADIAN
1	Bencana Banjir	Kecamatan Sintang	4 kali
2	Bencana Banjir	Kecamatan Binjai Hulu	4 kali
3	Bencana Banjir	Kecamatan Tempunak	4 kali
4	Bencana Banjir	Kecamatan Ketungau Hilir	4 kali
5	Bencana Banjir	Kecamatan Serawai	4 kali
6	Bencana Banjir	Kecamatan Ambalau	4 kali
7	Bencana Banjir	Kecamatan Kayan Hulu	4 kali
8	Bencana Banjir	Kecamatan Kayan Hilir	4 kali
9	Bencana Banjir	Kecamatan Sepauk	4 kali
10	Bencana Banjir	Kecamatan Dedai	4 kali
11	Bencana Banjir	Kecamatan Kelam Permai	4 kali
12	Bencana Karhutla	Tersebar di 14 Kecamatan	..... data hotspot 2020

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, 2022

BAB 3

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan

Dalam dokumen ini konsep, definisi dan pengukuran kemiskinan yang digunakan menggunakan empat konsep yakni: kemiskinan moneter, kemiskinan multidimensi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan mikro dengan data Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3.1.1. Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, kemiskinan kemudian tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan saja, tetapi juga dilihat dari kemampuan lain seperti bersosialisasi dan berpolitik. Di tahap awal pembangunan, suatu negara akan berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terkait dengan ketidakmampuan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun seiring dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita, negara akan mulai memperhatikan permasalahan yang lebih kompleks dan beragam. Dalam hal ini pengukuran kemiskinan sangat diperlukan sebagai suatu instrumen bagi para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pengukuran kemiskinan sejak tahun 1984 menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada tahun tersebut, perhitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin per tahun. Dimulai tahun 2011, tingkat kemiskinan dikeluarkan dua kali setahun pada bulan Maret dan September.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini maka pembatas antara penduduk miskin dan bukan penduduk miskin adalah Garis Kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan sendiri merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi

kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Melalui perhitungan GK ini kemudian dapat diperhitungkan persentase penduduk miskin pada suatu wilayah. BPS menyebutnya dengan Head Count Index (HCI-P0), yang merupakan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Data perhitungan GK dan persentase penduduk miskin ini adalah bersumber data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Selain mengetahui tingkat kemiskinan melalui Persentase Penduduk Miskin (P0), digunakan juga ukuran lain yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Terkait isu ketimpangan akan diuraikan mengenai Gini Rasio, rata-rata pengeluaran dan kurva insiden pertumbuhan (Growth Incidence Curve).

3.1.2. Kemiskinan Multidimensi

Vivi Yulaswati (2018) menyebutkan bahwa gagasan kemiskinan multidimensi lahir dari konsep-konsep seperti kebutuhan dasar, eksklusi sosial, kohesi sosial, dan kemiskinan karena ketiadaan keterampilan. Pendekatan pertama yang berpengaruh terhadap kemiskinan multidimensi adalah pendekatan kebutuhan dasar, sesuai dengan deklarasi yang diadakan di Cocoyoc, Mexico pada tahun 1974. Deklarasi ini mendefinisikan pembangunan sebagai kepuasan pemenuhan atas kebutuhan dasar, yaitu makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan, kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak untuk mengekspresikan, menerima ide, dan stimulus, serta hak untuk bekerja.

Kerangka konseptual berikutnya yang mempengaruhi pengukuran kemiskinan multidimensi adalah pendekatan kapabilitas oleh Amartya Sen (1993). Berbeda dengan pendekatan kemampuan dasar, ide pendekatan kapabilitas adalah evaluasi kemampuan seseorang untuk memenuhi setiap standar minimum kebutuhan dasarnya dan tidak hanya melihat jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Gagasan inilah yang mendorong terciptanya pengukuran kemiskinan multidimensi. Lebih lanjut Vivi Yulaswati (2018) mengemukakan bahwa Alkire dan Foster pada tahun 2007 mengembangkan ukuran kemiskinan baru yang dinamakan Multidimensional Poverty Index (MPI). MPI menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga/individu dan telah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. MPI memiliki tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator, masing-masing dua indikator untuk dimensi kesehatan dan pendidikan, serta enam indikator untuk dimensi standar hidup.

Indikator pada dimensi kesehatan adalah gizi dan kematian anak. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kebutuhan kesehatan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga. Indikator pada dimensi pendidikan adalah tahun lama bersekolah dan partisipasi sekolah untuk semua anak usia sekolah. Indikator ini digunakan untuk menangkap akses rumah tangga terhadap pendidikan, namun belum mencerminkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Indikator pada dimensi standar hidup adalah bahan bakar memasak, sanitasi layak, air minum bersih, listrik, lantai, dan kepemilikan beberapa barang konsumsi (radio, televisi, telepon, sepeda, sepeda motor, mobil, truk, dan kulkas).

Untuk memperkaya dimensi pada kemiskinan multidimensi ini, dalam dokumen ini akan ditambahkan dengan bidang-bidang yang relevan dengan isu kemiskinan di Kabupaten Sintang.

Bidang-bidang tersebut meliputi: infrastruktur dasar dan wilayah, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kerawanan pangan, dan koperasi dan UMKM.

3.1.3. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut dalam dokumen ini mengacu pada kemiskinan yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga." menurut PBB tahun 1995.

Pada tahun 2018, kemiskinan ekstrem mengacu pada pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional USD1,90 per hari (nilai pada tahun 2011) menurut Bank Dunia. Nilai ini setara dengan USD2,12 pada tahun 2022. Untuk tahun 2021 setara dengan Rp. 11.941 per kapita per hari, atau Rp358.233 per kapita per bulan.

Kemiskinan	Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK) Rp.472.525,- atau setara dengan US $ 2,5 PPP per hari (tahun 2020).	**Kemiskinan ekstrem** didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah US $ 1,9 PPP per hari.
Penghitungan pengeluaran konsumsi makanan dalam GK nasional melibatkan 52 komoditi, dan pengeluaran non-makanan mencakup 51 jenis untuk di wilayah perkotaan dan 47 jenis untuk di wilayah perdesaan (BPS, 2016).	Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai **US $ 1,9 PPP = Rp11.941 per kapita per hari**, untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan IHK periode tahun yang bersesuaian.
Gambaran sederhana terkait konsep PPP adalah apabila harga satu buah pisang di Amerika Serikat adalah US$ 1, sedangkan harga pisang yang sejenis di Indonesia adalah Rp.500,- maka PPP adalah US$ 0,02/Rupiah.	

Sumber : TNP2K, 2022

Gambar 3.1 Konsep Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan isu yang sangat krusial bahkan sesuai arahan Presiden bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 diharapkan mencapai 0%. Oleh karena itu, dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan diperlukan 3 (tiga) pilar utama yaitu : komitmen pemerintah, konvergensi program, anggaran dan sasaran, serta pemantauan dan evaluasi.

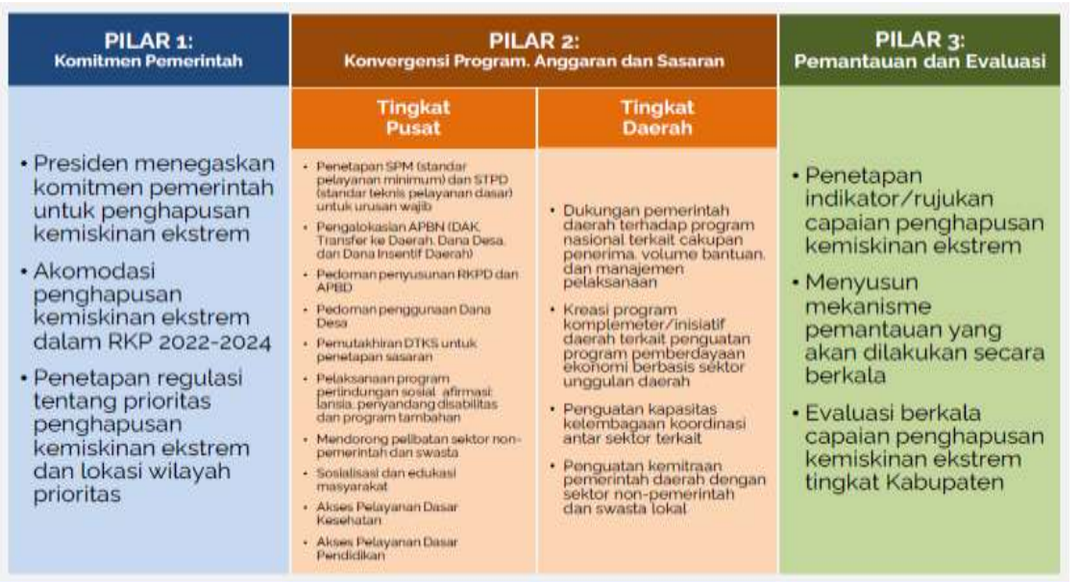

Sumber : TNP2K, 2022

Gambar 3.2 Tiga Pilar Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

3.1.4. Kemiskinan Mikro

Kemiskinan mikro dalam dokumen ini adalah merupakan kemiskinan yang diukur berdasarkan ciri-ciri dari variabel yang digunakan dalam pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT). Data ini berisi 16 variabel sosial, ekonomi dan demografi di tingkat provinsi seperti Status Kesejahteraan rumah tangga dan individu, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Informasi Pokok Rumah Tangga yang mencakup bagian terendah dari 40% populasi rakyat Indonesia berdasarkan status kesejahteraan.

Dalam penanggulangan kemiskinan, DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari DTKS.

3.2 Kondisi Kemiskinan

3.2.1. Kemiskinan Moneter

a. Tingkat Kemiskinan (P0), Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang, dalam 10 tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dibandingkan dengan kondisi tingkat kemiskinan provinsi maupun nasional. Berdasarkan Gambar ... Tingkat kemiskinan

tertinggi di Kabupaten Sintang terjadi pada tahun 2018, mencapai 10,35%, jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan provinsi (7,77%) dan nasional (9,82%).

Dalam periode tahun 2012-2021, terjadi 5 kali kenaikan angka kemiskinan dan 4 kali penurunan. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi dalam rentang tahun 2014-2018. Dalam 4 tahun, angka kemiskinan Kabupaten Sintang naik 1,24 poin, dari 9,11% naik hingga 10,35% pada tahun 2018. Selanjutnya kondisi menunjukkan perbaikan hingga tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan angka kemiskinan hingga 1,08 poin, menjadi 9,27% di tahun 2020. Namun, adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak peningkatan jumlah penduduk miskin yang berakibat ada peningkatan angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 9,28%. Perubahan angka kemiksinan di Kabupaten Sintang yang sangat fluktuatif disinyalir sebagai dampak tingkat inflasi yang sangat sensitif.

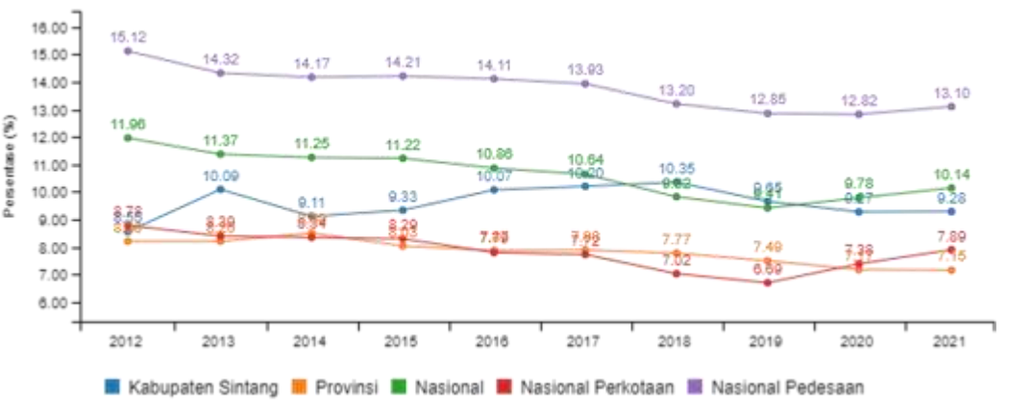

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.3 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sintang

Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga upaya mengatasi kedalaman kemiskinan.

Pada tahun 2018, tingkat kedalaman kemiskinan tercatat merupakan yang tertinggi yaitu 2,16. Selanjutnya turun hingga tahun 2020 sebesar 1,13 poin, hingga menjadi 1,03. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan indeks menjadi 1,46 atau naik 0,43 poin. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin cukup tinggi terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Sintang.

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.4 Perkembangan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang

Melihat lebih dalam terhadap tingkat kemiskinan, digunakan juga ukuran tingkat keparahan kemiskinan (P2). Tingkat keparahan kemiskinan menggambarkan rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.5 Perkembangan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang

Berdasarkan Gambar 3.5, tren keparahan kemiskinan di Kabupaten Sintang memiliki pola yang seragam dengan tingkat kedalaman kemiskinan. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa sebaran kesenjangan pengeluaran antar penduduk di Kabupaten Sintang relatif sama dengan sebaran kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri. Tingkat keparahan tertinggi terjadi pada tahun 2018, selanjutnya mengalami penurunan hingga 0,39 poin di tahun 2020 dan naik kembali menjadi 0,34 pada tahun 2021. Kenaikan rata-rata kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin diindikasikan sebagai dampak dari adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19.

b. Kurva Insiden Pertumbuhan

Kurva Insiden Pertumbuhan atau Growth Incidence Curve (GIC) mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan masing-masing kelompok kesejahteraan (kuintil, desil, persentil, dan sebagainya) dalam dua titik waktu atau tahun. SEPAKAT

menggunakan desil sebagai kelompok kesejahteraan rumah tangga. Melalui kurva insiden pertumbuhan, ketimpangan pertumbuhan antar kelompok kesejahteraan dapat dibandingkan, sehingga dapat dianalisis apakah rumah tangga kaya semakin jauh meninggalkan rumah tangga miskin.

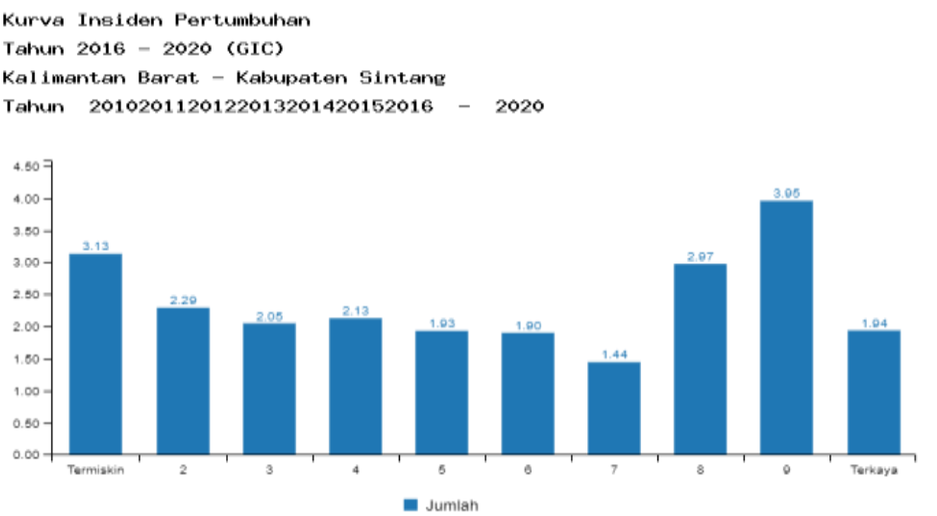

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.6 Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Sintang

Melalui kurva insiden pertumbuhan, ketimpangan pertumbuhan antar kelompok kesejahteraan dapat dibandingkan. Berdasarkan Grafik .... dapat diketahui bahwa secara rata-rata, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sintang dari tahun 2016 ke tahun 2020 tumbuh sebesar 2.3718 %. Pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk berpendapatan rendah lebih cepat dibandingkan penduduk berpendapatan tinggi, di mana penduduk 10% termiskin (desil 1) tumbuh sebesar 3,13%, sementara penduduk 10% terkaya [desil 10] tumbuh sebesar 1,94%.

c. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran per kapita jauh di bawah rumah tangga terkaya.

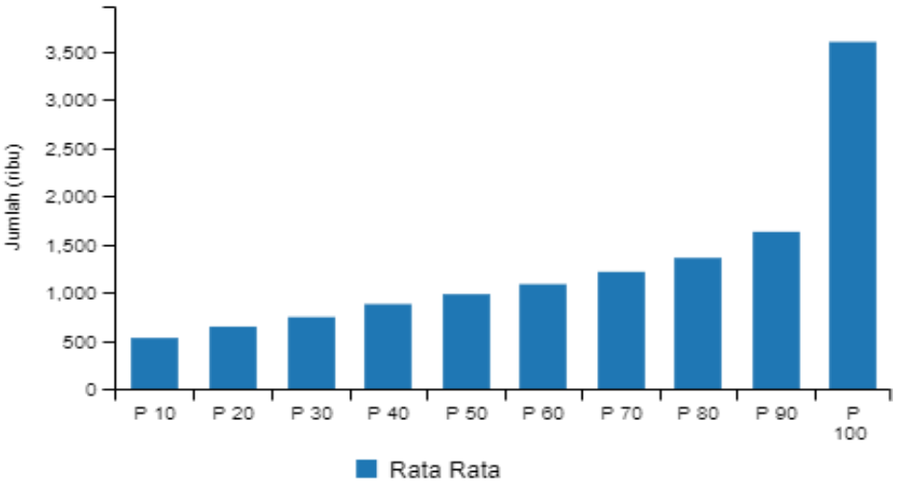

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.7 Pengeluaran Per Kapita Menurut Persentil

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar antara rumah tangga di percentil 1 dengan di kuintil di atasnya. Rumah tangga di percentil 1 pengeluaran rata-ratanya hanya sekitar 500 ribu rupiah sedangkan persentil 10 lebih dari 3,6 juta rupiah hal ini berarti bahwa terdapat selisih yang signifikan. Selain itu rata-rata pengeluaran sekitar 500 ribu per bulan menunjukkan angka di bawah garis kemiskinan Kabupaten Sintang sebesar 596 ribu rupiah.

3.2.2. Kemiskinan Multidimensi

a. Aspek Pendidikan

Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan, yaitu lama sekolah (years of schooling) dan kehadiran di sekolah (attendance of school). Dua indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat mengakses pendidikan dasar, tetapi tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang diperoleh.

Dimensi Pendidikan dijadikan sebagai tolok ukur dalam kemiskinan multidimensi dikarenakan pendidikan memiliki erat kapabilitas manusia dalam proses mencapai kesejahteraan. Aspek pendidikan dalam konteks kapabilitas memberikan kesempatan bagi berkembangnya manusia. Lebih lanjut implikasi pendidikan dalam kapabilitas kemampuan individu dalam menjalani suatu kehidupan untuk memiliki suatu nilai/fungsi dan meningkatkan subtantif pilihan atas nilai/fungsi yang dimiliki. Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi pendidikan fokus pada proses individu dalam memperoleh pendidikan dan nilai yang didapatkan dari pendidikan itu sendiri (Unterhalter, 2009, hlm. 208-107).

1) Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.

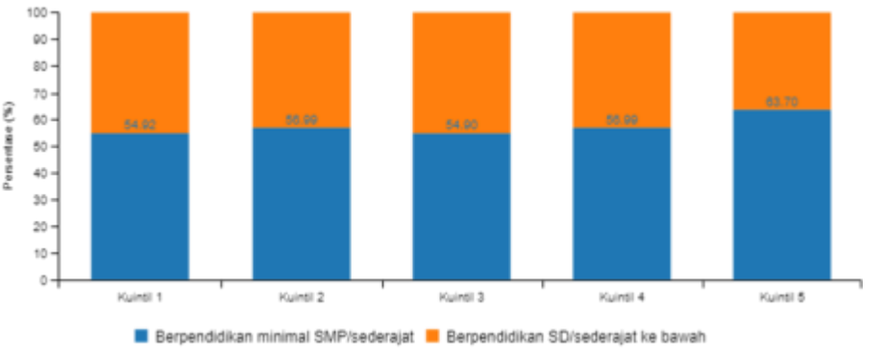

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.8 Capaian Pembelajaran Tahun 2022 Menurut Kuantil

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan tingkat capaian pendidikan antara kelompok termiskin dan kelompok terkaya. Pada kelompok Kuintil 1 dan 2 kurang dari 50% penduduknya yang tamat SMP, sedangkan pada kuintil 4 dan 5 lebih dari 50 persen bahkan di kuintil 5 sudah sampai pada 66 persen.

2) Tingkat Keberlanjutan Sekolah

Data lain yang dapat menunjukkan kondisi pendidikan adalah tingkat keberlanjutan sekolah sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

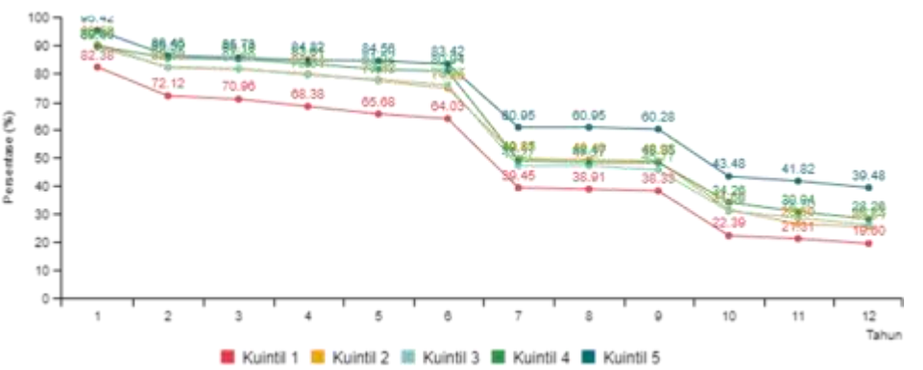

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.9 Tingkat Keberlanjutan Sekolah Menurut Usia Sekolah

3) APM/APK

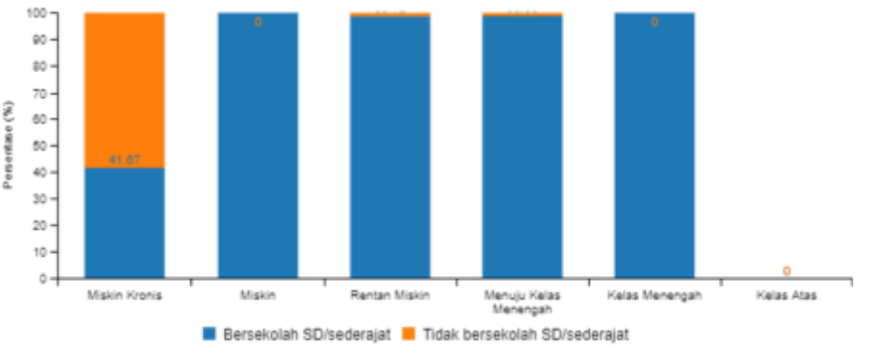

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.10 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sintang Tahun 2022

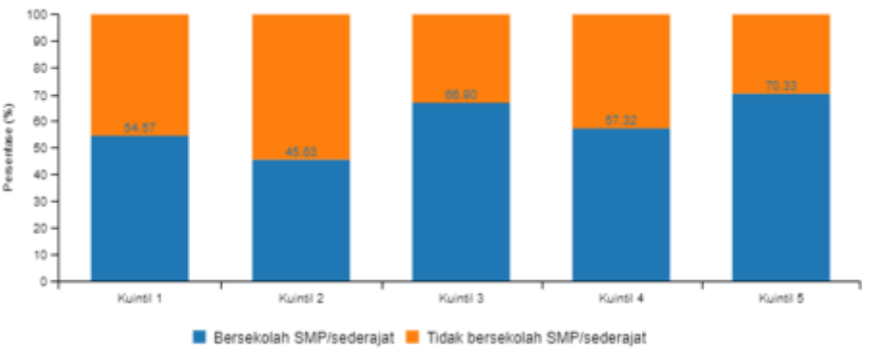

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.11 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni SMP di Sintang tertinggi berada di kuintil 3, yaitu 74,25% dan terendah berada pada kuintil 2 yaitu 52,79 %.

4) Angka Melek Huruf

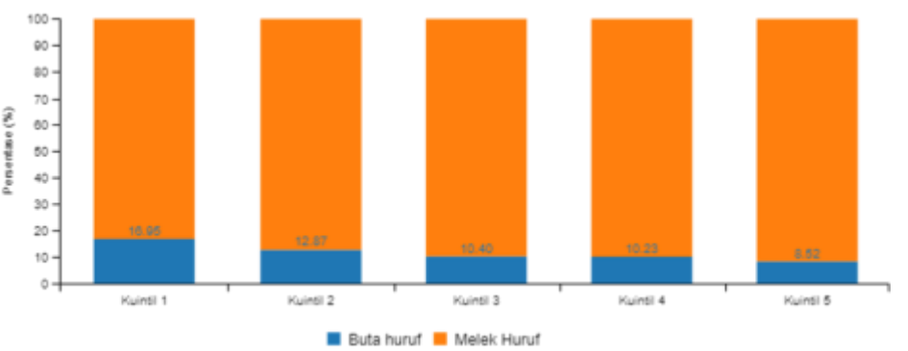

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.12 Angka Melek Huruf Kabupaten Sintang Tahun 2022

b. Aspek Kesehatan

1) Kesehatan Ibu dan Anak

Upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu program prioritas. Hal ini dikarenakan, masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi salah satu permasalahan utama di bidang kesehatan. Upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak, ditargetkan untuk menurunkan angka kematian dan kejadian sakit pada ibu dan anak. Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan pelayanan rujukan. Indikator yang digunakan untuk menilai program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) antara lain kunjungan ibu hamil pertama (K1), cakupan kunjungan keempat ibu hamil (K4), cakupan buku KIA, deteksi dini kehamilan berisiko oleh tenaga kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan, penanganan komplikasi obstentrik, pelayanan nifas, pelayanan neonatal, penanganan komplikasi neonatal, pelayanan kesehatan anak balita, pelayanan kesehatan anak balita sakit; dengan indikator kunci sebagai tolok ukur keberhasilan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Adapun secara khusus program KIA ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan ibu (pengetahuan, sikap dan perilaku), dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dalam menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, paguyuban keluarga, posyandu dan sebagainya.
2. Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga, paguyuban keluarga, posyandu, dan karang balita serta di sekolah taman kanak-kanak (TK).
3. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui.
4. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita.
5. Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya.

Berikut hasil Pemantauan jumlah kasus kematian pada Ibu, Neonatus, Bayi dan Balita Kabupaten Sintang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

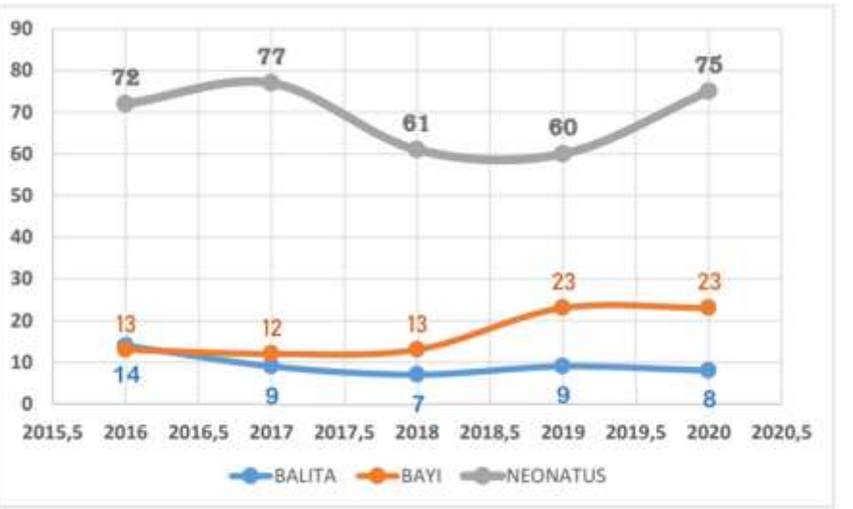

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Gambar 3.13 Jumlah Kasus Kematian Bayi

Dari grafik diatas memberikan gambaran bahwa jumlah kasus kematian terbanyak setiap tahunnya terjadi pada kelompok Neonatus disusul kelompok Balita dan Bayi. Dilihat dari total kematian pertahunnya ada trend peningkatan jumlah kasus kematian.

2) Status Gizi Masyarakat

Menurut (Supariasa, Bakri, dan Fajar, 2016) status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diit (Beck, 2000).

Indeks antropometri yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U) atau (PB/U) dan berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) atau (BB/PB).

1) Indeks berat badan menurut umur (BB/U)

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran masa tubuh, masa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak.

Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Indikator BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini, digunakan untuk menentukan kategori (anak usia 0 sampai 60 bulan):

a) Berat badan sangat kurang (severely underweight)
b) Berat badan kurang (underweight)
c) Berat badan normal
d) Berat badan lebih
e) Indeks tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U) atau (PB/U)

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan tubuh skeletal. Indikator TB/U menggambarkan status gizi masa lalu. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatip kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama, digunakan untuk menentukan kategori (anak usia 0 sampai 60 bulan):

a) Sangat pendek (severely stunted)
b) Pendek (stunted)
c) Normal
d) Tinggi
e) Indeks berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) atau (BB/PB).

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat kini (sekarang). Indeks BB/TB adalah merupakan indeks yang independen terhadap umur. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu, digunakan untuk menentukan kategori (anak usia 0 sampai 60 bulan):

a) Gizi buruk (severely wasted)
b) Gizi kurang (wasted)
c) Gizi baik (normal)
d) Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)
e) Gizi lebih (overweight)
f) Obesitas (obese)

Arah pembangunan gizi sesuai Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 141, dimana upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat yang dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan, sesuai dengan 13 Pesan Umum Gizi Seimbang (PUGS) dan perbaikan perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun, berbagai penyakit gangguan gizi dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu makanan maupun jumlah makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang masih sering ditemukan diberbagai tempat di Indonesia. Rendahnya status gizi jelas berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

Masalah gizi sebenarnya bukan masalah yang hanya disebakan oleh kemiskinan saja. Juga karena aspek sosial-budaya (kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan) yang ada di masyarakat kita, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang tercapainya gizi yang memadai untuk balita. Status gizi masyarakat merupakan salah satu indikator kemajuan program pembangunan kesehatan. Gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan dan kesehatan manusia.

Status gizi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yaitu penyakit infeksi, jenis pangan yang yang dikonsumsi baik secara kualitas maupun kuantitas. Faktor tidak langsung antara lain: sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pola asuh yang kurang memadai, sanitasi lingkungan yang kurang baik, rendahnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan.

Berikut hasil Pemantauan Status Gizi Masyarakat Kabupaten Sintang 2016 s/d 2021.

Gambar 3.14 Hasil Pemantauan Status Gizi Masyarakat

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa hingga tahun 2021 terdapat 28,59% dengan kategori Prevalensi Stunting; 12,82 dengan kategori Gizi buruk dan Gizi Kurang; 22,88 dengan kategori Berat Badan Sangat Kurang dan Kurang. Dari hasil pemantau status gizi dalam 3 (tiga) tahun terakhir ada kecenderungan penurunan, namun yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu rata-rata pengukuran pada kelompok sasaran, baru mencapai 35,79%. Dimungkinkan masih masih ada permasalahan gizi masyarakat yang belum terdeteksi.

Dari 3 (tiga) Indeks antropometri diatas, Indeks tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U) atau (PB/U) dengan kategori permasalahan gizi yaitu stunting menjadi permasalahan gizi utama sebagai pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan dalam waktu yang relatif lama, terutama pada masa 1000 (seribu) hari kehidupan pertama yang dimulai sejak dalam kandungan.

Stunting adalah suatu gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umur, tubuh pendek pada anak yang berada pada standar normal. Stunting pada balita berdampak jangka panjang, seperti penurunan IQ, balita dengan status IQ yang menurun dalam jangka panjang akan berdampak terhadap potensi maupun kemampuan anak dalam menyelesaikan pendidikan di masa remajanya, sehingga akan berdampak terhadap kemampuannya dalam memperoleh lapangan kerja atau mencipta lapangan kerja. Tentunya kondisi ini akan berdampak terhadap income/ penghasilan/ kemiskinan. Masalah stunting banyak dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, tidak terlepas dengan

masalah rendahnya ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan berpengaruh besar terhadap tingginya angka kejadian stunting, status gizi ibu saat hamil dengan ketersedian pangan tentunya tidak dapat terlepas, pola konsumsi makanan bergizi dibutuhkan saat ibu hamil.

Upaya perbaikan gizi masyarakat secara komprehensif sangat dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan gizi yang ada.

3) Penyakit Diare

Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar (BAB) lebih sering dari biasanya. Disamping itu, feses pengidap diare lebih encer dari biasanya. Hal Ini perlu diwaspadai, meski diare bisa berlangsung singkat, tapi bisa pula berlangsung selama beberapa hari, bahkan dalam beberapa kasus bisa terjadi hingga berminggu-minggu.

4) Penyakit HIV/AIDs (Kerentanan)

HIV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut, dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sintang, trend penderita AIDS di Kabupaten Sintang cenderung meningkat, bahkan sudah tersebar pada 14 kecamatan di Kabupaten Sintang.

5) Penggunaan Alat Kontrasepsi

CAPAIAN PESERTA KB BARU TERHADAP TARGET
DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

No	Kecamatan *Subdistrict*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Persentase Terhadap Target *Target Percentage*
1	2	3	4	5
1	Serawai	998	355	36%
2	Ambalau	493	22	4%
3	Kayan Hulu	564	177	31%
4	Sepauk	2031	294	14%
5	Tempunak	2083	458	22%
6	Sungai Tebelian	896	349	39%
7	Sintang	2130	1183	56%
8	Dedai	780	201	26%
9	Kayan Hilir	2042	232	11%
10	Kelam Permai	560	124	22%
11	Binjai Hulu	508	123	24%
12	Ketungau Hilir	482	65	13%
13	Ketungau Tengah	1150	525	46%
14	Ketungau Hulu	1060	437	41%
	Jumlah	15777	4545	29%

Catatan/Note : *Data Januari s/d Desember 2021*
Sumber/Source : *Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang*

Gambar 3.15 Capaian Peserta KB Baru

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pemakaian kontrasepsi tertinggi berada di kecamatan Sintang, yaitu 56,% dan terendah berada pada kecamatan Ambalau yaitu 4 %.

CAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KONTRASEPSI
DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

No	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi / Contraceptical Methods							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Serawai	0	0	0	0	0	210	145	355
2	Ambalau	0	0	0	0	10	8	4	22
3	Kayan Hulu	1	0	0	0	21	116	39	177
4	Sepauk	0	1	0	1	45	159	88	294
5	Tempunak	2	0	0	0	182	222	52	458
6	Sungai Tebelian	1	5	0	1	17	287	38	349
7	Sintang	121	189	0	21	47	746	59	1183
8	Dedai	4	3	0	4	1	152	37	201
9	Kayan Hilir	0	0	0	0	12	154	66	232
10	Kelam Permai	11	0	0	0	11	60	42	124
11	Binjai Hulu	31	0	0	12	50	21	9	123
12	Ketungau Hilir	0	1	0	1	6	36	21	65
13	Ketungau Tengah	5	0	0	1	124	202	193	525
14	Ketungau Hulu	0	0	0	1	0	436	0	437
	Jumlah	176	199	0	42	526	2809	793	4545

Catatan/Note : *Data Januari s/d Desember 2021*
Sumber/Source : *Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang*

Gambar 3.16 Capaian Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Peserta KB Baru menurut jenis kontrasepsi tingkat pemakaian tertinggi berada di kecamatan Sintang , yaitu 1183 dan terendah berada pada kecamatan Ambalau yaitu 22.

PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI
DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

No	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Serawai	6	20	0	4	430	2110	1750	4320
2	Ambalau	48	20	0	95	305	195	1360	2023
3	Kayan Hulu	10	7	70	55	168	1136	1620	3066
4	Sepauk	161	51	8	21	937	4385	2588	8151
5	Tempunak	85	30	1	61	377	2542	1218	4314
6	Sungai Tebelian	371	51	31	92	361	2125	1533	4564
7	Sintang	1587	709	26	258	401	4173	2364	9518
8	Dedai	127	7	10	5	310	2597	1483	4539
9	Kayan Hilir	12	7	2	60	349	2265	1495	4190
10	Kelam Permai	79	48	16	22	59	1304	1279	2807
11	Binjai Hulu	280	20	8	145	352	544	500	1849
12	Ketungau Hilir	12	15	4	16	40	1867	1527	3481
13	Ketungau Tengah	140	20	8	52	247	2498	2873	5838
14	Ketungau Hulu	30	6	5	4	197	730	1460	2432
	Jumlah	2948	1011	189	890	4533	28471	23050	61092
	Catatan/Note	*: Data Desember 2021*							
	Sumber/Source	*: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang*							

Gambar 3.17 Peserta KB Aktif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Peserta KB Aktif menurut jenis kontrasepsi tertinggi berada di kecamatan Sintang, yaitu 9518 dan terendah berada pada di kecamatan Binjai Hulu yaitu 1849.

PERBANDINGAN PESERTA KB AKTIF TERHADAP PASANGAN USIA SUBUR
DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	KB Aktif	Persentase
1	2	3	4	5
1	Serawai	4735	4320	91%
2	Ambalau	3128	2023	65%
3	Kayan Hulu	3921	3066	78%
4	Sepauk	10351	8151	79%
5	Tempunak	5840	4314	74%
6	Sungai Tebelian	6440	4564	71%
7	Sintang	10216	9518	93%
8	Dedai	6219	4539	73%
9	Kayan Hilir	5399	4190	78%
10	Kelam Permai	3488	2807	80%
11	Binjai Hulu	2936	1849	63%
12	Ketungau Hilir	4319	3481	81%
13	Ketungau Tengah	8636	5838	68%
14	Ketungau Hulu	3628	2432	67%
	Jumlah	79256	61092	77%
	Catatan/Note	*: Data Desember 2021*		
	Sumber/Source	*: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang*		

Gambar 3.18 Perbandingan Peserta KB Aktif Terhadap PUS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Perbandingan Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur tingkat pemakaian tertinggi berada di kecamatan Sintang , yaitu 93 % dan terendah berada pada kecamatan Binjai Hulu yaitu 63 %.

c. Aspek Infrastruktur Dasar

Kondisi kemiskinan multidimensi terkait infrastruktur dasar dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain sanitasi layak, air minum aman, rumah layak huni dan cakupan listrik.

a) Cakupan Sanitasi Layak

Sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan (terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara) yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Berikut merupakan tabel persebaran sarana sanitasi yang ada di Kabupaten Sintang.

Tabel 3.1
Sebaran Sarana Sanitasi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Sarana Sanitasi				
				MCK	JSP	JSSP	Sharing	OD
1	Sintang	29.851	7.463	116	-	12.675	28	1.286
2	Tempunak	17.080	4.270	123	-	3.786	146	2.808
3	Sepauk	29.610	7.403	167	-	7.230	165	3.846
4	Ketungau Hilir	65.921	16.480	68	-	1.834	28	2.732
5	Ketungau Tengah	37.218	9.305	45	-	2.562	54	3.104

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Sarana Sanitasi				
				MCK	JSP	JSSP	Sharing	OD
6	Ketungau Hulu	40.089	10.022	78	130	1.636	166	3.932
7	Dedai	96.840	24.210	89	-	3.476	86	3.300
8	Kayan Hilir	37.757	9.439	98	-	3.788	57	2.221
9	Kayan Hulu	33.103	8.276	167	-	2.564	12	2.845
10	Serawai	20.763	5.191	97	-	2.875	22	2.631
11	Ambalau	3.069	13.454	87	-	1.245	11	1.726
12	Kelam Permai	3.811	16.269	89	-	1.756	154	1.812
13	Sungai Tebelian	7.573	31.343	145	-	4.678	154	2.596
14	Binjai Hulu	2.980	12.576	112	-	1.996	216	656
Total		89.360	403.810	1.481	130	52.101	1.299	35.495

Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

Berdasarkan tabel di atas sarana sanitasi di Kabupaten Sintang terbagi menjadi lima jenis yaitu MCK, JSP, JSSP, Sharing, dan OD. Sebanyak 52.101 rumah di Kabupaten Sintang menggunakan sanitasi berupa JSSP yaitu Jamban Semi Sehat Permanen. Pelayanan Sanitasi yang layak erat kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan. Pembangunan yang berkesinambungan merupakan syarat mutlak dalam perbaikan sarana pelayanan sanitasi. Sanitasi yang baik akan menghasilkan kualitas rumah tangga yang baik sehingga akan terhindar dari segala macam penyakit. Di Kabupaten Sintang, penduduk yang sudah mengakses sanitasi layak sudah cukup baik sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

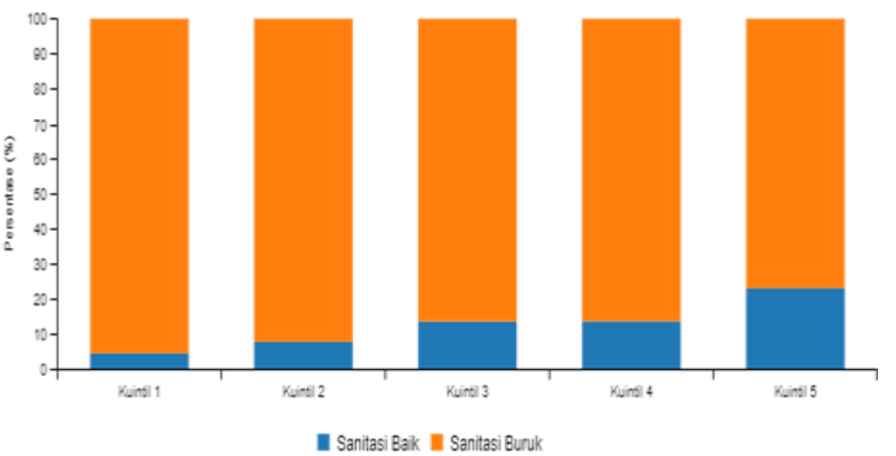

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.17 Persentase Penduduk Miskin Bersanitasi Menurut Kuintil

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.18 Persentase Akses Sanitasi Tahun 2017-2021

Profil sanitasi layak Kabupaten Sintang sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 66,60%, termasuk pula pada Kondisi BABS (Buang Air Besar Sembarangan) yang tiap tahun menunjukan adanya penurunan sekitar 1 Persen. Namun, masih terdapat 35.495 rumah yang masih melakukan praktik Buang Air Besar Secara Sembarangan. Kondisi tersebut menunjukan masih terdapat Masyarakat Kabupaten Sintang yang belum terlayani kondisi sanitasi layak yang berdampak pada pola hidup baik dan sehat.

b) Cakupan Air Minum Aman

Cakupan Air minum aman menjadi salah satu indikator penilai bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Berikut Data Capaian air minum aman di Kabupaten Sintang.

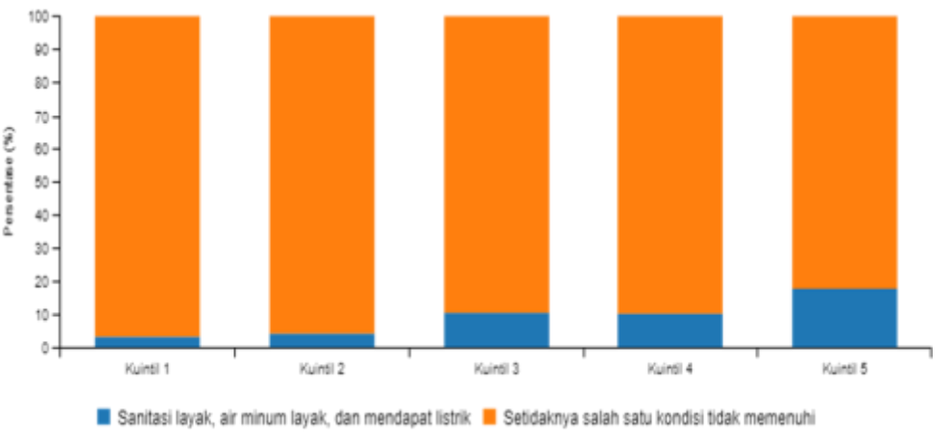

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.19 Persentase Cakupan Air Minum Aman

Berdasarkan gambar tersebut di atas terjadi peningkatan terhadap kesediaan Cakupan Air layak dalam setiap kuintil, namun air minum layak belum dapat dipastikan Aman untuk dikonsumsi.

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.20 Persentase Jaringan Perpipaan Tahun 2017-2021

Berdasarkan Grafik tersebut diatas, Air Minum layak di Kabupaten Sintang didapatkan dari sumber air bersih perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Pada Tahun 2021 Masyarakat Kabupaten Sintang masih banyak mendapatkan Sumber Air bersih melalui bukan jaringan perpipaan, kondisi ini lebih disebabkan karena kesediaan Sistem Penyediaan Air Minum belum mampu menjangkau pada daerah pedesaan terlebih daerah yang jauh dari jaringan distribusi PDAM.

c) Rumah Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada wilayah Kabupaten Sintang masih banyak ditemui rumah yang sangat sederhana sekali bahkan terkesan sangat tidak layak huni di beberapa kecamatan. berikut data rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. Untuk lebih jelasnya jumlah RTLH di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Grafik berikut berikut:

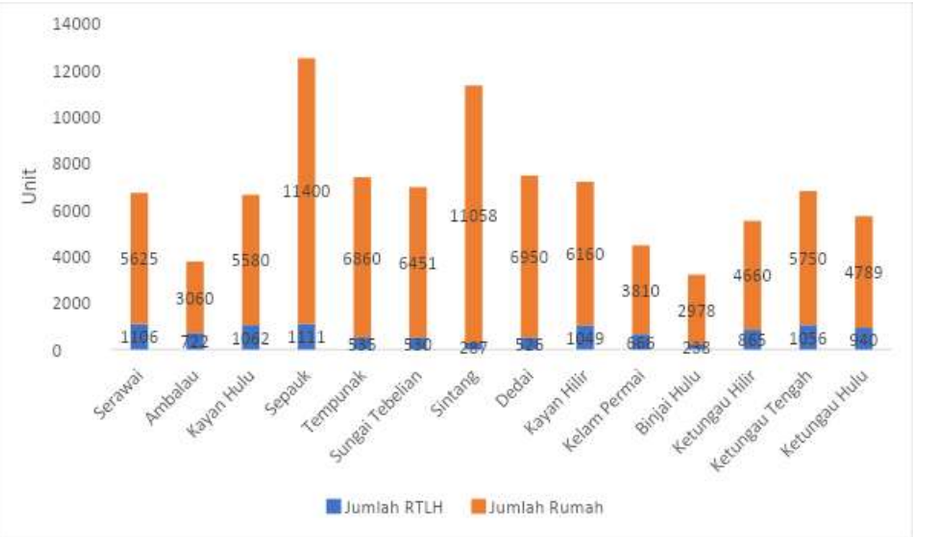

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.21 Sebaran RTLH Menurut Kecamatan

Berdasarkan Grafik di atas, diketahui jika jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 10.693 (13%). Kecamatan dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak berada di Kecamatan Serawai, kecamatan Kayan Hulu, Sepauk, Kayan Hilir, dan Ketungau Tengah. Keempat kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas Hulu dengan kelerengan yang tinggi dan berbukit sehingga mayoritas penduduk yang cenderung miskin cenderung lebih banyak yang mendirikan rumah dengan bahan bangunan yang seadanya.

d) Listrik

Energi listrik memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena telah menjadi kebutuhan bagi semua pihak. Energi listrik tidak hanya dibutuhkan sebagai sumber penerangan, tetapi juga penunjang dalam berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Adapun persebaran aliran listrik di Kabupaten Sintang saat ini masih tergolong belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya desa-desa yang belum dialiri listrik dari PLN, sehingga masyarakat harus mengusahakan sendiri listriknya.

Jumlah Rumah Tangga (RT) Pengguna Listrik PLN di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
RT dengan Daya 450 Watt	10.755	10.341	10.016	9.890	11.069
RT dengan Daya 900 Watt	35.601	37.496	40.135	43.778	48.062
RT dengan Daya > 900 Watt	9.157	12.359	14.727	16.721	18.417
Total Jumlah RT Yang menggunakan Listrik	55.513	60.196	64.878	70.389	77.548
Jumlah RT	98.960	100.335	101.158	92.559	97.375
% RT Pengguna Listrik PLN	56,10	60,00	64,14	76,05	79,64

Sumber: PLN Sintang, Tahun 2021

Gambar 3.22 Perkembangan Jumlah RT Pelanggan Listrik PLN

Di Kabupaten Sintang terdapat 407 Desa dan Kelurahan, jumlah penduduk 420 ribu jiwa berdasarkan data Desember 2021. Jumlah Kepala Keluarga yang sudah menikmati listrik PLN ada 74.626 KK atau 64,21 persen saat ini, sementara yang belum menikmati listrik PLN ada 41.681 KK atau 45,81 persen.

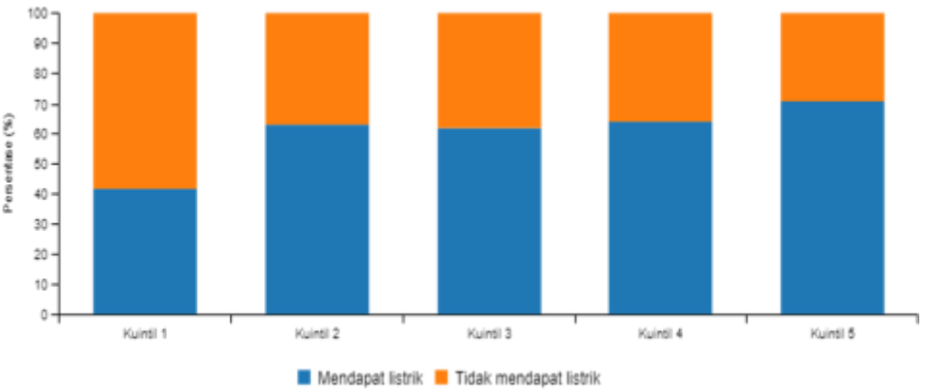

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.23 Persentase Rumah Tangga Miskin Berakses Listrik

Dari data grafik diatas berdasarkan Infrastruktur (SDG) Elektrifikasi yang sudah mendapat Listrik dan Tidak Mendapat Listrik dilihat pada berdasarkan Kuintil 1 terdapat 41,73 % kemudian posisi di kuintil 5 terdapat peningkatan sebesar 70,73 % sedangkan data Elektrifikasi yang Tidak Mendapat Listrik posisi pada Kuintil 1 sebesar 58,27 % kemudian posisi di kuintil 5 terdapat 29,27 %.

e) Transportasi Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kondisi jalan menentukan

bagaimana pergerakan itu akan berjalan dengan lancar atau pun tidak. Kondisi jalan yang bagus akan memudahkan dalam melakukan pergerakan di suatu wilaya untuk melakukan aktivitas. Berikut merupakan tabel kondisi jalan di Kabupaten Sintang.

Tabel 3.2
Perkembangan Kondisi Jalan

Kecamatan	Panjang Ruas (Km)	Jenis Penggunaan (Km)				Kondisi Jalan (Km)			
		ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAIN - LAIN	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Serawai	56.50	-	-	56.50	-	8.33	19.00	10.73	18.44
Ambalau	62.90	-	-	62.90	-	10.06	21.00	11.46	20.38
Kayan Hulu	148.00	-	-	148.00	-	15.65	53.21	29.48	49.66
Sepauk	239.30	25.10	-	214.20	-	23.23	86.95	49.90	79.21
Tempunak	54.70	3.00	-	51.50	0.20	4.87	20.05	10.35	19.44
Sungai Tebelian	101.30	40.80	16.00	44.50	-	9.95	37.71	19.68	33.96
Sintang	113.68	56.75	-	55.31	1.62	40.30	47.06	16.14	6.82
Dedai	199.90	48.00	23.20	128.70	-	31.98	66.73	36.42	64.77
Kayan Hilir	121.00	-	-	121.00	-	19.36	40.39	22.05	39.20
Kelam Permai	166.80	50.80	8.00	108.00	-	28.98	55.57	29.52	52.74
Binjai Hulu	78.54	-	-	78.54	-	12.57	26.22	14.31	25.45
Ketungau Hilir	141.65	10.00	-	131.65	-	22.66	47.28	25.81	45.89
Ketungau Tengah	112.28	6.00	-	106.28	-	17.96	37.48	29.46	36.38
Ketungau Hulu	111.47	-	-	111.47	-	20.70	37.04	20.41	33.53
TOTAL	1.708.02	240.45	47.20	1.418.52	1.82	266.59	595.68	316.72	535.87

Sumber Data: Kabupaten Sintang dalam Angka, 2019

Menunjukkan jenis perkerasan serta kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sintang. Panjang ruas jalan di Kabupaten Sintang yakni sepanjang 1.708,02 Km dengan perkerasan terbanyak adalah tanah dengan panjang jalan 1.418,58 Km. Sedangkan kondisi jalan di Kabupaten Sintang paling banyak berada dalam kondisi sedang dengan panjang jalan sepanjang 595,68 km.

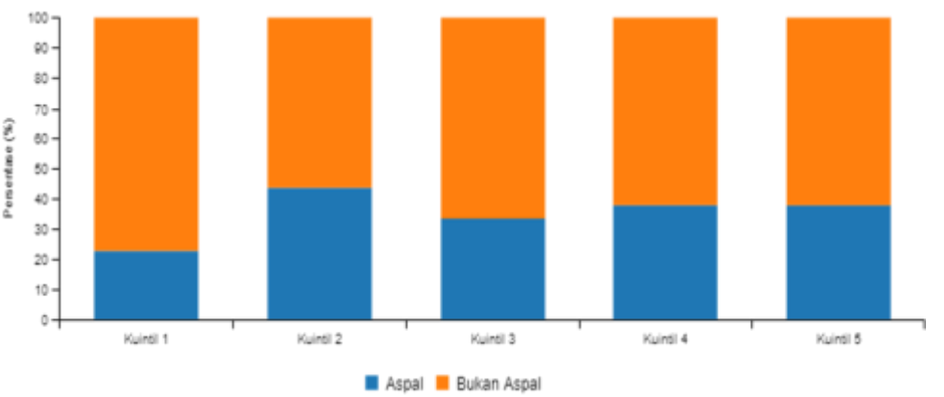

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.24 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kondisi Jalan

d. Aspek Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek multidimensi yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena aspek ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Penduduk Kabupaten Sintang pada dasarnya masih dominan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan Perikanan khususnya dalam 5 (tahun) terakhir sebagaimana tergambar di dalam Gambar dibawah ini dengan persentase mencapai 70,87% pada tahun 2017 dan berangsur-angsur menurun menjadi 62,66% pada tahun 2021. Selanjutnya disusul dengan sektor perdagangan, restoran dan perhotelan, serta sektor jasa masyarakat, sosial dan personal. Sedangkan persentase terkecil adalah pada sektor listrik, gas dan air.

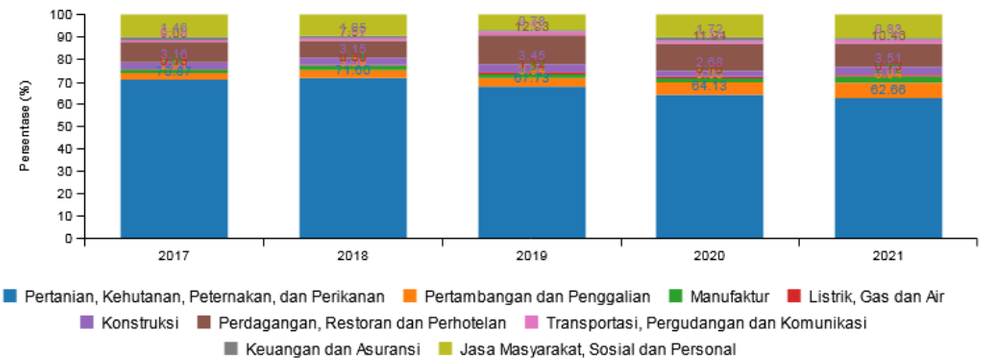

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.25 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Nama	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal	9.98	9.63	6.89	10.10	10.45
Keuangan dan Asuransi	1.46	1.05	0.78	1.72	0.83
Konstruksi	3.16	3.15	3.45	2.68	3.51
Listrik, Gas dan Air	0.13	0.30	1.12	0.78	0.73
Manufaktur	1.68	2.04	1.54	1.73	2.72
Perdagangan, Restoran dan Perhotelan	9.08	7.57	12.93	11.94	10.46
Pertambangan dan Penggalian	2.91	3.59	3.94	5.58	6.94
Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan	70.87	71.60	67.73	64.13	62.66
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	0.74	1.08	1.62	1.34	1.70
total	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.26 Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha

Jika melihat kondisi pada tahun 2021 dengan persentase 62,66%, maka jumlah penduduk yang dominan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan

perikanan adalah sebanyak 143.967 jiwa, disusul dengan sektor perdagangan, restoran dan perhotelan sebanyak 24.025 (10,46%), serta sektor jasa masyarakat, sosial dan personal 24.018 (0,45%). Sedangkan persentase terkecil adalah pada sektor listrik, gas dan air dengan jumlah sebanyak 1.681 jiwa (0,73%).

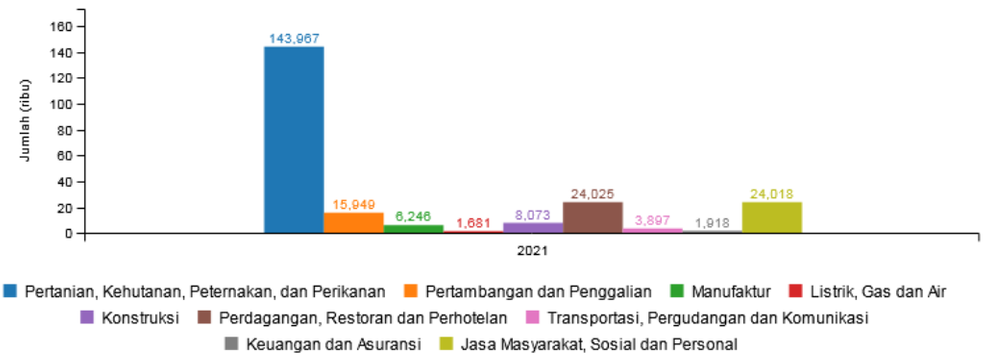

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.27 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha

Sektor	2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan	143,967
Pertambangan dan Penggalian	15,949
Manufaktur	6,246
Listrik, Gas dan Air	1,681
Konstruksi	8,073
Perdagangan, Restoran dan Perhotelan	24,025
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3,897
Keuangan dan Asuransi	1,918
Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal	24,018
total	**229,774**

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.28 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor Usaha

Namun dilihat dari tingkat pendidikan dimana penduduk yang bekerja rata-rata didominasi oleh tamatan SD dan tidak/belum sekolah atau tamat SD walaupun dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun dan cenderung stabil. Pada tahun 2017 penduduk bekerja yang tamat SD sebesar 34,50% selanjutnya menurun menjadi 29,58% pada tahun 2021. Sedangkan persentase yang tidak/belum sekolah atau tamat SD pada tahun 2017 mencapai 26,01% dan terus meningkat menjadi 26.88% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya kualitas penduduk yang bekerja di Kabupaten Sintang yang pada akhirnya nanti berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendapatan yang akan didapatkan.

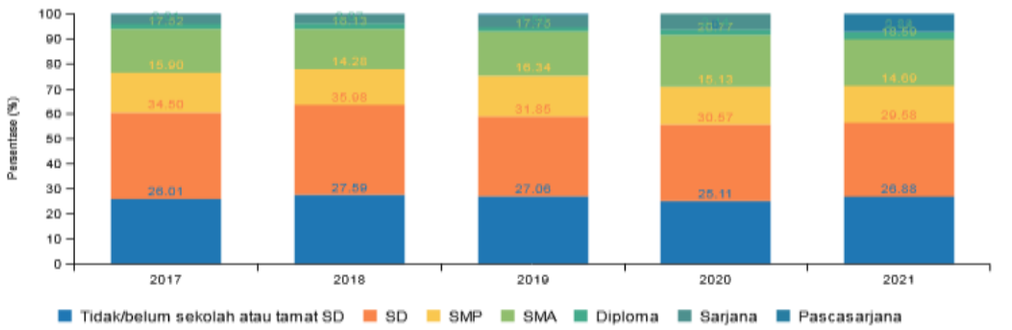

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.29 Tingkat Pendidikan Penduduk Bekerja

Dengan melihat kondisi pada tahun 2021 maka penduduk yang bekerja didominasi tamatan SD dengan jumlah sebanyak 67.973 jiwa atau dengan persentase 29,58%, sedangkan yang belum sekolah atau belum tamat SD mencapai maka jumlah penduduk 61.762 jiwa (26,88%).

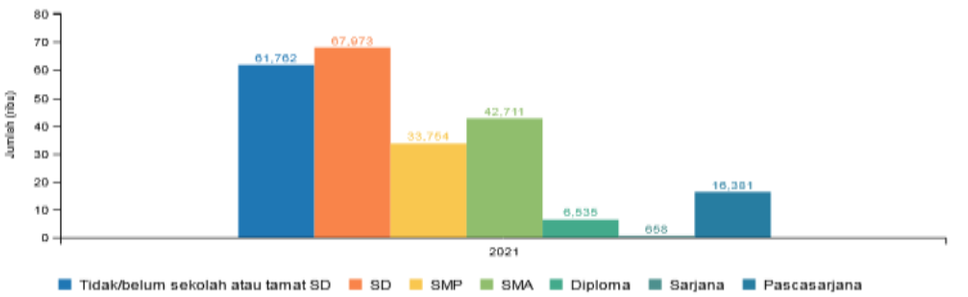

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.30 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Kemudian jika kita kaitkan dengan lapangan usaha dan tingkat pendidikan yang dimiliki, maka penduduk Kabupaten Sintang yang dominan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan tersebut, juga didominasi oleh penduduk yang belum tamat SD sebanyak 81,38% dan juga tamatan SD sebanyak 78%.

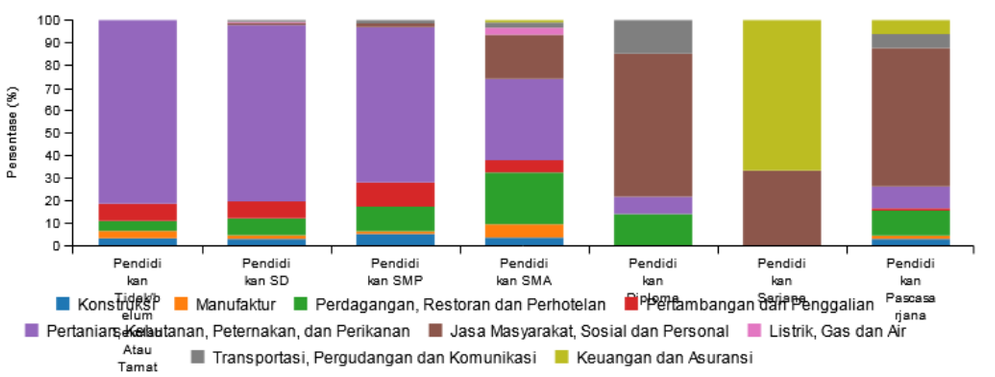

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.31 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3
Sebaran Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Nama/Lapangan Usaha	Pendidikan Tidak/belum Sekolah Atau Tamat SD	Pendidikan SD	Pendidikan SMP	Pendidikan SMA	Pendidikan Diploma	Pendidikan Sarjana	Pendidikan Pascasarjana
Konstruksi	3,39	3,09	5,29	3,68	-	-	3,16
Manufaktur	3,2	1,67	1,17	5,86	-	-	1,47
Perdagangan Restoran dan Perhotelan	4,5	7,46	10,85	22,93	14,05	-	10,96
Pertambangan dan Penggalian	7,52	7,55	10,85	5,5	-	-	1,01
Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan	81,38	78	68,82	35,99	7,68	-	9,66
Jasa Masyarakat Sosial dan Personal	-	1,02	1,56	19,59	63,49	33,43	61,43
Listrik Gas dan Air	-	0,51	-	3,12	-	-	-
Transportasi Pergudangan dan Komunikasi	-	0,7	1,48	2,25	14,78	-	6,07
Keuangan dan Asuransi	-	-	-	1,07	-	66,57	6,25
Total	100	100	100	100	100	100	100

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain : 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 3) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja, 4) Pendapatan rata-rata sektor pekerjaan, dan 5) Produktivitas Sektor Ekonomi Utama.

a) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data yang dirilis BPS bahwa TPT Kabupaten Sintang mengalami tren kenaikan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sebesar 1,93% terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 mencapai angka 4,5%. Namun pada tahun 2021 TPT Kabupaten Sintang cukup menggembirakan karena mengalami penurunan dari angka 4,5% pada tahun 2020 menjadi 3,95% pada tahun 2021 walaupun dirasakan masih cukup tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber : RDTR Disnakertrans, 2022

Gambar 3.32 Perkembangan TPT Kabupaten Sintang

Kemudian jika dilihat dari kelompok usia, penduduk menganggur terbuka dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 didominasi oleh kelompok usia muda yaitu pada kelompok usia 15 - 19 tahun dan 20 - 24 tahun. Jika kita ambil data tahun 2021, maka penduduk menganggur terbuka dari kelompok usia 15 - 19 tahun adalah sebesar 43,88% atau sebanyak 4.638 jiwa, dan kelompok usia 20 - 24 tahun sebesar 23,92% atau sebanyak 2.528 jiwa.

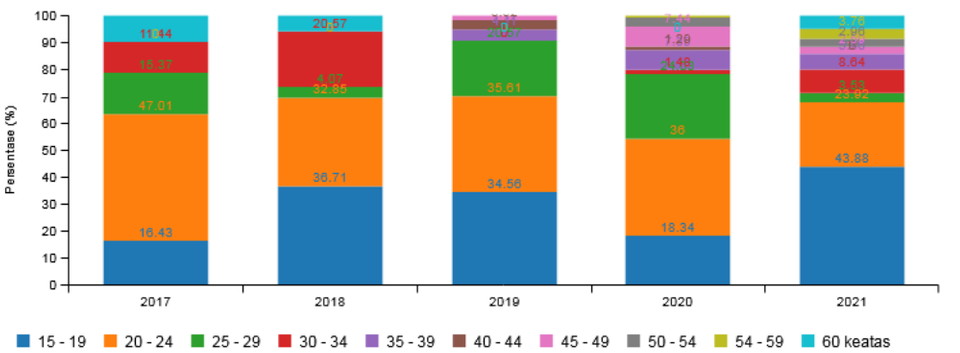

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.33 Persentase Penduduk Menganggur Menurut Kelompok Usia

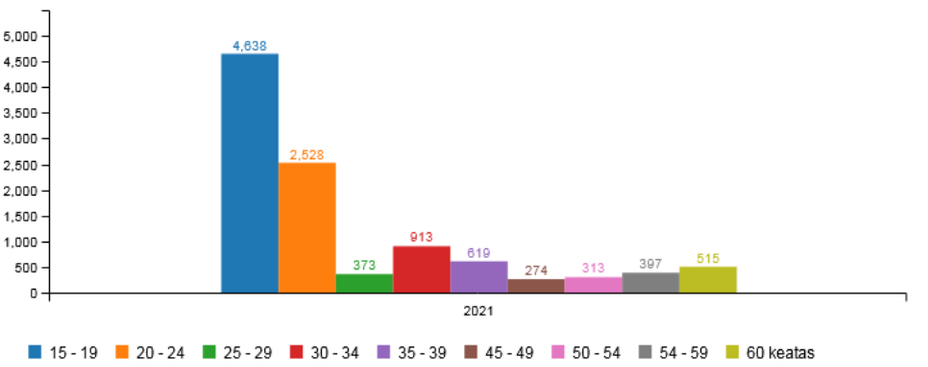

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.34 Jumlah Penduduk Menganggur Menurut Kelompok Usia

Selanjutnya berdasarkan kelompok jenis kelamin, maka penduduk menganggur terbuka pada periode tahun 2017-2020 didominasi oleh laki-laki, namun pada tahun 2021 mengalami pergeseran dimana kelompok perempuan mendominasi sebesar 54,26% atau sebanyak 5.735 jiwa dan kelompok laki-laki sebesar 45,74% atau sebanyak 4.835 jiwa.

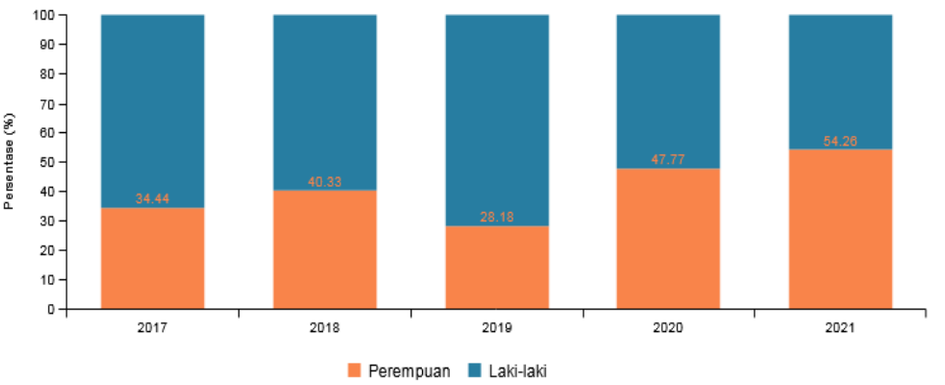

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.35 Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

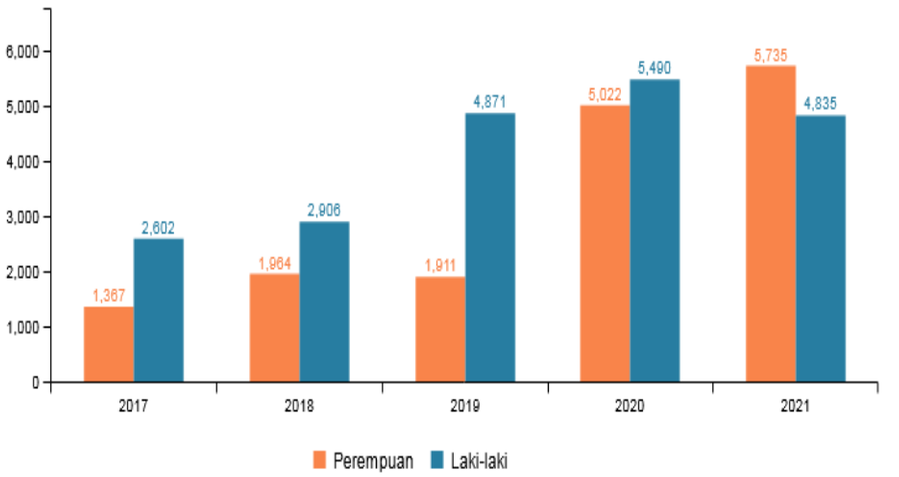

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.36 Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan klasifikasi keterampilan, penduduk yang menganggur terbuka lebih banyak yang terlatih sejumlah 79,05%, sedangkan yang tidak terlatih sejumlah 20,95%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk menganggur terbuka didominasi oleh lulusan SMA sedangkan yang yang terendah adalah dengan pendidikan pasca sarjana sebagaimana data 5 tahun terakhir di bawah ini. Untuk tahun 2021 pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan SMA mencapai 61,48% atau sebanyak 6.498 jiwa, sedangkan untuk pascasarjana sebesar 3,82% atau sebanyak 404 jiwa.

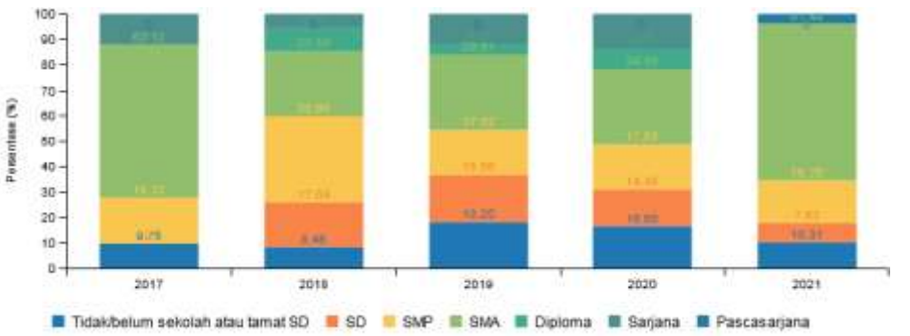

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.37 Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

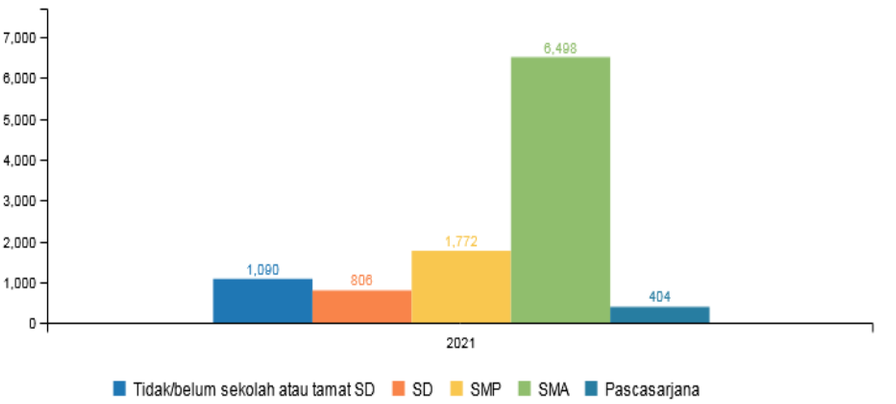

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.38 Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Selanjutnya berdasarkan klasifikasi keterampilan, penduduk yang menganggur terbuka mengalami fluktuasi antara yang terlatih dengan yang tidak terlatih. Pada tahun 2017 pengangguran yang terlatih mencapai 72,13% dan selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018, namun mengalami peningkatan kembali hingga dari tahun 2019 hingga 2021. Data terakhir tahun 2021 menunjukkan penduduk yang menganggur terbuka menjadi sebesar 66,30% dengan jumlah sebanyak 6.902 jiwa, sedangkan yang tidak terlatih sebesar 33,70% dengan jumlah sebanyak 3.668 jiwa.

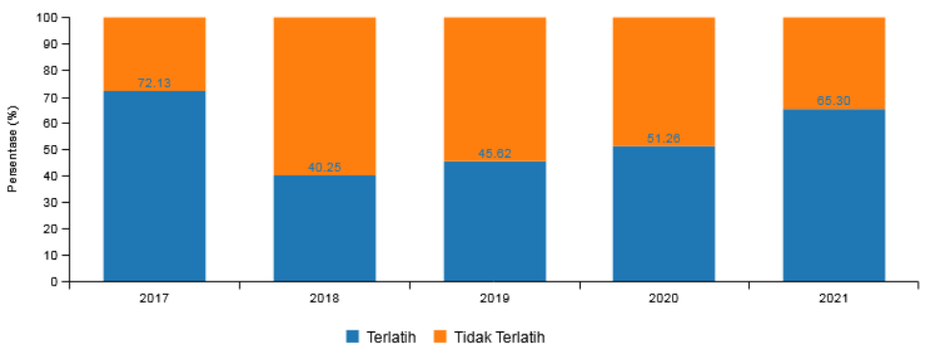

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.39 Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Klasifikasi Keterampilan

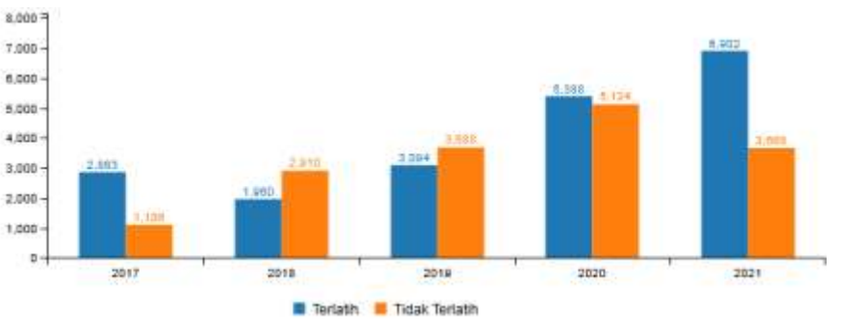

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.40 Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Menurut Klasifikasi Keterampilan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan angka yang menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Selain itu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Data BPS menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Sintang dalam periode tahun 2017 - 2021 menunjukkan tren peningkatan dari 71,74% pada tahun 2017 meningkat menjadi 77,78% pada tahun 2021.

Sumber : RDTR Disnakertrans, 2022

Gambar 3.41 Perkembangan TPAK Kabupaten Sintang

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 adalah 1,93% atau setara dengan 3.968 Jiwa . Lebih rinci data pengangguran tersebut berada pada usia 15-19 tahun sejumlah 652 jiwa, pada usia 20-24 tahun sejumlah 1.866 jiwa, pada usia 25-29 jiwa sejumlah 610 jiwa, pada usia 30-34

tahun sejumlah 454 jiwa, pada usia 40-44 tahun sejumlah 0 jiwa dan pada usia 45-49 tahun sejumlah 0 jiwa. Dari data tersebut yang termasuk kategori pemuda (15-24 tahun) sebanyak 47,01% dan bukan pemuda 52,99%. apabila dibandingkan dengan tahun 2021 Tingkat Penggangguran Terbuka Mengalami Peningkatan menjadi 3,95% atau setara dengan 9.625 Jiwa. Lebih rinci data pengangguran tersebut berada pada usia 15-19 tahun sejumlah 4.242 jiwa, pada usia 20-24 tahun sejumlah 1.979 jiwa, pada usia 25-29 jiwa sejumlah 373 jiwa, pada usia 30-34 tahun sejumlah 913 jiwa, pada usia 35-39 619 Jiwa, usia 40-44 tahun sejumlah 0 jiwa dan pada usia 45-49 tahun sejumlah 274 jiwa, Usia 50-54 sejumlah 313 Jiwa, usia 55-59 sejumlah 397 Jiwa dan usia 60 tahun ke atas 515 Jiwa.

Berdasarkan klasifikasi menurut Pendidikan, penduduk yang menganggur terbuka lebih banyak didominasi oleh lulusan SMA 48,95% atau sejumlah 4.711 jiwa pada tahun 2021, sedangkan yang paling rendah 0% atau sejumlah 0 jiwa adalah yang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana.

b. Produktivitas Sektor Ekonomi Utama

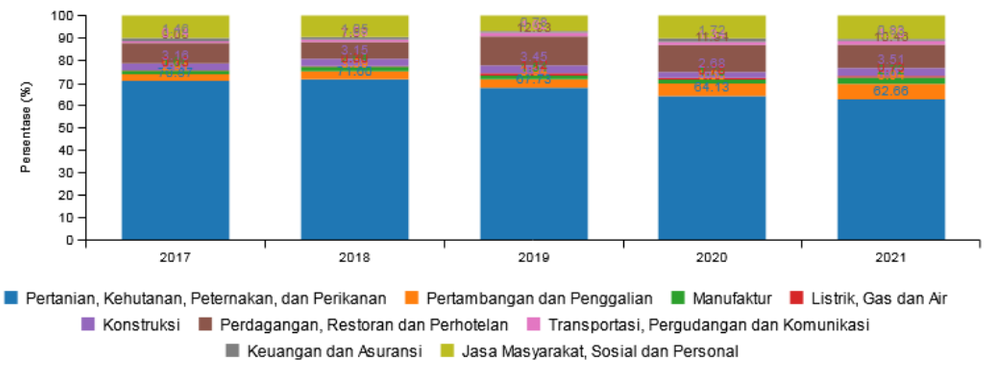

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.42 Persentase Produktivitas Sektor Ekonomi Utama

2). Aspek Sosial

1) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Di Kabupaten Sintang, komponen PPKS tersebut antara lain :

a. disabilitas fisik sebanyak 734 jiwa;
b. disabilitas mental sebanyak 383 jiwa;

c. disabilitas ganda sebanyak 37 jiwa;
d. lansia terlantar sebanyak 32 jiwa;
e. anak-anak terlantar sebanyak 50;
f. gelandangan sebanyak 3 jiwa; dan
g. wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 39 jiwa.

Tabel 3.4
Jumlah PPKS Tahun 2022

No	Kecamatan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Ganda	Lansia Terlantar	Anak Terlantar	Gelandangan	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah
1	Dedai	250	124	0	109	14	0	0	497
2	Sungai Tebelian	8	4	0	0	0	0	0	12
3	Ketungau Tengah	150	65	23	65	0	2	0	305
4	Kelam Permai	52	20	4	5	4	0	0	85
5	Sintang	75	66	8	285	0	1	0	435
6	Kayan Hilir	143	49	2	413	19	0	39	665
7	Ambalau	56	55	0	255	13	0	0	379
	Total	734	383	37	1.132	50	3	39	2.378

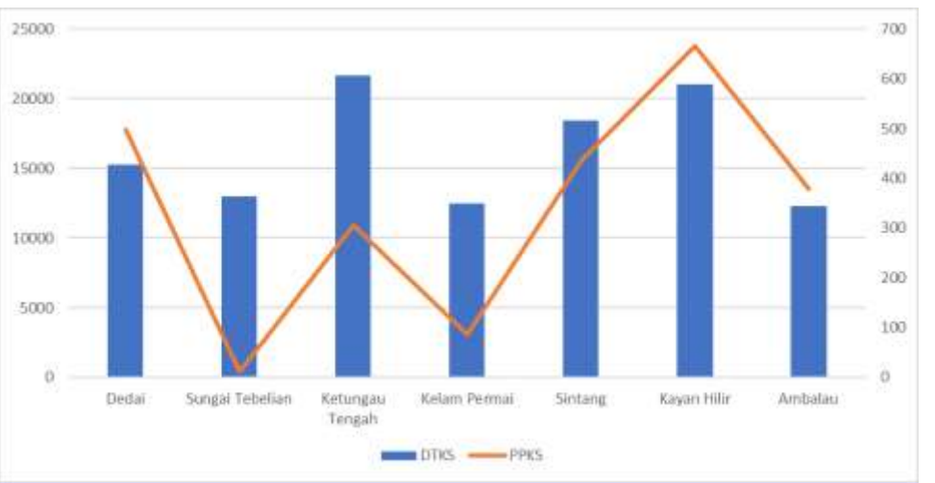

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.43 Jumlah DTKS dan PPKS Tahun 2022

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa ada 7 (tujuh) kecamatan yang memiliki data PPKS. Data PPKS terbesar terdapat di Kecamatan Kayan Hilir yaitu sebanyak 665 jiwa dengan jumlah DTKS sebanyak 21.011 jiwa atau 3,17%. Data terkecil terdapat di Kecamatan sei Tebelian yang hanya 12 jiwa dengan jumlah DTKS sebanyak 12.983 jiwa atau 0,09 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah PPKS dan DTKS, demikian pula sebaliknya.

2) Cakupan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Kepemilikan Jaminan Sosial di Kabupaten Sintang dapat dijelaslan sebagai berikut:

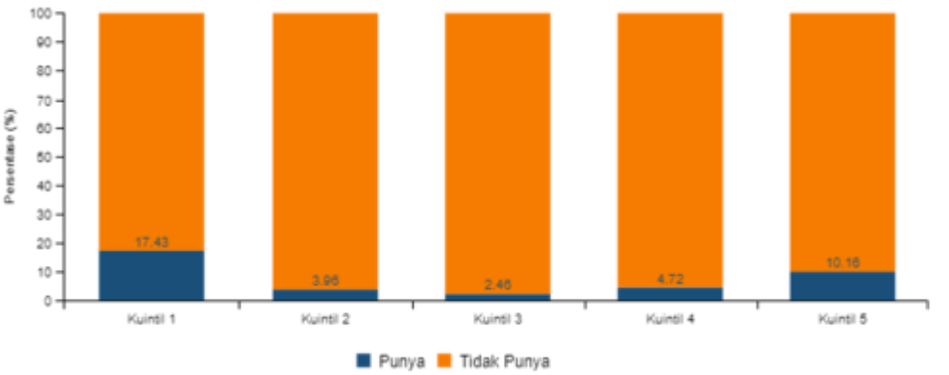

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.44 Persentase Kepemilikan Perlindungan Sosial Menurut Kuantil Masyarakat Miskin

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa kepemilikan jaminan sosial dalam cakupan perlindungan sosial tertinggi pada pada kuintil 1 jumlah kepemilikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin kronis hanya 17,43%, dengan demikian pada masyarakat miskin kronis ini masih banyak yang belum mendapatkan kepemilikan jaminan sosial yaitu sejumlah 82,57 %.

:::	Miskin Kronis	Miskin	Rentan Miskin	Menuju Kelas Menengah	Kelas Menengah
Punya	33.51	57.16	55.20	55.48	63.03
Tidak Punya	66.49	42.82	44.80	44.52	36.97
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.45 Persentase Kepemilikan Jamkes Menurut Kuantil Masyarakat Miskin

Dari grafik di atas bahwa kepemilikan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin kronis hanya sebanyak 33,51%. Dengan demikian bahwa masyarakat miskin kronis masih banyak yang belum mendapatkan kepemilikan jaminan kesehatan (66,49 %).

3). Aspek Infrastruktur Wilayah

1) Kondisi Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan yang memadai akan memudahkan penduduk mengakses dan menjangkau berbagai fasilitas. Di Kabupaten Sintang, kondisi jalan utama panjang terverifikasi 2.289.620 Km. Untuk lebih rinci, data terkait kondisi ruas jalan umum di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

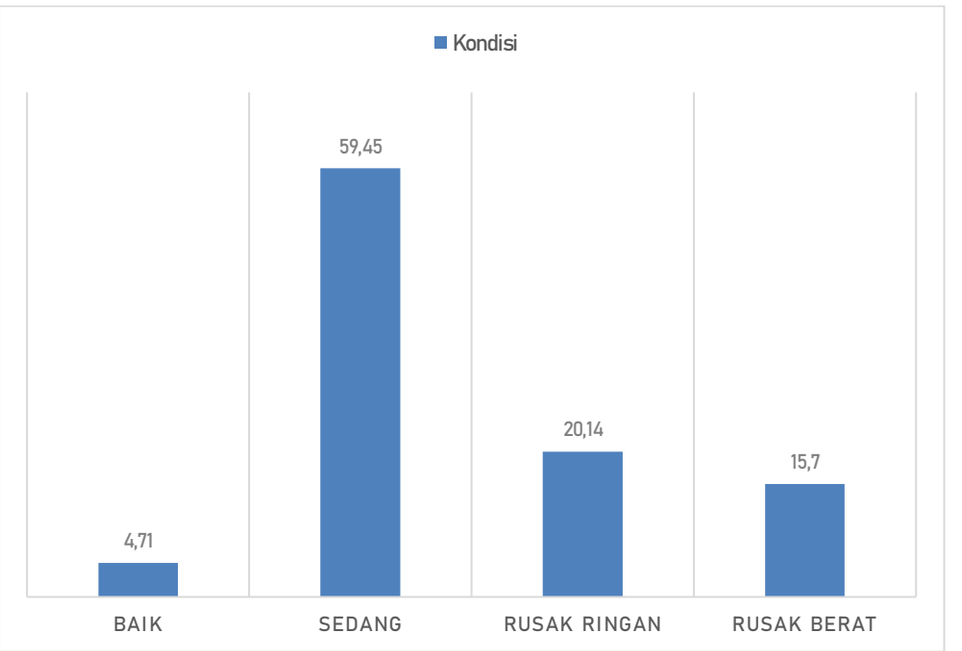

Sumber : Dinas PU, 2021

Gambar 3.46 Persentase Ruas Jalan Menurut Kondisi Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah ruas jalan di Kabupaten Sintang adalah 223 Km^2 dengan Kondisi Kemantapan Ruas Jalan baik 4,71 %, sedang 59,45 %, Rusak Ringan 20,14 % dan Rusak berat 15,7 %. Panjang Jembatan 12523,90 M dengan total 979 Unit dengan kondisi Jembatan dikatakan baik / sedang baru 254 Unit.

2) Transportasi

Jasa transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Tersedianya Sistem transportasi berdampak pada jangkauan rumah tangga untuk

mendapatkan berbagai jenis fasilitas-fasilitas (pendidikan, kesehatan, pasar). Di Kabupaten Sintang Terdapat berbagai Jenis Moda transportasi yaitu Sistem Jaringan transportasi Udara, Sistem Jaringan transportasi darat dan Sistem Jaringan Transportasi Sungai. Moda Transportasi tersebut dapat dikatakan memadai terpenuhi di Kabupaten Sintang dalam mendukung kesinambungan ketersediaan jasa guna stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda Pemerintahan di kabupaten Sintang.

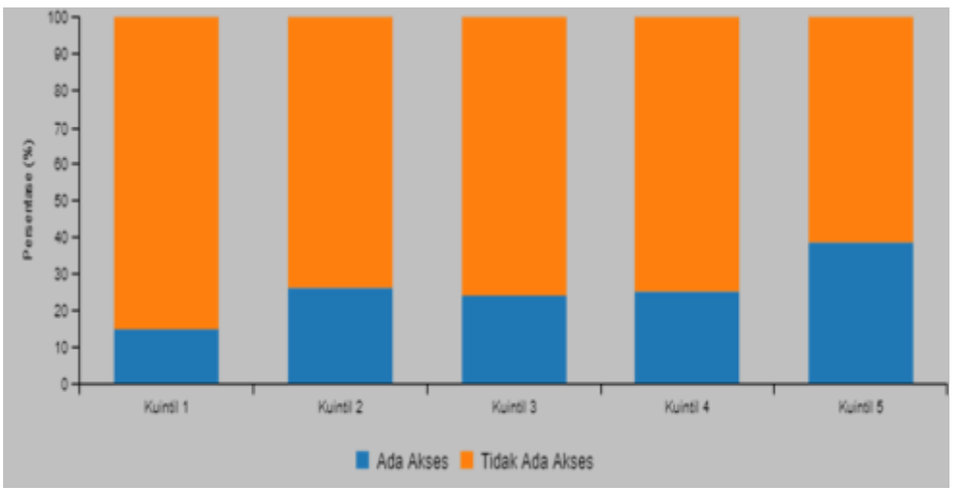

Sumber : SEPAKAT BAPPENAS, diolah, 2022

Gambar 3.47 Persentase Masyarakat Miskin yang memiliki akses trayek transportasi publik

Berdasarkan Data Grafik Fasilitas Transportasi Publik dengan Trayek Tetap di Kabupaten Sintang Tahun 2018, berdasarkan Kuintil (100 %) terbagi dalam beberapa kriteria: Data Trayek yang memiliki Akses pada Kuintil 1 sebesar (14,92%), Kuintil 2 sebesar (26,22%), Kuintil 3 menurun menjadi 25,86 % dan hampir seimbang dengan kuintil 4 dan meningkat pada 5 yang hampir mencapai 40 %.

Sistem jaringan prasarana utama dibentuk oleh sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai, sistem jaringan transportasi perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi udara. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjabaran sistem jaringan transportasi di bawah ini.

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

a. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, terdiri atas:

- Ruas Jalan Sekadau – Tebelian;

- Ruas Jalan Tebelian – Nanga Pinoh (PKWp);
- Ruas Jalan Tebelian – Batas Kota Sintang (PKW);
- Ruas Jalan MT. Haryono (Sintang);
- Ruas Jalan Lintas Melawi (Sintang);
- Ruas Jalan Oevaang Oeray (Sintang); dan
- Ruas Jalan Batas Kota Sintang – Simpang Nanga Silat.

b. Jaringan jalan kolektor primer (K1) adalah jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi di Kabupaten Sintang, terdiri atas:

- Ruas jalan Sintang – Binjai;
- Ruas jalan Binjai – Setungkup;
- Ruas jalan Setungkup – Senibung;
- Ruas jalan Senibung – Argo Mulyo;
- Ruas jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong; dan
- Ruas Jalan Sudirman

c. Jaringan jalan kolektor primer (K3) yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan kolektor (K1) yang menghubungkan antar PKSN atau antara PKSN dengan gerbang lintas batas negara atau antara Pelabuhan Nasional dengan PKW, terdiri atas:

- Ruas Jalan Poros Perbatasan;
- Ruas Jalan Balai Karangan – Secangkul – Simpang Pintas Keladan;
- Ruas Jalan Paralel Simpang Pintas Keladan – Rasau – Belubu – Sepulau – Nanga Seran – Nanga Jaong – Simpang Jaong;
- Ruas Jalan Rasau – Jasa – Sungai Kelik – Batas Sarawak; dan
- Ruas Jalan Paralel Simpang Jaong – Jaong – Langau – Nanga Kantuk.

d. Jaringan jalan kolektor primer (K2) adalah jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota kabupaten di Kabupaten Sintang, terdiri atas:

- Ruas jalan Sungai Ukoi – Manter;
- Ruas jalan Manter – Nanga Pinoh;
- Ruas Jalan Sintang – Semubuk – Seputau III; ▪ ruas Jalan Seputau III – Simpang Pintas Keladan; dan
- Ruas Jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong.

e. Jaringan jalan kolektor primer (K3) terdiri atas:

- Ruas Jalan Simpang Medang – Nanga Mau – Tebidah;
- Ruas Jalan Tebidah – Bunyau – Nanga Serawai; dan

- Ruas Jalan Nanga Serawai – Nanga Ella.

f. Jaringan jalan lokal primer

Selain jaringan jalan, direncanakan pula jaringan prasarana lalu lintas Kabupaten Sintang yang terdiri atas:

a. Terminal penumpang tipe B terletak di Sungai Ukoi;
b. Rencana pembangunan terminal tipe A terletak di Sungai Ukoi Kecamatan Tebelian;
c. Rencana pembangunan terminal tipe B terletak di Desa Jasa dan Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu;
d. Terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Sepauk, Kelurahan Tanjung Puri, kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir;
e. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C terletak di, Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, Senaning Kecamatan Ketungau Hulu, Merakai Kecamatan Ketungau Tengah;
f. Rencana pembangunan terminal angkutan barang tipe B terletak di Kota Sintang;
g. Jembatan timbang terletak di Sungai Ukoi; dan
h. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) terletak di Sungai Ukoi.

2. Sistem Jaringan Transportasi Sungai

Di Kabupaten Sintang juga terdapat sistem jaringan transportasi sungai dengan pengembangan poros utama transportasi sungai terdapat di kota Sintang untuk wilayah Utara dan Nanga Serawai untuk wilayah Selatan Kabupaten Sintang. Prasarana transportasi sungai, meliputi dermaga terdapat di Dermaga Sungai Durian di Kota Sintang, Dermaga Nanga Serawai di Kecamatan Serawai, Dermaga Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau, Dermaga Senangan dan Wirayuda di Kecamatan Ketungau Tengah, dan Dermaga khusus angkutan sungai untuk swasta. Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai terdiri dari:

a. Pelabuhan Sungai Durian di Kota Sintang;
b. Pelabuhan Sungai Ringin di Kecamatan Sintang;
c. Dermaga Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir; dan
d. Dermaga Sungai Ana di Kecamatan Sintang.

Selain itu direncanakan juga pemberian/hibah transportasi sungai untuk desa dari APBD dan APBN.

3. Sistem Jaringan Transportasi Udara

a. Rencana pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Sungai Tebelian;

b. Rencana pengembangan bandar udara untuk melayani penerbangan perintis di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ketungau Hulu; dan

c. Rencana pengembangan heliport di Jasa Kecamatan Ketungau Hulu.

3) Telekomunikasi

Infrastruktur Telekomunikasi merupakan bagian dari teknologi yang Titik blank spot wilayah Kabupaten Sintang. Hal ini disebabkan tidak adanya jaringan listrik PLN untuk backup BTS pada beberapa desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang saat ini hanya menjangkau sinyal 2G dan 3G dari operator seluler. Sinyal 4G baru ada disekitar wilayah perkotaan.

1. Jaringan serat optik dalam kabupaten untuk wilayah kota dan kawasan-kawasan perkotaan di setiap wilayah kecamatan;

2. Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS (Base Transceiver Station) dari dan ke perangkat seluler, dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap wilayah kecamatan;

3. Jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS (Base Transceiver Station);

4. Jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kabupaten; dan

5. Jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

Tabel 3.5
Jumlah BTS Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	BTS	
		Swasta	Bakti KEMKOMINFO
1	Ambalau	1	23
2	Binjai Hulu	3	3
3	Dedai	5	11
4	Kayan Hilir	4	18
5	Kayan Hulu	2	29
6	Kelam Permai	5	7
7	Ketungau Hilir	4	12
8	Ketungau Hulu	2	24

9	Ketungau Tengah	5	22
10	Sepauk	17	17
11	Serawai	4	17
12	Sintang	42	4
13	Sungai Tebelian	22	4
14	Tempunak	12	17
	Total	164	208

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sintang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jaringan BTS atau Base Transceiver Station sudah menjangkau desa-desa di Kabupaten Sintang. Namun jangkauan pelayanannya masih belum menyeluruh.

4). Aspek Kebencanaan

1) Bencana Alam

Kabupaten Sintang Masuk sebagai prioritas nasional dalam penanggulangan bencana, khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia. Berdasarkan dari sejarah bencana yang pernah terjadi di kabupaten Sintang, Kabupaten Sintang sering mengalami Bencana Kebakaran dan Banjir yang menimbulkan kerusakan baik korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun dampak psikologis. Bencana yang terjadi di sintang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam.

a. Bencana Banjir

Kondisi alam serta geografi wilayah kab sintang dengan intensitas curah hujan yang tinggi, lereng yang curam di daerah hulu disertai dengan perubahan ekosistem dari tanaman tahunan atau tanaman keras berakar dalam ke tanaman semusim berakar dangkal mengakibatkan berkurangnya air yang disimpan dalam tanah, memperbesar aliran permukaan serta menyebabkan terjadinya tanah longsor. Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang singkat dan tidak dapat diserap tanah akan dilepas sebagai aliran permukaan yang akhirnya menimbulkan banjir.

Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, pelanggaran tata ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain ancaman banjir, ancaman alam yang bersifat hydrometeorologis lainnya yaitu kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun

perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang menimbulkan kekeringan.

Kondisi geologis, tofografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Sintang menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana alam dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sintang, dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kawasan Rawan Banjir
2. Kawasan Rawan Tanah Longsor
3. Kawasan Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Kawasan Rawan Puting Beliung

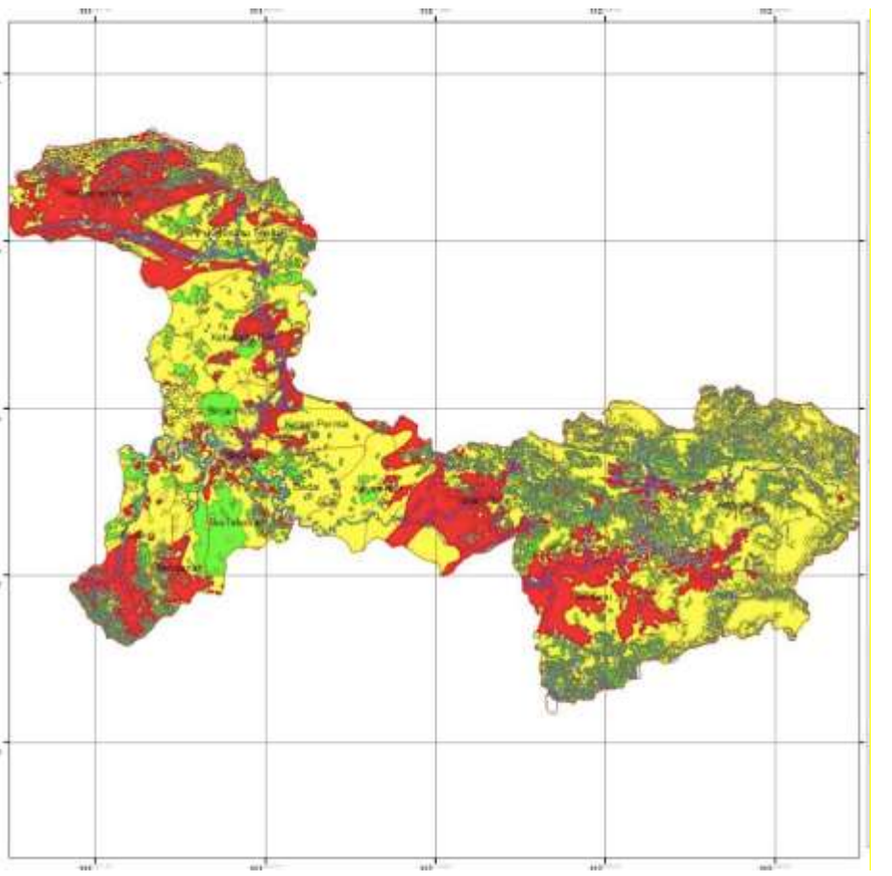

Sumber : BPBD Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 3.48 Peta Sebaran Potensi Bencana Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) tanggap darurat di lima desa Kabupaten Sintang. Lima POKMAS Tanggap Darurat Banjir yang dibentuk di lima desa di antaranya Desa Tanjung Kelamsam, Teluk Kelamsam, Mungguk Bantuk, Tebing Raya dan Desa Tertung.

b. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus, sedangkan pada bulan September titik api sudah mulai berkurang, karena hujan sudah mulai turun. Kejadian ini berlangsung setiap tahun dengan sebaran titik api yang beragam. Sangat sulit untuk menekan jumlah titik api yang ada di wilayah kab sintang, serta menentukan siapa sebenarnya penyebab kebakaran dan siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Yang pasti adalah bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap musim kemarau dan harus ditanggulangi untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya. Namun harus diakui bahwa dalam urusan kebakaran hutan dan lahan, instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, perusahaan-perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), merupakan mata rantai yang tidak terputus sebagaimana telah dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan. Dari kejadian ini, dapat disimpulkan bahwa semua pihak memiliki andil menurut proporsinya masing-masing sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3.6
Jumlah Hotspot Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Hotspot
1	Serawai	25
2	Ambalau	21
3	Kayan Hulu	10
4	Sepauk	18
5	Tempunak	9
6	Sungai Tebelian	3
7	Sintang	0
8	Dedai	2
9	Kayan Hilir	6
10	Kelam Permai	1
11	Binjai Hulu	0
12	Ketungau Hilir	10
13	Ketungau Tengah	26
14	Ketungau Hulu	31
	Jumlah	**162**

Sumber : BPBD Kabupaten Sintang, 2022

Berdasarkan Pengkajian Kerentanan, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang akan berdampak pada 12 Kecamatan dengan

kecamatan yang kerentanannya tertinggi adalah kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah dan Kecamatan Serawai. Seberan Kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat ditampilkan dalam bentuk peta Gambar Sebaran wilayah kerawanan dibedakan menjadi tiga kelas yakni sedang, rendah, dan tinggi.

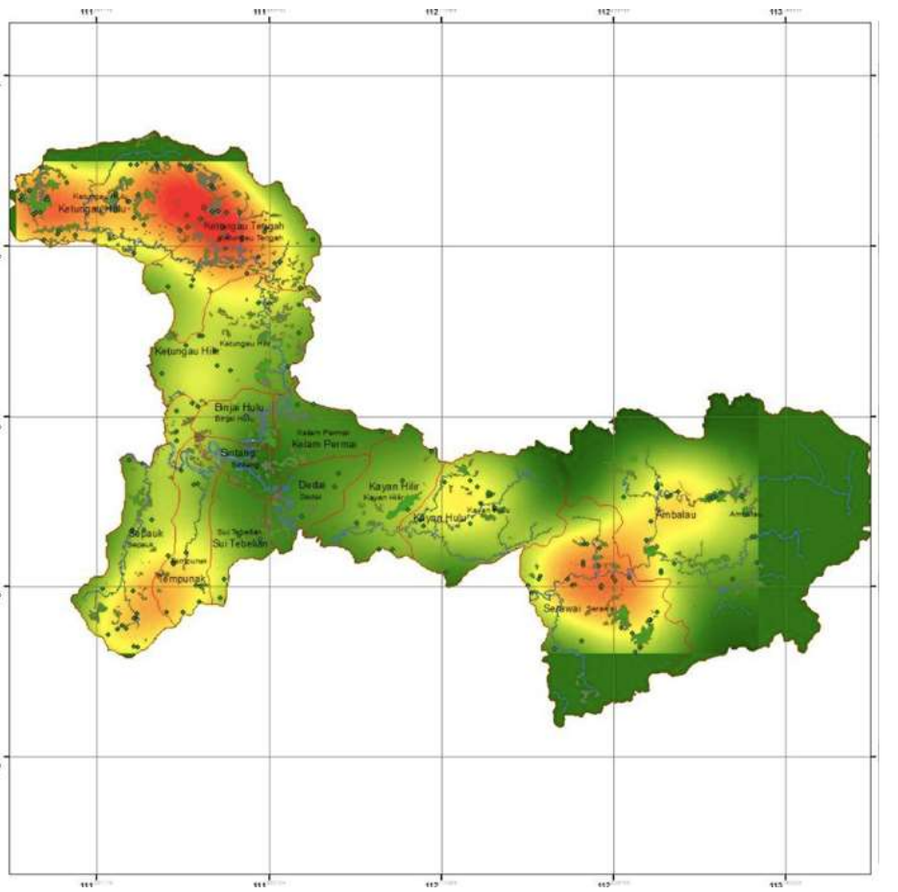

Sumber : BPBD Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 3.49 Peta Sebaran Potensi Kerawanan Kebakaran Hutan

Kebijakan penanggulangan bencana menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Terdapat 6 (enam) fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah. Penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Sintang juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Sinkronisasi perencanaan dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 6 (enam) strategi utama penanggulangan bencana, yaitu:

1. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan.
2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu.
3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.
5. Perlindungan Masyarakat dari Bencana.
6. Penanggulangan Bencana.

2) Bencana Non Alam

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tidak luput dari masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Efek covid-19 merupakan efek yang sangat luar biasa yang yang berdampak pada pendapatan masyarakat dan hal-hal yang ditimbulkan antara lain lapangan kerja yang semakin sedikit di segala sektor baik pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan sektor lainnya.

Seluruh daerah di Kalimantan Barat saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Sintang, pada awal januari 2021, jumlah yang terpapar covid-19 berjumlah 523 orang dan yang meninggal sebanyak 6 orang. Pada pertengahan Februari bertambah menjadi 673 orang. Pada bulan April, dalam sepekan ada 11 orang yang meninggal. Puncak gelombang ketiga Covid-19 terjadi pada bulan April dengan 154 kasus perminggu. Angka CFR atau tingkat kematian kasus pada bulan April sebesar 5,4 persen.

5). Aspek Ketahanan Pangan

1) Kerawanan Pangan

Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi dan seimbang menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup. Berdasarkan Peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang Tahun 2021 (Gambar ...), bahwa wilayah timur Kabupaten Sintang menjadi wilayah sangat rentan, yaitu desa-desa di Kecamatan Kayan Hulu, Serawai dan Ambalau, sehingga menjadi prioritas 1 penanganan.

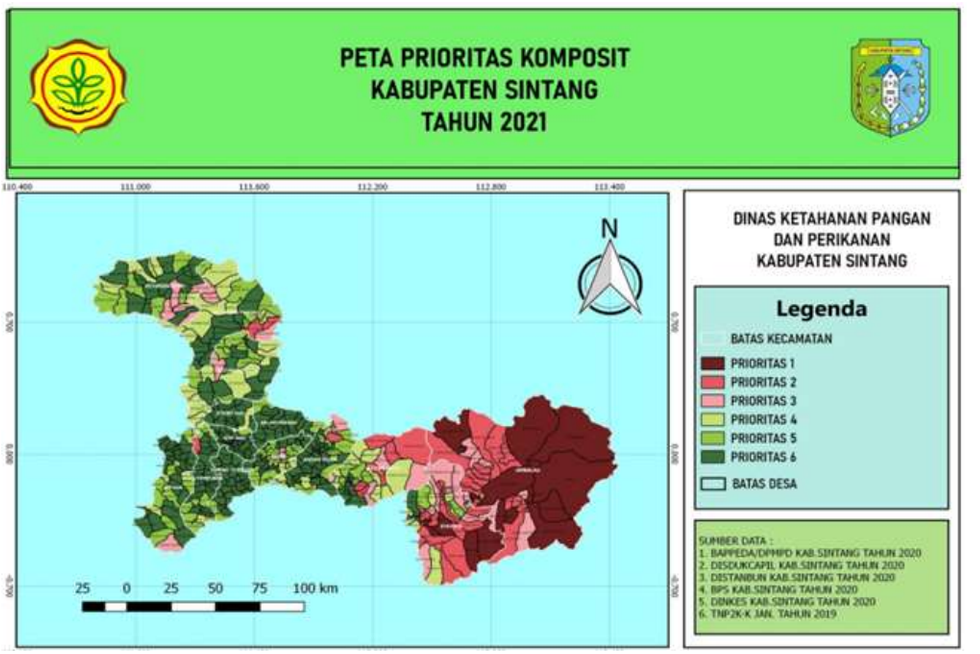

Sumber : DKPP Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 3.50 Peta Kerawanan Pangan

Secara spesifik, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sintang dilihat dari aspek kerawanan pangan dapat diketahui melalui ketersediaan pangan di desa, dengan asumsi bahwa bisa jadi suatu wilayah desa tidak memiliki potensi untuk memproduksi pangan sendiri, namun memiliki sarana dan prasarana penyedia pangan sehingga ketersediaan pangan di desa tersebut masih mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini dapat digambarkan dari dari sebaran rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap sebaran jumlah desa dengan tingkat kesejahteraan terendah, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

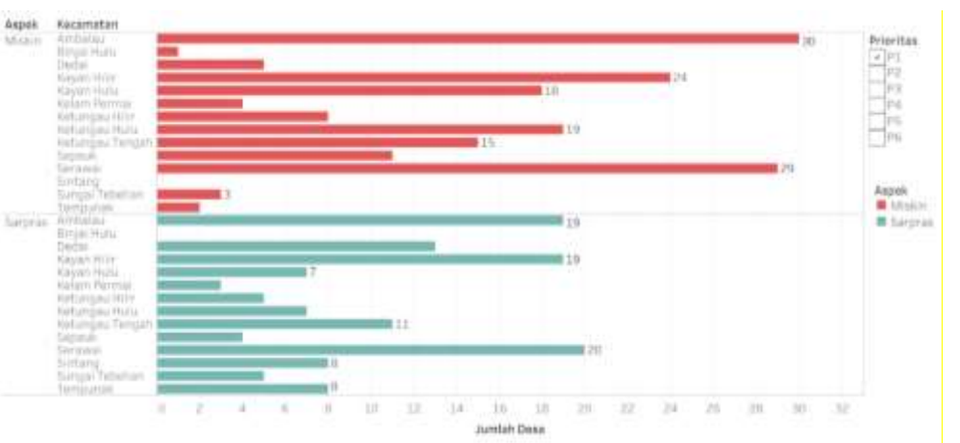

Sumber : DKPP Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 3.51 Sebaran rasio jumlah sarpras penyedia pangan

Berdasarkan gambar di atas, untuk daerah prioritas 1 (Sangat rentan), sebaran jumlah desa/kelurahan prioritas penanganan berdasarkan rasio tingkat kesejahteraan masyarakat terendah (warna merah) memiliki pola yang relatif sama dengan sebaran desa/kelurahan prioritas penanganan berdasarkan rasio ketersediaan sarana dan prasarana pangan (warna hijau). Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah desa-desa yang memiliki rasio tingkat kesejahteraan terendah juga menjadi kecamatan dengan desa prioritas utama penanganan penyediaan sarana dan prasarana pangan.

2) Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga adalah satu lonjakan atau ketidaktepatan yang menimpa harga-harga produk tertentu. Terjadinya fluktuasi harga dari produk-produk tertentu biasanya ditimbulkan dari kenyataan-kenyataan yang langsung muncul di masyarakat. Yang mana fluktuasi ini terjadi akibat adanya patokan nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Tidak dipungkiri karakteristik dari komoditas barang adalah harga ditentukan oleh adanya penawaran dan permintaan pasar. Tidak semata-mata ditentukan oleh penyalur maupun penjual. Maka dari itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat ketika muncul fluktuasi, baik yang berupa kenaikan maupun penurunan. Fluktuasi harga di Kabupaten Sintang banyak dipengaruhi oleh Fluktuasi Harga Produk di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Unsur-unsur yang memengaruhi terjadinya fluktuasi nilai di bidang pertanian bermacam-macam. Salah satunya adalah disebabkan oleh naiknya harga produk seperti pupuk, bibit, benih, dan lainnya.

Selain itu hal yang memengaruhi yang selanjutnya adalah harga produk komunitasnya sendiri memang sudah mengalami kenaikan. Seperti harga ayam dengan pakannya dan selainnya. Harga teknologi produksi yang sejatinya membantu meningkatkan produktivitas budidaya juga menentukan terjadinya fluktuasi harga di bidang pertanian. Tak hanya itu musim, ramalan penjualan juga ikut memengaruhi fluktuasi utamanya di bidang pertanian.

Berdasarkan data inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2020- 2022 (Juli) bahwa komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi adalah kelompok sayuran dan sumber protein. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar ....

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 3.52 Komoditi Penyumbang Inflasi

Berdasarkan gambar di atas, dalam kurun waktu tahun 2020- Juli 2022, sebagian besar komoditas penyumbang inflasi (penurunan harga) adalah kelompok sayuran (warna hijau) dan sumber protein (warna orange), meskipun pada Agustus 2021, penyumbang inflasi terbesar adalah obat dengan resep, yang diduga sebagai salah satu dampak Covid-19. Kelompok sayuran dan sumber protein yang menjadi golongan besar penyumbang inflasi menunjukkan bahwa komoditas tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Dengan demikian, maka fluktuasi harga yang terjadi pada kelompok tersebut akan berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pada aspek perkebunan, sebagian besar naik turunnya harga produk di bidang perkebunan disebabkan oleh adanya permintaan ekspor yang juga berkurang. Bisa juga karena memang kualitas produksi dari komoditas ini sangat lemah sehingga mempengaruhi permintaan. Komoditi perkebunan unggulan di kabupaten Sintang adalah karet, dan sawit.

Selain itu kenaikan harga minyak dunia juga berpengaruh pada kenaikan harga minyak nasional dan kenaikan tarif dasar listrik yang sangat berpengaruh pada fluktuatif harga barang dan jasa, sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang berkurang.

6). Aspek Pembangunan Desa

Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Didukung dengan kebijakan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa memiliki fungsi untuk percepatan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pebaikan layanan di

tingkat desa. Hingga saat ini, status desa di Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17
Desa Menurut Status IDM

Status Desa	Tahun							
	2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Mandiri	0	0,00	6	1,54	29	7,38	65	16,66
Maju	0	0,00	14	3,59	59	15,01	82	21,02
Berkembang	29	7,46	104	26,67	161	40,97	233	59,74
Tertinggal	148	38,05	180	46,15	143	36,39	10	2,56
Sangat Tertinggal	212	54,50	86	22,05	1	0,25	0	0

Sumber : DPMPD Kabupaten Sintang, 2022

Sebaran persentase masyarakat miskin di Desa Tertinggal, yang diketahui dari persentase jumlah individu DTKS di desa tersebut, menunjukkan masih tingginya kemiskinan di masyarakat. Berdasarkan Gambar .... terdapat 10 desa tertinggal yang tersebar di Kecamatan Ambalau, Serawai dan Ketungau Hulu. Dari 10 desa tersebut, hanya Desa Tanjung Baru di Kecamatan Serawai yang memiliki persentase individu DTKS yang paling rendah yaitu 23,8% dari total penduduk desa. Sementara 9 desa tertinggal lainnya memiliki jumlah individu DTKS yang lebih besar dari 50% total penduduk di desa tersebut.

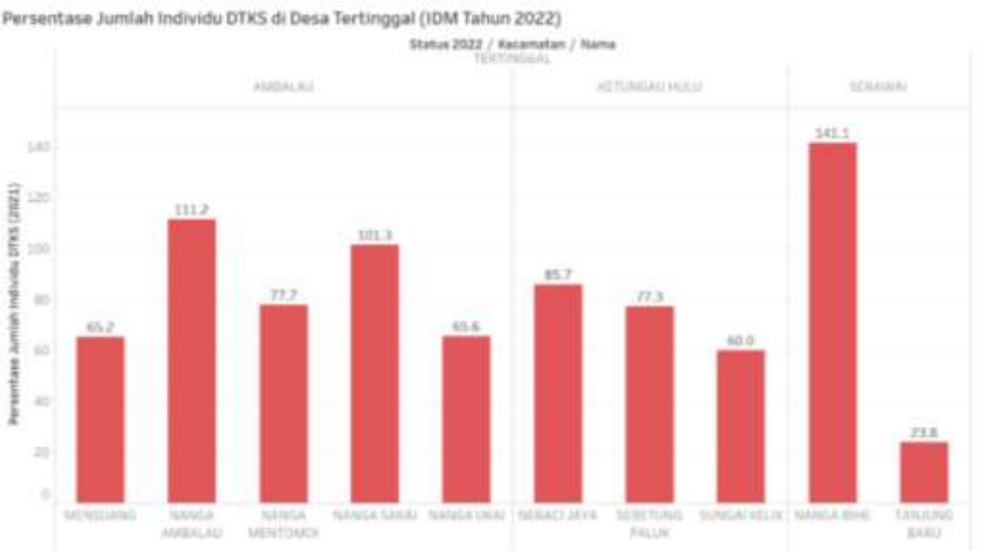

Sumber : DPMPD Kabupaten Sintang, diolah, 2022

Gambar 3.53 Persentase Jumlah Individu DTKS di Desa Tertinggal

Luas kawasan hutan yang membentang di Kabupaten Sintang menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan desa. Pembangunan desa,

khususnya desa yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan, memiliki keterbatasan akses yang tinggi. Kabupaten Sintang memiliki 59 desa yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan, yang tersebar di 9 Kecamatan yaitu 12 desa di Kecamatan Ambalau, 6 Desa di Kecamatan Kayan Hilir, 11 desa di KEcamatan Kayan Hulu, 7 desa di Kecamatan Ketungau Hilir, 5 desa di KEcamatan Ketungau Hulu, 6 desa di Kecamatan Ketungau Tengaj, 4 desa di KEcamatan Sepauk, 4 desa di Kecamatan Serawai dan 2 desa di Kecamatan Tempunak.

Isu kemiskinan juga terjadi pada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sebagian besar desa yang berada dalam kawasan hutan memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 50% dari total penduduk desa. Berikut disajikan persentase penduduk miskin 59 desa yang berada dalam kawasan hutan.

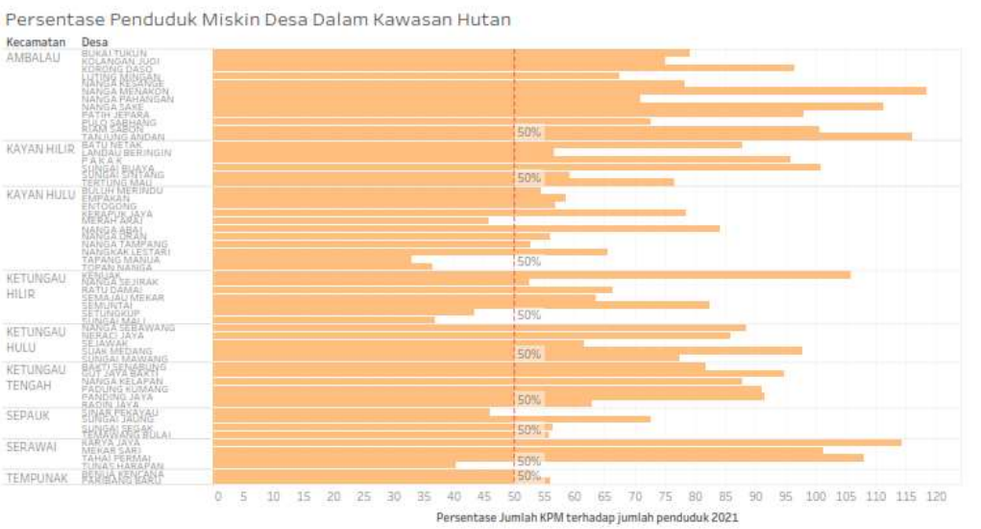

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sintang, diolah, 2022

Gambar 3.54 Persentase Penduduk Miskin Desa Dalam Kawasan Hutan

3.2.3 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut, adalah kemiskinan yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga." menurut PBB tahun 1995.

Pada tahun 2018, kemiskinan ekstrem mengacu pada pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional USD1,90 per hari (nilai pada tahun 2011) menurut Bank Dunia. Nilai ini setara dengan USD2,12 pada tahun 2022. Untuk tahun 2021 setara dengan Rp. 11.941 per

kapita per hari, atau Rp 358.233 per kapita per bulan. Berdasarkan data BPS bahwa Kemiskinan Ekstrem Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 2,04 persen menurun sebesar 0,1 persen poin dibandingkan 2021.

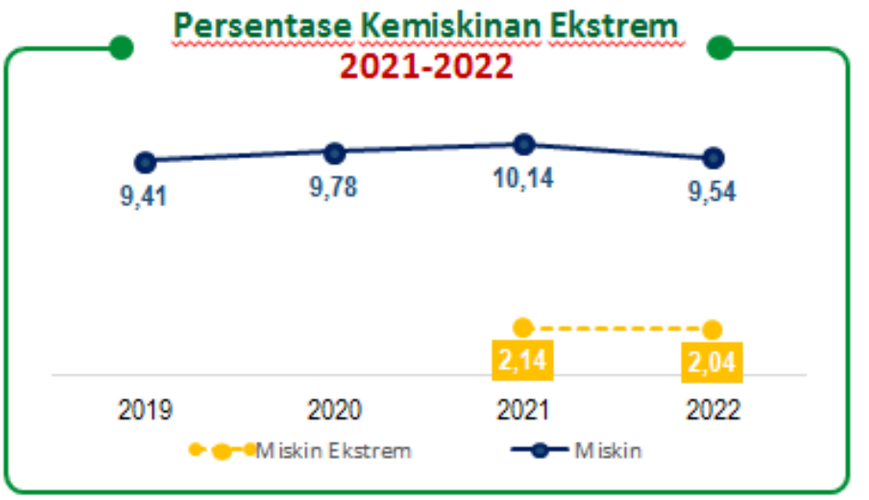

Sumber : BPS Kabupaten Sintang, diolah, 2022

Gambar 3.55 Persentase Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Sedangkan angka kemiskinan ekstrim Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data tahun 2020 adalah sebesar 2,44% dari angka kemiskinan Provinsi Kalbar sebesar 7,17%, atau dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 124.830 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk miskin Provinsi Kalbar sebanyak 366.770 jiwa.

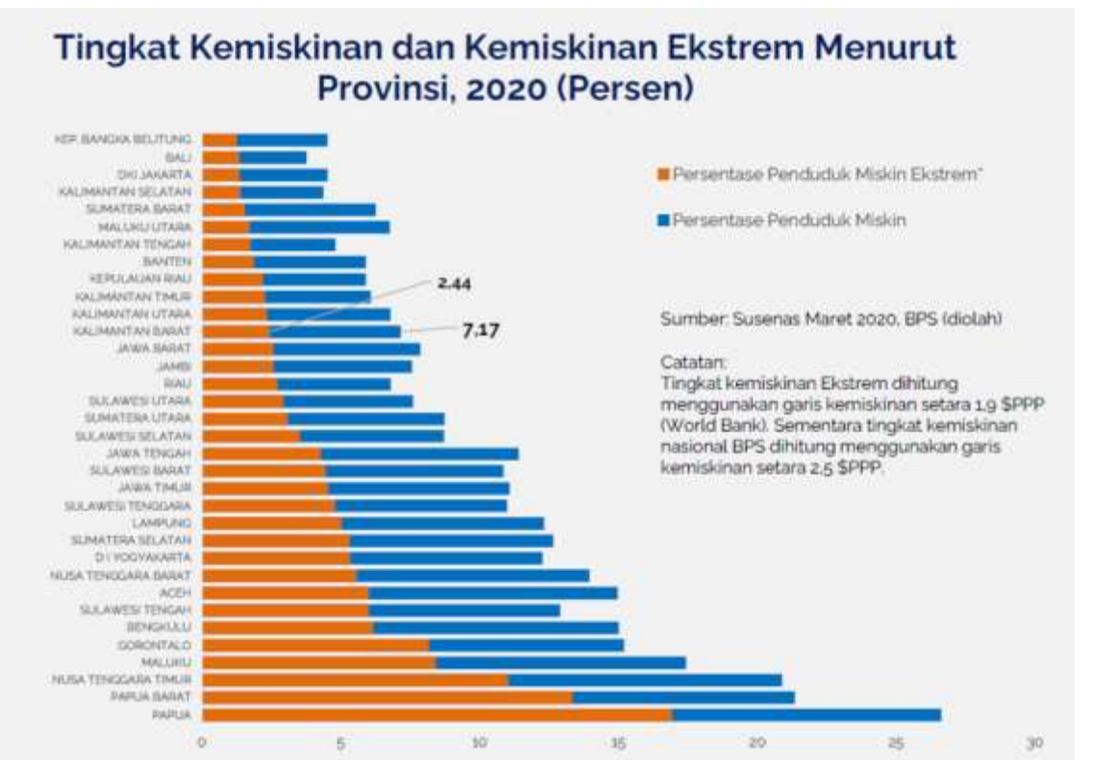

Sumber : BPS, 2022

Gambar 3.56 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Provinsi Tahun 2020

Jika mengacu kepada angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2,04% dan provinsi sebesar 2,44% hingga mencapai 3%, maka dapat diasumsikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sintang tahun 2022 yang dengan kemiskinan ekstrem mencapai sekitar 8.643 sampai dengan 12.710 jiwa. Adapun data real angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ekstrem akan dilakukan pendataan penduduk miskin ekstrem oleh BPS pada bulan September - Oktober 2022 melalui kegiatan Sensus Nasional Registrasi Sosial dan Ekonomi (Integrasi Reg Sosek).

Oleh karena itu dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres ini menginstruksikan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah agar :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :
    a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat,
    b. peningkatan pendapatan masyarakat, dan
    c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Tindak lanjut dari instruksi Presiden ini adalah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 dimana Provinsi Kalbar termasuk Kabupaten Sintang merupakan salah satu dari 302 daerah kabupaten/kota yang menjadi prioritas dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Sumber data dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah di peringkat

berdasarkan informasi kesejahteraan. Berdasarkan Kepmenko PMK 30 Tahun 2022 tersebut Sebaran Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Sintang adalah sebesar 37.446 KK atau 155.146 jiwa. Sedangkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tahun 2022 adalah sebesar 233.690 jiwa.

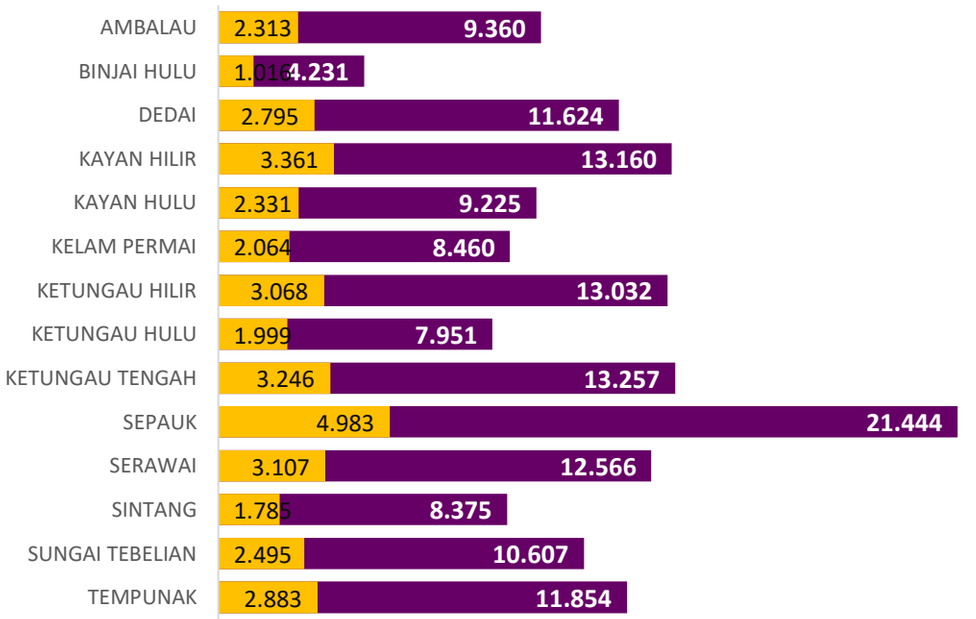

Sumber : Satgas P3KE Kepmenko PMK, 2022

Gambar 3.57 Jumlah Individu dan Keluarga P3KE Kabupaten Sintang Tahun 2022

3.2.4 Kemiskinan Mikro

Dalam dokumen analisis kemiskinan mikro menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021. Sebaran penduduk yang masuk dalam DTKS per kecamatan disajikan pada Tabel 3.8. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara absolut kecamatan yang memiliki jumlah penduduk DTKS terbanyak adalah Kecamatan Sepauk, Kayan Hilir dan Ketungau Tengah. Sementara, dari sisi persentase kecamatan yang memiliki persentase penduduk DTKS tertinggi adalah Kecamatan Ambalau, Kayan Hilir, Ketungau Hulu, Serawai dan Ketungau Tengah.

Tabel 18
Jumlah Individu DTKS Kabupaten Sintang Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk DTKS	Persentase DTKS
1	Serawai	22.771	17.007	74,69
2	Ambalau	13.259	12.261	92,47
3	Kayan Hulu	22.758	14.758	64,85
4	Sepauk	53.251	24.208	45,46
5	Tempunak	30.163	13.418	44,48
6	Sungai Tebelian	34.679	12.983	37,44
7	Sintang	77.319	18.400	23,80
8	Dedai	30.127	15.240	50,59
9	Kayan Hilir	27.562	21.011	76,23
10	Kelam Permai	18.433	12.487	67,74
11	Binjai Hulu	13.910	8.257	59,36
12	Ketungau Hilir	24.100	16.436	68,20
13	Ketungau Tengah	30.413	21.687	71,31
14	Ketungau Hulu	22.561	16.932	75,05
		421.306	225.085	53,43

Sumber : Dinsos Kabupaten Sintang, 2022

3.3 Karakteristik Kemiskinan Berdasarkan Klaster Wilayah

Kabupaten Sintang memiliki bentang wilayah dengan tutupan yang beragam dan kondisi wilayah berbeda. Hal ini berimplikasi pada perbedaan tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur atau pun kelembagaan di setiap wilayah. Rodriquez and Pose (1998); (Rustiadi et al. (2011); Hermes et al. (2017) mengungkapkan bahwa aspek wilayah sangat penting dalam pembangunan khususnya bidang sosial-ekonomi dan perubahan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu diketahui kondisi kemiskinan di Kabupaten Sintang secara topologi wilayah yang dibagi atas klaster kawasan hutan, klaster sungai, klaster pertanian dan perkebunan, dan klaster perkotaan.

3.3.1 Klaster Kawasan Hutan

Gambar 3.59 menunjukkan sebaran tingkat kemiskinan desa, yang diukur dengan jumlah penerima bantuan sosial (harusnya persentase jumlah individu DTKS terhadap jumlah penduduk) terhadap area kawasan hutan di Kabupaten Sintang (area diarsir). Semakin tinggi jumlah penerima bansos, maka gradasi warna pada peta akan semakin gelap. Berdasarkan Gambar 3.59 diketahui bahwa di kawasan hutan, sebaran tingkat kemiskinan yang lebih tinggi berada di wilayah utara Kabupaten Sintang yaitu Ketungau Hulu, Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir. Namun, di wilayah

timur (Kecamatan Kayan Hilir, Serawai dan Ambalau) memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah.

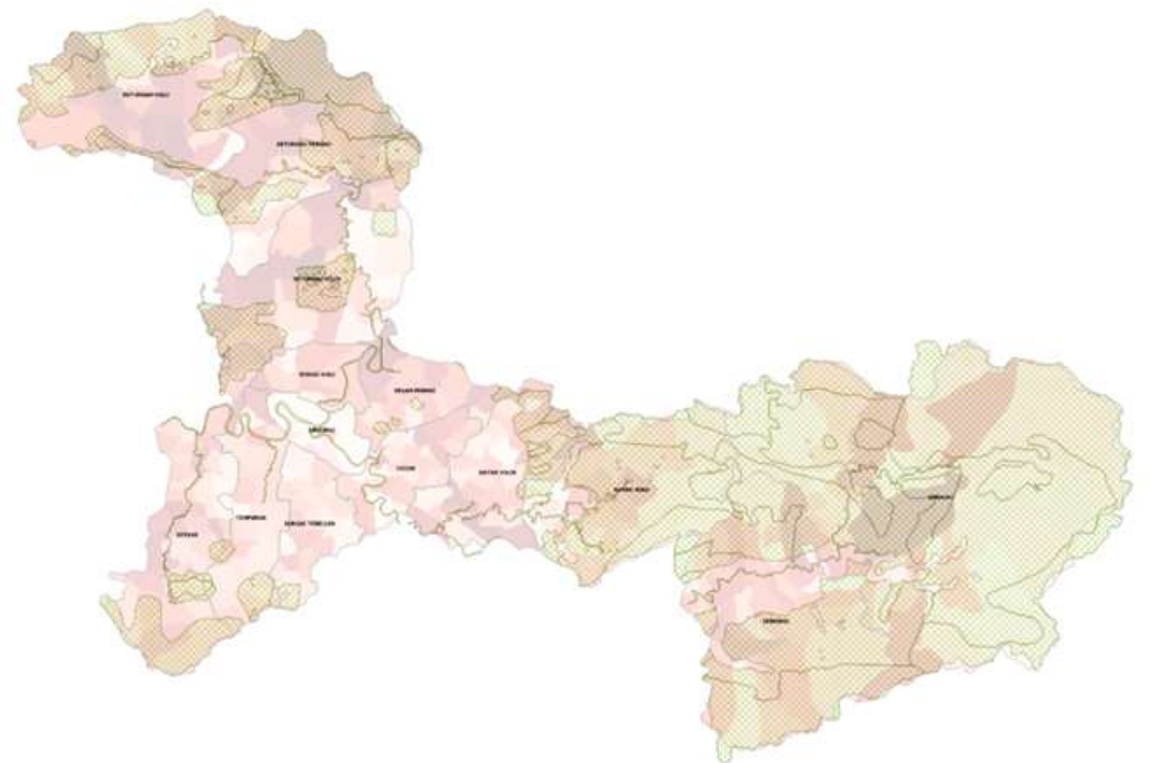

Gambar 3.58 Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Hutan

Beberapa karakteristik kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin di Kawasan Hutan antara lain:

1. Aksesibilitas wilayah yang sangat terbatas.
2. Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang susah.
3. Akses layanan kesehatan dan pendidikan terbatas.
4. Sulit memperoleh akses listrik dan telekomunikasi.
5. Tidak memiliki legalitas hak atas tanah
6. Rendahnya infrastruktur dasar terbangun

3.3.2 Klaster Kawasan Sungai

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar (Sungai Kapuas dan Melawi), sehingga memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup panjang membuat munculnya permukiman di wilayah sekitar sungai. Tipologi ini merupakan permukiman yang tumbuh secara natural. Pola permukimannya cenderung memanjang atau linier sepanjang sungai.

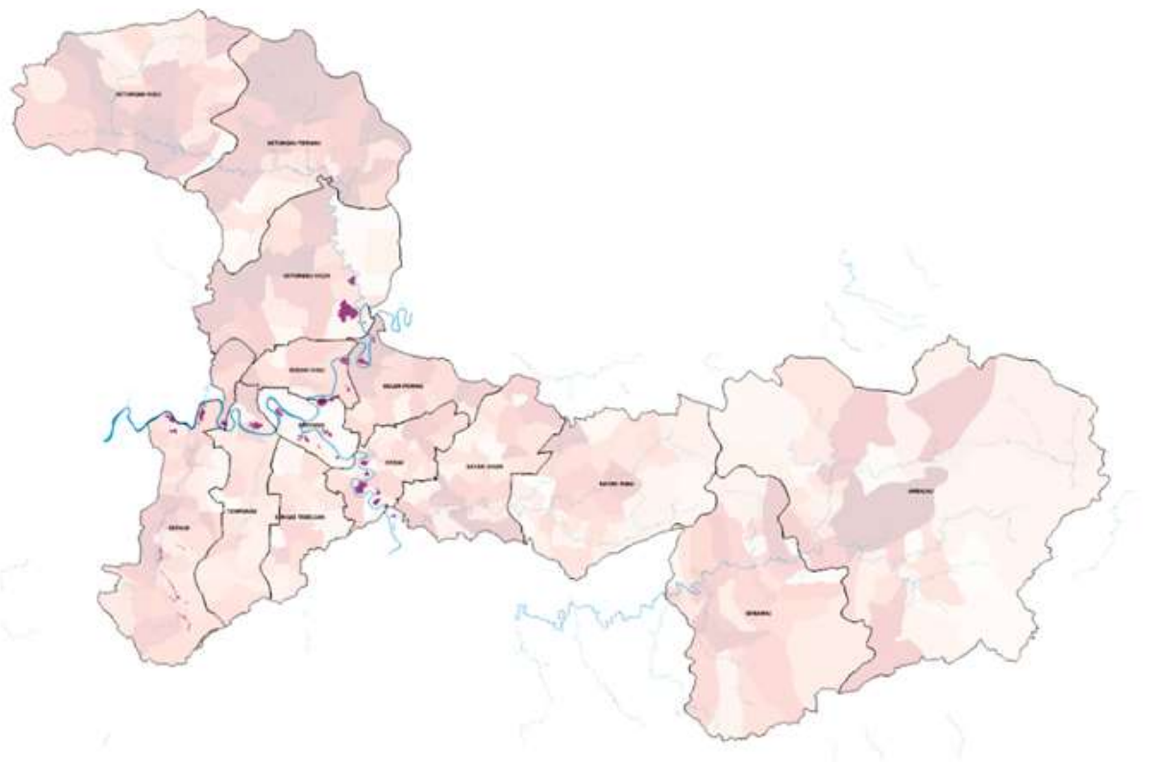

Gambar 3.59 Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Sungai

Pada Gambar 3.60 disajikan sebaran jumlah penerima bansos di desa terhadap area pertambangan yang ada di Kabupaten Sintang. Berdasarkan gambar tersebut, area pertambangan di Kabupaten Sintang tersebar di wilayah yang merupakan DAS Kapuas maupun DAS Melawi, dengan aktivitas pertambangan pasir. Pemanfaatan sungai sebagai lokasi pertambangan pasir yang termasuk kedalam bahan galian golongan C oleh masyarakat sebagai mata pencaharian untuk membangun perkonomian masyarakat.

Desa-desa yang berada pada wilayah DAS memiliki gradasi warna yang lebih terang, sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah DAS relatif lebih rendah. Namun, kenyataan bahwa adanya pertambangan pasir sebagai aktivitas masyarakat memberikan karakteristik khusus untuk klaster sungai.

Beberapa karakteristik kejadian kemiskinan di klaster sungai antara lain:

1. Kondisi permukiman yang kumuh karena pola sanitasi dan air minum yang mengandalkan air sungai
2. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang belum memadai
3. Aksesibilitas transportasi berpengaruh pada pasangg surut air sungai

3.3.3 Klaster Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Berdasarkan hasil identifikasi, beberapa karakteristik yang dialami oleh masyarakat di daerah Kawasan pertanian dan perkebunan yang dapat menjadi pemicu kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas wilayah yang sangat terbatas.
2. Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang susah.
3. Akses layanan kesehatan dan pendidikan terbatas.
4. Sulit memperoleh akses listrik dan telekomunikasi.
5. Rendahnya infrastruktur dasar terbangun
6. Akses distribusi hasil pertanian belum mendukung

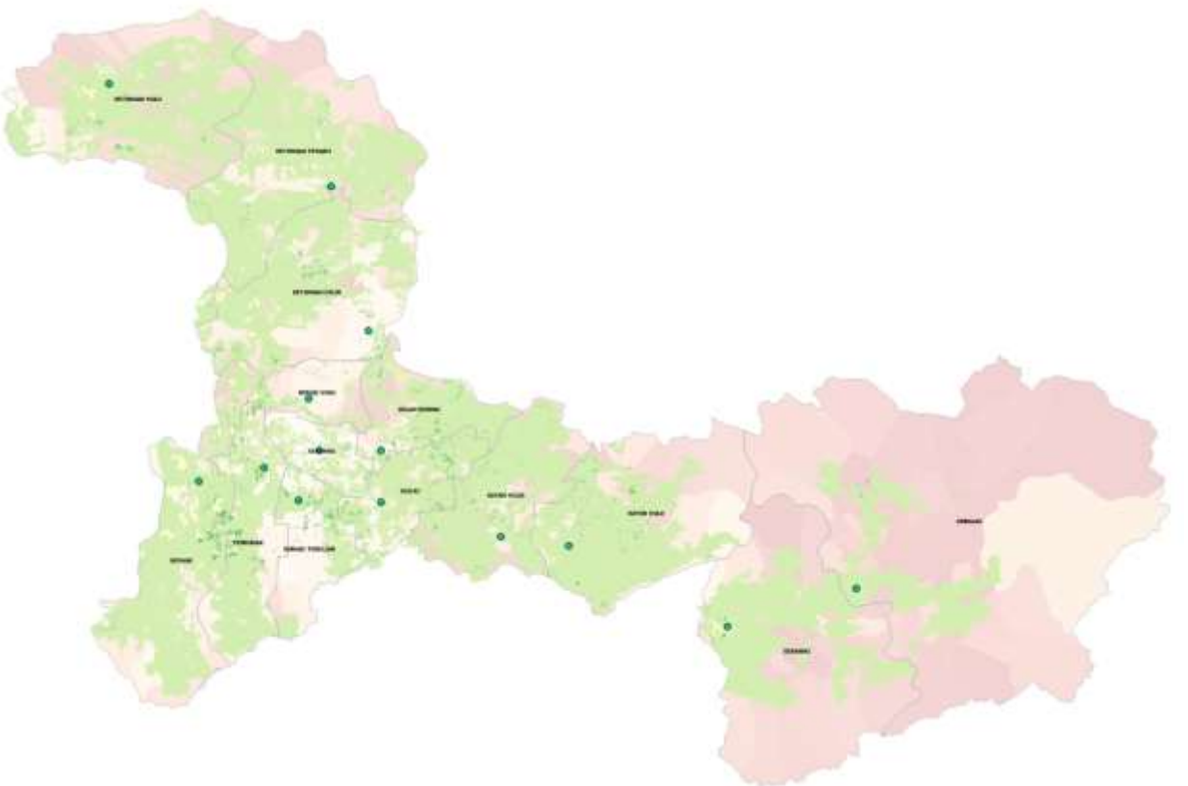

Gambar 3.60 Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Pertanian dan Perkebunan

3.3.4 Klaster Kawasan Perkotaan

Permukiman kumuh merupakan kumpulan rumah yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh biasanya ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan yang kurang memenuhi syarat layak huni. Permukiman kumuh yang terdapat di Kawasan Perkotaan Sintang terdapat dibeberapa desa, baik kumuh dari segi bangunan maupun lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang terdapat 68,2 ha wilayah di Kecamatan Sintang tergolong permukiman

kumuh. Permukiman kumuh tersebut tersebar di tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Sintang. Kecamatan dengan luas sebaran kumuh terbanyak berada di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir.

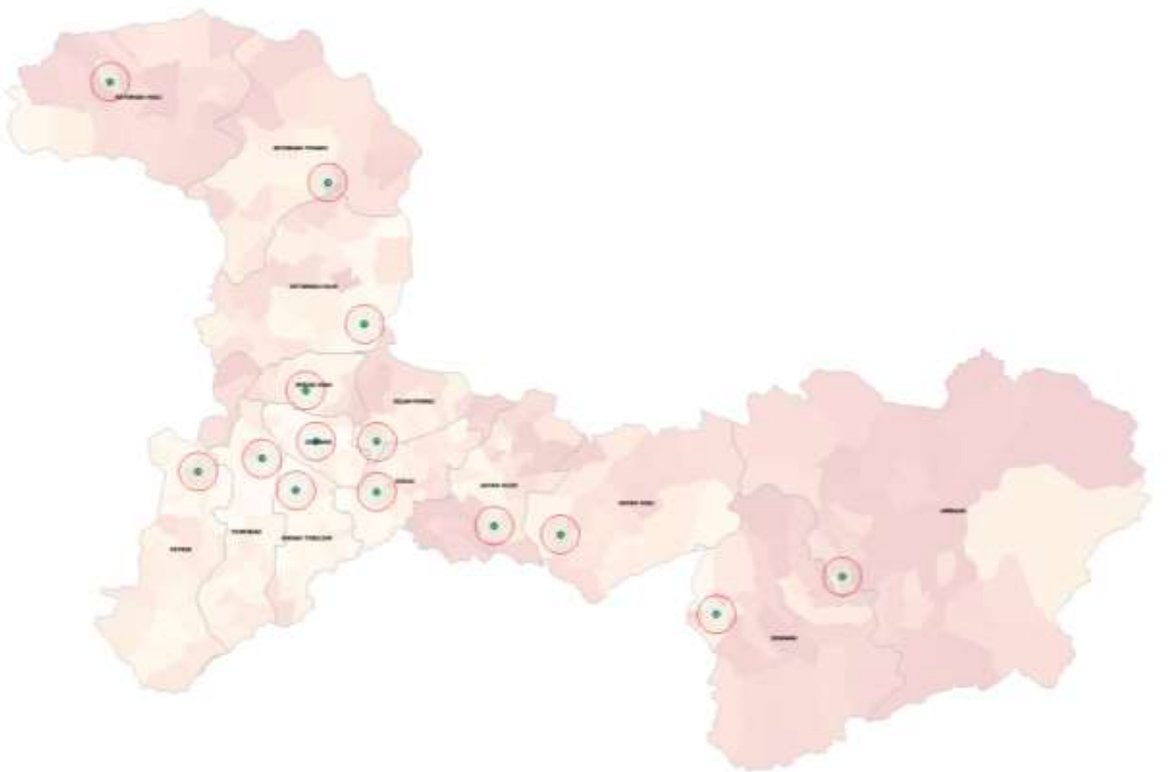

Gambar 3.61 Sebaran Tingkat Kemiskinan Klaster Kawasan Perkotaan

Kekumuhan permukiman di Kabupaten Sintang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. kepadatan penduduk yang meningkat,
2. pendapatan penduduk masih rendah,
3. perilaku masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan,
4. kurang tersedianya sarana dan prasarana permukiman seperti air minum, drainase, persampahan, sanitasi, dan proteksi terhadap kebakaran.

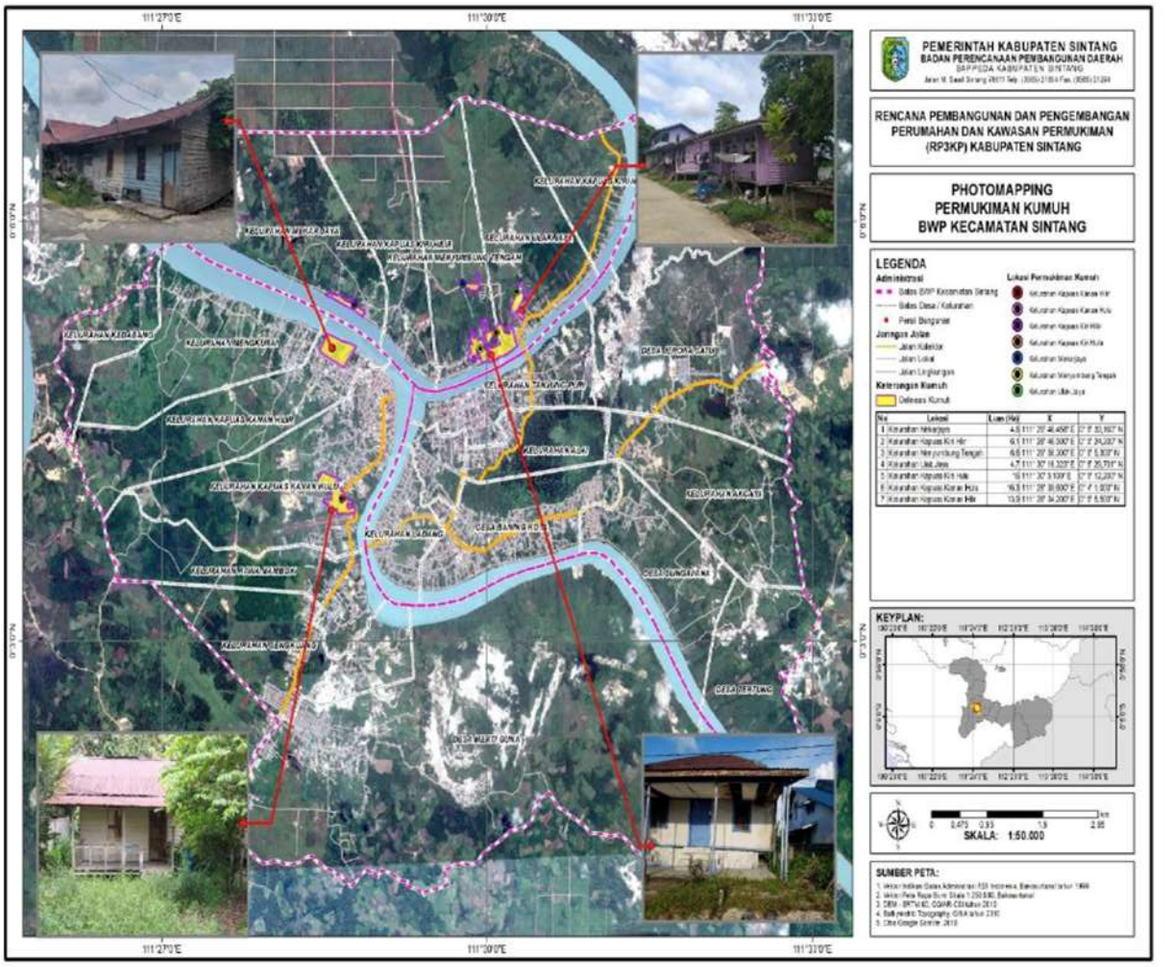

Sumber : DPRKP Kabupaten Sintang, 2022

Gambar 3.62 Photomapping Permukiman Kumuh di Kabupaten Sintang

BAB 4

PRIORITAS PROGRAM

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1 Permasalahan dan Isu Strategis Kemiskinan

4.1.1 Kondisi Ekonomi Yang Kurang Kondusif Dalam Mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu tantangan terbesar dalam bidang kemiskinan di Kabupaten Sintang adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang kurang kondusif dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan terkait dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang relevan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang adalah:

a. **Kinerja pembangunan ekonomi belum optimal mendukung penurunan kemiskinan terkait dengan: pertumbuhan ekonomi kurang inklusif, keterbatasan investasi dan tingginya inflasi.**

Dalam beberapa tahun terakhir sebelum Pandemi Covid-19 angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang berada di atas rata-rata angka nasional. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang sudah relatif baik, namun kinerka pertumbuhan ekonomi yang baik ini tidak berbanding lurus dengan kinerja pengurangan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang kurang inklusif terhadap kelompok miskin dan rentan. Di sisi lain terdapat pula persoalan rendahnya investasi di Kabupaten Sintang. Dalam beberapa tahun terakhir nilai investasi di Kabupaten Sintang tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Persoalan lain adalah tingginya inflasi di Kabupaten Sintang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sintang tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

b. **Meningkatnya angka pengangguran akibat dampak Pandemi Covid-19**

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang tidak luput dari masalah kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Efek Covid-19 merupakan efek yang sangat luar biasa yang berdampak pada pendapatan masyarakat dan hal-hal yang ditimbulkan antara lain lapangan kerja yang semakin sedikit di segala sektor baik pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan sektor lainnya. Pemerintah memperkirakan penurunan pendapatan masyarakat mencapai titik terendah sampai kisaran 75 – 80 % dan yang paling berdampak adalah pada sektor usaha kecil menengah

(UKM) dan pariwisata. Tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus dan atau tingkat Pendidikan yang rendah pada sektor UKM dan pariwisata juga banyak terkena dampak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan atau dirumahkan dikarenakan mengalami seleksi alami dalam persaingan kualitas dan loyalitas kerja, sehingga hal ini memunculkan masalah baru dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

4.1.2 Keterbatasan Masyarakat Miskin Dalam Mengkases Pelayanan Dasar

Ketidakmampuan dalam pemenuhan pelayanan dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada tingginya kemiskinan. Pelayanan dasar yang memadai dan menjangkau kelompok miskin dan rentan merupakan prakondisi agar kelompok ini dapat meningkatkan taraf kehidupannya secara bermartabat. Secara khusus isu-isu strategis dalam pelayanan dasar di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

a. **Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan terkait dengan : banyaknya penduduk tidak memiliki KK, banyaknya penduduk tidak memiliki KTP dan masih rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran.**

   Luasnya wilayah geografis Kabupaten Sintang, Infrastruktur jalan yang belum memadai, dan besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk dapat tiba di pusat pelayanan adminduk menjadi penyebab utama masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Sintang yang belum memiliki dokumen Adminduk. Banyaknya penduduk miskin dan rentan yang belum memiliki KK dan KTP dapat berakibat pada keterbatasan dalam mengakses berbagai program dan bantuan dari pemerintah. Di sisi lain rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan juga dapat menghambat akses anak-anak dalam mendapatkan berbagai pelayanan termasuk pendidikan dan kesehatan.

b. **Belum optimalnya layanan pendidikan masyarakat miskin dan rentan terkait dengan: rendahnya tingkat partisipasi sekolah, tingginya angka putus sekolah dan rendahnya aksesibilitas.**

   Rendahnya tingkat partisipasi sekolah, tingginya angka putus sekolah dan rendahnya aksesibilitas bagi penduduk miskin dan rentan merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan bagi pendidikan. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada kemampuan dan potensi penduduk miskin dan rentan untuk dapat berkembang dan meningkatkan taraf kehidupannya.

c. **Belum optimalnya layanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan terkait dengan: rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, rendahnya status gizi masyarakat, tingginya potensi penyebaran penyakit menular, dan ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan.**

Tingginya kematian ibu dan anak, tingginya penyakit menular, tingginya prevalensi wasting dan stunting, tingginya potensi penularan penyakit menular terutama TBC, dan ketidakmampuan masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses fasilitas kesehatan merupakan faktor-faktor dalam bidang kesehatan yang secara langsung mempengaruhi rendahnya derajat kesehatan penduduk miskin dan rentan. Jika derajat kesehatan rendah maka penduduk miskin dan rentan akan mengalami kesulitan untuk dapat beraktivitas yang memungkinkan untuk peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik.

d. **Belum optimalnya layanan infrastruktur dasar dan wilayah pada masyarakat miskin dan rentan terutama terkait dengan sulitnya mengakses air bersih, sanitasi yang tidak layak, ketiadaan listrik, dan keterbatasan transportasi.**

Persoalan layanan infrastruktur yang masih menjadi isu bagi penduduk miskin dan rentan adalah sulitnya mengakses air bersih, sanitasi yang tidak layak dan rumah tidak layak huni. Ketiga hal ini berakibat penduduk miskin dan rentan hidup dalam kondisi yang tidak layak dari sisi lingkungan dan permukiman. Jika penduduk miskin dan rentan hidup dalam kondisi lingkungan dan permukiman yang tidak layak maka penduduk miskin akan kesulitan dalam mengembangkan penghidupan yang lebih baik.

4.1.3 Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial Yang Belum Komprehensif

Perlindungan sosial merupakan upaya negara dalam melindungi segenap warga negaranya. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Persoalan perlindungan sosial dan pemberdayaan soaial yang belum komprehensif menjadi salah satu isu krusial dalam penanggulangan kemiskinan. Isu-isu strategis terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial adalah:

a. **Rendahnya cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terkait dengan: keterbatasan anggaran daerah untuk program bantuan dan jaminan, adanya overlapping penerimaan program perlindungan dan bantuan sosial.**

Kondisi ini menyebabkan masih adanya ketimpangan sosial seperti jumlah masyarakat rentan terkategori miskin yang tidak tertangani/terlayani dalam usaha kesejahteraan sosial menyebabkan jumlah PPKS berpotensi terus bertambah.

b. **Rendahnya akurasi program bantuan sosial dan jaminan sosial terkait dengan: kurangnya koordinasi dan komunikasi, rendahnya kewenangan dan kinerja pekerja sosial dan pekerja sosial, dan data DTKS yang kurang akurat.**

Permasalahan koordinasi dan koordinasi dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial atau bantuan sosial merupakan salah satu akar masalah untuk perbaikan akurasi program. Selain itu, masih terdapat permasalahan rendahnya kewenangan dan kinerja pekerja sosial sebagai ujung tombak pelaksaan program di lapangan. Di sisi lain, salah satu persoalan rendahnya akurasi dalam program dikarenakan masih adanya data inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan perlindungan sosial tidak tepat sasaran sehingga intervensi program dan kegiatan tidak berjalan secara maksimal.

c. **Rendahnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terkait dengan: kurangnya fasilitasi/sarana binaan PPKS, kurangnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Kurangnya fasilitasi/sarana binaan PPKS merupakan hal harus menjadi perhatian. Hal ini harus dipenuhi dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan PPKS. Begitupula dengan dukungan dari PSKS baik di tingkat Kabupaten sampai ke tingkat desa/kelurahan. permasalahan kedua akar penyebab tersebut akan berakibat rendahnya penanganan PPKS yang berdampak pada perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial yang belum komprehensif.

d. **Tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana terkait dengan: rendahnya kesiap-siagaan bencana, banyaknya kejadian bencana, dan banyaknya kawasan risiko bencana.**

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara bencana dengan kemiskinan. Kejadian bencana seringkali menimbulkan dampak meningkatnya tingkat kemiskinan. Banjir, longsor, kebakaran hutan dan kejadian bencana lain berpotensi untuk merusak sumber penghidupan masyarakat. Selain itu kejadian bencana setingkali juga merusak permukiman penduduk. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dalam konteks perlindungan sosial terhadap penduduk terdampak bencana selain memperkuat kesiap-siagaan penduduk dalam menghadapi risiko bencana.

4.1.4 Terbatasnya Akses Masyarakat Miskin dan Rentan Dalam Mengembangkan Penghidupan Secara Layak dan Berkelanjutan

Berdasarkan analisis pada Bab sebelumnya, isu-isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan penghidupan secara berkelanjutan adalah :

a. **Masih rendahnya tingkat pendapatan serta terbatasnya Akses dan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin**, antara lain terkait dengan :
   1. Rendahnya kualitas tenaga kerja masyarakat miskin dan rentan miskin yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, masih rendahnya tenaga terampil dan terlatih dan masih terbatasnya sarana dan akses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
   2. Rendahnya produktifitas kerja yang disebabkan oleh masih kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, dan masih rendahnya budaya dan semangat kerja; dan
   3. Terbatasnya akses dan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh mayoritas pekerjaan dan lapangan usaha masyarakat miskin dan rentan yang ada di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan tradisional, belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi mikro, terbatasnya akses dan sumber permodalan dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

b. **Rendahnya Keberagaman dan Keseimbangan Konsumsi Pangan Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin terkait dengan rendahnya pemenuhan konsumsi pangan, rendahnya produktivitas pertanian dan rendahnya daya jual hasil pertanian.**

   Rendahnya pemenuhan konsumsi pangan, rendahnya produktivitas pertanian dan daya jual hasil pertanian yang juga masih rendah menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Asumsi yang digunakan adalah ketika masyarakat miskin dan rentan miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, maka akan berdampak pada pemenuhan gizi, yang selanjutnya dapat mempengaruhi produktivitas kerja dalam meningkatkan taraf hidup.

c. **Rendahnya akses penghidupan berkelanjutan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang terkait dengan: banyaknya desa dalam kawasan hutan, implementasi skema**

Perhutanan Sosial belum optimal, belum adanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, dan akses Hasil Hutan Bukan Kayu belum optimal.

Hutan merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Wilayah Kabupaten Sintang yang didominasi oleh kawasan hutan baik produksi maupun lindung memungkinan interaksi yang sangat tinggi antara masyarakat dengan kawasan hutan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, dapat diidentifikasi bahwa kawasan hutan belum dapat memberikan penghidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan di dalam dan kawasan hutan. Hal ini dapat disebabkan karena masih banyaknya desa dalam kawasan hutan, implementasi skema Perhutanan Sosial belum optimal, belum ada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, dan akses Hasil Hutan Bukan Kayu belum optimal.

d. **Masih kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan** yang terkait dengan :
   1. Pengembangan Bumdes belum berjalan optimal yang disebabkan oleh sumber daya manusia pengelola yang kurang profesional, serta masih kurangnya kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola BUMDes;
   2. Pemanfaatan dana desa yang belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, dan masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana desa; dan
   3. Pengembangan produk unggulan lokal/desa yang belum optimal yang disebabkan oleh belum maksimal dilakukannya identifikasi dan penyusunan produk unggulan lokal/desa (Prudes) dan belum dilakukan analisa/mapping kelayakan usaha.
   4. Pengembangan Desa Wisata belum optimal yang disebabkan oleh belum optimalnya penggunaan dana desa dan belum ada investor, serta kondisi infrastruktur yang buruk.

4.1.5 Rendahnya Efektivitas Program dan Kegiatan Penanggulanan Kemiskinan

Bertalian erat dengan fakta bahwa pada periode RPJMD 2014-2019, APBD Kabupaten Sintang belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka dapat dianalisa permalalahan-permasalahan mendasar di dalamnya sebagai berikut;

a. **Belum optimalnya fungsi perencanaan dan penganggaran daerah dalam mendukung percepatan penanggulangan daerah terkait dengan : belum adanya road map (peta jalan) penanggulangan kemiskinan, lemahnya desain program dan kegiatan**

penanggulangan kemiskinan, kurang efektinya penganggaran program penanggulangan kemiskinan, ketidaktepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif merupakan kunci dari keberhasilan percepatan penanggulangan kemiskinan. Proses perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam penanggulangan hanya dapat dilaksanakan dengan berbagai dukungan antara lain adanya road map yang penanggulangan kemiskinan yang jelas dan terukur, desain program dan kegiatan penanggulangan yang baik, efektivitas dalam penganggaran dalam program penanggulangan kemiskinan dan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

b. **Belum ada sistem pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang memadai terkait dengan: lemahnya koordinasi, kurang optimalnya fungsi TKPD, lemahnya kerjasama antar stakeholder.**

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sistem pendukung yang memadai. Sistem pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prasyarat dan prakondisi agar kebijakan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

4.2 Determinan Kemiskinan

4.2.1 Determinan Kemiskinan pada Aspek Ekonomi Makro

Permasalahan dan isu strategis penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang yang telah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan penajaman permasalahan dan penyebab masalah. *Theory of Change* (ToC) digunakan sebagai logika berpikir yang menguraikan ekspresi dari urutan tindakan sebab-akibat atau kejadian pada berbagai dimensi kemiskinan yang terjadi. Selanjutnya, sumber daya organisasi dan keuangan yang tersedia diasumsikan akan diubah menjadi hasil sosial yang diinginkan. Dengan demikian maka ToC setiap dimensi kemiskinan dapat memberikan gambaran determinan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sintang.

Kondisi ekonomi yang kondusif merupakan prasyarat dan prakondisi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Tanpa kondisi ekonomi yang kondusif maka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akan sulit dilakukan. Dalam konteks ekonomi, permasalahan ekonomi di Kabupaten Sintang yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan disajikan adalah:

Kinerja pembangunan ekonomi belum optimal dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan: pertumbuhan ekomomi yang kurang inklusif, keterbatasan investasi dan tingginya inflasi. Permasalahan ekonomi dan akar masalah yang dapat diidentifikasi disajikan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 4.1 Determinan Kemiskinan Aspek Pertumbuhan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi yang kurang inklusif

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek pembangunan yang penting. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan salah satu kunci agar kelompok miskin dan rentan dapat terlibat atau mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif di Kabupaten Sintang diindentifikasi karena pertumbuhan ekonomi selama ini lebih banyak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi pada sektor padat modal. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan keterlibatan kelompok miskin dan rentan.

b. Keterbatasan Investasi

Investasi merupakan salah satu pendorong pembangunan ekonomi daerah. Investasi yang memadai dapat mendukung perkembangan suatu daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi di Kabupaten Sintang sudah mengalami peningkatan namun demikian dibandingkan kebutuhan secara total masih dianggap terbatas. Hasil identifikasi menujukkan bahwa investasi yang terjadi selama masih bertumpu pada investasi dalam negeri (PMDN).

c. Tingginya Inflasi

Inflasi merupakan salah satu permasalahan krusial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang. Rata-rata inflasi di Kabupaten Sintang merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan tingginya angka inflasi ini maka Garis Kemiskinan Kabupaten Sintang juga naik cukup tinggi sehingga potensi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi semakin besar. Dapat diidentifikasi bahwa tingginya inflasi di Kabupaten Sintang disebabkan oleh adanya ketergantungan produk dari luar daerah dan permasalahan kelangkaan.

4.2.2 Determinan Kemiskinan pada Aspek Pengangguran Dampak Pandemi Covid-19

Dampak Pandemi Covid masih terasa hingga saat ini termasuk dalam hal perekonomian. Salah satu dampak yang harus menjadi perhatian adalah meningkatnya angka pengangguran dikarenakan sektor-sektor ekonomi yang terdampak Pandemi Covid-19. Secara umum permasalahan peningkatan pengangguran akibat Pandemi Covid-19 dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

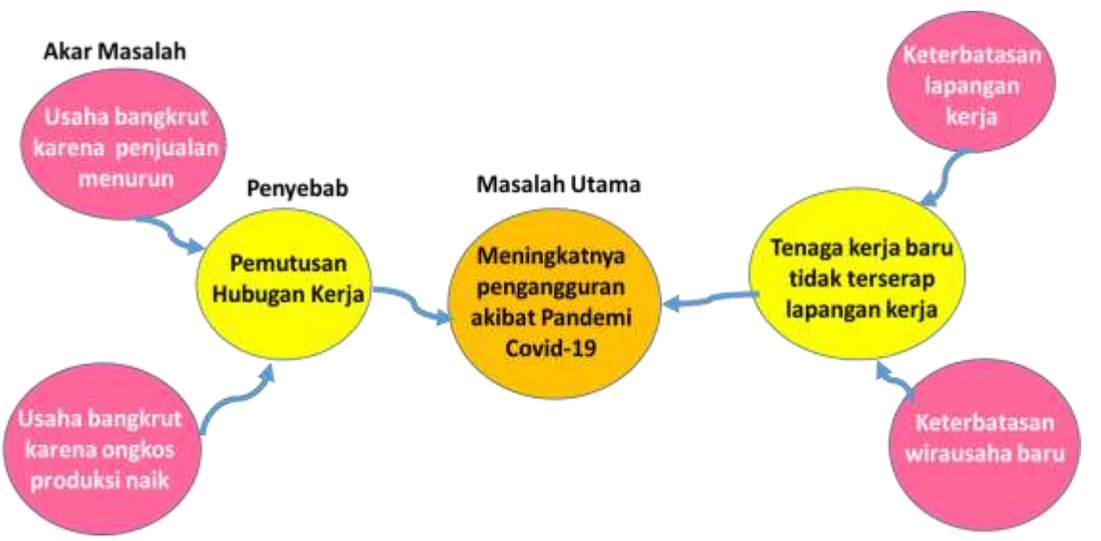

Gambar 4.2 Determinan Kemiskinan Aspek Pengangguran Dampak Pandemi Covid-19

a. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu dampak ekonomi yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang. Banyaknya kasus PKH ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran dalam beberapa tahun ini. Secara umum PHK terjadi dikarenakan usaha yang bangkrut karena penjualan atau permintaan pasar menurun dan usaha bangkrut karena ongkos produksi mengalami kenaikan.

b. Tenaga Kerja Baru Tidak Terserap Lapangan Kerja

Dampak Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian adalah tidak tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang menyebabkan tenaga kerja baru tidak terserap di pasar kerja. Hal ini terjadi karena sektor-sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 mengalami kontraksi sehingga tidak dapat menumbuhkan pekerjaan baru. i sisi lain, keberbatasan wirausaha baru juga ikut mempengaruhi tidak terserapnya tenaga kerja baru. Pasca Pandemi Covid-19 wirausaha baru di Kabupaten Sintang sangat terbatas sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan tenaga kerja baru.

4.2.3 Determinan Kemiskinan pada aspek Pendidikan

Kemiskinan akan sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul salah satunya karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Dengan demikinan menjadi sangat penting bagi setiap orang untuk memiliki pendidikan yang layak dan memadai sehingga diharapkan akan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, berpeluang untuk mendapat pekerjaan yang layak, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang layak. Sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas, menyebabkan pilihan pekerjaan menjadi terbatas, serta membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Secara lengkap permasalahan kemiskinan terkait dengan pendidikan dapat dilihat pada analisa pohon masalah di bawah ini:

Gambar 4.3 Determinan Kemiskinan Aspek Pendidikan

Dari analisa di atas, permasalahan utama dalam pendidikan dalam konteks kemiskinan adalah rendahnya akses layanan pendidikan yang disebabkan oleh: rendahnya tingkat Tingkat Partisipasi Pendidikan, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka buta huruf dan rendahnya aksesibilitas. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. **Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan**

Rendahnya APM/APK menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah bagi masyarakat miskin dan rentan. Di Kabupaten Sintang, persoalan rendahnya APM/APK dalam dokumen ini difokuskan pada tingkat PAUD dan SMP sederajat.

b. **Tingginya angka putus sekolah**

Tingginya anak putus sekolah merupakan persoalan pendidikan di Kabupaten Sintang yang terkait dengan ketidakmampuan masyarakat miskin dan rentan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Dalam analisa ini ditemukan akar masalah tingginya anak putus sekolah yang terkait dengan: rendahnya pendidikan orang tua, anak membantu orang tua bekerja, dan ketiadaan biaya.

Dalam permasalahan membantu orang tua bekerja, fenomena ini dapat ditemui di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sintang. Secara umum, sektor pertanian dalam arti luas sektor yang dominan di Kabupaten Sintang hal yang cenderung membutuhkan tenaga kerja yang cukup intensif. Pilihannya kemudian bagi keluarga miskin dan rentan, dalam melaksanakan pekerjaan dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan akan dibantu oleh anak-anak mereka. Hal ini yang menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan akan terbatas waktunya untuk dapat bersekolah dikarenakan sebagian besar waktunya habis untuk bekerja membantu orang tua mereka.

Terkait dengan keterbatasan peran orang tua, persoalan ini sangat terkait dengan permasalahan kesadaran orang tua yang sangat terbatas akan arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini terjadi umumnya karena orang tua dari keluarga miskin dan rentan umumnya juga berpendidikan rendah sehingga orang tua kurang dapat memotivasi anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang tinggi.

Dalam hal keterbatasan biaya, secara umum sebenarnya biaya sekolah sebenarnya telah digratiskan oleh pemerintah melalui BOS dan skema yang lain, namun dalam praktiknya seringkali masyarakat miskin dan rentan masih mengalami permasalahan dengan biaya-biaya pendukung. Biaya-biaya pendukung tersebut adalah: biaya seragam, tas dan sepatu, buku, dan yang paling penting adalah biaya transportasi dari rumah menuju sekolah.

c. **Tingginya angka buta huruf**

Tingginya angka buta huruf masih menjadi permasalahan pendidikan di Kabupaten Sintang. Secara umum, buta huruf dapat menghambat masyarakat miskin dan rentan mengembangkan kapasitasnya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Tingginya angka buta huruf di Kabupaten Sintang diidentifikasi karena rendahnya motivasi untuk sekolah dan terbatasnya sarana belajar.

D. **Rendahnya aksesibilitas**

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh fasilitas pelayanan termasuk pendidikan. Kondisi wilayah hunian yang terpencil dan terisolasi di Kabupaten Sintang disebabkan karena konektivitas wilayah yang tidak optimal, topografi yang bergunung, posisi wilayah yang berada di kawasan hutan dan buruknya kondisi jalan sehingga arus distribusi barang dan pergerakan orang terbatas.

Kondisi-kondisi di atas menyebabkan jarak fasilitas pendidikan dengan area permukiman menjadi jauh dan tidak terjangkau terutama penduduk miskin dan rentan. Di sisi lain, kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sarana transportasi dari permukiman menuju fasilitas pendidikan sehingga menyulitkan kelompok miskin dan rentan dapat mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

4.2.4 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Kesehatan

Kemiskinan sangat terkait dengan persoalan kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan identik dengan lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat, perilaku dan kesadaran hidup sehat yang rendah, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Semakin miskin dan kumuh sebuah komunitas masyarakat, bisa dipastikan derajat kesehatan mereka pun rendah, tak peduli mereka memiliki kartu berobat gratis atau tidak. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan inisiatif hidup sehat masyarakat miskin dan rentan akibat keterbatasan pengetahuan dan informasi.

Secara lengkap permasalahan kemiskinan terkait dengan kesehatan dapat dilihat pada analisa pohon masalah di bawah ini:

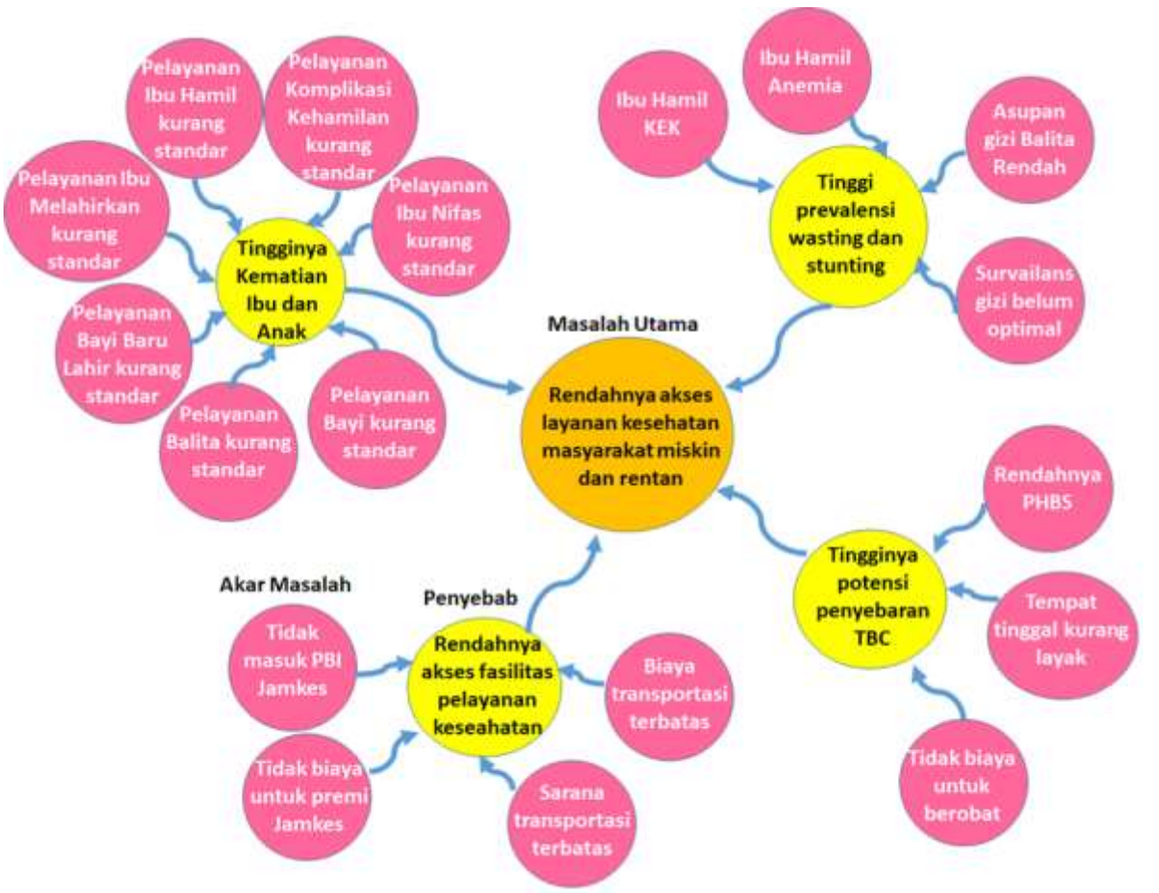

Gambar 4.4 Determinan Kemiskinan Aspek Kesehatan

Dari analisa di atas, secara umum persoalan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan adalah rendahnya akses layanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan yang disebabkan oleh: tingginya angka kematian Ibu dan Anak, tingginya prevalensi wasting dan stunting, tingginya penyakit menular (TBC), dan rendahnya akses masyarakat miskin dan rentan ke fasilitas kesehatan.

a. Tingginya kematian ibu dan anak

Masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Sintang disebabkan beberapa hal. Secara umum terkait kematian ibu dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat pelayanan yang kurang standar terkait pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu melahirkan, pelayanan nifas dan pelayanan komplikasi. Hal-hal ini dapat ditandai dengan masih banyak ibu yang enggan memeriksakan kehamilannya dengan frekuensi kunjungan 6 kali selama masa kehamilan, rendahnya pemahaman ibu tentang perawatan selama hamil, perawatan bayi dan semasa nifas. tingkat kesadaran masyarakat terhadap persalinan yang aman masih rendah

Rendahnya atau kurang standarnnya berbagai pelayaan di atas membuat ibu hamil kurang mendapatkan informasi dan pemahaman tentang perawatan yang tepat selama

hamil, perawatan bayi dan semasa nifas. Ibu hamil yang mengalami pendarahan, hipertensi dan penyakit lainnya yang menjadikan munculnya komplikasi kehamilan dan persalinan. Banyaknya ibu hamil yang tidak mengetahui tanda-tanda bahaya selama kehamilan, berdampak pada kematian ibu dan anak yang baru lahir.

Terkait dengan tingginya kematian anak di Kabupaten Sintang, dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat pelayanan yang kurang standar terkait pelayanan bayi baru lahir, pelayanan bayi dan pelayanan balita.

b. Tingginya Angka Prevalensi Wasting dan Stunting

Tingginya Prevalensi stunting di Kabupaten Sintang terkait dengan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada priode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dalam analisa ini ditemukan tiga hal akar masalah tingginya prevalensi stunting yaitu terkait dengan: Rendahnya Gizi ibu Hamil. Rendahnya tingkat Pendidikan dan pengaruh lingkugan.

Dalam hal rendahnya gizi ibu hamil, maka faktor yang mempengaruhi adalah masih kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang pada saat hamil, Rendahnya status gizi ibu hamil tersebut mempengaruhi keadaan kesehatan dan perkembangan janin. Gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan dapat menyebabkan berat badan rendah sehingga mempunyai resiko untuk menjadi anak stuting.

Selain rendahnya gizi ibu hamil, tingkat Pendidikan turut mempengaruhi peluang anak lahir stunting. Tingkat pendidikan ibu yang rendah banyak dialami ibu yang tinggal di daerah terpencil dengan akses pendidikannya sulit dan didukung faktor kemiskinan. Kegiatan sekolah ibu hamil maupun sekolah pengantin merupakan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ibu hamil dan calon ibu memahami tentang penyebab anak lahir stunting dan dampak bagi anak apabila terlahir stunting. Faktor pengaruh lingkungan berdampak besar pula anak lahir stunting, budaya masyarakat yang masih kuat, masih mempercayai mitos atau kebiasaan-kebiasaan ibu. Kesulitan mengakses air minum yang layak, sanitasi yang tidak layak. Kondisi ini mempengaruhi kejadian infeksi karena sanitasi yang buruk, kejadian penyakir diare dan cacingan misalkan pada anak dapat menggangu proses penyerapan nutrisi makan, menyebabkan penurunan berat badan bayi dan balita.

c. Tingginya penyakit menular (TBC).

Tingginya penyakit menular ditimbulkan oleh masalah rendahnya kesehatan lingkungan. Padahal kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat desehatan terutama dalam mencegah tingginya penyakit menular sangat penting, masih burukya

sanitasi khususnya pada konsidi perumahan yang padat hunian dan lebih banyak dihuni oleh masyarakat miskin, sulitnya mengakses air berih akan semakin menambah tingginya potensi penyebaran penyakit menular.

Terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, kurangnya ketersediaan air bersih dan masih tingginya kegiatan BAB buang air besar sembarangan (BABS) atau masih rendanya open defecation free (ODF), menjadi hal yang banyak mempengaruhi semakin tingginya penyebaran penyakit menular. Diperlukan pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat dalam memutus rantai penyebaran penyakit menular.

D. Rendahnya akses ke fasilitas kesehatan

Akses masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Sintang masih menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan rendahnya srjat kesehatan masyarakat miskin dan rentan. Beberapa akar masalah yang dapat diidentifikasi terkait rendahnya akses ke fasilitas kesehatan ini adalah: penduduk miskin dan rentan belum seluruhnya masih dalam daftar PBI jaminan kesehatan, masyarakat miskin dan rentan tidak memiliki biaya untuk membayar premi jaminan kesehatan, terbatasnya sarana transportasi menuju fasilitas kesehatan dan tidak ada biaya untuk menuju fasilitas kesehatan. Hal-hal di atas menyebabkan masyarakat miskin dan rentan semakin sulit dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

4.2.5 Determinan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang paling penting. Hal ini dikarenakan pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan kemiskinan konsumsi. Pendekatan pengukuran kemiskinan konsumsi menggunakan ukuran kosumsi makanan dengan proporsi sekitar 70%. Dengan demikian ketahanan pangan memiliki posisi yang sangat strategis dalam percepatan penanggulanan kemiskinan.

Berdasarkan peta kerawanan pangan yang disajikan di bab sebelumnya, telah diidentifikasi beberpa kecamatan yang termasuk dalam kawasan rawan pangan. Secara lebih mendetil permasalaham kerawanan pangan di Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

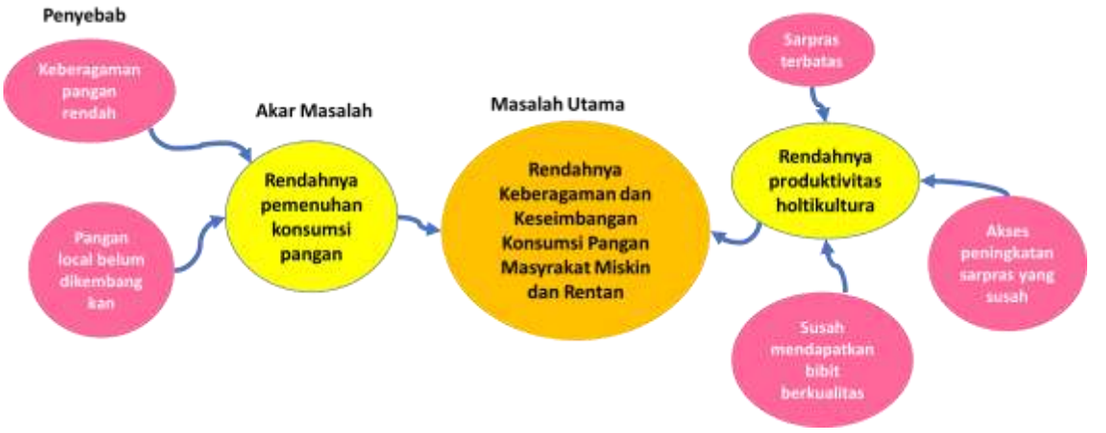

Gambar 4.5 Determinan Kemiskinan Aspek Ketahanan Pangan

a. Rendahya pemenuhan konsumsi pangan

Masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Sintang disebabkan beberapa hal. Secara umum terkait kematian ibu dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat pelayanan yang kurang standar terkait pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu melahirkan

b. Rendahya produktivitas hortikultura

Masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Sintang disebabkan beberapa hal. Secara umum terkait kematian ibu dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat pelayanan yang kurang standar terkait pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu melahirkan,

4.2.6 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Infrastruktur Dasar Dan Wilayah

Infrastruktur dasar dan wilayah sangat berkaitan dengan aspek determinan kemiskinan lainnya baik itu aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Kondisi akses air minum dan sanitasi serta hunian yang layak pada sebuah komunitas akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat yang bermukim pada wilayah itu yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada sumber daya manusia yang ada pada komunitas tersebut, terutama akan berdampak pada anak yang merupakan harapan keluarga untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik di sebuah keluarga.

Infrastruktur dasar merupakan instrument pendukung untuk mengatasi determinan kemiskinan pada aspek kesehatan dan pendidikan. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin dan rentan yang disebabkan oleh tingginya prevalensi stunting dan tingginya penyakit menular sangat erat kaitannya dengan kondisi akses air minum dan sanitasi masyarakat.

Secara lengkap permasalahan kemiskinan terkait dengan infrastruktur dasar dapat dilihat pada analisa pohon masalah di bawah ini:

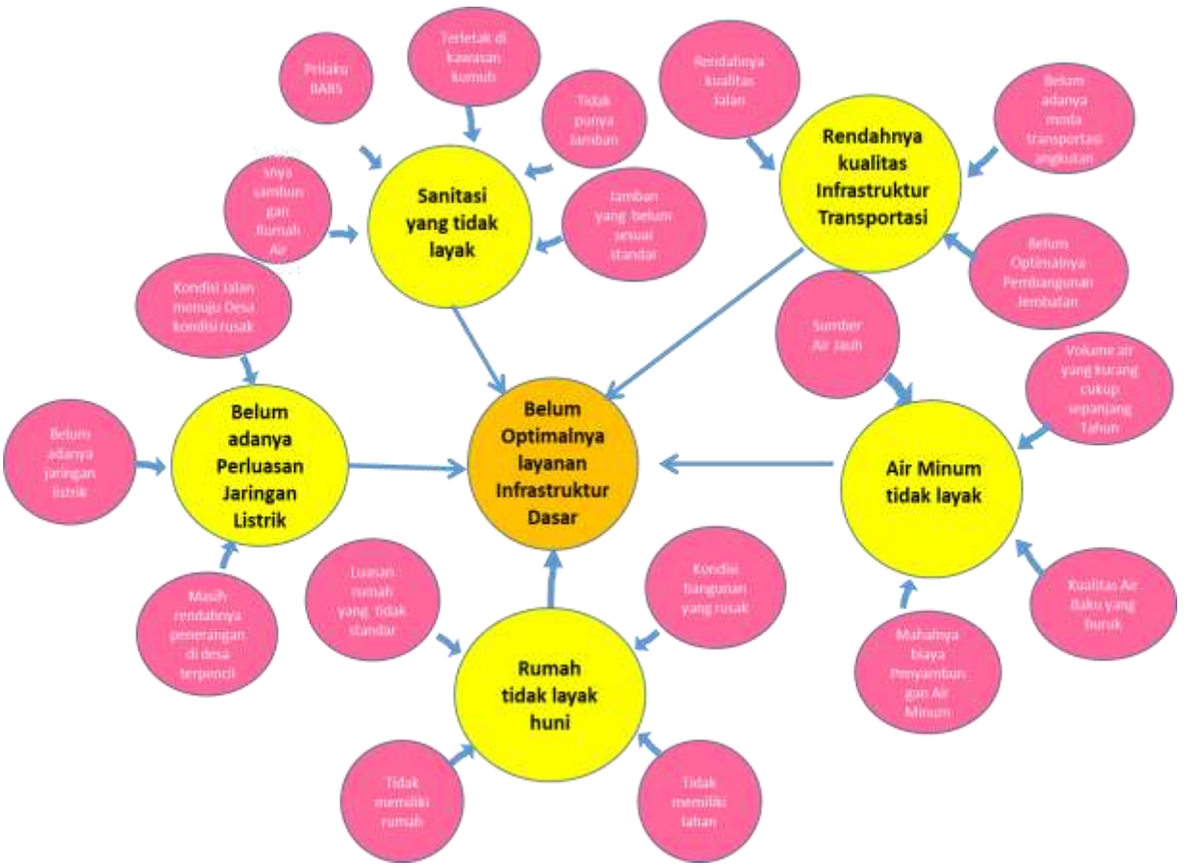

Gambar 4.6 Determinan Kemiskinan Aspek Infrastruktur Dasar

Dari analisa pohon masalah di atas, secara umum persoalan infrastruktur dasar yang terkait erat dengan kemiskinan adalah: 1. Sulitnya akses air bersih; 2. Sanitasi yang tidak layak; serta 3. Rumah atau hunian yang tidak layak ; 4. ketiadaan listrik, 5. Rendahnya kualitas infrastrtuktur transportasi.

a. Jalan dan Transportasi

Akses jalan memudahkan masyarakat mencapai daerah yang terisolir sehingga perekonomian dapat berkembang. Perkembangan daerah produktif yang didukung infrastruktur dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan.

Kendalanya rendahnya kualitas infrastruktur transportasi dan konektivitas antar moda yang disebabkan pada rendahnya ketersediaan moda transportasi perhubungan dan kualitas penyediaan moda. guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan maka dilaksanakan kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan

didukung oleh simpul transportasi antar moda pada desa tertinggal dan yang belum terlayani transportasi dengan lokasi prioritas di Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ambalau dan Serawai dan direncanakan bantuan/hibah transportasi bagi desa-desa tertinggal di lokasi prioritas tersebut.

b. Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak

Sulitnya akses air minum layak dan sanitasi layak disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air dan sanitasi yang layak, dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dalam melakukan aktivitas pekerjaan.

Kondisi sanitasi yang tidak layak disebabkan oleh terbatasnya sambungan rumah air limbah, tidak memiliki jamban sehat, besanya jumlah kawasan kumuh, perilaku BABS serta jamban yang tidak memenuhi standar. Kondisi hunian yang tidak layak disebabkan oleh karena luasan rumah yang tidak sesuai standar, tidak memiliki lahan untuk bangun rumah, dan kondisi bangunan yang rusak.

Berdasarkan uraian di atas maka penanggulangan kemiskinan pada aspek infrastruktur maka pembangunan harus diarahkan untuk bagaimana meningkatkan akses air minum yang kayak melalui sambungan rumah. Begitu pula dengan akses sanitasi, kebijakan anggaran harus diarahkan pada peningkatan layanan sanitasi yang sesuai. Sedangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dari aspek hunian yang tidak layak maka program peningkatan kualitas rumah swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya harus ditingkatkan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan.

c. Listrik

Secara umum, dua dari empat indikator kemiskinan di Indonesia yang masih relatif tinggi berkaitan dengan energi. Berdasarkan pada nilai indikator IKM, rumah tangga miskin memiliki persoalan tertinggi terkait elektrifikasi yang berasal dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)/non-PLN.

Jumlah Elektrifikasi yang terdapat di Kabupaten Sintang masih sangat minim, baru mencapai 55% dilihat jumlah Desa yang di aliri listrik, kondisi ini disebabkan oleh sulitnya akses energi listrik menjangkau ke desa-desa, yang disebabkan oleh kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. keadaan ini sangat berpengaruh terhadap standar masyarakat desa yang belum berlistrik sehingga menyebabkan produktivitas rendah yang menyebabkan kemiskinan di daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

D. **Informasi dan Komunikasi.**

Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan dari segi ekonomi saja tetapi merupakan permasalahan yang kompleks, yaitu dari segi budaya, sosial, psikologi, dan geografi. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya akses informasi dan komunikasi.

Kurangnya informasi dan komunikasi dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup, Mereka cenderung terlambat mengetahui informasi ketersediaan peluang usaha yang sebenarnya bisa dilakukan jika mendapatkan informasi lebih cepat.

4.2.7 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Sosial

Kemiskinan sangat terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau sekarang lebih dikenal dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Semakin miskin dan rentannya baik perorangan, keluarga, maupun komunitas masyarakat tentunya tidak lepas dari perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan. Secara lengkap permasalahan kemiskinan dari aspek sosial terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan yang belum komprehensip dapat dilihat pada analisa pohon masalah di bawah ini:

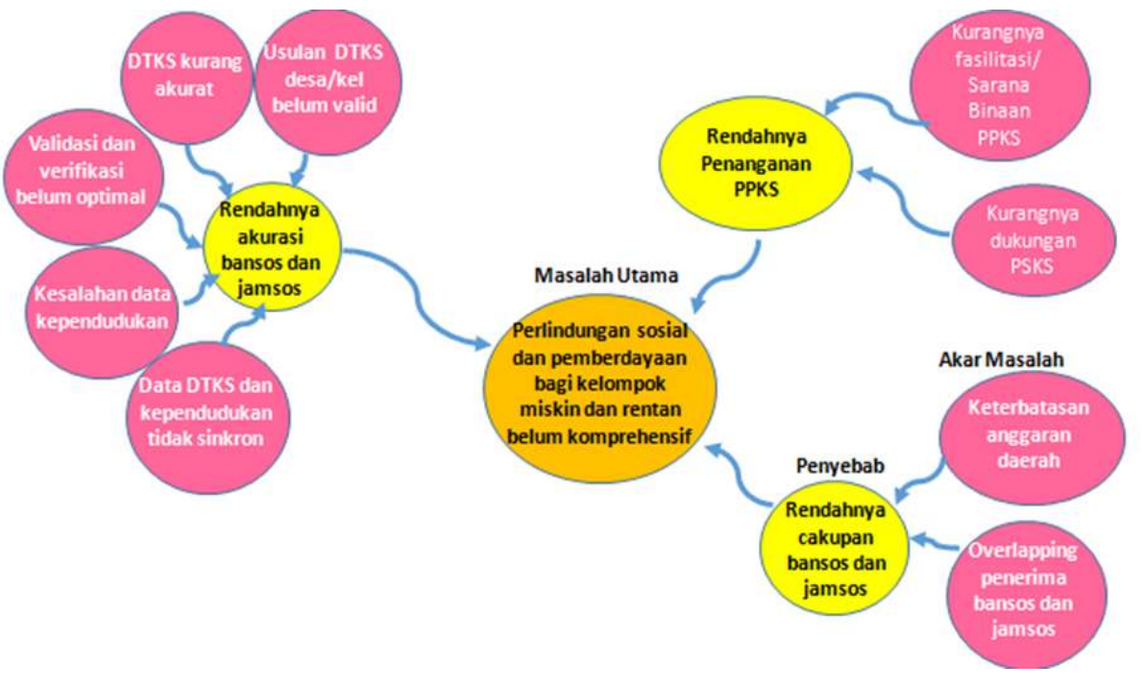

Gambar 4.7 Determinan Kemiskinan Aspek Sosial

Dari analisa di atas, secara umum permasalahan sosial yang terkait dengan kemiskinan adalah perlindungan sosial yang belum komprehensip yang disebabkan oleh: rendahnya akurasi bantuan sosial dan jaminan sosial, rendahnya cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial, dan rendahnya penanganan PPKS.

a. **Rendahnya akurasi bantuan sosial dan jaminan sosial**

Rendahnya akurasi bansos sosial dan jaminan sosial disebabkan usulan DTKS desa/kelurahan belum valid, DTKS yang kurang akurat, validasi dan verifikasi belum optimal, kesalahan data kependudukan, dan data kependudukan dan DTKS yang tidak singkron.

b. **Rendahnya cakupan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial**

Rendahnya cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial disebabkan keterbatasan anggaran daerah, dan overlapping bantuan sosial dan jaminan sosial.

c. **Rendahnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Rendahnya penanganan PPKS disebabkan kurangnya fasilitas/sarana binaan PPKS, dan kurangnya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.2.8 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Kebencanaan

Aspek kebencanaan suatu daerah memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan potensi peningkatan kemiskinan. Kejadian bencana seringkali menyebabkan penduduk terganggu sumber penghidupannya dan bahkan kehilangan sumber penghidupannya. Dengan demikian antisipasi terhadap bencana menjadi salah satu prakondisi yang diperlukan agar masyarakat memiliki ketahanan terhadap bencana. Secara sederhana permasalahan bencana di Kabupaten Sintang yang sangat berdampak bagi kelompok miskin dan rentan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

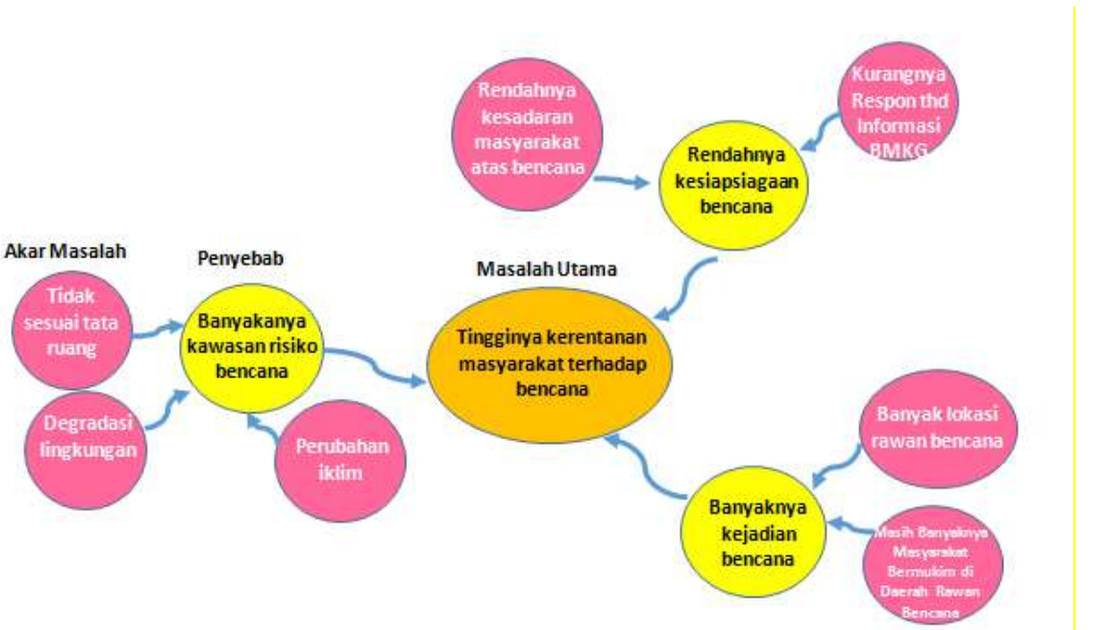

Gambar 4.8 Determinan Kemiskinan Aspek Kebencanaan

Tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana disebabkan oleh :

a. **Banyaknya kawasan risiko bencana**

Banyaknya kawasan risiko bencana di Kabupaten Sintang disebabkan oleh tidak sesuainya tataruang, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim.

b. **Rendahnya kesiapsiagaan bencana**

Rendahnya kesiapsiagaan bencana disebabkan oleh : rendahnya kesadaran masyarakat atas bencana, dan kurangnya respon masyarakat terhadap informasi BMKG.

c. **Banyaknya kejadian bencana**

Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Sintang disebabkan oleh banyaknya lokasi rawan bencana, dan masih banyaknya masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana/pinggiran sungai.

4.2.9 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aspek pemberdayaan masyarakat dan desa dalam konteks penanggulangan kemiskinan sangat penting karena sebagian besar penduduk miskin dan rentan hidup di perdesaan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki posisi strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah perdesaan di Kabupaten Sintang. Isu dan permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa serta determinan kemiskinan yang menjadi akar masalahnya dapat digambarkan pada bagan analisis (ToC) di bawah ini:

Gambar 4.9 Determinan Kemiskinan Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari analisa di atas, secara umum permasalahan yang menjadi determinan kemiskinan aspek pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

a. **Pemanfaatan Dana Desa Belum Optimal**

Dana Desa merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan terutama di desa-desa yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau dengan APBD Kabupaten. Potensi pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebenarnya sangat tinggi namun hingga saat ini belum optimal. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pemahaman aparat desa terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, masih ditemukan kelemahan koordinasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Dari sisi pembinaan, dengan jumlah desa yang mencapai 391 desa sangat sulit bagi OPD terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang untuk melakukan pembinaan yang intensif karena luas dan sulitnya jangkauan desa, serta kurangnya Anggaran dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi maupun SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Perangkat desa yang masih sering terjadi pergantian sehingga pembinaan terputus serta banyaknya kasus hukum yang menimpa desa juga menjadi salah satu penyebab determinan kemiskinan di Kabupaten Sintang.

b. **BUMDES Belum Optimal**

BUMDES memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan. BUMDES bisa menjadi stimulus bagi pergerakan ekonomi di desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Saat ini peran BUMDES belum optimal dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di desa. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya pendampingan bagi pengelola BUMDES. Di sisi lain, sebagian besar pengelola BUMDES saat ini belum profesional sehingga kurang dapat menjalankan fungsi bisnis dari BUMDES.

c. **Produk Unggulan Desa belum Optimal Dikembangkan**

Produk unggulan desa dapat menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi di tingkat desa. Selain dapat menciptakan lapangan kerja baru, produk unggulan desa akan memberikan nilai ekonomis yang sangat potensial. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan desa di Kabupaten Sintang saat ini menyebabkan perekonomian perdesaan kurang tumbuh dengan baik. Salah satu penyebab kurang berkembangnya produk unggulan desa adalah belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi secara khusus kepada desa untuk pengembangan produk unggulan desa.

Selain itu, pemetaan terhadap potensi produk unggulan desa dan analisa kelayakan usaha juga masih sangat terbatas.

d. Desa Wisata Belum Optimal

Desa Wisata merupakan salah satu strategi pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi wisata lokal tingkat desa. Pengelolaan desa wisata yang baik berpotensi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata dapat menggerakkan sektor usaha bidang akomodasi, transportasi dan UMKM, Beberapa permasalahan belum optimalnya pengembangan desa wisata di Kabupaten Sintang adalah akses infrastruktur jalan yang kurang mendukung. Di samping itu keterbatasan dana dan investasi untuk pengembangan Desa Wisata juga masih menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian.

4.2.10 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Ketenagakerjaan

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang adalah masih terbatasnya akses dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan miskin serta terkait erat dengan kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Sebagian besar (75,25%) berlatar belakang pendidikan rendah (SMP ke bawah) dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuhan dan Perikanan (60,15%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja meskipun bertambah, namun pertambahannya relatif lambat.

Pasar kerja Indonesia, termasuk Kabupaten Sintang, menunjukkan ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja juga rendah.

Perencanaan tenaga kerja disertai reposisi dan revitalisasi BLKI dalam merespon era digitalisasi menjadi isu strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah. Isu dan permasalahan ketenagakerjaan serta determinan kemiskinan yang menjadi akar masalahnya dapat digambarkan pada bagan analisis (ToC) di bawah ini:

Gambar 4.10 Determinan Kemiskinan Aspek Ketenagakerjaan

Berdasarkan bagan analisis dan pohon masalah di atas dapat kita identifikasi bahwa permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan adalah Masih Terbatasnya Akses dan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin. Hal itu disebabkan antara lain terkait dengan hal-hal berikut.

a. **Masih rendahnya kualitas tenaga kerja masyarakat miskin dan rentan.**

   Rendahnya kualitas tenaga kerja masyarakat miskin dan rentan umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, dan ketrampilan serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja.

b. **Masih rendahnya produktivitas kerja**

   Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya tenaga terampil dan terlatih, kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, dan masih rendahnya budaya dan semangat kerja.

c. **Masih terbatasnya akses dan lapangan pekerjaan**

   Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan secara umum disebabkan oleh mayoritas pekerjaan dan lapangan usaha masyarakat miskin dan rentan ada di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan tradisional, belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi mikro, terbatasnya akses dan sumber permodalan dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

4.2.11 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) merupakan salah satu tulang punggung perekomian di masyarakat dan berperan sangat strategis dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, kelembagaan KUKM masih dirasakan kurang optimal dalam menggerakkan perekonomian untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan KUKM ini disajikan dalam bagai sebagai berikut:

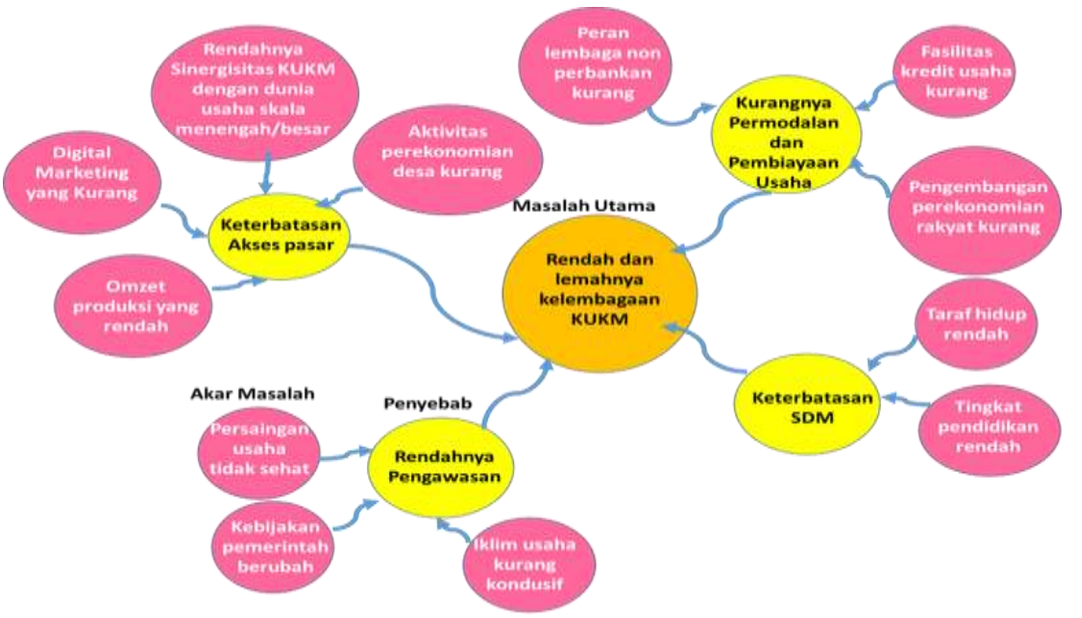

Gambar 4.11 Determinan Kemiskinan Aspek KUKM

Berdasarkan bagan analisis dan pohon masalah di atas dapat kita identifikasi bahwa permasalahan utama di bidang KUKM adalah keterbatasan akses pasar, kurangnya permodalan dan pembiayaan usaha, keterbatasan SDM dan rendahnya pengawasan.

a. **Masih Keterbatasan Akses Pasar**

Rendahnya kualitas tenaga kerja masyarakat miskin dan rentan umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, dan masih terbatasnya sarana dan akses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

b. **Kurangnya Permodalan dan Pembiayaan Usaha**

Kondisi ini yang disebabkan oleh masih rendahnya tenaga terampil dan terlatih, kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, dan masih rendahnya budaya dan semangat kerja.

c. **Keterbasaan SDM**

Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan secara umum disebabkan oleh mayoritas pekerjaan dan lapangan usaha masyarakat miskin dan rentan yang ada di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan tradisional, belum optimalnya

pengembangan usaha ekonomi mikro, terbatasnya akses dan sumber permodalan dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

D. Lemahnya Pengawasan

Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan secara umum disebabkan oleh mayoritas pekerjaan dan lapangan usaha masyarakat miskin dan rentan yang ada di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan tradisional, belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi mikro, terbatasnya akses dan sumber permodalan dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

4.2.12 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Kawasan Hutan

Kejadian kemiskinan juga dialami masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang tersebar di 9 Kecamatan, terkait dengan rendahnya akses penghidupan masyarakat. Adapun permasalahan yang yang terjadi pada aspek kehutanan disajikan pada Gambar berikut.

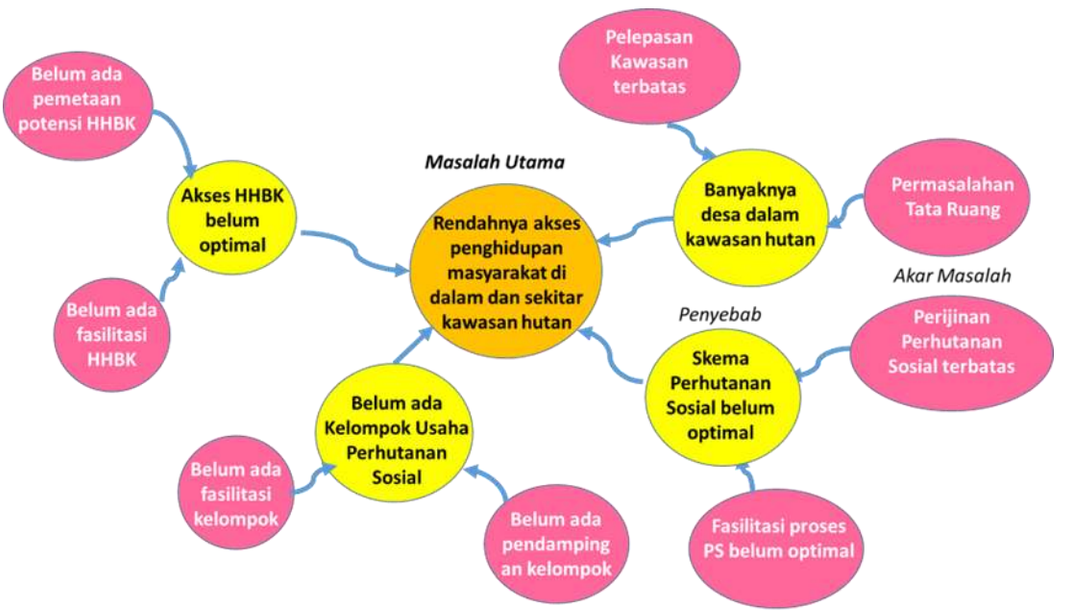

Gambar 4.12 Determinan Kemiskinan Aspek Kawasan Hutan

Berdasarkan bagan analisis dan pohon masalah di atas dapat kita identifikasi bahwa permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan adalah Masih Terbatasnya Akses dan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin. Hal itu disebabkan antara lain terkait dengan hal-hal berikut.

a. Akses HHBK yang belum optimal

Potensi HHBK yang ada di Kabupaten Sintang dapat berupa rotan, madu, tanaman pewarna tenun dan lain sebagainya, belum dapat membantu memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat yang mengelola. Kendala yang terjadi adalah masalah

akses terhadap potensi HHBK yang belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena diperlukan biaya yang besar untuk mengolah dan mengembangkan HHBK, sementara tingkat pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan tergolong rendah.

b. Belum ada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Skema pengembangan potensi kawasan hutan dapat berupa berbagai bentuk yang telah diatur dalam regulasi, salah satu adalah Perhutanan Sosial. Potensi pengembangan HHBK melalui skema perhutanan sosial akan lebih optimal ketika ada manajemen pengelolaan yang baik dengan pelibatan berbagai pihak. Namun, di Kabupaten Sintang belum ada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.

c. Banyaknya desa dalam kawasan hutan

Tantangan pemberdayaan masyarakat desa salah satunya adalah banyaknya jumlah desa yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan. Sebanyak 59 desa di Kabupaten Sintang masih belum dilakukan pelepasan dari pola ruang kawasan hutan. Hal ini dapat berakibat pada susahnya akses dalam pemberdayaan masyarakat dan keterbatasan akses pembangunan infrastruktur desa.

D. Skema Perhutanan Sosial belum optimal.

Dengan potensi luasnya Kawasan hutan yang ada, maka lahirnya perhutanan social dapat menjadi alternatif upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan hutan. Namun, pengelolaan skema perhutanan social belum optimal dilakukan sehingga belum dapat memberikan dampak positif terhadap penghidupan berkelanjutan masyarakat sekitar Kawasan hutan.

4.2.13 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Perencanaan Dan Penganggaran Berpihak Masyarakat Miskin Dan Rentan

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses reguler di pemerintahan daerah yang menjamin seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat diimplementasikan di tingkat lapangan. Tanpa dukungan proses perencanaan dan penganggaran yang baik maka program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa pemasalahan terkait perencanaan dan penggaran yang fokus untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diagram berikut ini:

Gambar 4.13 Determinan Kemiskinan Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Secara rinci permasalahan belum optimalnya fungsi perencanaan dan penganggaran daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan terkait dengan:

a. **Akses Belum tersedianya road map (peta jalan) penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.**

Kabupaten Sintang belum memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) sebagai peta jalan penangulangan kemiskinan di Sintang. Pada Tahun 20xx Kabupaten Sintang pernah menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 20xx-20xxx namun masih ada keterbatasan dalam internalisasi di masing-masing OPD. Selain itu terdapat persoalan non-teknis yang banyak menghambat program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

b. **Lemahnya desain program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.**

Melihat data mengenai kinerja penurunan tingkat kemiskinan tahun pada rentang 2011-2021yang sangat melambat dibandingkan periode sebelumnya hampir dapat dipastikan desain program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum mampu menjawab tantangan-tantangan dalam upaya penurunan kemiskinan yang signifikan. Selain itu semakin besar tingkat kemiskinan maka akan lebih dibutuhkan upaya yang keras dan inovatif.

c. **Ketidaktepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.**

Isu ketidaktepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ini menjadi salah satu isu krusial dikaitkan dengan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Sintang. Sebagai contoh, hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Sintang, program raskin

cenderung untuk dibagi rata ke seluruh penduduk di desa yang menyebabkan program raskin tidak dapat membawa dampak yang sigfinifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Demikian pula evaluasi terhadap program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni yang menunjukkan bahwa sebagian sasarannya tidak sesuai dengan data acuan PPLS/DTKS.

D. Kurang efektifnya penganggaran untuk progam penanggulangan kemiskinan

Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan pengangaran program penanggulangan kemiskinan, menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu dan koordinasi antara pusat dan daerah belum selaras, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang ada.

4.2.14 Determinan Kemiskinan Pada Aspek Kebijakan Dan Sistem Pendukung Kebijakan

Penanggulangan kemiskinan harus didukung dengan kebijakan dan sistem pendukung kebijakan yang memadai. Tanpa kedua hal tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak akan memiliki pondasi yang kuat dalam implementasi di tingkat lapangan. Di sisi lain, kebijakan yang baik harus didukung dengan sistem pendukung yang baik juga untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di tingkat lapangan secara efektif.

Permasalahan terkait dengan kebijakan dan sistem pendukung kebijakan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintand disajikan dalam diagaram sebagai berikut:

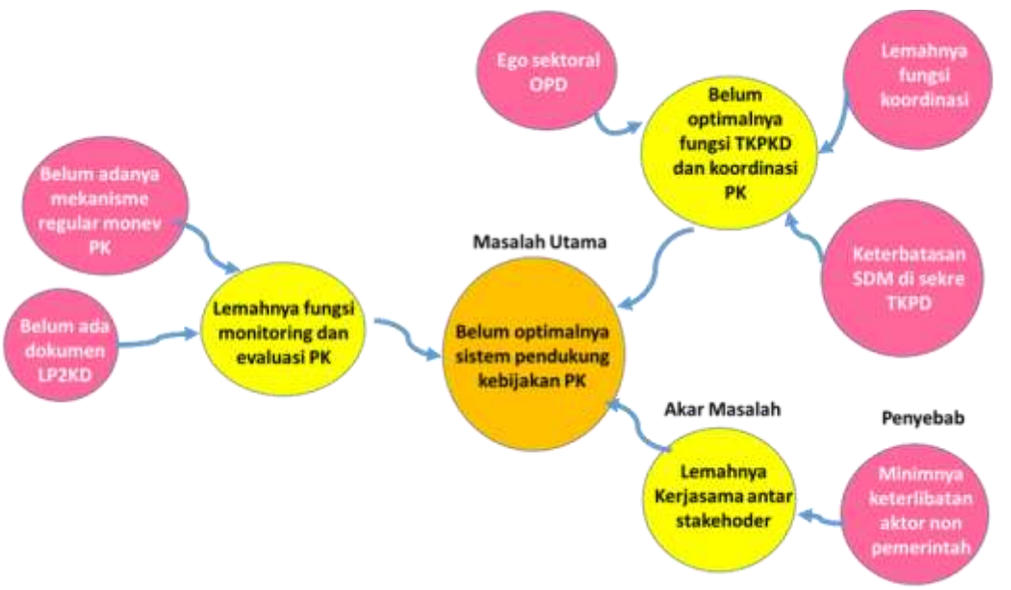

Gambar 4.14 Determinan Kemiskinan Aspek Sistem Pendukung Kebijakan PK

Sistem pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dimaksud adalah sistem-sistem yang bekerja untuk mendukung perumusan kebijakan, desain program dan kegiatan, monitoring

dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini fungsi Bidang litbang dan data Bappeda akan sangat signifikan dalam menyokong sistem pendukung ini. Secara umum belum optimalnya sistem pendukung kebijakan disebabkan oleh:

a. **Akses Belum optimalnya fungsi TKPKD**

   Secara normatif persoalan lemahnya koordinasi, integrasi dan sinergi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan masih menjadi persoalan. TKPKD seharusnya memiliki peran paling strategis dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, namun dalam praktiknya masih sering menghadapi kendala teknis dan non-teknis dalam upaya mengimplementasikan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara optimal.

b. **Lemahnya kerjasama antar stakeholders.**

   Persoalan kemiskinan tidak mungkin ditangani hanya dengan mengandalkan kekuatan pemerintah daerah, dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang terpadu dengan para pihak sehingga kemiskinan menjadi persoalan bersama. Lembaga-lembaga keagamaan yang cukup mengakar di Sintang, potensi kerjasama dengan pihak swasta, termasuk dengan Perguruan tinggi dan LSM seharunya menjadikan kemiskinan sebagai musuh bersama.

c. **Lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi**

   Untuk memastikan program dan kegiatan penanggulangan dapat dilaksanakan secara efektfi harus didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.

4.3 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sintang

Mengadopsi strategi dan arah kebijakan penangulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMD Tahun 2022-2026 dengan memperhatikan karakteristik Kabupaten Sintang, maka dalam empat tahun ke depan, upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata ditempuh dengan tiga strategi utama dengan satu strategi prasyarat dan satu strategi pendukung. Tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan tersebut adalah: perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Tiga Strategi utama tersebut difokuskan untuk mengembangkan lima aset penghidupan masyarakat miskin, di mana pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan sosial sebagai ‘bantalan’, sedangkan strategi pengembangan penghidupan

berkelanjutan untuk mengembangkan aset produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Satu strategi prasyarat adalah penciptaan kondisi ekonomi makro yang kondusif dengan fokus penciptaan kesempatan kerja yang inklusif dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi, sedangkan strategi pendukung adalah pengembagan sistem pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sintang.

Gambar 4.15 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sintang

Uraian masing-masing strategi adalah sebagai berikut:

1. **Strategi Peningkatan Kondisi Ekonomi untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan**

   Kebijakan ekonomi lokal yang menjadi dasar bagi berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, disesuaikan dengan kebijakan ekonomi regional dan makro. Kebijakan ekonomi lokal diarahkan pada terwujudnya iklim yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha serta terbukanya kesempatan yang luas untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan penanggulangan kemiskinan perumusan kebijakan ekonomi lokal ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan dan lapangan kerja seta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Secara spesifik, strategi prasyarat berkaitan dengan kondisi ekonomi makro tidak akan diuraikan secara detil dalam dokumen ini, namun akan terintegrasi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2022-2026.

   Strategi di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan dan program prioritas sebagai berikut:

a. **Pengangguran**

1. Arah Kebijakan : Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

   Program Prioritas: Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Arah Kebijakan : Meningkatkan Penciptaan Lapangan Usaha Baru

   Program Prioritas: Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

2. Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan

Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi). Peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui pendekatan frontline, yaitu sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada mekanisme penyediaan pelayanan dasar yang responsif terhadap permasalahan yang terjadi di berbagai fasilitas pelayanan dasar, termasuk umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan dasar.

Strategi di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan dan program prioritas sebagai berikut:

a. **Kesehatan**

1. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan komplikasi kebidanan sesuai standar

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

6. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

7. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

8. Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan gizi masyarakat dan penatalaksnaan gizi buruk sesuai standar

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

9. Arah Kebijakan: Peningkatan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC (BTA +)

   Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

10. Arah Kebijakan: Peningkatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

    Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

11. Arah Kebijakan: Peningkatan ketersediaan obat

    Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

12. Arah Kebijakan: Peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat)

    Program Prioritas: Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

13. Arah Kebijakan: Penyediaan fasilitas kesehatan, terutama di tingkat desa

    Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

14. Arah Kebijakan: Jaminan pelayanan kesehatan semesta

    Program Prioritas: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Pendidikan

1. Arah Kebijakan : Peningkatan jumlah asrama pelajar
   Program Prioritas: Program Pengelolaaan Pendidikan
2. Arah Kebijakan : Penyediaan Angkutan sekolah gratis
   Program Prioritas: Program penunjang urusan pemerintah daerah
3. Arah Kebijakan : Pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi
   Program Prioritas: Program Pengelolaaan Pendidikan
4. Arah Kebijakan : Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang Pendidikan
   Program Prioritas: Program Pengelolaaan Pendidikan
5. Arah Kebijakan : Pemberian Layanan Pendidikan gratis
   Program Prioritas: Program Pengelolaaan Pendidikan
6. Arah Kebijakan : Peningkatan peran Komite sekolah
   Program Prioritas: Program Pengelolaaan Pendidikan
7. Arah Kebijakan : Pemilihan Duta Genre (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)
   Program Prioritas: Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
8. Arah Kebijakan : Pembentukan Kelompok BINA Keluarga Remaja (BKR)
   Program Prioritas: Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
9. Arah Kebijakan : Pelayanan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
   Program prioritas: Program Pengelolaaan Pendidikan

c. Infrastruktur Wilayah

1. Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan
   Program prioritas: Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Pengadaan jaringan air bersih
   Program Prioritas: Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum
   Program prioritas: Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
4. Penguatan Kelembagaan

Program prioritas: Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

5. Penguatan regulasi pembangunan perumahan permukiman
   Program prioritas: Program kawasan pemukiman
6. Pembangunan Perumahan / Permukiman Kumuh
   Program prioritas: Program kawasan pemukiman
7. Bedah rumah
   Program prioritas: Program kawasan pemukiman
8. Pengadaan rumah susun
   Program prioritas: Program kawasan pemukiman

d. Administrasi Kependudukan

1. Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
   Program Prioritas : Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil

3. Strategi Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Yang Komprehensif

Strategi penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dimaksudkan agar penduduk miskin dan rentan mendapatkan perlindungan sosial yang layak sehingga amanat Undang-undang Kesejahteraan Sosial Tahun 2009 dapat terpenuhi. Strategi di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan dan program prioritas sebagai berikut:

a. **Sosial**

1. Arah Kebijakan : Meningkatkan Meningkatkan Prioritas Pelayanan Dasar/ SPM terhadap PPKS
   Program Prioritas : Rebilitasi Sosial
2. Arah Kebijakan : Meningkatkan penanganan korban bencana alam/ social
   Program Prioritas : Penanganan Bencana
3. Arah Kebijakan : Optimalisasi masyarakat miskin yang mendapatkan JKN/ Jamkesda
   Program Prioritas: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

4. Arah Kebijakan : Meningkatkan Validasi usulan DTKS desa/ kelurahan, Akurasi DTKS, verifikasi dan validasi DTKS secara Reguler, Perbaikan Data Kependudukan, Singkronisasi DTKS dengan Data Kependudukan
   Program Prioritas : Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Arah Kebijakan : Meningkatkan Fasilitasi terhadap PPKS (Warga KAT)
   Program Prioritas : Pemberdayaan Sosial
6. Arah Kebijakan : Meningkatkan Fasilitasi terhadap PPKS (Penyandang Disabilitas)
   Program Prioritas : Rehabilitasi Sosial
7. Arah Kebijakan : Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
   Program Prioritas : Pemberdayaan Sosial
8. Arah Kebijakan : Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana
   Program Prioritas : Penanganan Bencana
9. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran serta Taruna Siaga Bencana
   Program Prioritas : Penanganan Bencana

b. **Kebencanaan**

1. Arah Kebijakan : Meningkatkan Pelayanan informasi Rawan bencana, Meningkatkan Penanganan Pasca bencana, Optimalisasi Regulasi dan Penangulangan Bencana kabupaten
   Program : Penanggulangan Bencana
2. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan Bencana, Optimalisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
   Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
3. Arah Kebijakan : Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   Program : Penanggulangan Bencana.
4. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan Bencana
   Program : Penanggulangan Bencana

4. **Strategi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan**

Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif secara kelompok. Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif. Perbaikan tata kelola sistem usaha pertanian, optimalisasi fungsi dari stakeholders yang bekerja dalam pasar pertanian, serta mendorong kemampuan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian akan terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, memastikan agar petani dapat mengakses pada "pasar", baik untuk meningkatkan input petani maupun untuk pemasaran hasil produksi. Membangun kemitraan dengan para stakeholder, pemerintah daerah, perusahaan swasta, asosiasi usaha, lembaga nirlaba dan penelitian dalam membantu memacu pertumbuhan di sepanjang rantai nilai.

Strategi di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan dan program prioritas sebagai berikut:

a. **Ketenagakerjaan**

1. Arah Kebijakan Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
   Program Prioritas: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Arah Kebijakan Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi yang diperlukan
   Program Prioritas: Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Arah Kebijakan Melaksanakan pembangunan gedung baru BLK yang lebih representatif
   Program Prioritas: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
4. Arah Meningkatkan sarana dan prasarana gedung diklat LLK-UKM
   Program Prioritas: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
5. Arah Kebijakan Meningkatkan peralatan dan bahan diklat pada LLK-UKM
   Program Prioritas: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Arah Kebijakan Meningkatkan inovasi dan kreatifitas, serta pemanfaatan teknologi
   Program Prioritas: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

7. Arah Kebijakan Meningkatkan budaya dan semangat kerja bagi masyarakat khususnya pencaker

   Program Prioritas: Program Penempatan Tenaga Kerja
8. Meningkatkan Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru

   Program Prioritas: Program Penempatan Tenaga Kerja
9. Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru

   Program Prioritas: Program Penempatan Tenaga Kerja
10. Pemberian kemudahan akses dan sumber permodalan, berupa stimulan Pasca Pelatihan

    Program Prioritas: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
11. Meningkatkan semangat kerja bagi masyarakat miskin dan rentan

    Program Prioritas: Program Penempatan Tenaga Kerja
12. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, khususnya kawasan transmigrasi

    Program Prioritas: Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

b. **Kawasan Hutan**

1. Arah kebijakan : Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

   Program Prioritas:

   i. Program KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat)

      Program KELULUT merupakan upaya pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui kerjasama triplehelix (Pemda-Masyarakat-Perusahaan) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Beberapa opsi intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

      a. Pemetaan potensi HHBK dan pola pengembangannya
      b. Fasilitasi dan pendampingan optimalisasi potensi HHBK
      c. Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial
      d. Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial
      e. Sosialisasi dan Pendampingan Pola Pengembangan Perhutanan Sosial
      f. Fasilitasi Perizinan Perhutanan Sosial

   ii. Program Pengelolaan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Penataan Ruang merupakan program dukungan operasional dan legalisasi perubahan pola tata ruang yang disebabkan adanya pelepasan desa dalam kawasan. Adapun intervensi yang dilakukan melalui program:

a. Pengusulan Revisi Kawasan Hutan
b. Pengusulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

5. **Strategi Sistem Pendukung Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

Sistem pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dimaksud adalah sistem-sistem yang bekerja untuk mendukung perumusan kebijakan, desain program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Semua sistem pendukung ini perlu menjadi perhatian agar imlementasi strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara optimal.

Strategi di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan dan program prioritas antara lain:

1) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

BAB 5

LOKASI PRIORITAS

BAB V
LOKASI PRIORITAS

Bab ini menjelaskan tentang lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program-program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Secara umum, lokasi prioritas dirumuskan untuk tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan yakni: pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan peningkatan penghidupan berkelanjutan. Dengan beragamnya ketersediaan data dan kedalaman analisis maka lokasi prioritas dirumuskan secara umum pada tingkat kecamatan dan jika diperoleh data tambahan akan dirumuskan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Berbagai program prioritas yang dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan, nantinya akan menuju suatu agenda besar yaitu adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sintang. Pada tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan turun hingga mencapai angka 7,65%. Hal ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Target Angka Kemiskinan Tahun 2023

Indikator	Target				
	2022	2023	2024	2025	2026
Angka Kemiskinan (%)	8,19	7,65	7,11	6,57	6,03

Sumber : RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

Untuk mencapai tujuan penurunan angka kemiskinan, maka perlu upaya bersama dan terarah sehingga efektivitas dan efisiensi sumber daya dapat dimaksimalkan. Implementasi berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan akan semakin berdampak ketika program-program tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk itu perlu adanya penentuan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Sintang melalui strategi-strategi yang telah disusun.

Secara umum, lokasi prioritas untuk strategi pelayanan dasar dan perlindungan sosial dirumuskan dengan melihat permasalahan pada indikator tujuan atau indikator utama dan indikator antara atau indikator pendukungnya. Wilayah yang memiliki capaian yang relatif buruk pada kedua indikator tersebut akan menjadi lokasi prioritas. Jika hanya mempertimbangkan satu indikator sebagai pertimbangan dalam penentuan lokasi prioritas maka dapat menggunakan kombinasi jumlah dan persentase dari indikator tersebut. Wilayah dengan jumlah dan persentase

terburuk untuk suatu indikator merupakan lokasi prioritas. Metode utama yang digunakan dalam penentuan prioritas ini dengan menggunakan kuadran, didukung dengan data dan informasi lain yang relevan. Salah satu sumber data dalam penentuan kuadran menggunakan DTKS Tahun 2021.

Untuk lokasi prioritas pada strategi peningkatan penghidupan berkelanjutan, selain mengutamakan pada kecamatan dan desa miskin juga mempertimbangkan potensi di wilayah tersebut yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam strategi ini, pendekatan penyelesaian kemiskinan akan dikombinasikan dengan pengembangan potensi-potensi ekonomi yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Tujuan utamanya agar kegiatan ekonomi ini memiliki dampak secara langsung terhadap penanggulangan kemiskinan.

5.1 Strategi Pelayanan Dasar

Secara prinsip pelayanan dasar harus menjangkau setiap penduduk yang membutuhkan karena pendekatan bantuan dan perlindungan harus inklusif. Dengan demikian lokasi prioritas yang dianalisis dalam sub bab ini tidak berarti membatasi program terkait strategi pelayanan dasar hanya berlokasi di wilayah tersebut. Lokasi prioritas dalam pelayanan dasar lebih mengarah pada pentahapan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran. Jika ketersediaan anggaran memungkinkan untuk menjangkau seluruh penduduk atau rumah tangga yang membutuhkan maka akan menjadi kondisi yang lebih ideal.

Program-program dalam strategi pelayanan dasar meliputi: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Lokasi prioritas untuk program pelayanan dasar secara umum dirumuskan berdasarkan kecamatan yang memiliki indikator capaian terendah.

1. Bidang Administrasi Kependudukan

a. Program Pendaftaran Penduduk

Secara umum lokasi prioritas untuk program pendaftaran penduduk idealnya seluruh kecamatan tanpa pengecualian mengingat kepemilikan identitas hukum bagi warga negara bersifat wajib. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kepemilikan identitas hukum

akan memungkinan penduduk untuk dapat mengakses berbagai layanan dan program perlindungan serta bantuan sosial.

Dengan petimbangan teknis, program Pendaftaran Penduduk dengan indikator persentase administrasi kependudukan yang tertata dan persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk akan diprioritaskan pada Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk.

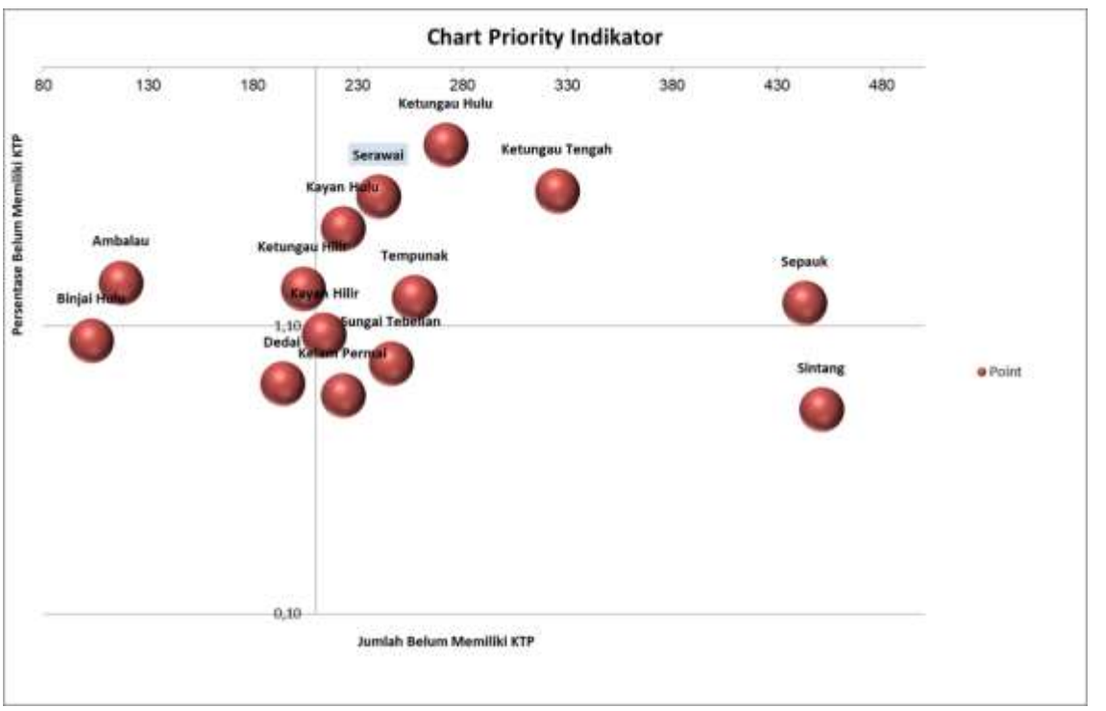

Gambar 5.1 Sebaran Lokasi Prioritas Program Pendaftaran Penduduk

Berdasarkan gambar kuadran di atas, maka lokasi prioritas untuk Program Pendaftaran Penduduk akan diprioritaskan di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk.

b. Program Pencatatan Sipil

Secara umum lokasi prioritas untuk program pencatatan sipil idealnya seluruh kecamatan tanpa pengecualian mengingat kepemilikan identitas hukum bagi warga negara bersifat wajib. Dengan pertimbangan teknis, Program Pencatatan Sipil dan indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun akan diprioritaskan pada Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Kayan Hilir.

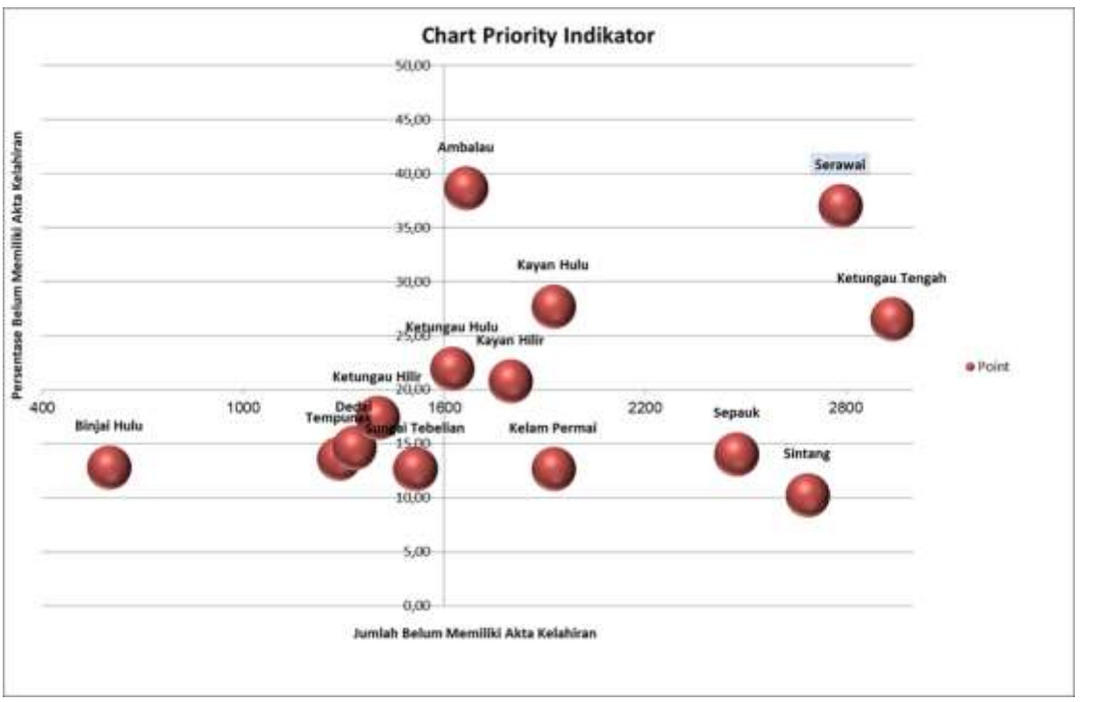

Gambar 5.2 Sebaran Lokasi Prioritas Program Pencatatan Sipil

Berdasarkan gambar kuadran di atas, maka lokasi prioritas untuk Program Pencatatan Sipil akan diprioritaskan di Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Kayan Hilir.

2. Bidang Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Jumlah Asrama yang dibangun diprioritaskan di Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator APM SMP akan diprioritaskan di Kecamatan Binjai Hulu,, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Ketungau Hilir untuk APK SMP akan diprioritaskan pada Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sepauk. Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Ambalau

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator APK PAUD dijelaskan dalam kuadran di bawah ini.

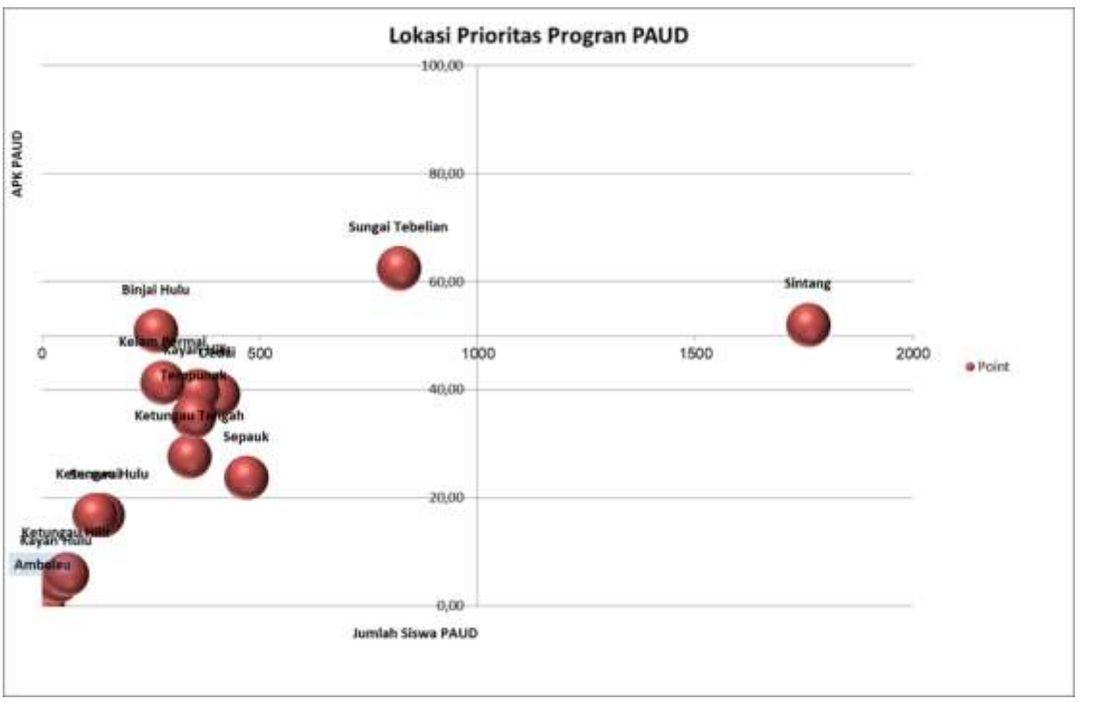

Gambar 5.3 Sebaran Lokasi Prioritas Program PAUD

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program PAUD Kecamatan Ambalau, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ketungau Hulu

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Persentase angka putus sekolah tingkat SD akan diprioritaskan pada Kecamatan Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah sementara untuk angka putus sekolah tingkat SMP akan diprioritaskan pada Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai

3. Bidang Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Lokasi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K-4) akan diprioritaskan di puskesmas sesuai dengan kuadran di bawah ini:

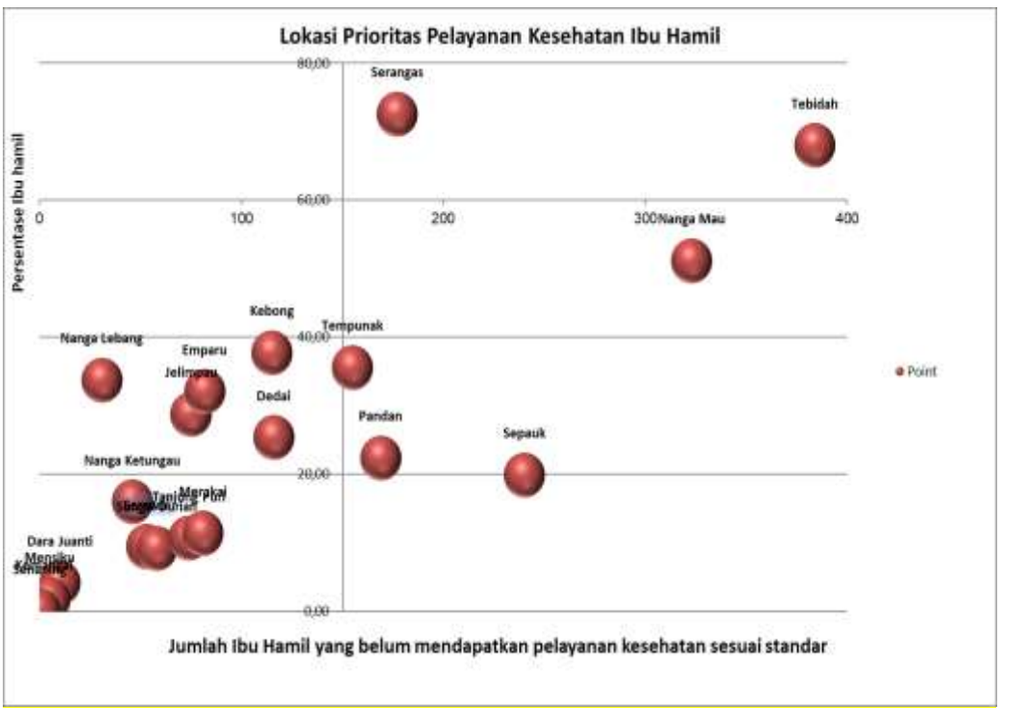

Gambar 5.4 Sebaran Lokasi Prioritas Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K-4) adalah Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir dan Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Tempunak Kec. Tempunak.

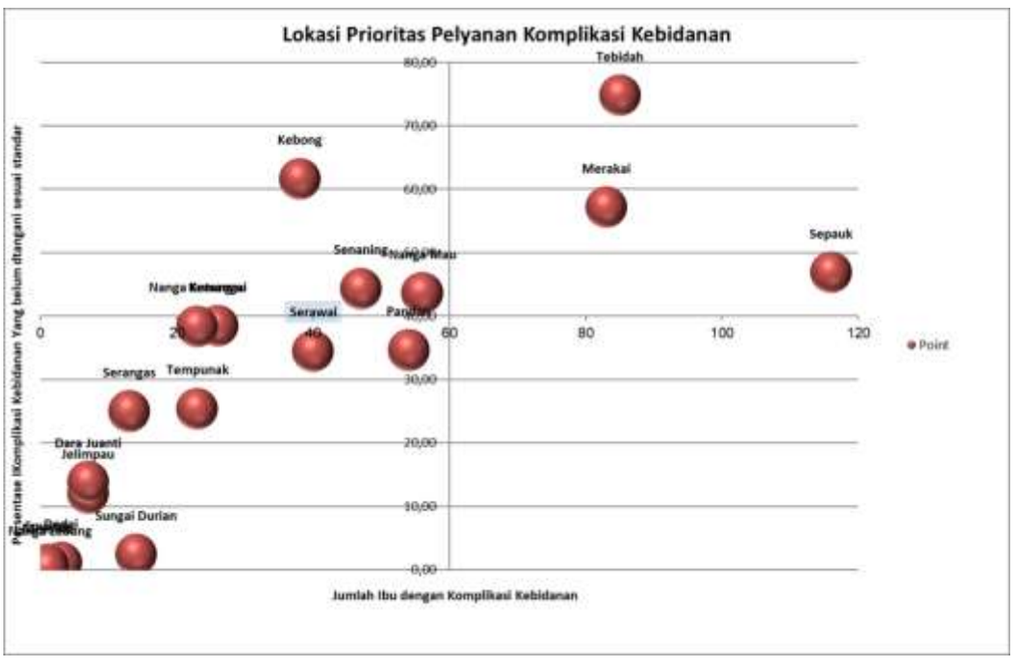

Gambar 5.5 Sebaran Lokasi Prioritas Program Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Kebong Kec. Kelam Permai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir dan Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu.

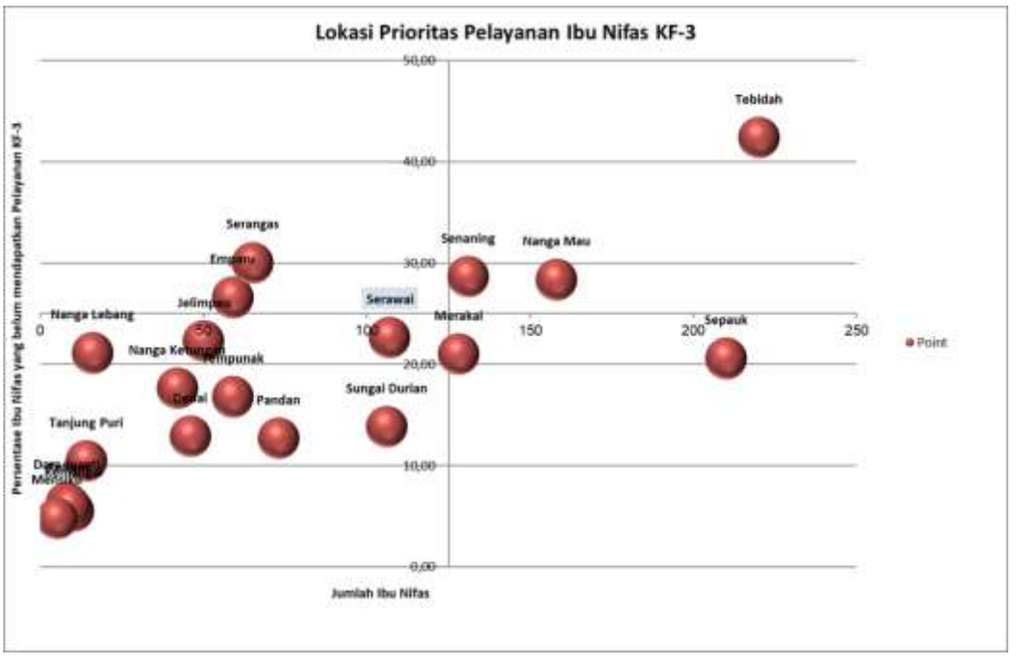

Gambar 5.6 Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Nifas KF-3

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu Nifas yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (KF-3) adalah Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Emparu Kec. Dedai

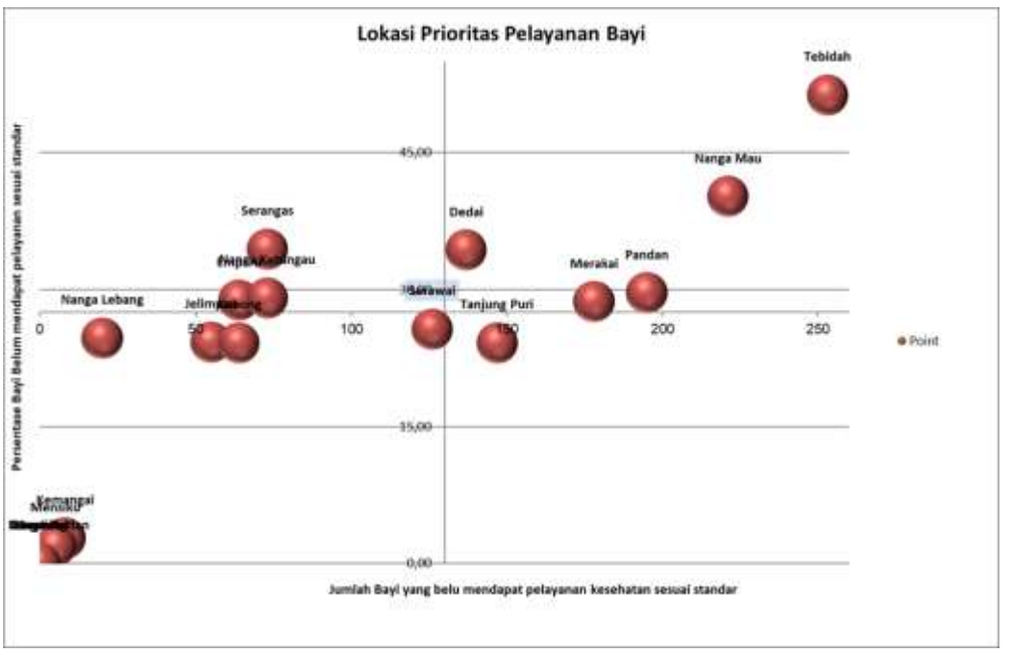

Gambar 5.7 Sebaran Lokasi Prioritas Program Pelayanan Bayi

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Bayi yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, dan Puskesmas Dedai Kec. Dedai.

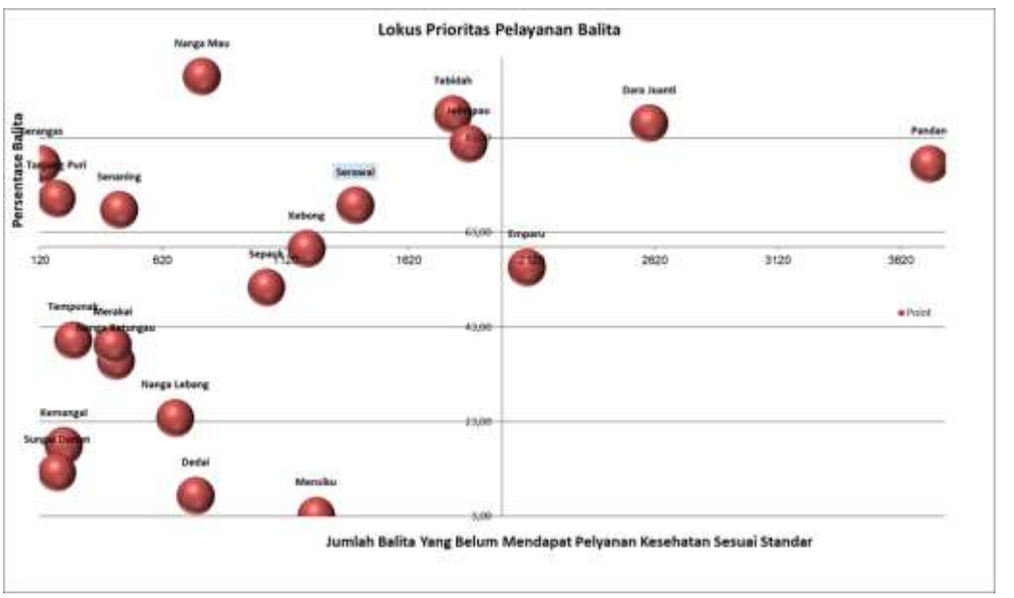

Gambar 5.8 Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Balita

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Balita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah

Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Dara Juanti Kec. Sintang, Puskesmas Jelimpau Kec. Tempunak, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Serawai Kec. Serawai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmsa Tanjung Puri Kec. Sintang dan Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir.

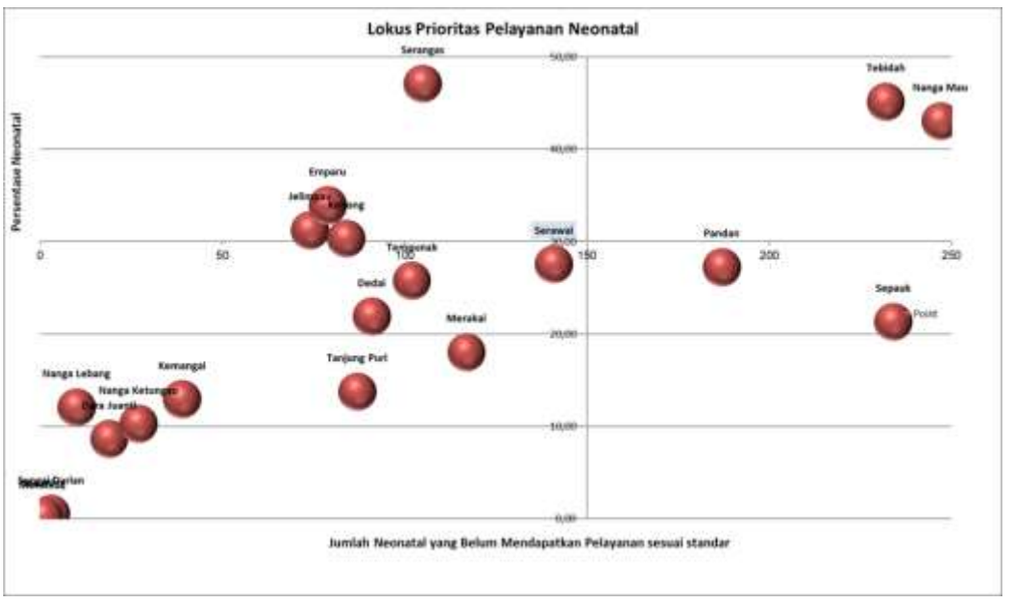

Gambar 5.9 Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Neonatal

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Neonatal (KN-3) yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Emparu Kec. Dedai, Puskesmas Jelimpau Kec. Tempunak dan Puskesmas Kebong Kec. Kelam Permai .

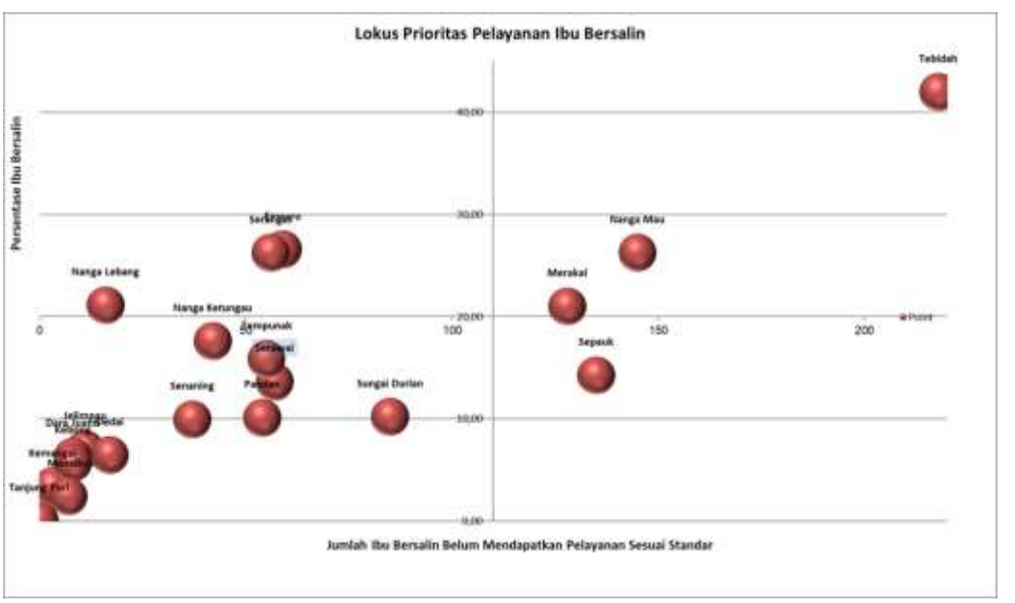

Gambar 5.10 Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Bersalin

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu Bersalin yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Emparu Kec. Dedai, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai .

Lokasi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) akan diprioritaskan di puskesmas sesuai dengan kuadran di bawah ini:

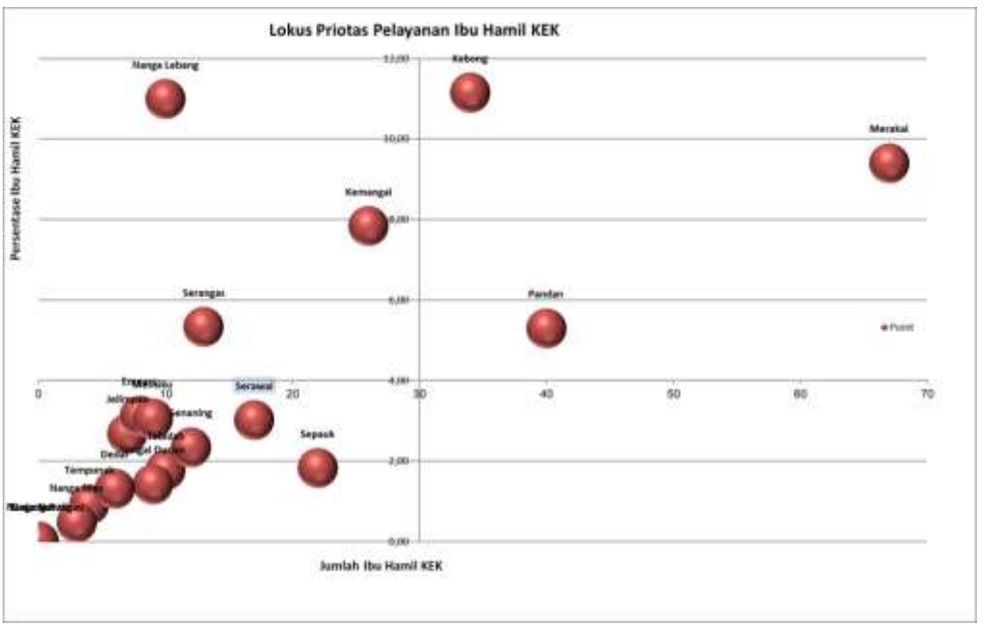

Gambar 5.11 Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Hamil KEK

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) adalah Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Kebong Kec. Kelam Permai, Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai.

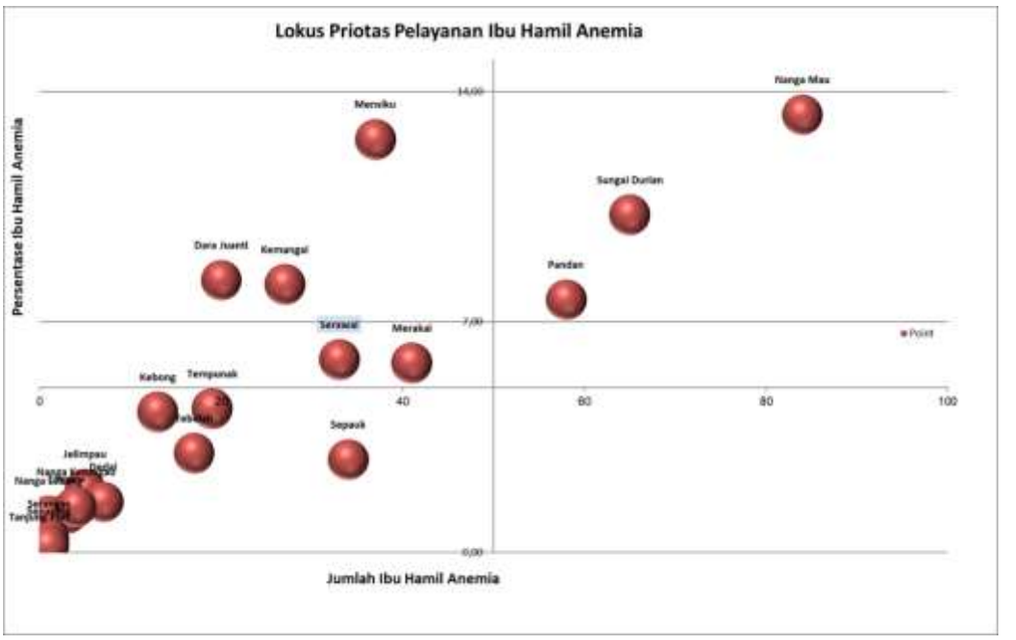

Gambar 5.12 Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Ibu Hamil Anemia

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Ibu Hamil Anemia adalah Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Mensiku Kec. Binjai Hulu, Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau dan Puskesmas Dara Juanti Kec. Sintang.

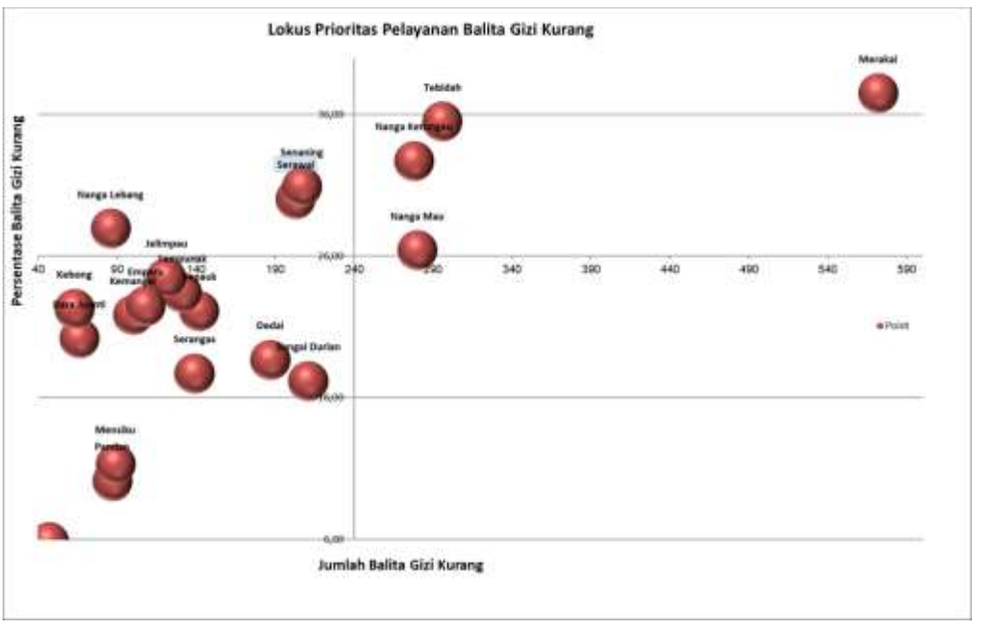

Gambar 5.13 Sebaran Lokasi Prioritas Pelayanan Balita Gizi Kurang

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator

Persentase Balita Gizi Kurang adalah Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Ketungau Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas Serawai Kec. Serawai dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai.

Lokasi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Kasus TBC yang terdaftar akan diprioritaskan di puskesmas sesuai dengan kuadran di bawah ini:

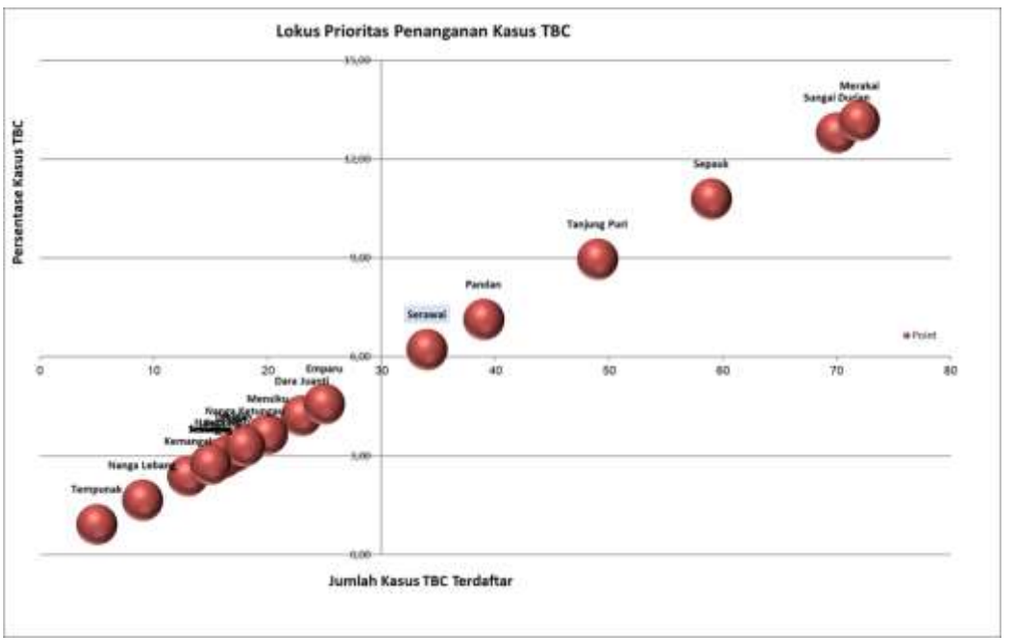

Gambar 5.14 Sebaran Lokasi Prioritas Penanganan Kasus TBC

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase Kasus TBC yang terdaftar adalah Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Tanjung Puri Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Serawai Kec. Serawai.

Lokasi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Desa/ Kelurahan yang tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan akan diprioritaskan di Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas Serawai Kecamatan Serawai, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah dan Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu.

b. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase Posyandu Tidak Aktif akan diprioritaskan di puskesmas sesuai dengan kuadran di bawah ini:

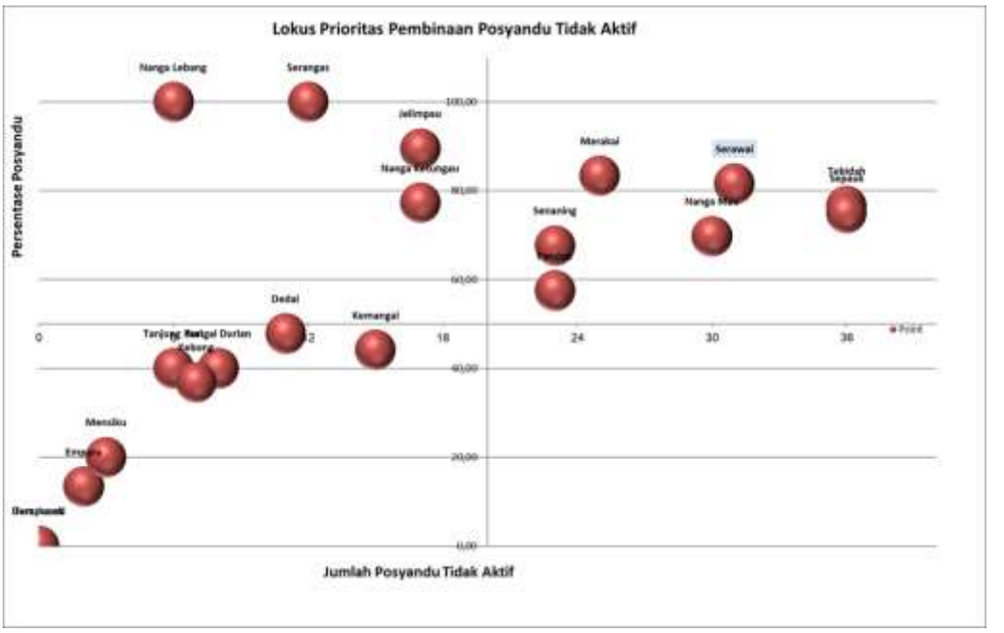

Gambar 5.15 Sebaran Lokasi Prioritas Pembinaan Posyandu Tidak Aktif

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase Posyandu Tidak Aktif adalah Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Serawai Kec. Serawai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu dan Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian

c. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator Persentase Peserta KB Aktif akan diprioritaskan di Kecamatan Sintang, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Ketungau Tengah.

d. Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja

Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja di diprioritaskan di 14 sekolah yaitu SMA N 1 Sintang, SMA N 2 Sintang, SMA N 3 Sintang, SMKN 1 Sintang, MAN 1 Sintang, SMA Panca Setya Sintang, SMK Budi Luhur Sintang, Stikara Sintang, SMA Mujahidin Sintang, SMA Muhammadiyah Sintang, SMA Sinar Kasih Sintang, SMP N 1 Sintang, SMP N 7 Sintang, SMA N 1 Tempunak.

e. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera di diprioritaskan di 15 Desa Lokus Stunting. yaitu Desa Nanga Mentatai, Desa Batu Ketebung, Desa Nusa Tujuh, Desa

Nanga Abai, Desa Nanga Oran, Desa Tuguk, Desa Jentawang Hilir, Desa Lepung Pantak, Desa Radin Jaya, Desa Idai, Desa Nanga Bugau, Desa Kemantan, Desa Bancoh, Desa Riguk, Desa Hulu Dedai.

4. Bidang Infrastruktur Dasar

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum (PSU), akan di prioritaskan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk mencakup seluruh aspek pelayanan dalam akses transportasi publik yang menunjang pembangunan insfrastruktur maka seluruh wilayah di setiap kecamatan di Kabupaten Sintang merupakan prioritas kegiatan.

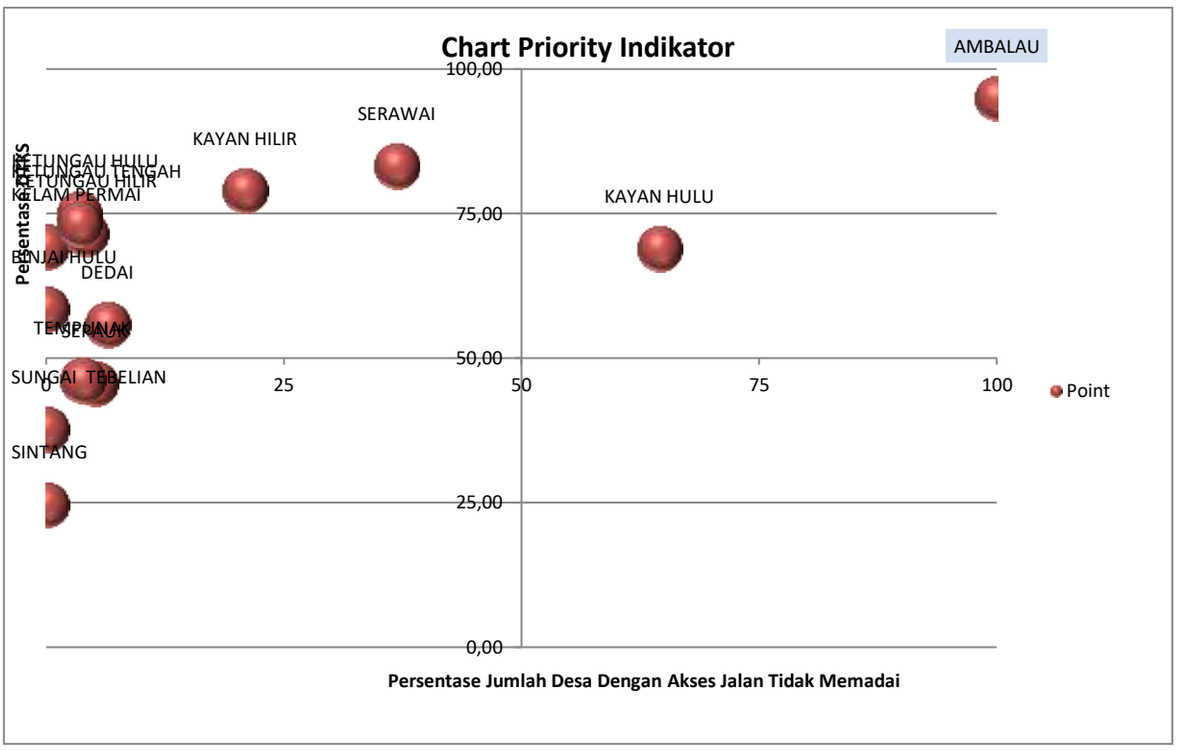

Gambar 5.16 Sebaran Lokasi Prioritas Penanganan Jalan Desa

5. Bidang Infrastruktur Wilayah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum akan di laksanakan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

5.2 Strategi Perlindungan Sosial

1. Bidang Sosial

Secara prinsip, bantuan dan perlindungan sosial harus menjangkau setiap penduduk yang membutuhkan karena pendekatan bantuan dan perlindungan harus inklusif. Dengan demikian lokasi prioritas yang dianalisis dalam sub bab ini tidak berarti membatasi program terkait strategi

perlindungan dan bantuan sosial hanya berlokasi di wilayah tersebut. Lokasi prioritas dalam perlindungan dan bantuan sosial lebih mengarah pada pentahapan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran. Jika ketersediaan anggaran memungkinkan untuk menjangkau seluruh penduduk atau rumah tangga yang membutuhkan maka akan menjadi kondisi yang lebih ideal.

Program-program dalam strategi perlindungan sosial meliputi: Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Secara umum, lokasi prioritas untuk program terkait perlindungan sosial secara umum dirumuskan berdasarkan kecamatan yang memiliki cakupan terendah untuk seluruh bentuk bantuan dan jaminan sosial. Bantuan dan jaminan sosial tersebut meliputi: Kepemilikan KKS/KPS, KIP/BSM, KIS/BPJS Kesehatan/ Jamkesmas, BPJS Kesehatan Mandiri, Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, Askes lainnya, PKH dan Raskin atau Rastra. Data yang digunakan sebagai rujukan adalah DTKS 2021.

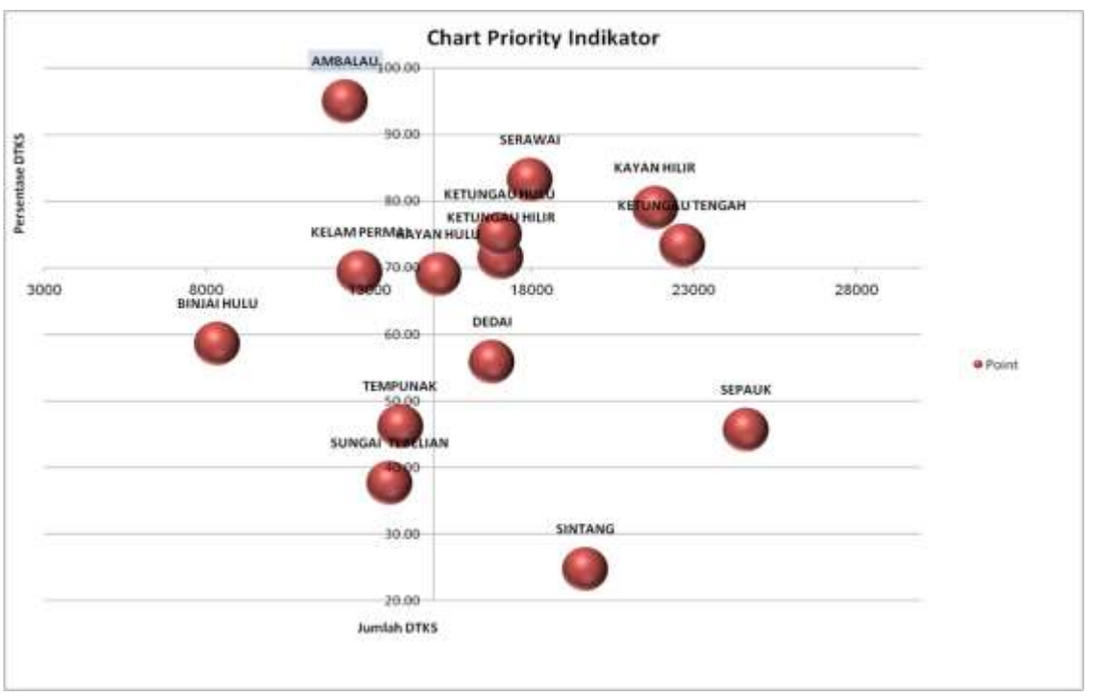

Gambar 5.17 Sebaran Lokasi Prioritas Program Perlindungan Sosial

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka secara umum lokasi prioritas untuk program terkait perlindungan sosial adalah Kecamata Serawai, Kayan Hilir, Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Ketungau Hilir dan Ambalau. Untuk kecamatan-kecamatan prioritas lain, jika program perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak wilayah maka perlu mempertimbangan urutan kecamatan dengan jumlah dan persentase terbesar untuk penduduk atau rumah tangga tanpa bantuan dan jaminan sosial.

Dengan tambahan data dan informasi yang relevan dari OPD terkait, secara spesifik lokasi prioritas untuk masing-masing program sebagai disajikan dalam Lampiran Matriks Program.

a. **Program Rehabilitasi Sosial**

Program Rehabilitasi Sosial dengan dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial akan diproritaskan pada Kecamatan Kayan Hilir, Dedai, Sintang, Ambalau dan Ketungau Tengah.

b. **Program Pemberdayaan Sosial**

Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator Persentase Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan dan peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), akan diproritaskan pada Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ketungau Hulu.

c. **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial akan diproritaskan pada Kecamatan Serawai, Kayan Hilir, Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Ketungau Hilir dan Ambalau.

e. **Program Penanganan Bencana**

Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase Korban Bencana yang tertangani akan diproritaskan pada Kecamatan Serawai, Ketungau Hilir, Sintang, Dedai dan Sepauk.

f. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Jamkesda, diproritaskan pada Kecamatan Serawai, Kayan Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir dan Ambalau.Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Kebencanaan

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi, baik secara alamiah ataupun akibat ulah manusia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan

dampak psikologis. Bencana banjir di Kabupaten Sintang dapat dijelaskan pada analisis kuadran sebagai berikut :

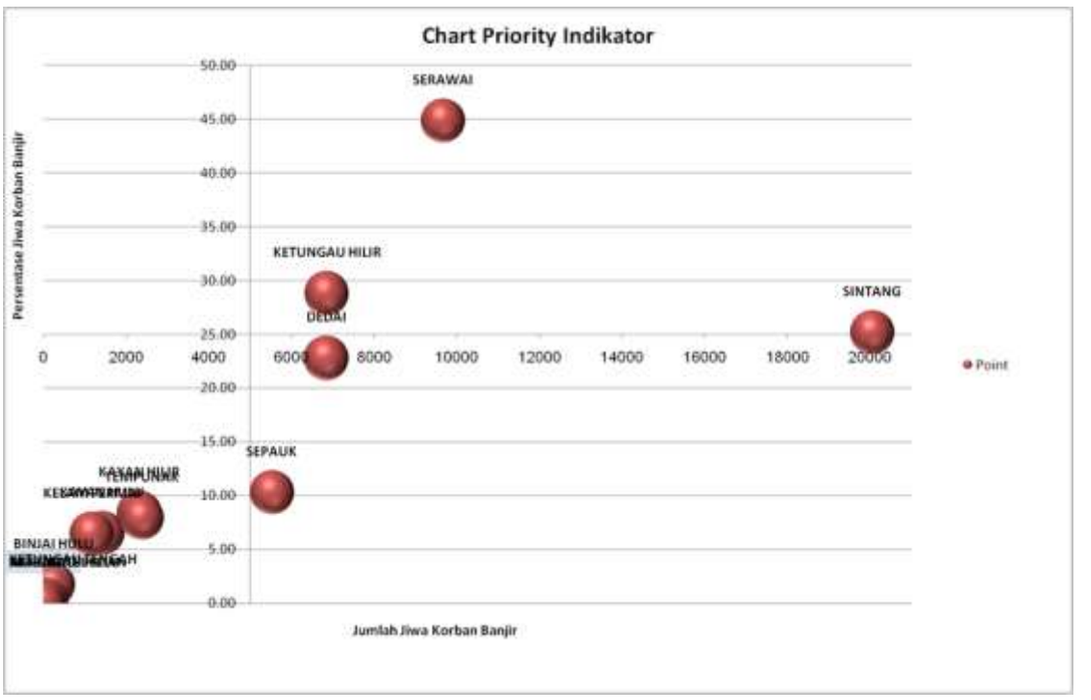

Gambar 5.18 Sebaran Lokasi Prioritas Penanggulangan Kebencanaan

Program-program dalam strategi kebencanaan meliputi: Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran. Program sebagaima tersebut di atas lebih diprioritaskan terhadap masyarakat/jiwa yang terkena banjir pada masing-masing kecamatan. Dari analisis kuadran banjir tersebut, program prioritas terdapat pada Kecamatan Serawai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Dedai, Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sepauk.

A. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase Desa/kelurahan yang tertangani akan diproritaskan pada Kecamatan Serawai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, dan Kecamatan Sepauk.

B. Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase peran serta masyarakat yang diproritaskan pada Kecamatan Serawai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, dan Kecamatan Sepauk.

5.3 Strategi Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan

Secara prinsip, program terkait dengan penghidupan berkelanjutan harus bersifat inklusif dengan menjangkau setiap penduduk yang membutuhkan, namun demikian program penghidupan berkelanjutan seringkali terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal. Artinya daerah daerah miskin atau wilayah kantong kemiskinan yang memiliki potensi ekonomi lebih besar lebih berpotensi untuk dikembangkan dibandingkan lokasi dengan potensi ekonomi yang lebih terbatas.

1. Bidang Ketenagakerjaan

Sebagaimana stategi lain, lokasi-lokasi prioritas yang dianalisis untuk sub bab ini tidak berarti membatasi program terkait strategi penghidupan berkelanjutan hanya berlokasi di wilayah tersebut. Lokasi prioritas dalam program penghidupan berkelanjutan lebih mengarah pada penahapan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran. Jika ketersediaan anggaran memungkinkan untuk menjangkau seluruh penduduk atau rumah tangga yang membutuhkan dukungan dengan ketersediaan potensi ekonomi yang dikembangkan maka akan menjadi lebih ideal.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Penjungan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Program pengembangan kawasan transmigrasi.

Secara umum, lokasi prioritas strategi penghidupan berkelanjutan didasarkan pada wilayah dengan persentase dan jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang tertinggi. Gambaran lokasi prioritas strategi penghidupan berkelanjutan bidang ketenagakerjaan disajikan dalam gambar sebagai berikut.

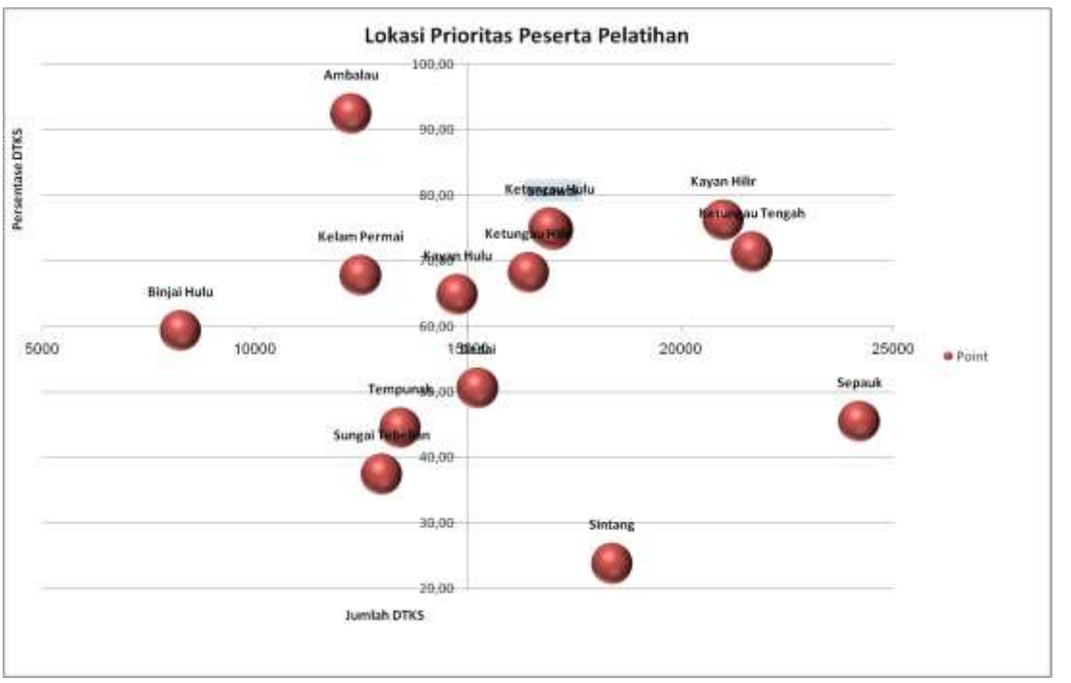

Gambar 5.19 Sebaran Lokasi Prioritas Program Ketenagakerjaan

Berdasarkan gambar kuadran di atas maka lokasi prioritas untuk program-program terkait penghidupan berkelanjutan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamtan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Dengan tambahan data dan informasi yang relevan dari OPD terkait, secara spesifik lokasi prioritas untuk masing-masing program sebagai disajikan dalam Lampiran Matriks Program.

a. Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi merupakan salah satu kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja untuk mendapatkan standar ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, dalam rangka peningkatan Keterampilan bagi Pencari kerja dengan tujuan agar para pencari kerja memiliki kemampuan serta keahlian dalam persaingan di dunia usaha serta mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan sasaran para pencari kerja, sumber pendanaanya dari APBN dengan Prioritas Kegiatan di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja dalam berbagai bidang kejuruan, serta meredam dampak negatif dari tingginya angka pengganggguran,

sehingga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian para pencari kerja dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. untuk mewujudkan maksud tersebut sesuai dengan arah kebijakan meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi yang diperlukan, maka dilaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi yang disertai dengan memberikan bantuan stimulan peralatan kerja sesuai dengan bidang kejuruan dengan sasaran kegiatan para pencari kerja atau pengganggguran yang kegiatnnya diprioritaskan pada 5 (lima) yaitu Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamtan Ketungau Hulu.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan sarana penunjang atau pendukung dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi dengan arah kebijakan melaksanakan pembangunan gedung BLK baru yang lebih representatit, melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dan sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya kegiatan gedung pelatihan, dengan sasaran kegiatan Gedung Pelatihan BLK.

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan tenaga kerja ini bertujuan untuk mengurangi pengganggguran dan setengah pengganggguran melalui perluasan kesempatan kerja di berbagai bidang usaha baik diperkotaan maupun dipedesaan, dan meningkatkan devisa pengiriman tenaga kerja keluar negeri, serta memberikan pelayanan bursa kerja bagi pencari kerja. Kebijakan yang akan di laksanakan dalam menunjang program tersebut yaitu meningkatkan penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mencapai program tersebut didukung dengan kegiatan Pelayanan antar kerja Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dan Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja, dengan sasaran kegiatan para pencari kerja atau pengganggguran di wilayah Kabupaten Sintang yang diprioritaskan penempatannya di Wilayah Kabupaten Sintang.

d. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas di kawasan pemukiman Transmigrasi dalam rangka pemerataan persebaran penduduk dan penanggulangan kemiskinan di daerah

pedesaan, serta menguatan sumberdaya manusia yang mandiri pada satuan pemukiman dengan arah kebijakan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, khususnya kawasan transmigrasi dengan melaksanakan kegiatan berupa memberikan pembinaan di wilayah pemukiman transmigarsi dengan sasaran kegiatan pada 2 (dua) UPT yaitu UPT Sebetung Paluk dan UPT Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu.

2. Bidang Pertanian dan Perkebunan

a. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian menjadi salah satu upaya dalam peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian menjadi arah kebijakan dalam memastikan ketersediaan komoditas pertanian. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa bantuan penyaluran bibit padi unggul. Adapun lokasi prioritas intervensi program adalah Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Serawai dan Ambalau.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Berupa Kegiatan Pengembangan Model Kehutanan yang difokuskan di Kecamatan Serawai, Ambalau dan Ketungau Tengah.

c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Peningkatan Jalan Usaha Tani, Bantuan Traktor,

d. Program Penyuluh Pertanian

Pendampingan adopsi teknologi tepat guna pertanian, Pemberdayaan kelembagaan pertanian, Pasar tani,

e. Program Penerapan Izin Usaha Pertanian

Penerapan izin perkebunan, Pendampingan adopsi teknologi pemanfaatan olahan sampingan hasil hutan.

3. Bidang Ketahanan Pangan

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan keberagaman lokal, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin. Beberapa opsi intervensi yang dilakukan berupa Gerakan Menanam di Pekarangan, Lomba Inovasi Pangan Lokal di Tingkat Desa, Penyaluran Bantuan dan Pengembangan Bibit Unggulan Daerah dan Pangan Lokal dan Sosialisasi Teknologi Pengolahan Lanjutan Komoditas Pangan Lokal.

Lokasi prioritas Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada kecamatan yang memiliki karakteristik jumlah desa memiliki persentase

jumlah DTKS yang tinggi dan tidak memiliki kebun gizi. Dengan adanya berbagai intervensi pada program dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan keberagaman pangan melalui pemanfaatan potensi lingkungan di desa. Adapun lokasi prioritas program adalah Kecamatan Ambalau, Serawai, Kayan Hilir dan Kayan Hulu.

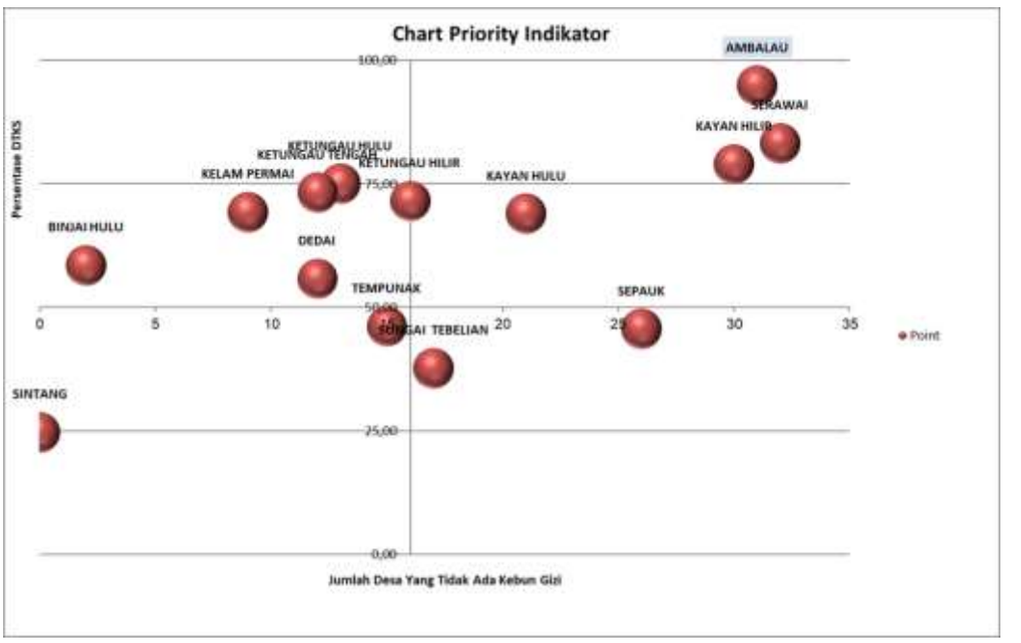

Gambar 5.20 Sebaran Lokasi Prioritas Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, maka perlu dukungan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penyedia pangan. Implementasi kebijakan yang akan dilakukan yaitu melalui Program Penanganan Kerawanan Pangan. Opsi intervensi yang dapat dilaksanakan adalah Bantuan Pengadanan Sarana dan Prasarana Penyediaan Pangan.

Adapun lokasi yang menjadi prioritas adalah Kecamatan Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah, Kayan Hilir dan Dedai. Wilayah yang menjadi lokasi prioritas dipilih berdasarkan jumlah desa yang menjadi prioritas pertama dalam penanganan prasarana penyediaan pangan.

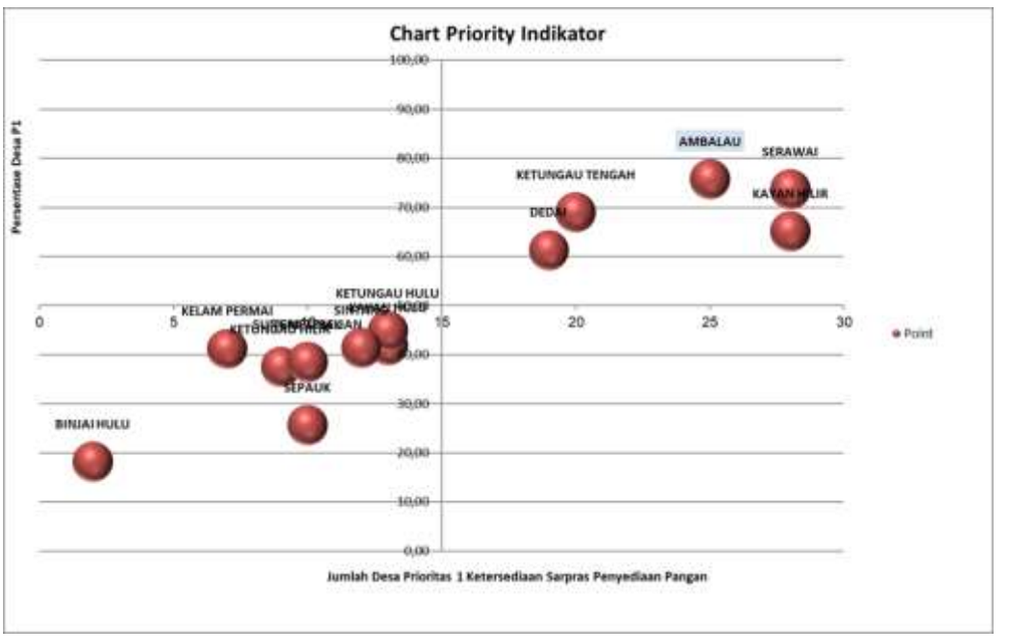

Gambar 5.21 Sebaran Lokasi Prioritas Program Penanganan Kerawanan Pangan

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas perikanan di Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan, pendampingan bentuk kerjasama produsen dan mitra, dan pendampingan penerapan teknologi budidaya perikanan. Melalui opsi intervensi yang dipilih, diharapkan dapat memberikan bekal peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan, yang selanjutnya dapat meningkatkan produksi hasil perikanan.

Adapun lokasi prioritas program difokuskan di Kecamatan Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Ketungau Tengah dan Dedai. Lokasi prioritas dipilih dengan memperhatikan jumlah UMK Perikanan yang ada di desa terhadap persentase jumlah DTKS yang ada di Desa.

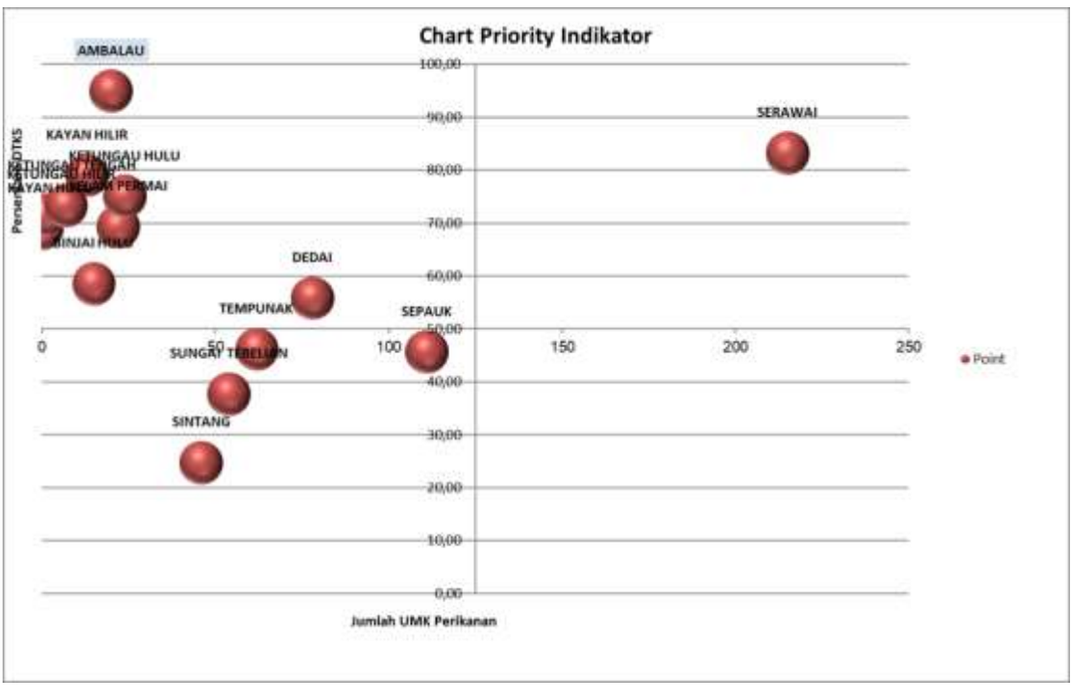

Gambar 5.22 Sebaran Lokasi Prioritas Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

4. Bidang Kehutanan

a. Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Program ini merupakan salah satu intervensi pelaksanaan program **KELULUT** (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat) dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan HHBK. Lokasi prioritas program akan terfokus pada 9 kecamatan yang memiliki desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dengan memperhatikan jumlah desa dalam kawasan dan persentase individu DTKS yang di 59 desa dalam kawasan, maka sebaran lokasi prioritas adalah di Kecamatan Ambalau, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.

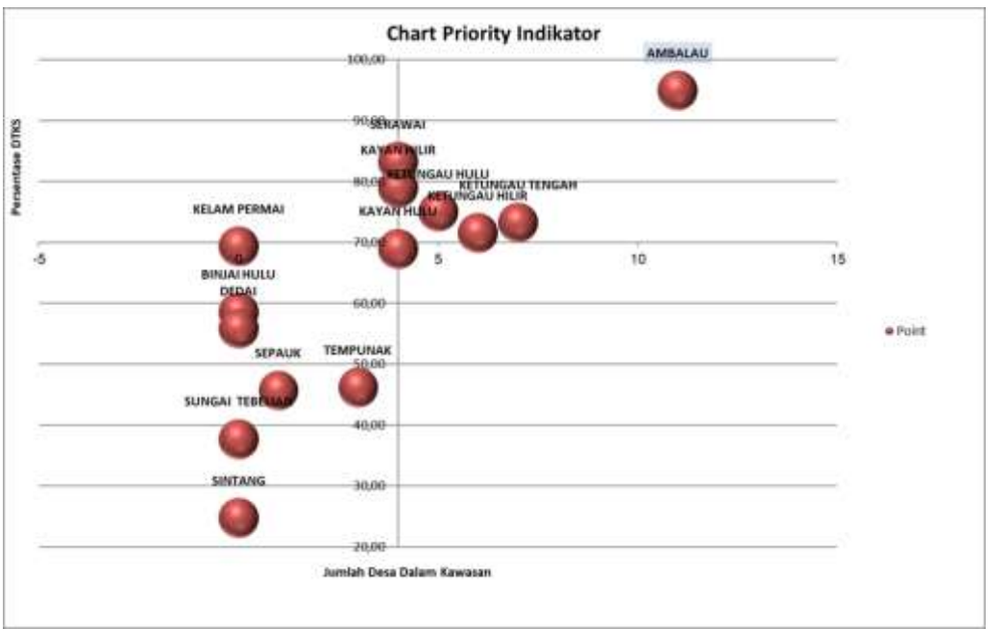

Gambar 5.23 Sebaran Lokasi Prioritas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Kawasan Hutan

BAB 6

KELEMBAGAAN DAN SISTEM MONITORING EVALUASI

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN SISTEM MONITORING EVALUASI

6.1. Kelembagaan

6.1.1 Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sintang

Kebutuhan akan adanya kelembagaan koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPKD sangat penting dalam mengoperasionalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui sistem birokrasi yang ada. Dengan adanya informasi mengenai kelembagaan dalam RPKD akan mengoperasionalkan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Karena itu secara khusus kelembagaan TKPK dengan peran dan fungsinya, struktur yang menyangkut kelompok program dan kelompok kebijakannya perlu dicantumkan dalam dokumen RPKD sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan pembentukan Kelembagaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi utama dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam Mengkoordinasikan, dan Mengendalikan Kebijakan dan Program dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang direncanakan dan bersifat lintas sektor berjalan secara sinergis.

Sesuai amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota tersebut, TKPKD Kabupaten Sintang tahun 2022 telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sintang

Nomor 401/680/KEP-BAPPEDA/2022 tertanggal 10 Mei 2022. Di Kabupaten Sintang, Keputusan pembentukan TKPKD diperbahui setiap tahun.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang tersebut, TKPK Kabupaten Sintang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang;
2. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang;
3. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sintang dimaksud kepada Bupati Sintang.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya, TKPKD menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
2. koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Adapun koordinasi yang dapat dilakukan TKPK berdasarkan fungsinya tersebut, antara lain :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
2. Mengkoordinasikan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
3. Mengkoordinasikan forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
4. Mengkoordinasikan forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD;

5. Evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Tugas dan fungsi utama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang menggerakkan strategi yang lain melalui instrumen koordinasi dan pengendalian agar kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan dan bersifat lintas sektor berjalan secara sinergis. Dalam operasional sehari-hari, TKPK dapat membentuk Tim Teknis yang bertugas memfasilitasi kordinasi antara TKPK dengan satuan kerja lainnya di daerah.

Dengan melihat tugas dan fungsi tersebut di atas, maka Instrumen koordinasi dan pengendalian yang dapat dijalankan oleh TKPKD antara lain :

1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dengan mengkoordinasikan penyusunannya TKPKD dapat mendorong RPJMD lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan integrasi RPKD kedalam RPJMD.
2. Mengkoordinasikan penajaman perencanaan dalam Renstra SKPD, Renja SKPD dan perancangan RKPD.
3. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi.
4. Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program perlindungan dan jaminan sosial.
5. Koordinasi, pemutakhiran, verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai basis data program perlindungan dan jaminan sosial.
6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
8. Pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, Ketua TKPKD dibantu oleh 3 (tiga) Kelompok Pengelola Program yang terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu bertugas untuk melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu

Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

2. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bertugas melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
3. Kelompok Program Lainnya bertugas melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota, Bupati/WaliKota membentuk sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan dukungan administrasi teknis;
2. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
3. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi dan agenda tahunan;
4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang.

6.1. 2. Struktur Organisasi dan Kelembagaan TKPK Kabupaten Sintang

Struktur organisasi dan kelembagaan TKPK Kabupaten Sintang sesuai Keputusan Bupati Sintang Nomor : 401/680/KEP-BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu : Tim Koordinasi, Kelompok Pengelola Program dan Tim Sekretariat.

Tim Koordinasi TKPK sendiri diketuai oleh Wakil Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati selaku Penanggung Jawab TKPK. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua TKPK dibantu oleh Wakil Ketua TKPK yang dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris TKPK yang dijabat oleh Kepala Bappeda dalam menangani tugas-tugas kesekretariatan. Sekretaris TKPK dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris, yaitu Wakil Sekretaris I yang dijabat oleh Kepala Dinas Sosial, Wakil Sekretaris II yang dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,

dan Wakil Sekretaris III yang dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Tim Sekretariat yang juga berkedudukan di Bappeda. Sedangkan Kelompok Pengelola Program terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu : 1) Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu, 2) Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, 3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya.

Adapun struktur organisasi TKPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagaimana gambar berikut ini.

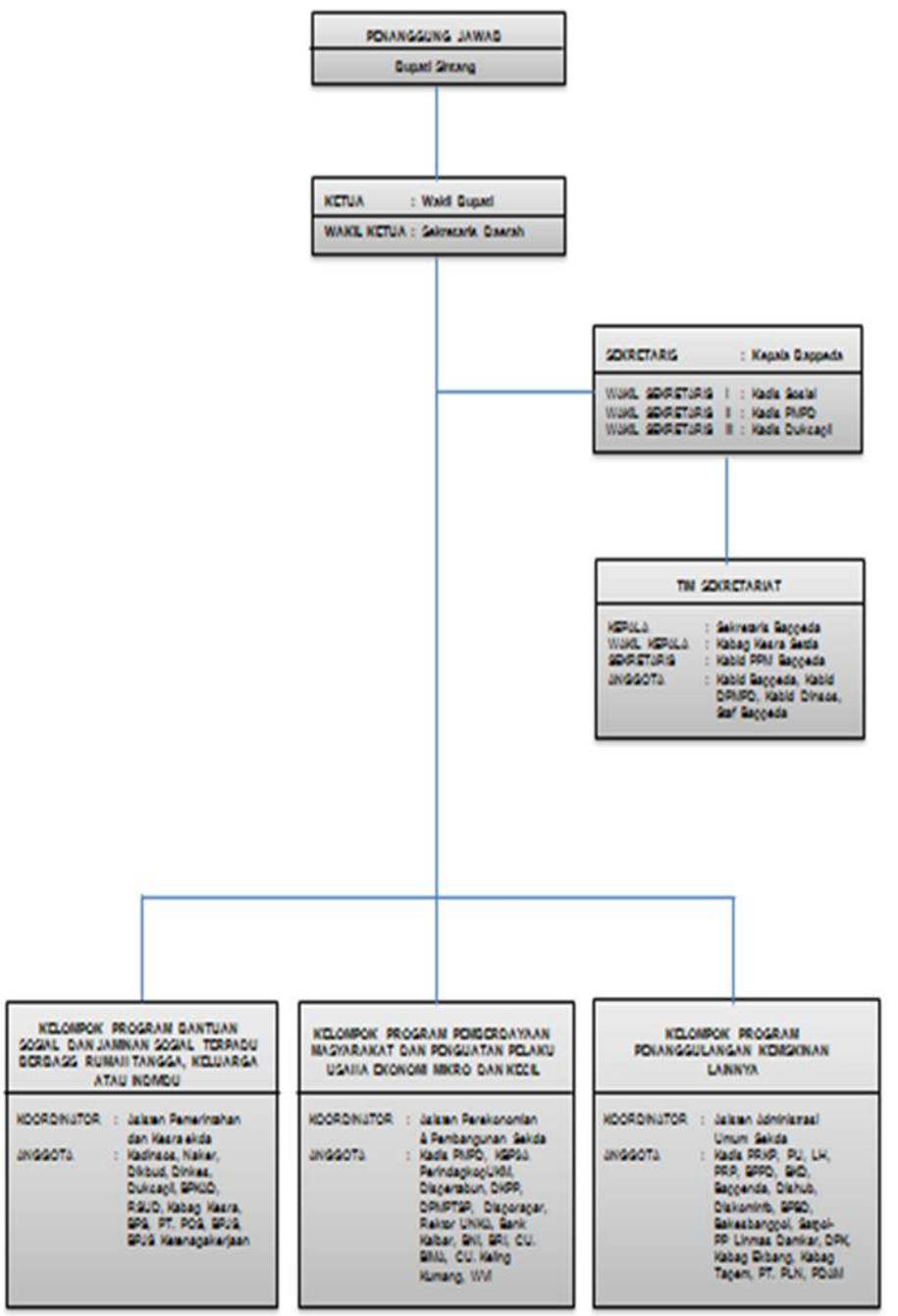

Gambar 6.1 Struktur Organisasi dan Kelembagaan TKPK Kabupaten Sintang

Saat ini kelembagaan TKPK masih berada di tingkat kabupaten serta dalam upaya untuk memaksimalkan peran dan fungsi TKPK Kabupaten Sintang. Diharapkan ke depan secara bertahap dapat dibentuk TKPK di tingkat kecamatan dan bahkan di tingkat desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang. Dengan adanya kelembagaan TKPK hingga ke tingkat kecamatan, maka diharapkan koordinasi dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik.

6.1.3. Kinerja dan Tantangan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sintang

Dari hasil evaluasi tentang kelembagaan TKPK selama ini menunjukkan bahwa kinerja TKPK Kabupaten Sintang masih belum maksimal. Masing-masing baik kelompok program maupun kelompok kerja belum terkoordinasi dengan baik serta belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini berakibat pada pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik program intervensi pusat maupun program daerah masih belum terintegrasi sehingga belum mampu memperbaiki indikator penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu masih perlu optimalisasi peran dan fungsi dari TKPK dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang melalui peningkatan koordinasi maupun peningkatan kapasitas teknis TKPK.

Koordinasi merupakan syarat utama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan namun pada kenyaataan bukan hal yang mudah dilaksanakan. Koordinasi perlu dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring dan evlauasi kegiatan agar kebijakan maupun program dan/atau kegiatan dapat bersinergi, terintegrasi, dan sinkron satu sama lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) program dan/atau kegiatan. Satu data pembangunan yang dijadikan basis data dan menyediakan indikator-indikator penanggulangan kemiskinan merupakan instrumen yang harus disepakati dan menjadi acuan bersama dalam rangka penanggulangan kemiskinan sehingga tidak terjadi salah target, sasaran dan lokasi dari program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan keberpihakan APBD yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan (*pro poor budgeting*). Penganggaran yang optimal akan mampu menghasilkan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan yang maksimal. Keberpihakan anggaran ini juga termasuk alokasi BOP TKPK sehingga bisa melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang berkontribusi dalam percepatan pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang sesuai dengan target nasional, provinsi dan kabupaten. Dukungan peningkatan BOP TKPK juga diperuntukkan agar kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dapat teratasi. Percepatan pengurangan angka kemiskinan juga tidak bisa optimal apabila

hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten semata, perlu adanya keterlibatan, kemitraan dan kerjasama dari semua pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Keempat kondisi (syarat) tersebut merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar percepatan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai sesuai dengan target capaian indikator-indikator penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka perlu adanya penguatan kapasitas TKPK dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK dalam perencanaan penganggaran program penanggulangan kemiskinan serta pemantauan pelaksanaannya.
2. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi untuk memantapkan basis perencanaan program penanggulangan kemiskinan dan penetapan sasarannya di kabupaten Sintang.
3. Peningkatan dukungan APBD untuk operasionalisasi kegiatan TKPK Kabupaten Sintang.
4. Penguatan komitmen Kepala Daerah sebagai penanggungjawab TKPK dan Wakil Kepala Daerah sebagai Ketua TKPK untuk memobilisasi fungi SKPD terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
5. Kebijakan alih tugas (mutasi) yang mempertimbangkan kesinambungan peran Tim Teknis TKPK Kabupaten Sintang.
6. Peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain terutama sektor dunia usaha (CSR) untuk mengkonsolidasikan program dan memobilisasi dana bagi tujuan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sintang.

6.2. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi bertujuan menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program; mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program; memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program, dari segi output, manfaat maupun dampaknya; dan menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program. Pemantauan program dan evaluasi program berbeda dalam setidaknya tiga hal pokok, yaitu fokus, pemanfaatan informasi, dan pelaksananya. Fokus pemantauan adalah pada proses, dengan membandingkan pelaksanaan dengan rencana/prosedur yang sudah ditentukan. Sedangkan, evaluasi meletakkan fokus pada keluaran, hasil dan dampak : mengacu pada tujuan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program, dan menggunakan kelompok kontrol. Informasi hasil pemantauan digunakan untuk

mengendalikan pelaksanaan program. Sedangkan, informasi hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan masa depan program.

Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program atau pemangku kepentingan lain dari program yang bersangkutan. Sedangkan, evaluasi lebih sering dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga non-pemerintah. Pemantauan menyediakan informasi tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program, yang diperlukan untuk tujuan pengendalian program. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan pertanyaan pokok : (1) apakah program dan tahapannya dilaksanakan sesuai disain dan prosedur; (2) apakah program atau tahapan program dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan; (3) apakah anggaran program terserap sesuai dengan rencana; dan (4) apa masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik yang telah diantisipasi maupun yang belum untuk selanjutnya dicoba diatasi.

Proses pemantauan akan menghasilkan informasi berupa analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya; analisis indikator kinerja kunci dan implementasi program. Sebagai dasar untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (output). Informasi tersebut juga membantu pemerintah dalam memahami sebab keberhasilan, kelemahan maupun kegagalan program. Pemantauan akan mendukung pengambilan kebijakan. Informasi yang didapatkan sebagai hasil pemantauan membantu pemerintah dengan menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan program, baik dari segi biaya maupun hasil/dampak. Pemantauan membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek, dalam mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Manfaat lain yang tak kalah penting dari pemantauan adalah meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Informasi hasil pemantauan menyediakan bukti dasar tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Adanya rencana sistem monitoring akan membantu menyediakan bukti-bukti yang menunjukkan efektif tidaknya pelayanan dan program yang dijalankan, baik dari segi biaya maupun dampak. Monitoring juga akan membantu dalam memutuskan apakah kebijakan dan program yang ada layak dikembangkan. Selain itu juga membantu mengidentifikasi masalah dan kesulitan dalam pelaksanaan. Manfaat lain dari pelaksanaan monitoring adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menunjukkan bukti bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik. Sementara adanya mekanisme pengaduan masyarakat akan bermanfaat sebagai media dalam merespon dan menangani masalah yang muncul dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga akan mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pelaksanaan kegiatan

penanggulangan kemiskinan, sekaligus sebagai sistem kontrol sosial bagi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan.

6.3. Struktur Kelembagaan dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota bahwa salah satu fungsi TKPK Kabupaten/Kota adalah penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam hal efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, TKPK melakukan monitoring dan evaluasi setidaknya pada 2 (dua) aspek :

1. Monitoring terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di tiap bidang SKPD.
2. Monitoring terhadap program-program penanggulangan kemiskinan bersasaran.
3. Evaluasi terhadap output program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di tiap bidang SKPD.
4. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (outcome) kemiskinan.

Dengan demikian, TKPK dapat melakukan monitoring terhadap output program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dengan memanfaatkan mekanisme monitoring yang sudah ada di tiap SKPD. Hal-hal yang penting dalam rencana sistem monitoring, antara lain : 1) Mekanisme dan Prosedur Monitoring; 2) Indikator Monitoring; dan 3) Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Dalam hal pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota, disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 bahwa Bupati/Walikota melaporkan

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijakan secara objektif. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap. Konsolidasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga swadaya masyarakat, media massa, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

6.4. Metode Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan dengan mengamati tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program. Dalam setiap tahapan, terdapat fokus pengamatan dengan indikator tertentu menurut jenis program. Seperti terlihat pada Gambar 8.1, dalam tahapan perencanaan, fokus pengamatan adalah masukan (input) program dengan indikator sumberdaya yang mencakup anggaran, sumberdaya manusia dan rencana kerja.

Gambar 6.2 Fokus dan Indikator Pemantauan

Dalam tahapan pelaksanaan, fokus pengamatan adalah proses (kegiatan) program, dengan indikator pelaksanaan seperti pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi. Sedangkan dalam tahap pasca- pelaksanaan, fokus pengamatan adalah hasil program, dengan indikator hasil keluaran atau output program. Logika yang menghubungkan masing-masing fokus pengamatan, dari masukan (input) sampai dampak (impact) program dapat lebih mudah dibangun dengan menggunakan model pernyataan kondisi "If- Then", seperti yang diilustrasikan pada Gambar 8.2. Proses pemantauan dilakukan pada focus masukan, kegiatan dan hasil (seperti yang tercantum di

dalam kotak). Kegiatan yang tercantum di luar kotak dalam gambar tersebut merupakan proses evaluasi. Rangkaian logika yang digunakan adalah sama, antara pemantauan dan evaluasi.

Gambar 6.3 Model Pernyataan Kondisi "If-Then"

Ada beberapa pertanyaan utama yang perlu diajukan baik kepada pelaksana program maupun penerima manfaatnya, untuk memperoleh informasi kunci yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Kepada Pelaksana Program**
   (1) Apa tujuan utama program tersebut?
   (2) Kapan program tersebut dimulai, bagaimana progress dan kapan rencana program tersebut berakhir?
   (3) Berapa anggaran yang telah disediakan untuk mendukung program tersebut? Berapa yang terserap?
   (4) Apa sasaran dari program tersebut?
   (5) Berapa banyak kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
   (6) Apa kriteria dari kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
   (7) Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut?

2. **Kepada Penerima Manfaat Program**
   (1) Apa manfaat program?
   (2) Siapa saja yang berpartisipasi dalam program? Bagaimana partisipasi perempuan di dalamnya? Bagaimana partisipasi kelompok sasaran lainnya?
   (3) Bagaimana pendapat mereka tentang program tersebut?

Tolok ukur pelaksanaan pemantauan adalah rangkaian indikator kinerja program, meliputi target output dan outcome suatu program. Sedangkan tolok ukur evaluasi adalah indikator kinerja

capaian program penanggulangan kemiskinan setiap tahun atau akhir dari suatu periode program. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi :

1. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, sejak proses perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan;
2. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan;
3. Metode pemantauan dan evaluasi, ditentukan dan dilakukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara umum, kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan dan program yang direncanakan dalam perangkat daerah dapat dilaksanakan/direalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran?
2. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan?
3. Apakah indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan yang meliputi keluaran, hasil, manfaatdan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berhasil dilaksanakan? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut mengapa?
4. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilanjutkan tanpa perbaikan, dilanjutkan dengan perbaikan atau merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbeda?
5. Apakah hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan bahan umpan balik bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan untuk periode sekarang maupun yang akan datang ?

Pada prinsipnya evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada indikator kinerja yang ditetapkan. Penghitungan capaian kinerja memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut.

a. **Indikator Invers,** yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik. Persentase capaian target untuk indikator positif dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

b. **Indikator Convers,** yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek. Persentase capaian target untuk indikator negatif dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target - (Realisasi - Target)}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Evaluasi pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap keseluruhan dokumen perencanaan, karena sifatnya yang lebih sederhana yaitu hanya dengan membandingkan capaian dengan target sehingga tidak membutuhkan analisis yang rumit. Fokus evaluasi ditujukan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan, dan tindak lanjut yang direkomendasikan. Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan up to date. Mekanisme pengumpulan data biasanya menggunakan penelaahan dokumen (document review), data survei yang dilakukan sendiri maupun hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain seperti BPS, World Bank, UNDP dan sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, evaluasi pengukuran kinerja tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga perlu menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan/program/kegiatan maupun menjelaskan permasalahan yang menyebabkan kebijakan/program/kegiatan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis ini sangat penting sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya serta pengambilan kebijakan atas pelaksanaan program/kegiatan, apakah program/kegiatan tersebut akan dilanjutkan, dihentikan atau dikembangkan?

Dalam rangka memudahkan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan program maka perlu dibuat notifikasi capaian kinerja berdasarkan capaian indikator masing-masing program. Teknik penilaian status capaian kinerja terhadap target akhir program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Kriteria Notifikasi Capaian Kinerja

Notifikasi	Warna	Kriteria Notifikasi	Kategori
	Hijau	Apabila terget tercapai ≥ 95%	Sudah tercapai atau *On Track/ On Trend*
	Kuning	Apabila mencapai target < 95% dan ≥ 75%	Perlu kerja keras
	Merah	Apabila target mencapai < 75%	Sulit tercapai

BAB 7

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026 disusun dengan upaya kerja keras seluruh Tim yang terlibat di dalamnya, proses diskusi yang melelahkan dan berbagai pertemuan yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun. Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai paga tahapan dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya kerja yang lebih keras untuk benar-benar mewujudkan tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang.

LAMPIRAN I

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

LAMPIRAN I

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SINTANG

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
Strategi 1: Peningkatan kondisi ekonomi untuk percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan											
1	Ekonomi	Kinerja Pembangunan Ekonomi belum optimal dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Tingginya inflasi	Ketergantungan produk dari luar daerah	Memetakan Komoditas yang bergantung pada suplay dari luar daerah						
					Meningkatkan Produktifitas Komoditas yang didatangkan dari luar daerah						
				Kelangkaan dan distribusi barang	Penataan distribusi barang/jasa untuk menghindari kelangkaan		Operasi Pasar	Terlaksananya Operasi Pasar dengan jumlah barang yang memadai dan tepat sasaran	Masyarakat di Kabupaten Sintang	Jumlah Barang yang didistribusikan dan jumlah masyarakat yang membeli produk operasi pasar	DISPERINDAGKOP-UKM
				Produksi Komoditas Belum Mencukupi Kebutuhan Dalam Daerah	Meningkatkan produktifitas komoditas untuk mencukupi dalam daerah						

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
			Perutmbuhan Ekonomi Kurang Inklusif	Bertumpu pada sektor padat modal	Menciptakan kegiatan padat karya						
			Keterbatasan Investasi	Bertumpu pada PMDN	Membuka peluang investasi PMA						
				Keterbatasan Akses Modal	Mendorong akses modal ke UMKM						
			Rendahnya Produktiiftas Sektor dan Sub Sektor Ekonomi	Dominasi Penduduk Miskin dan Rentan di Sektor Pertanian	Pemetaan dan Pendampingan masyarakat yang bekerja di Sektor Pertanian						
				Produktifitas UMKM Belum Optimal	Pemetaan dan Pendampingan UMKM						
2	Pengangguran	Meningkatnya Penganggguran Akibat Pandemi	Tenaga Kerja baru tidak terserap lapangan kerja	Keterbatasan Lapangan Pekerjaan	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan kulitas dan Produktivitas tenaga kerja	Para Pencari Kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans
				Keterbatasan wirausaha baru	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Meningkatkan Penciptaan	Program pelatihan kerja dan produktivit	Terlaksananya Peningkatan kulitas dan	Para Pencari Kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					Bagi Pencari Kerja	Lapangan Usaha Baru	as tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja			
			Pemutusan Hubungan Kerja	Usaha bangkrut karena penjualan menurun	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan kulitas dan Produktivitas tenaga kerja	Para Pencari Kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans
				Usaha bangkrut karena ongkos produksi naik	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan kulitas dan Produktivitas tenaga kerja	Para Pencari Kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans
Strategi 2: Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan											
1	Kesehatan	Rendahnya akses layanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan	Tingginya Kematian Ibu dan Anak	Pelayanan Ibu Hamil kurang standar	Jejaring/ Pelacakan dan validasi ibu hamil atas pelayanan ANC (Ante Natal Care) yang telah diberikan	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 2.196 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						sesuai standar					
					Sweeping ANC sesuai standar pada ibu hamil yang belum mendapatkannya	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 2.196 orang	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Komplikasi Kehamilan kurang standar	Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Peningkatan pelayanan kesehatan komplikasi kebidanan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Hamil dengan Komplikasi	Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 631 orang	Dinas Kesehatan
					Pemantapan sistem rujukan maternal dan neonatal dengan keterlibatan masyarakat (RT;	Peningkatan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Lintas sektoral/ Lintas Program	Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 631 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					RW/Dusun; Desa/Kelurahan; Kecamatan; Kabupaten)	komplikasi kebidanan sesuai standar	Kesehatan Masyarakat				
				Pelayanan Ibu Melahirkan kurang standar	Jejaring/ Pelacakan dan validasi perencanaan waktu dan tempat kelahiran dengan keterlibatan masyarakat (RT; RW/Dusun; Desa/Kelurahan; Kecamatan; Kabupaten)	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.141 orang	Dinas Kesehatan
					Penyediaan jaminan total coverage persalinan mulai dari sebelum hingga sesudah persalinan	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.141 orang	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Ibu Nifas kurang standar	Jejaring/ Pelacakan dan validasi ibu nifas atas pelayanan	Peningkatan pelayanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Ibu Nifas	Jumlah ibu Nifas yang dilayani pelayanan	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					PNC (Post Natal Care) yang telah diberikan	kesehatan ibu nifas sesuai standar	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat		kesehatan sesuai standar 1.516 orang	
					Sweeping PNC sesuai standar pada ibu nifas yang belum mendapatkannya	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Nifas	Jumlah ibu Nifas yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.516 orang	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Bayi kurang standar	Jejaring/ Pelacakan dan validasi Bayi atas pelayanan ksehatan yang telah diberikan	Peningkatan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bayi	Jumlah Bayi yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.619 orang	Dinas Kesehatan
					Tuntas pelayanan kesehatan Bayi	Peningkatan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bayi	Jumlah Bayi yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.619 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Pelayanan Balita kurang standar	Jejaring/ Pelacakan dan validasi Balita atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan	Peningkatan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Balita	Jumlah Balta yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 21.476 orang	Dinas Kesehatan
					Tuntas pelayanan kesehatan Balita	Peningkatan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Balita	Jumlah Balta yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 21.476 orang	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Bayi Baru Lahir kurang standar	Jejaring/ Pelacakan dan validasi Bayi Baru Lahir atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan	Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Neonatal	Jumlah Neonatal yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.879 orang	Dinas Kesehatan
					Tuntas pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan pelayanan kesehatan bayi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Neonatal	Jumlah Neonatal yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.879 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						baru lahir sesuai standar	Kesehatan Masyarakat				
			Tinggi prevalensi wasting dan stunting	Ibu Hamil KEK	Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat dan penatalaksnaan gizi buruk sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Hamil KEK	Jumlah Ibu Hamil KEK Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 519 orang	Dinas Kesehatan
					Pengawasan dan pemantaun pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat dan penatalaksnaan gizi buruk sesuai	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Hamil KEK	Jumlah Ibu Hamil KEK Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 519 orang	Dinas Kesehatan
				Ibu Hamil Anemia	Penyediaan suplemen yang berkecukupan untuk meningkatkan	Peningkatan pelayanan gizi masyarak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Ibu Hamil Anemia	Jumlah Ibu Hamil Anemia Yang mendapatkan Suplemen Tambah Darah 465 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					kadar Haemoglobin (Hb) bagi ibu hamil anemia	at dan penatalaksnaan gizi buruk sesuai	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat			
					Pengawasan dan pemantaun pemberian suplemen untuk meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil anemia	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat dan penatalaksnaan gizi buruk sesuai	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Hamil Anemia	Jumlah Ibu Hamil Anemia Yang mendapatkan Suplemen Tambah Darah 465 orang	Dinas Kesehatan
				Survailans gizi belum optimal	Peningkatan cakupan PSG (Pemantauan Status Gizi) pada Balita baik jumlah maupun frekuensinya	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat dan penatalaksnaan gizi buruk sesuai	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Balita	Jumlah Balita Yang disurvey satatus gizi 14.646 orang	Dinas Kesehatan
					Pengawasan dan pemantaun pemberian makanan tambahan	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Balita	Jumlah Balita Wasting Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 2.280 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					berbasis pangan lokal bagi Balita	penatalaksnaan gizi buruk sesuai	Kesehatan Masyarakat				
				Asupan gizi Balita Rendah	Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Balita	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat dan penatalaksnaan gizi buruk sesuai	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Balita Wasting dan Stunting	Jumlah Balita Wasting Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 2.280 orang	Dinas Kesehatan
			Tingginya potensi penyebaran TBC Paru	Rendahnya PHBS	Pendidikan dan Pelatihan Pendampingan keluarga dengan TBC bagi kader kesehatan	Peningkatan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC (BTA +)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terduga TBC Paru	Jumlah terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar 1.277 orang	Dinas Kesehatan
					Pendampingan keluarga dengan TBC dalam upaya pengobatan dan	Peningkatan Penemuan dan Penangan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Penderita TBC Paru	Jumlah kesembuhan penderita TBC Paru 259 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					pencegahan penularannya	an Penderita Penyakit TBC (BTA +)	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat			
				Tempat tinggal kurang layak	Strategi perubahan perilaku	Peningkatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keluarga dengan TBC Paru	Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan
				Tidak ada biaya untuk berobat	Penyediaan obat hingga masa pengobatan selesai, termasuk penatalaksanaan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang ditimbulkan	Peningkatan ketersediaan obat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penderita TBC Paru	Jumlah obat paket penderita TBC Paru 259 paket	Dinas Kesehatan
					Service delivey, baik penderita ke fasilitas kesehatan maupun obat dari fasilitas kesehatan ke	Peningkatan UKBM	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengawas Minum Obat	Jumlah kasus TBC Terdaftar 547 orang	Dinas Kesehatan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					rumah tinggal penderita						
			Rendahnya akses fasilitas pelayanan keseahatan	Biaya transportasi terbatas	Kunjungan pelayanan kesehatan terpadu secara periodik	Penyediaan fasilitas kesehatan, terutama di tingkat desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Desa yang tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Khusus Desa yang tidak memiliki fasiltas kesehatan minimal 4 kali setahun	Dinas Kesehatan
				Sarana transportasi terbatas	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi untuk prasarana rujukan ke fasilitas kesehatan	Penyediaan fasilitas kesehatan, terutama di tingkat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kader dan Perangkat Desa/Kelurahan	Jumlah Posyandu tidak aktif 308 posyandu	Dinas Kesehatan
				Tidak biaya untuk premi Jamkes	Subsidi untuk pembayaran premi	Jaminan pelayanan kesehatan semesta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengambil Kebijakan		Dinas Sosial

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
							Kesehatan Masyarakat				
				Tidak masuk PBI Jamkes	Pemutakhiran data PBI Jamkes secara periodik	Jaminan pelayanan kesehatan semesta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengambil Kebijakan		Dinas Sosial
2	Pendidikan	Rendahnya akses layanan pendidikan masyarakat miskin dan rentan miskin	rendahnya aksesibilitas layanan pendidikan	sarana pendidikan jauh	penyediaan layanan pendidikan	Peningkatan jumlah asrama siswa	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah berasrama	Jumlah Asrama yang dibangun	DISDIKBUD
				sarana transportasi terbatas	penyediaan bis sekolah melalui proposal (MoU) CSR	Penyediaan Angkutan sekolah gratis	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Tercapainya penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	DISDIKBUD
			Rendahnya tingkat Partisipasi Pendidikan	masih rendahnya APM/APK SMP	bantuan operasional siswa SMP	Beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	Jumlah siswa SMP	DISDIKBUD

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Masih rendahnya APM/APK PAUD	bantuan operasional siswa PAUD	Beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peserta didik	Jumlah siswa PAUD	DISDIKBUD
			Tingginya angka buta huruf	terbatasnya akses sarana belajar	Digitalisasi sekolah	Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	Jumlah peserta PKBM dan SPNF SKB	DISDIKBUD
				Rendahnya mativasi untuk sekolah	Bantuan Operasional Siswa	Pemberian Layanan Pendidikan gratis	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	Jumlah SD dan SMP	DISDIKBUD
			Tingginya angka putus sekolah	Rendahnya latar belakang pendidikan orang tua	Bantuan Operasional Siswa	Peningkatan peran Komite sekolah	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Komite Sekolah	Jumlah Komite SD dan SMP	DISDIKBUD

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Anak membantu orang tua bekerja	Bantuan Operasional Penyelanggaraan Pendidikan	Pemberian Layanan Pendidikan gratis	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Peserta PKBM dan SPNF	Jumlah Peserta PKBM dan SPNF	DISDIKBUD
				tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah	Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas melalui bantuan pengganti SPP	Pemberian Layanan Pendidikan gratis	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	Jumlah SD dan SMP	DISDIKBUD
				Pernikahan anak usia dini	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	Pemilihan Duta Genre (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Remaja	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Kelompok	DKBP3A
				Anak membantu orang tua bekerja	TRIBINA	Pembentukan Kelompok BINA Keluarga Remaja (BKR)	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Henat Generasi	Kelompok Usia Balita, Remaja, Lansia di Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPK	DKBP3A

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
								Berencana, Kelanjut Usian Serta Pengelolaan Keuangan keluarga)		S,PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Rendahnya akses layanan program kesetaraan pendidikan	Layanan Paket A, B, C di Kecamatan	Pelayanan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Peserta PKBM dan SPNF	Jumlah Peserta PKBM dan SPNF	DISDIKBUD
3	Infrastruktur Dasar	Belum optimalnya layanan Infrastuktur Dasar	Sanitasi yang tidak layak	Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat Sadar Sanitasi	Prilaku BABS	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Secara Luas dan Merata	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa ODF	Desa ODF	Dinas Kesehatan
					Tidak Memiliki Jamban Sehat		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Kualitas Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Jamban Sehat	Desa ODF	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rendahnya kualitas infrastruktur	Rendahnya kualitas jalan	Peningkatan Persentase proporsi panjang	Pemantapan Kapasitas	Porgram Penyelengg	Meningkatnya Kulaitas Jalan Kabupaten	Jumlah Ruas Jalan Desa	Desa Tertinggal	Dinas Pekerjaan Umum

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
			Transportasi dan konektivitas antar moda	Belum optimalnya pembangunan Jembatan	jalan dalam kondisi baik	dan Kualitas Jalan dan Jembatan	araan Jalan Kabupaten		Jembatan Kayu	Jembatan kayu yang rusak	Dinas Pekerjaan Umum
				Rendahnya ketersediaan Moda Transportasi Perhubungan	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan dan Sungai	Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Penyelanggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Desa tertinggal dan tidak terlayani transportasi	Desa tertinggal dan tidak terlayani transportasi	Dinas Perhubungan
			Belum tersedianya Air bersih	Sumber air jauh	Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih	Peningkatan Ketersediaan SPAM Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sintang	Jumlah Desa		Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan
									Jumlah Desa		Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan
				Kualitas air baku yang buruk					Jumlah Desa		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Inventarisasi dan Pemanfaatan			Jumlah Desa		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Mahalnya biaya penyediaan air bersih		Sumber Air Baku			Jumlah Desa		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rumah tidak layak huni	Krisis Ekonomi	Peningkatan Kualitas RTLH Sesuai dengan Persyaratan dan Tsandar Rumah Layak Huni	Pendataan Kondisi Perumahan dan Permukiman		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Desa	Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Konsep Rumah Sangat Sedrhana (RSS)		Renovasi / Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Kualitas Permukiman Kumuh	Lokasi Kumuh	Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Peningkatan Ketersediaan untuk Pengembangan Perumahan					
				Kontuksi Rumah yang tidak sesuai standar		Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Kumuh			Pemilik Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Sanitasi Buruk		Optimalisasi			Mesyarakat yang belum	Rumah Susun	Dinas Perumahan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						Pengembangan Kawasan Permukiman Terpadu			memiliki rumah		dan Kawasan Permukiman
			Belum adanya perluasan jaringan listrik	Kondisi jalan menuju Desa dalam keadaan rusak	mengkaji dan menganalisis kebutuhan dan jangkauan persebaran jaringan listrik	memperbaiki akses jalan yang rusak					
				Belum adanya jaringan listrik		pengembangan sumber tenaga alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik dari tenaga surya dan air					
				Masih rendahnya penerangan di Desa terpencil							
4	Administrasi Kependudukan dan Pencat	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan khususnya	Masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan	Kondisi geografis Kabupaten Sintang	Peningkatan Pelayanan Adminduk melalui Pelayanan	Peningkatan kualitas layanan publik secara	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk	Masyarakat Kab Sintang	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
	atan sipil	masyarakat miskin dan rentan	bantuan sosial dari Pemerintah karena tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)		Langsung Jemput Bola	berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik					
				Infrastruktur jalan yang belum memadai	Pelayanan Adminduk Online	Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk	Masyarakat Kab Sintang	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Perekeman KTP elektronik di	Peningkatan kualitas layanan publik	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk	Masyarakat Kab Sintang	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					setiap Kecamatan	secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik					
				Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya dokumen adminduk	Pengoptimalan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Adminduk kepada Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk	Masyarakat Kab Sintang	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang	Kondisi geografis Kabupaten Sintang	Peningkatan Pelayanan Adminduk melalui	Peningkatan kualitas layanan	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Masyarakat Kab Sintang	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
			belum memiliki Akta Kelahiran		Pelayanan Langsung Jemput Bola	publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik					Pencatatan Sipil
				Infrastruktur jalan yang belum memadai	Pelayanan Adminduk Online	Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Masyarakat Kab Sintang	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Kurangnya kesadaran orang tua	Pengoptimalan Sosialisasi Peraturan dan	Peningkatan kualitas	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan	Masyarakat Kab Sintang	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				tentang pentingnya Akta Kelahiran	Kebijakan Adminduk	layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		Kepemilikan Akta Kelahiran			Pencatatan Sipil
Strategi 3: Peningkatan dan perluasan perlindungan sosial yang komprehensif											
1	Sosial	Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan belum komprehensif	Rendahnya cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial	Keterbatasan anggaran daerah	prioritas anggaran daerah terhadap pelayanan dasar/ SPM	Meningkatkan Prioritas Pelayanan Dasar/ SPM terhadap PPKS	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial Persentese penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasar	orang	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
					Penanganan korban bencana alam/sosial	Meningkatkan penanganan korban bencana	Penanganan Bencana	Prosentase Penanganan Bencana	Korban Bencana	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						alam/sosial					
				Overlapping penerima bantuan sosial dan jaminan sosial	melakukan aktivasi kartu JKN/Jamkesda penerima Jaminan Sosial	Optimalisasi masyarakat miskin yang mendapatkan JKN/Jamkesda	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	PKS dengan BPJS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM)	Dinas Sosial
			Rendahnya akurasi bantuan sosial dan jaminan sosial	Usulan DTKS desa/kel belum valid	Perbaikan usulan DTKS desa/ kelurahan	Meningkatkan Validasi usulan DTKS desa/ kelurahan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jiwa	Jumlah Perbaikan usulan DTKS desa/kel	Dinas Sosial
				DTKS kurang akurat	Akurasi DTKS	Optimalisasi Akurasi DTKS	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jiwa	Jumlah Akurasi DTKS	Dinas Sosial
				Validasi dan verifikasi belum optimal	verifikasi dan validasi DTKS secara Reguler	Optimalisasi Akurasi DTKS	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jiwa	Jumlah verifikasi dan validasi DTKS secara reguler	Dinas Sosial
				Kesalahan data kependudukan	Perbaikan Data Kependudukan	Optimalisasi Perbaika	Perlindungan dan	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jiwa	Jumlah Perbaikan Data Kependudukan	Dinas Sosial

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						n Data Kependudukan	Jaminan Sosial				
				Data DTKS dan kependudukan tidak sinkron	Singkronisasi DTKS dengan Data Kependudukan	Optimalisasi Singkronisasi DTKS dengan Data Kependudukan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	keluarga	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Rendahnya Penanganan PPKS	Kurangnya fasilitasi/ sarana binaan PPKS	fasilitasi PPKS	Meningkatkan Fasilitasi terhadap PPKS (warga KAT)	Pemberdayaan Sosial	Prosentase Pemberdayaan Sosial	Desa/Kel	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Dinas Sosial
					fasilitasi PPKS	Meningkatkan Fasilitasi terhadap PPKS (Penyandang Disabilitas)	Rehabilitasi Sosial	Prosentase Rehabilitasi Sosial	PPKS	jumlah Fasilitasi terhadap PPKS	Dinas Sosial
				Kurangnya dukungan PSKS	Optimalisasi Tali Asih terhadap PSKS	Meningkatkan Kinerja Potensi	Pemberdayaan Sosial	Prosentase Pemberdayaan Sosial	TKSK	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi dan	Dinas Sosial

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan	
					Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada PSKS	Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan Sosial	Prosentase Pemberdayaan Sosial	LKS	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Dinas Sosial
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan Bencana	Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Penanganan Bencana	Prosentase Penanganan Bencana	Kampung	jumlah Penyelenggaraan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial
					Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatkan peran serta Taruna Siaga Bencana	Penanganan Bencana	Prosentase Penanganan Bencana	Tagana	jumlah Penyelenggaraan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
2	Kebencanaan	Tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana	Banyaknya Kawasan Resiko Bencana	Tidak sesuai tata ruang	Sosialisasi Kontijensi Kebencanaan	Meningkatkan Pelayanan informasi Rawan bencana, meningkatkan penanganan pasca bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah kajian kebutuhan pasca bencana yang akan dilaksanakan	Masyarakat di daerah Rawan bencana	Jumlah kajian kebutuhan pasca bencana yang akan dilaksanakan	BPBD kabupaten Sintang
				Degradasi Lingkungan	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Meningkatkan Penanganan Pasca bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah dampak bencana infrastruktur, fasum, rumah tinggal yang diidentifikasi selanjutnya diusulkan untuk direbilitasi/rekonstruksi	infrastruktur, fasum, rumah tinggal yang diidentifikasi selanjutnya diusulkan untuk direbilitasi/rekonstruksi	Jumlah dampak bencana infrastruktur, fasum, rumah tinggal yang diidentifikasi selanjutnya diusulkan untuk direbilitasi/rekonstruksi	BPBD kabupaten Sintang
				Perubahan Iklim	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten	Optimalisasi Regulasi dan Penangulangan Bencana kabupaten	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah regulasi penanggulangan bencana	regulasi penanggulangan bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana	BPBD kabupaten Sintang

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
			Rendahnya kesiapsiagaan bencana	Rendahnya Kesadaran Masyarakat Atas Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatkan sosialisasi terhadap peran serta Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Jumlah wilayah yang dilaksanakan sosialisasi dan Patroli untuk pencegahan karhutla	sosialisasi dan Patroli untuk pencegahan karhutla	Jumlah wilayah yang dilaksanakan sosialisasi dan Patroli untuk pencegahan karhutla	BPBD kabupaten Sintang
				Kurangnya Respon Masyarakat terhadap informasi BMKG	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Optimalisasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Jumlah data dan pembuatan peta rawan bencana Kabupaten/Kota	peta rawan bencana Kabupaten	Jumlah data dan pembuatan peta rawan bencana Kabupaten	BPBD kabupaten Sintang
			Banyaknya Kejadian Bencana	Banyaknya Lokasi Rawan Bencana	Penyediaan peralatan perlindungan	Meningkatkan Pelayana	program Penanggul	Jumlah Peralatan Pemadaman	tersedianyaPeralatan Pemadaman	Jumlah Peralatan Pemadaman	BPBD kabupaten Sintang

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	angan Bencana	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kebakaran Hutan dan Lahan	
				Masih Banyaknya Masyarakat yang Bermukim di Daerah Rawan Becana/pinggiran sungai	Tersedinya SDM masyarakat dalam pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan bencana	program Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	Tersedinya SDM masyarakat dalam pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	BPBD kabupaten Sintang
Strategi 4: Pengembangan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan											
1	Ketenagakerjaan	Terbatasnya Akses dan Kesempatan Kerja, serta Rendahnya Pendapatan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan	Rendahnya kualitas tenaga kerja masyarakat miskin dan rentan miskin	Masih rendahnya tingkat pendidikan, tenaga terampil dan terlatih	Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi	Program pendidikan dan pelatihan vokasi	Meningkatnya Pendididkan dan Pelatihan Vokasi	Para Pencari Kerja	Menurunya angka pengangguran	Disnakertrans
					Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster	Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Para Pencari Kerja	Menurunnya angka pengangguran	Ketenagakerjaan LLK UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					kompetensi : dengan jenis pelatihan : 1). Pelatihan Mekanik Sepeda Motor. 2). Pelatihan Las Listrik. 3). Pelatihan Garmen /Menjahit. 4). Pelatihan Mekanik Mobil Bensin, 5). Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut.	berdasarkan klaster kompetensi yang diperlukan					
				Terbatasnya sarana dan akses Diklat Tenaga Kerja	Pembangunan Gedung BLK baru	Melaksanakan pembangunan gedung baru BLK yang lebih representatif	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Gedung Pelatihan BLK	Meningkatnya kulaitas bangunan gedung Pelatihan	Ketenagakerjaan LLK UKM
					Peningkatan sarana dan prasarana	Meningkatkan sarana dan	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Gedung Pelatihan	Meningkatnya Kualitas pendukung Gedung Pelatihan	Ketenagakerjaan LLK UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					gedung diklat LLK-UKM	prasarana gedung diklat LLK-UKM	Daerah Kab/Kota				
					Peningkatan peralatan dan bahan diklat pada LLK-UKM	Meningkatkan peralatan dan bahan diklat pada LLK-UKM	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peralatan Pelatihan BLK	Meningkatnya Peralatan Pelatihan Kerja	Ketenagakerjaan LLK UKM
			Rendahnya produktifitas kerja	Kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi	Meningkatkan inovasi dan kreatifitas, serta pemanfaatan teknologi	Meningkatkan inovasi dan kreatifitas, serta pemanfaatan teknologi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Para Pencari Kerja (Penganggura n)	Para Pengangguran	Ketenagakerjaan LLK UKM
				Masih rendahnya budaya dan semangat kerja	Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan bagi masyarakat khususnya pencaker	Meningkatkan budaya dan semangat kerja bagi masyarakat khususny	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelayanan antar kerja	Jumlah Perusahaan yang terdata menggunakan pelayanan antar kerja	Para Pencari kerja	Urusan Ketenaga kerjaan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						a pencaker					
			Terbatasnya akses dan lapangan pekerjaan	Mayoritas pekerjaan dan lapangan usaha masyarakat miskin dan rentan yang ada di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan tradisional	Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru	Meningkatkan Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelayanan penempatan tenaga kerja	Para Pencari Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Bidang urusan ketengakerjaan
				Mayoritas pekerjaan dan lapangan usaha masyarakat miskin dan rentan yang ada di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan tradisional	Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru	Meningkatkan Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelayanan penempatan tenaga kerja	Para Pencari Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Bidang Urusan Ketenaga Kerjaan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Terbatasnya akses dan sumber permodalan	Pemberian kemudahan akses dan sumber permodalan Pasca Pelatihan	Pemberian kemudahan akses dan sumber permodalan, berupa stimulan Pasca Pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Para Pencari Kerja (Penganggguran)	Para Pengangguran	Urusan Ketenaga kerjaan
				Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan	Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan bagi masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan semangat kerja bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelayanan penempatan tenaga kerja	Para Pencari Kerja	Masyarakat miskin dan rentan	Urusan Ketenaga kerjaan
					Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, khususnya kawasan transmigrasi	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, khususnya kawasan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas pengembangan kawasan Transmigrasi	2 UPT	Meningkatnya Pembinaan SDM di Pemukiman Transmigrasi	Bidang Transmigrasi

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						transmigrasi					
2	Koperasi dan UKM	Rendah dan lemahnya kelembagaan KUKM	Kurangnya Permodalan dan pembiayaan usaha	Fasilitas kredit usaha kurang							
				Peran lembaga non perbankan kurang							
3	Kerawanan Pangan	Rendahnya Keberagaman dan Keseimbangan Konsumsi Pangan Masyrakat Miskin dan Rentan Miskin	Rendahnya pemenuhan konsumsi pangan	Keberagaman pangan rendah	Gerakan Menanam di Pekarangan	Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		RT Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah RT Miskin dan Rentan Miskin berpartisipasi menanam cabe/sawi di pekarangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Sosialisasi dan Pemberian Bibit untuk warga di desa P1 kerawanan pangan	Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Desa P1 kerawanan pangan	Jumlah desa P1 yang diberi sosialisasi dan pemberian bibit	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Pangan local belum dikembangkan	Lomba Inovasi Pangan Lokal Tingkat Desa	Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Inovasi pangan lokal desa yang berpartisipasi	Jumlah inovasi pangan lokal desa yang berpartisipasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					Pengembangan Pangan Lokal dengan melibatkan warga miskin	Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Warga miskin dan rentan miskin	Jumlah warga miskin dan rentan miskin yang berpartisipasi dalam proyek pengembangan pangan lokal (spesifik komoditas tertentu)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Sosialisasi teknologi pengolahan lanjutan komoditas pangan lokal	Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Warga miskin dan rentan miskin	Jumlah warga miskin dan rentan miskin yang mendapat sosialisasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Rendahnya produktivitas hortikultura	Susah mendapatkan bibit berkualitas	Penyaluran bibit dan pendampingan pengelolaan produk unggulan desa	Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Kelompok Petani di Desa dengan jumlah DTKS tinggi	Jumlah Poktan yang mendapat bantuan bibit dan pendampingan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Pengembangan bibit unggulan daerah	Peningkatan Produktivitas	Program Peningkatan Diversifikasi dan		Kelompok Petani di Desa dengan jumlah DTKS tinggi	Jumlah Poktan yang mendapat bantuan bibit dan pendampingan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						Hortikultura	Ketahanan Pangan Masyarakat				
				Sarpras terbatas	Bantuan pengadaan sarpras	Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Desa dengan jumlah poktan yang diprioritaskan	Jumlah desa yang mendapat bantuan sarpras	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Akses peningkatan sarpras yang susah	Peningkatan infrastruktur jalan	Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Program Peningkatan Jalan		Ruas jalan	Panjang ruas jalan akses pertanian yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum
					Peningkatan infrastruktur jembatan	Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Program Peningkatan Jembatan		Jumlah jembatan	jumlah jembatan sebagai akses pertanian yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum
4	Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Rendahnya kontribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan untuk peningkatan taraf	Rendahnya produktivitas pertanian dan daya jual hasil pertanian	Biaya produksi tinggi	Bantuan penyaluran bibit padi unggul	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Kelompok Petani di Desa dengan jumlah DTKS tinggi	Jumlah Poktan yang mendapat bantuan bibit padi unggul	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Akses distribusi susah	Peningkatan jalan usaha tani	Peningkatan Produktiv	Program Penyediaan dan		Desa dengan jumlah	Panjang ruas jalan desa sebagai	Dinas Pertanian

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
		kesejahteraan hidup Masyrakat Miskin dan Rentan Miskin				itas Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian		poktan yang diprioritaskan	akses pertanian yang ditingkatkan	dan Perkebunan
				Sarpras terbatas	Bantuan traktor	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Kelompok Petani di Desa dengan jumlah DTKS tinggi	Jumlah poktan yang mendapat bantuan traktor	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Pengelolaan masih konvensional	Pendampingan adopsi teknologi tepat guna pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyuluh Pertanian		Kelompok Petani yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah poktan yang mengadopsi teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
					Pemberdayaan kelembagaan pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian		Kelompok petani	Jumlah poktan yang didampingi	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Kurang promosi	Pasar Tani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian		Produsen hasil tani	Peningkatan jumlah peserta pasar tani (Poktan/Kelembagaan)	Dinas Pertanian dan Perkebunan
			Rendahnya produktivitas perkebunan dan daya jual	Harga tidak stabil	Penerapan Izin Perkebunan	Peningkatan Produktivitas	Program Perizinan Usaha Pertanian		Kelompok Tani/Pekebun	Jumlah Kelompok Tani dan Perusahaan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
			hasil perkebunan			Perkebunan					
				Alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan besar	Pengembangan Model Kehutanan Sosial	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Kelompok Tani/Pekebun	Jumlah Kelompok Tani, Pengadaan Bibit Karet dan Sawit	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Rendahnya keterampilan dan penerapan inovasi teknologi	Pendampingan adopsi teknologi pemanfaatan olahan sampingan hasil hutan	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian		Kelompok Tani/Pekebun	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
			Rendahnya produktivitas perikanan dan daya jual hasil perikanan	Sarpras yang minim	Bantuan sarpras perikanan	Peningkatan Produktivitas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Kelompok Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan yang mendapat bantuan sarpras perikanan	Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan
				Keterampilan pembudidayaan rendah	Pendampingan penerapan teknologi budidaya perikanan	Peningkatan Produktivitas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Kelompok Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan yang menerapkan teknologi budidaya perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Sistem pemasaran belum optimal	Pendampingan bentuk kerjasama produsen dan mitra	Peningkatan Produktivitas	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Kelompok Usaha Perikanan dan Mitra	Jumlah Mitra yang bergabung dalam pola kemitraan budidaya ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						Perikanan					
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan	Pengembangan Bumdes belum berjalan optimal	Identifikasi dan analisa kelayakan jenis ussaha Bumdes yang belum optimal	Pendampingan dan analisa kelayakan jenis usaha BUMDes yang akan dilaksanakan	Meningkatkan kapasitas dan peran BUMDes	Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	228 BUMDes dan Pengelola BUMDes	Jumlah BUMDes yang mendapatkan pendampingan dan analisa kelayakan jenis usaha BUMDes yang akan dilaksanakan	DPMPD
				SDM Pengelola yang kurang handal dan profesional	Pelaksanaan Bimtek dan Diklat bagi Pengelola Bumdes					Jumlah Pengelola BUMDes yang mendapatkan Bimtek dan Diklat	
				Kurangnya Bimtek dan Diklat							
			Pemanfaatan dana desa yang belum optimal	Kurangnya rapat-rapat koordinasi dan evaluasi	Peningkatan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi	Meningkatkan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan kualitas pengelolaan dana desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	391 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desanya	DPMPD
				Kurangnya pemahaman pengelolaan dana desa	Pelatihan dan pendampingan Pengelolaan dana desa				391 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya	DPMPD
			Pengembangan Produk unggulan lokal/desa	Belum maksimal dilakukannya identifikasi dan	Pelatihan dan pendampingan identifikasi dan penyusunan	Meningkatkan usaha ekonomi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyara	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga	391 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi	DPMPD

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
			yang belum optimal	penyusunan produk unggulan lokal/desa (Prudes)	produk unggulan lokal/desa (Prudes)	masyarakat melalui pengembangan produk unggulan lokal/desa (Prudes)	katan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		masyarakat dan pemerintah desanya	
				Pendampingan dan analisa/mapping kelayakan usaha dan pengembangan Prudes yang belum maksimal	Mapping kelayakan usaha desa dan pengembangan Prudes	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan produk unggulan lokal/desa (Prudes)					
			Pengembangan Desa Wisata belum optimal	Belum dilakukan identifikasi dan pemetaan serta penetapan desa wisata	Identifikasi dan penetapan desa wisata	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi perdesaan melalui	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	28 Desa di 14 Kecamatan	Jumlah Desa yang diidentifikasi dan ditetapkan menjadi Desa Wisata	DPMPD/Bappeda
					Penyusunan Masterplan				1 Dokumen	Tersusunnya dokumen	

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
					Pengembangan Desa Wisata	pengembangan desa wisata				Penyusunan Masterplan Pengembangan Desa Wisata	
				Belum optimalnya penggunaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata, serta belum ada investor	Pelatihan dan pendampingan penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan desa wisata; peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata (Pokdarwis); peningkatan minat investor	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi perdesaan melalui pengembangan desa wisata	Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Kerjasama Desa	28 Desa di 14 Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan desa wisata	DPMPD
				Sarana dan prasarana desa, serta kondisi infrastruktur desa yang belum memadai	Penyediaan Sarana dan Prasarana desa; Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur desa	Penyediaan Infrasruktur dan sarana dan prasarana desa	Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Desa	Sarana dan Prasarana Desa; Infraastruktur Desa	Jumlah sarana dan prasarana dan infrastruktur desa yang disediakan	DPMPD/Dinas PU
6	Perdagangan, Koperasi,	Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Turun	Proses perijinan memerlukan	Rendahnya kualitas produk dan pemasaran,	pelatihan digital marketing, pelatihan peningkatan	meningkatkan akses perijinan	Program pelayanan izin usaha	jumlah unit usaha	Koperasi dan UMKM	jumlah koperasi dan UMKM	DISPERINDAGKOP-UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
	Usaha Kecil dan Mengen gah		pengorbanan besar	serta akses perijinan	kualitas produk dan kemasan	dan permodal an bagi koperasi	simpan pinjam				
			Sarana DIstribusi Perdagangan belum merata	Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif	pengadaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan uang representatif (pasar)	penyedia an sarana dan prasaran a distribusi perdagan gan	Program peningkata n sarana distribusi perdagang an	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Pelaku UMKM	Jumlah unit	DISPERINDA GKOP-UKM
		cukup banyak koperasi yang tidak aktif	lemahnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga koperasi dan umkm	lemahnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga koperasi dan umkm	peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap berbagai laporan yang masuk	penguata n, pengawa san dan pemberd ayaan lembaga koperasi	Program Pemberday aan dan perlindung an koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, program Pengawasa n pemeriksaa n koperasi, program pemberday aan UMKM	jumlah unit usaha	Koperasi dan UMKM	JUmlah Koperasi dan UMKM	DISPERINDA GKOP-UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
			euforia pembentukan lembaga koperasi	rendahnya akses perijinan dan permodalan bagi koperasi dan umkm	mempermudah informasi dan jalan terhadap akses permodalan	penguatan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga koperasi	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	jumlah unit usaha	Koperasi dan UMKM	JUmlah Koperasi dan UMKM	DISPERINDAGKOP-UKM
		Komposisi UMKM yang kurang relatif seimbang	kurangnya dukungan pemangku kepentingan terhadap akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku umkm	kurangnya jiwa kewirausahaan, kualitas sdm koperasi dan umkm, serta akses pemasaran	bimbingan teknis	optimalisasi perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM dan industri pengolahan berbasis potensi dan sumber daya lokal, dan hilirisasi produk	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian, program pengembangan UMKM	jumlah unit usaha	Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM	DISPERINDAGKOP-UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				kurangnya akeses informasi	mentransmisikan setiap informasi	Pemanfaatan aplikasi transmisi informasi elektronik (instagram, facebook, media online)		jumlah unit usaha	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha	DISPERINDAGKOP-UKM
7	Kawasan Hutan	Rendahnya akses penghidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan	Akses HHBK belum optimal	Belum ada pemetaan potensi HHBK	Pemetaan HHBK dan pola pengembangannya (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Desa Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Desa Dalam Kawasan Hutan yang difasilitasi	DISPERINDAGKOP-UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Belum ada fasilitasi HHBK	Fasilitasi dan Pendampingan Optimalisasi Potensi HHBK (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Desa Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Desa Dalam Kawasan Hutan yang difasilitasi	DISPERINDAGKOP-UKM
			Belum ada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Belum ada fasilitasi kelompok	Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembaga		Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang dibentuk	DISPERINDAGKOP-UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
							an dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				
				Belum ada pendampingan kelompok	Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi	DISPERINDAGKOP-UKM
			Banyaknya desa dalam kawasan hutan	Pelepasan Kawasan terbatas	Pengusulan Revisi Kawasan Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan			Dokumen Revisi Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Revisi Kawasan Hutan yang diterbitkan	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
						Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu					
				Permasalahan Tata Ruang	Pengusulan Revisi RTRW	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu			Dokumen Revisi RTRW	Jumlah Dokumen Revisi RTRW yang diselesaikan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
			Skema Perhutanan Sosial belum optimal	Perijinan Perhutanan Sosial terbatas	Sosialisasi dan Pendampingan Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi		Desa Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Usaha Perhutanan Sosial di desa	DISPERINDAGKOP-UKM

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
							Dengan Para Pemangku Kepentingan				
				Fasilitasi proses PS belum optimal	Fasilitasi Perizinan Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Desa Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Usaha Perhutanan Sosial di desa	DISPERINDAGKOP-UKM
Strategi 5: Penguatan sistem pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan											
1.	Perencanaan dan	Belum optimalnya fungsi	Lemahnya desain PK	Terbatasnya riset bidang PK	Kerja sama dengan perguruan tinggi						

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
	Penganggaran	perencanaan dan penganggaran daerah dalam PK		Belum ada inovasi khusus untuk PK	Menumbuh kembangkan inovasi pada OPD yang berkaitan dengan PK						
				Lemahnya perencanaan berbasis bukti	Penguatan dalam pengelolaan data						
					Pemanfaatan data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan						
			Belum ada road map PK	Belum ada dokumen RAT PK	Menyusun dokumen RAT PK						
				Belum ada dokumen RPKD	Menyusun dokumen RPKD						
			Rendahnya efektivitas penganggaran PK	Penganggaran belum sesuai kebutuhan	Penguatan pada proses verifikasi anggaran						
					Menyusun RKA Tematik Kemiskinan						
				Terbatasnya anggaran dalam penaggulangan PK	Menambah alokasi anggaran dari berbagai sumber						

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Kebijakan pemerintah berubah	Pengawalan terhadap target-target RPJMD						
			Ketidak tepatan sasaran program PK	Belum adanya Rekonsiliasi data PK	Melakukan rekonsiliasi data PK secara berkala						
				Data sasaran kurang updated	Updating data sasaran						
				Data sasaran kurang valid	verifikasi dan validasi data						
2.	Sistem Pendukung	Belum optimalnya sistem pendukung kebijakan PK	Belum optimalnya fungsi TKPKD dan koordinasi PK	Lemahnya fungsi koordinasi	menyusun agenda pertemuan secara berkala						
				Ego sektoral OPD	Menyusun rencana aksi bersama						
			Lemahnya Kerjasama antar stakehoder	Minimnya keterlibatan aktor non pemerintah	Membentuk tim penanggulangan Kemiskinan yang berisi multi stakeholder						
			Lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi PK	Belum adanya mekanisme regular monev PK	Penyusuna jadwal monev PK						

No	Bidang/ Urusan	Isu Strategis/ Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah	Opsi Intevensi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Sasaran Target	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD
				Belum ada dokumen LP2KD	Menyusun dokumen LP2KD						

LAMPIRAN II

MATRIKS KEBUTUHAN ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

LAMPIRAN II

MATRIKS KEBUTUHAN ANGGARAN PROGRAM PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SINTANG

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
Strategi 1: Peningkatan kondisi ekonomi untuk percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan															
1	Ekonomi	Memetakan Komoditas yang bergantung pada suplay dari luar daerah													
		Meningkatkan Produktifitas Komoditas yang didatangkan dari luar daerah													
		Penataan distribusi barang/jasa untuk menghindari kelangkaan	Operasi Pasar	Jumlah Barang yang didistribusikan dan jumlah masyarakat yang membeli produk operasi pasar	DISPERINDAGKOP-UKM										
		Meningkatkan produktifitas komoditas untuk mencukupi dalam daerah													
		Menciptakan kegiatan padat karya													
		Membuka peluang investasi PMA													
		Mendorong akses modal ke UMKM													
		Pemetaan dan Pendampingan masyarakat yang bekerja di Sektor Pertanian													
		Pemetaan dan Pendampingan UMKM													

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
2	Pengangguran	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans	48 Orang	300.000.000	48 Orang	330.000.000	48 orang	363.000.000	48 orang	500000000	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	DAU
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans	48 Orang	300.000.000	48 Orang	330.000.000	48 orang	363.000.000	48 orang	500000000	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	DAU
		Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans	48 Orang	300.000.000	48 Orang	330.000.000	48 orang	363.000.000	48 orang	500000000	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Menurunnya angka pengangguran	Disnakertrans	48 Orang	300.000.000	48 Orang	330.000.000	48 orang	363.000.000	48 orang	500000000	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	DAU
Strategi 2: Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan															
1	Kesehatan	Jejaring/ Pelacakan dan validasi ibu hamil atas pelayanan ANC (Ante Natal Care) yang telah diberikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu hamil yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 2.196 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%	#########	Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%	#########	Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%	#########	Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%	#########	Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir dan Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Tempunak Kec. Tempunak	DAK-NF
		Sweeping ANC sesuai standar pada ibu hamil yang belum mendapatkannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Jumlah ibu hamil yang dilayani pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%		Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%		Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%		Cakupan K-4 Ibu Hamil 100%		Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir,	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
			Kesehatan Masyarakat	sesuai standar 2.196 orang										Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir dan Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Tempunak Kec. Tempunak	
		Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 631 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%		Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Kebong Kec. Kelam Permai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir dan Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu	
		Pemantapan sistem rujukan maternal dan neonatal dengan keterlibatan masyarakat (RT; RW/Dusun; Desa/Kelurahan; Kecamatan; Kabupaten)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 631 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%	113.000.000	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%	124.300.000	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%	136.730.000	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%	150.403.000	Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Kebong Kec.	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Kelam Permai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir dan Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu	
		Jejaring/ Pelacakan dan validasi perencanaan waktu dan tempat kelahiran dengan keterlibatan masyarakat (RT; RW/Dusun; Desa/Kelurahan; Kecamatan; Kabupaten)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu bersalin yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.141 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%	742.272.500	Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%	816.499.750	Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%	898.149.725	Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%	987.964.698	Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Emparu Kec. Dedai, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai	DAK-NF
		Penyediaan jaminan total coverage persalinan mulai dari sebelum hingga sesudah persalinan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu bersalin yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.141 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%		Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%		Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%		Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%		Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah,	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Puskesmas Emparu Kec. Dedai, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai	
		Jejaring/ Pelacakan dan validasi ibu nifas atas pelayanan PNC (Post Natal Care) yang telah diberikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu Nifas yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.516 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Emparu Kec. Dedai	
		Sweeping PNC sesuai standar pada ibu nifas yang belum mendapatkannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu Nifas yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.516 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Cakupan KF-3 Ibu Nifas 100%		Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Emparu Kec. Dedai	
		Jejaring/ Pelacakan dan validasi Bayi atas pelayanan ksehatan yang telah diberikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.619 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Bayi 100%	222.595.000	Cakupan Kunjungan Bayi 100%	244.854.500	Cakupan Kunjungan Bayi 100%	269.339.950	Cakupan Kunjungan Bayi 100%	296.273.945	Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, dan Puskesmas Dedai Kec. Dedai	DAK-NF
		Tuntas pelayanan kesehatan Bayi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.619 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Bayi 100%		Cakupan Kunjungan Bayi 100%		Cakupan Kunjungan Bayi 100%		Cakupan Kunjungan Bayi 100%		Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, dan Puskesmas	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Dedai Kec. Dedai	
		Jejaring/ Pelacakan dan validasi Balita atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balta yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 21.476 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Balita 100%		Cakupan Kunjungan Balita 100%		Cakupan Kunjungan Balita 100%		Cakupan Kunjungan Balita 100%		Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Dara Juanti Kec. Sintang, Puskesmas Jelimpau Kec. Tempunak, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Serawai Kec. Serawai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmsa Tanjung Puri Kec. Sintang dan Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir	
		Tuntas pelayanan kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balta yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 21.476 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Balita 100%		Cakupan Kunjungan Balita 100%		Cakupan Kunjungan Balita 100%		Cakupan Kunjungan Balita 100%		Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Dara Juanti Kec. Sintang, Puskesmas	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Jelimpau Kec. Tempunak, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Serawai Kec. Serawai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmsa Tanjung Puri Kec. Sintang dan Puskesmas Serangas Kec. Ketungau Hilir	
		Jejaring/ Pelacakan dan validasi Bayi Baru Lahir atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Neonatal yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.879 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Nenatal (KN-3) 100%	401.034.900	Cakupan Kunjungan Nenatal (KN-3) 100%	441.138.390	Cakupan Kunjungan Nenatal (KN-3) 100%	485.252.229	Cakupan Kunjungan Nenatal (KN-3) 100%	533.777.452	Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Emparu Kec. Dedai, Puskesmas Jelimpau Kec. Tempunak dan Puskesmas	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Kebong Kec. Kelam Permai	
		Tuntas pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Neonatal yang dilayani pelayanan kesehatan sesuai standar 1.879 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Neonatal (KN-3) 100%		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN-3) 100%		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN-3) 100%		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN-3) 100%		Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Emparu Kec. Dedai, Puskesmas Jelimpau Kec. Tempunak dan Puskesmas Kebong Kec. Kelam Permai	
		Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil KEK Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 519 orang	Dinas Kesehatan	Persentase Ibu Hamil KEK 3%	#########	Persentase Ibu Hamil KEK 2%	1.104.691.500	Persentase Ibu Hamil KEK 1%	1.215.160.650	Persentase Ibu Hamil KEK 0%	1.336.676.715	Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Kebong Kec. Kelam Permai, Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Nanga Lebang	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Kec. Kelam Permai	
		Pengawasan dan pemantaun pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil KEK Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 519 orang	Dinas Kesehatan	Persentase Ibu Hamil KEK 3%	#########	Persentase Ibu Hamil KEK 2%	#########	Persentase Ibu Hamil KEK 1%	2.999.161.055	Persentase Ibu Hamil KEK 0%	3.299.077.161	Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Kebong Kec. Kelam Permai, Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau, Puskesmsa Serangas Kec. Ketungau Hilir dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai	DAK-NF
		Penyediaan suplemen yang berkecukupan untuk meningkatkan kadar Haemoglobin (Hb) bagi ibu hamil anemia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil Anemia Yang mendapatkan Suplemen Tambah Darah 465 orang	Dinas Kesehatan	Persentase Ibu Hamil Anemia 4%		Persentase Ibu Hamil Anemia 2,5%		Persentase Ibu Hamil Anemia 1%		Persentase Ibu Hamil Anemia 0%		Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Mensiku Kec. Binjai Hulu, Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau dan	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Puskesmas Dara Juanti Kec. Sintang	
		Pengawasan dan pemantaun pemberian suplemen untuk meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil anemia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil Anemia Yang mendapatkan Suplemen Tambah Darah 465 orang	Dinas Kesehatan	Persentase Ibu Hamil Anemia 4%		Persentase Ibu Hamil Anemia 2,5%		Persentase Ibu Hamil Anemia 1%		Persentase Ibu Hamil Anemia 0%		Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian, Puskesmas Mensiku Kec. Binjai Hulu, Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau dan Puskesmas Dara Juanti Kec. Sintang	DAK-NF
		Peningkatan cakupan PSG (Pemantauan Status Gizi) pada Balita baik jumlah maupun frekuensinya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita Yang disurvey satatus gizi 14.646 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan PSG 60%		Cakupan PSG 70%		Cakupan PSG 80%		Cakupan PSG 90%		Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Ketungau Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Hulu, Puskesmas Serawai Kec. Serawai dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai	
		Pengawasan dan pemantaun pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita Wasting Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 2.280 orang	Dinas Kesehatan	Persentase Balita Gizi Kurang 20%		Persentase Balita Gizi Kurang 15%		Persentase Balita Gizi Kurang 10%		Persentase Balita Gizi Kurang <=5%		Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Nanga Ketungau Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas Serawai Kec. Serawai dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai	DAK-NF
		Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Jumlah Balita Wasting Yang mendapatkan Makanan Tambahan atau PMT 2.280 orang	Dinas Kesehatan	Persentase Balita Gizi Kurang 20%	#########	Persentase Balita Gizi Kurang 15%	#########	Persentase Balita Gizi Kurang 10%	#########	Persentase Balita Gizi Kurang <=5%	#########	Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu,	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
			Kesehatan Masyarakat											Puskesmas Nanga Ketungau Kec. Ketungau Hilir, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas Serawai Kec. Serawai dan Puskesmas Nanga Lebang Kec. Kelam Permai	
		Pendidikan dan Pelatihan Pendampingan keluarga dengan TBC bagi kader kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar 1.277 orang	Dinas Kesehatan	Cakupan penemuan terduga TBC 100%	67.315.000	Cakupan penemuan terduga TBC 100%	74.046.500	Cakupan penemuan terduga TBC 100%	81.451.150	Cakupan penemuan terduga TBC 100%	89.596.265	Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Tanjung Puri Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Serawai Kec. Serawai	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Pendampingan keluarga dengan TBC dalam upaya pengobatan dan pencegahan penularannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kesembuhan penderita TBC Paru 259 orang	Dinas Kesehatan	Angka Kesembuhan Penderita TBC Paru100%		Angka Kesembuhan Penderita TBC Paru100%		Angka Kesembuhan Penderita TBC Paru100%		Angka Kesembuhan Penderita TBC Paru100%		Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Tanjung Puri Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Serawai Kec. Serawai	
		Strategi perubahan perilaku	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 70%	751.423.900	Cakupan Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 80%	826.566.290	Cakupan Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 90%	909.222.919	Cakupan Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 95%	1.000.145.211	Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Tanjung Puri Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Serawai Kec. Serawai	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Penyediaan obat hingga masa pengobatan selesai, termasuk penatalaksanaan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang ditimbulkan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah obat paket penderita TBC Paru 259 paket	Dinas Kesehatan	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	#########	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	#########	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	#########	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	#########	Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Tanjung Puri Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Serawai Kec. Serawai	DAU
		Service delivey, baik penderita ke fasilitas kesehatan maupun obat dari fasilitas kesehatan ke rumah tinggal penderita	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah kasus TBC Terdaftar 547 orang	Dinas Kesehatan	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	154.098.000	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	169.507.800	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	186.458.580	Angka Pengobatan Lengkap Penderita TBC Paru100%	205.104.438	Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Sungai Durian Kec. Sintang, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Tanjung Puri Kec. Sintang, Puskesmas Pandan Kec. Sungai Tebelian dan Puskesmas Serawai Kec. Serawai	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Kunjungan pelayanan kesehatan terpadu secara periodik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Khusus Desa yang tidak memiliki fasiltas kesehatan minimal 4 kali setahun	Dinas Kesehatan	Frekuensi kunjungan pelayanan kesehatan khusus minmal 4 kali setahun	927.680.000	Frekuensi kunjungan pelayanan kesehatan khusus minmal 4 kali setahun	#########	Frekuensi kunjungan pelayanan kesehatan khusus minmal 4 kali setahun	#########	Frekuensi kunjungan pelayanan kesehatan khusus minmal 4 kali setahun	#########	Puskesmas Kemangai Kec. Ambalau, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu, Puskesmas Serawai Kecamatan Serawai, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah dan Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu	DAK-NF
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi untuk prasarana rujukan ke fasilitas kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Posyandu tidak aktif 308 posyandu	Dinas Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif 50%	808.183.000	Persentase Posyandu Aktif 60%	889.001.300	Persentase Posyandu Aktif 70%	977.901.430	Persentase Posyandu Aktif 80%	#########	Puskesmas Tebidah Kec. Kayan Hulu, Puskesmas Sepauk Kec. Sepauk, Puskesmas Serawai Kec. Serawai, Puskesmas Nanga Mau Kec. Kayan Hilir, Puskesmas Merakai Kec. Ketungau Tengah, Puskesmas Senaning Kec. Ketungau Hulu dan Puskesmas Pandan Kec.	DAK-NF

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Sungai Tebelian	
		Subsidi untuk pembayaran premi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Sosial										
		Pemutakhiran data PBI Jamkes secara periodik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Sosial										
2	Pendidikan	penyediaan layanan pendidikan	Pengelolaaan Pendidikan	Jumlah Asrama yang dibangun	DISDIKBUD	1 SMP berasrama	#########	1 SMP berasrama	#########	1 SMP berasrama	#########	1 SMP berasrama	#########	Kecamatan : Kelam Permai, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Serawai, Ambalau	APBD/APBN
		penyediaan bis sekolah melalui proposal (MoU) CSR	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	DISDIKBUD	3 dokumen	#########	3 dokumen	#########	3 dokumen	#########	3 dokumen	#########	Kabupaten Sintang	APBD
		bantuan operasional siswa SMP	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah siswa SMP	DISDIKBUD	19495 orang	#########	19495 orang	#########	19495 orang	#########	19495 orang	#########	Kecamatan : Binjai Hulu, Sepauk, Kayan Hulu, Ketungau Hilir, Ambalau	APBN
		bantuan operasional siswa PAUD	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah siswa PAUD	DISDIKBUD	5531 orang	#########	5531 orang	#########	5531 orang	#########	5531 orang	#########	Kecamatan : Ambalau Kayan Hulu,	APBN

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Ketungau Hilir, Serawai, Ketungau Hulu	
		Digitalisasi sekolah	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah peserta PKBM dan SPNF SKB	DISDIKBUD	12 PKBM dan 1 SKB	#########	12 PKBM dan 1 SKB	#########	12 PKBM dan 1 SKB	#########	12 PKBM dan 1 SKB	#########	Kecamatan : Sungai Tebelian, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir,Kayan Hilir Sintang	APBN
		Bantuan Operasional Siswa	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah SD dan SMP	DISDIKBUD		#########	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	Kecamatan : Ambalau, Ketungau Hulu, Sungai Tebelian, Serawai, Kayan Hulu	APBN
		Bantuan Operasional Siswa	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Komite SD dan SMP	DISDIKBUD	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	Kecamatan : Ambalau, Ketungau Hulu, Sungai Tebelian, Serawai, Kayan Hulu	APBN
		Bantuan Operasional Penyelanggaraan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Peserta PKBM dan SPNF	DISDIKBUD	1000 orang	#########	1000 orang	#########	1000 orang	#########	1000 orang	#########	Kecamatan : Sungai Tebelian, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir,Kayan Hilir Sintang	APBN
		Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas melalui bantuan pengganti SPP	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah SD dan SMP	DISDIKBUD	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	533 satuan pendidikan	#########	Kecamatan : Ambalau, Ketungau Hulu, Sungai Tebelian, Serawai, Kayan Hulu	APBN

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Kelompok	DKBP3A	14 Sekolah	Rp. 15.374.795	14 Sekolah	Rp. 15.759.165	14 Sekolah	Rp. 16.153.144	14 sekolah	Rp. 16.556.973	SMA N 1 Sintang, SMA N 2 Sintang, SMA N 3 Sintang, SMKN 1 Sintang, MAN 1 Sintang, SMA Panca Setya Sintang, SMK Budi Luhur Sintang, Stikara Sintang, SMA Mujahidin Sintang, SMA Muhammadiyah Sintang, SMA Sinar Kasih Sintang, SMP N 1 Sintang, SMP N 7 Sintang, SMA N 1 Tempunak,	APBN
		TRIBINA	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS,PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DKBP3A	15 Desa	Rp.15.375.000	15 Desa	Rp.15.759.375	15 Desa	Rp. 16.153.359	15 Desa	Rp. 16.557.193	Desa Nanga Mentatai, Desa Batu Ketebung, Desa Nusa Tujuh, Desa Nanga Abai, Desa Nanga Oran, Desa Tuguk, Desa Jentawang Hilir, Desa Lepung Pantak, Desa Radin Jaya, Desa Idai, Desa Nanga	APBN

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Bugau, Desa Kemantan, Desa Bancoh, Desa Riguk, Desa Hulu Dedai	
		Layanan Paket A, B, C di Kecamatan	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Peserta PKBM dan SPNF	DISDIKBUD	1000 orang	#########	1000 orang	#########	1000 orang	#########	1000 orang	#########	Kecamatan : Sungai Tebelian, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir,Kayan Hilir Sintang	APBN
3	Infrastruktur Dasar	Prilaku BABS	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa ODF	Dinas Kesehatan	Sanitasi Layak	Rp. 500.000.000	Sanitasi Layak	Rp. 500.000.000	Sanitasi Layak	Rp. 500.000.000	Sanitasi Layak	Rp. 500.000.000	14 Kecamatan	APBD
		Tidak Memiliki Jamban Sehat	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum (PSU)	Desa ODF	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sanitasi Layak	-	Sanitasi Layak	-	Sanitasi Layak	-			14 Kecamatan	APBD/APBN
		Peningkatan Persentase proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Porgram Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Desa Tertinggal	Dinas Pekerjaan Umum	Kualitas Jalan Desa		Kualitas Jalan Desa		Kualitas Jalan Desa		Kualitas Jalan Desa		198 Desa	APBD / APBN/ CSR
				Jembatan kayu yang rusak	Dinas Pekerjaan Umum	Kualitas Jembatan		Kualitas Jembatan		Kualitas Jembatan		Kualitas Jembatan		198 Desa	APBD / APBN/ CSR
		Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan dan Sungai	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Desa tertinggal dan tidak terlayani transportasi	Dinas Perhubungan	Moda Transportasi	1000000000	Moda Transportasi	1000000000	Moda Transportasi	1000000000	Moda Transportasi	1000000000	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, kecamatan Ambalau	APBD/APBN

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	Ketersediaan SPAM									
					Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	Kualitas SPAM									
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketersediaan SPAM		Penyedian SPAM		Penyediaan SPAM				Kecamtan Binjai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir,	APBN
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kualitas SPAM		Penyedian SPAM		Penyediaan SPAM				IKK Kelam Permai, IKK Sereawai,	APBD / APBN
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketersediaan SPAM		Ketersediaan SPAM		Ketersediaan SPAM				10 Kecamatan	APBD / APBN
		Peningkatan Kualitas RTLH Sesuai dengan Persyaratan dan Tsandar Rumah Layak Huni		Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman		Kawasan Permukiman		Kawasan Permukiman	1 M			14 Kecamatan	APBD
			Kawasan Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan	Kawasan Permukiman	100M	Kawasan Permukiman		Kawasan Permukiman	100 M			14 Kecamatan	APBD / APBN

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
					Permukiman										
				Perumahan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan		Perumahan	1 M	Perumahan	1 M			14 Kecamatan	APBD
				Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelola Perumahan		Pengelola Perumahan	500 Juta	Pengelolaan Perumahan	500 Juta			14 Kecamatan	APBD
		mengkaji dan menganalisis kebutuhan dan jangkauan persebaran jaringan listrik													
4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	Peningkatan Pelayanan Adminduk melalui Pelayanan Langsung Jemput Bola	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	#########	7 Kecamatan	#########	9 Kecamatan	#########	11 Kecamatan	#########	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk	APBD
		Pelayanan Adminduk Online	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	#########	7 Kecamatan	#########	9 Kecamatan	#########	11 Kecamatan	#########	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan	APBD

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perekeman KTP elektronik di setiap Kecamatan	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	#########	7 Kecamatan	#########	9 Kecamatan	#########	11 Kecamatan	#########	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk	APBD
		Pengoptimalan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Adminduk kepada Masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	#########	7 Kecamatan	#########	9 Kecamatan	#########	11 Kecamatan	#########	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk	APBD
		Peningkatan Pelayanan Adminduk melalui Pelayanan Langsung Jemput Bola	Program Pencatatan Sipil	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	#########	7 Kecamatan	#########	9 Kecamatan	#########	11 Kecamatan	#########	Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu,	APBD

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Kayan Hilir	
		Pelayanan Adminduk Online	Program Pencatatan Sipil	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	#########	7 Kecamatan	#########	9 Kecamatan	#########	11 Kecamatan	#########	Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Kayan Hilir	APBD
		Pengoptimalan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Adminduk	Program Pencatatan Sipil	Jumlah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	#########	7 Kecamatan	#########	9 Kecamatan	#########	11 Kecamatan	#########	Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Kayan Hilir	APBD
Strategi 3: Peningkatan dan perluasan perlindungan sosial yang komprehensif															
1	Sosial	prioritas anggaran daerah terhadap pelayanan dasar/ SPM	Rehabilitasi Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Dinas Sosial	25 orang	15.000.000	25 orang	16.500.000	25 orang	18.150.000	25 orang	19.965.000	Kec. Kayan Hilir , Kec.Dedai, Kec. Sintang,	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
				Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat di Luar Panti Sosial										Kec. Ambalau dan Kec. Ketungau Tengah	
		Penanganan korban bencana alam/sosial	Penanganan Bencana	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	100 orang	9.990.000	100 orang	11.000.000	100 orang	12.100.000	100 orang	13.296.690	Kec. Serawai, Kec. Sintang, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai dan Kec. Sepauk	DAU
		melakukan aktivasi kartu JKN/Jamkesda penerima Jaminan Sosial	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM)	Dinas Sosial	1 Dokumen	#########	1 Dokumen	#########	1 Dokumen	#########	1 Dokumen	#########	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	DAU
		Perbaikan usulan DTKS desa/ kelurahan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Perbaikan usulan DTKS desa/kel	Dinas Sosial	52.500 Keluarga	168.410.000	52.500 Keluarga	185.251.000	52.500 Keluarga	203.776.100	52.500 Keluarga	224.153.710	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	DAU
		Akurasi DTKS	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Akurasi DTKS	Dinas Sosial	52.500 Keluarga	168.410.000	52.500 Keluarga	185.251.000	52.500 Keluarga	203.776.100	52.500 Keluarga	224.153.710	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec.	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	
		verifikasi dan validasi DTKS secara Reguler	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah verifikasi dan validasi DTKS secara reguler	Dinas Sosial	52.500 Keluarga	168.410.000	52.500 Keluarga	185.251.000	52.500 Keluarga	203.776.100	52.500 Keluarga	224.153.710	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	DAU
		Perbaikan Data Kependudukan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Perbaikan Data Kependudukan	Dinas Sosial	52.500 Keluarga	168.410.000	52.500 Keluarga	185.251.000	52.500 Keluarga	203.776.100	52.500 Keluarga	224.153.710	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	DAU
		Singkronisasi DTKS dengan Data Kependudukan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	52.500 Keluarga	168.410.000	52.500 Keluarga	185.251.000	52.500 Keluarga	203.776.100	52.500 Keluarga	224.153.710	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	DAU
		fasilitasi PPKS	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Dinas Sosial	42 Keluarga	30.000.000	42 Keluarga	#########	42 Keluarga	36.300.000	42 Keluarga	39.930.000	Kec. Kayan Hulu, Kec. Ambalau, Kec. Ketungau	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
														Tengah, Kec. Serawai dan Kec. Ketungau Hulu	
		fasilitasi PPKS	Rehabilitasi Sosial	jumlah Fasilitasi terhadap PPKS	Dinas Sosial	10 orang	34.970.000	10 orang	38467000	10 orang	42313700	10 orang	46545070	Kec. Kayan Hilir , Kec.Dedai, Kec. Sintang, Kec. Ambalau dan Kec. Ketungau Tengah	DAU
		Optimalisasi Tali Asih terhadap PSKS	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Dinas Sosial	14 orang	39.280.000	14 orang	43.208.000	14 orang	47.528.800	14 orang	52.281.680	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	DAU
		Bimbingan Teknis dan Supervisi kepada PSKS	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Dinas Sosial	14 Lembaga	80.000.000	14 Lembaga	88.000.000	14 Lembaga	96.800.000	14 Lembaga	106.480.000	Kec. Serawai, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hilir dan Kec. Ambalau	DAU
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan Bencana	Penanganan Bencana	jumlah Penyelenggaraan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial	1 Kampung	29.675.000	1 Kampung	32642500	1 Kampung	35.906.750	1 Kampung	39.497.425	Kec. Serawai, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai, Kec. Sintang dan Kec. Sepauk	DAU
		Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan	Penanganan Bencana	jumlah Penyelenggara	Dinas Sosial	20 orang	48.900.500	20 orang	53.790.550	20 orang	59.169.605	20 orang	65.086.565	Kec. Serawai, Kec. Ketungau	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana										Hilir, Kec. Dedai, Kec. Sintang dan Kec. Sepauk	
2	Kebencanaan	Sosialisasi Kontijensi Kebencanaan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah kajian kebutuhan pasca bencana yang akan dilaksanakan	BPBD kabupaten Sintang	1dokumen	74.999.960	1 dokumen	74.999.960	1 dokumen	74.999.960	1 dokumen	74.999.960	Kec. Serawai, Kec. Sintang, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai dan Kec. Sepauk	DAU
		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah dampak bencana infrastruktur, fasum, rumah tinggal yang diidentifikasi selanjutnya diusulkan untuk direbilitasi/rekonstruksi	BPBD kabupaten Sintang	100%	84.999.950	100%	35000000	100%	200.000.000	100 %	200.000.000	Kec. Serawai, Kec. Sintang, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai dan Kec. Sepauk	DAU
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah regulasi penanggulangan bencana	BPBD kabupaten Sintang	2 jenis	200.000.000	2 Jenis	200.000.000	2 jenis	200.000.000	2 Jenis	200.000.000	Kec. Serawai, Kec. Sintang, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai dan Kec. Sepauk	DAU
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Jumlah wilayah yang dilaksanakan sosialisasi dan Patroli untuk pencegahan karhutla	BPBD kabupaten Sintang	7 Lokasi	655.724.505	7 lokasi	655.724.505	7 Lokasi	655.724.505	7 Lokasi	655.724.505	Kec. Serawai, Kec. Sintang, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai dan Kec. Sepauk	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Jumlah data dan pembuatan peta rawan bencana Kabupaten	BPBD kabupaten Sintang	1 Dokumen peta rawan bencana kabupaten sintang	300.000.000	1 Dokumen peta rawan bencana kabupaten sintang	300.000.000	1 Dokumen peta rawan bencana kabupaten sintang	300.000.000	1 Dokumen peta rawan bencana kabupaten sintang	300.000.000	Kab. Sintang	DAU
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	program Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	BPBD kabupaten Sintang	5 Jenis	109.747.000	5 Jenis	109.747.000	5 Jenis	109.747.000	5 Jenis	109.747.000	Kec. Serawai, Kec. Sintang, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai dan Kec. Sepauk	DAU
		Tersedinya SDM masyarakat dalam pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	program Penanggulangan Bencana	Jumlah Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	BPBD kabupaten Sintang	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	Kec. Serawai, Kec. Sintang, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai dan Kec. Sepauk	DAU
Strategi 4: Pengembangan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan															
1	Ketenagakerjaan	Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi	Program pendidikan dan pelatihan vokasi	Menurunya angka pengangguran	Disnakertrans	64 Orang	400.000.000,-	80 Orang	450.000.000.-	96 Orang	500.000.000,-	96 Org	575.000.000.-	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	APBN (Dana Dekon)
		Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Menurunnya angka pengangguran	Ketenaga kerjaan LLK UKM	48 Orang	Rp. 300.000.000,-	48 Orang	330.000.000,-	48 Orang	363.000.000,-	48 Orang	500.000.000,-	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir,	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		kompetensi : dengan jenis pelatihan : 1). Pelatihan Mekanik Sepeda Motor. 2). Pelatihan Las Listrik. 3). Pelatihan Garmen /Menjahit. 4). Pelatihan Mekanik Mobil Bensin, 5). Pelatihan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut.												Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	
		Pembangunan Gedung BLK baru	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kulaitas bangunan gedung Pelatihan	Ketenagakerjaan LLK UKM	0	0	1 Gedung	275.000.000,-	1 Gedung	300.000.000,-	1 Gedung	400.000.000,-	BLK Kab Sintang	DAU
		Peningkatan sarana dan prasarana gedung diklat LLK-UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas pendukung Gedung Pelatihan	Ketenagakerjaan LLK UKM	0	0	6 Unit	55.000.000,-	7 Unit	60.000.000,-	8 Unit	70.000.000,-	BLK Kab Sintang	DAU
		Peningkatan peralatan dan bahan diklat pada LLK-UKM	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Peralatan Pelatihan Kerja	Ketenagakerjaan LLK UKM	0	0	16 Unit	230.000.000,-	16 Unit	263.000.000,-	16 Unit	300.000.000,-	BLK Kab Sintang	DAU
		Meningkatkan inovasi dan kreatifitas, serta pemanfaatan teknologi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Para Pengangguran	Ketenagakerjaan LLK UKM	48 Orang	Rp. 300.000.000,-	48 Orang	330.000.000,-	48 Orang	363.000.000,-	48 Orang	400.000.000,-	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan bagi masyarakat khususnya pencaker	Program Penempatan Tenaga Kerja	Para Pencari kerja	Urusan Ketenaga kerjaan	3 Perusahaan	35.000.000,-	3 Perusahaan	40.250.000	3 Perusahaan	43.287.500	4 Perusahaan	50.000.000,-	Kabupaten Sintang	DAU
		Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Bidang urusan ketengakerjaan	290 orang	Rp. 40.000.000,-	340 Org	75.000.000,-	390 Org	100.000.000	500 Org	150.000.000,-	Kabupaten Sintang	DAU
		Penempatan tenaga kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Bidang Urusan Ketenaga Kerjaan	0	0	200 Org	Rp. 150.000,000,-	250 Org	RP. 225.000.000.-	260 Orang	Rp. 300.000.000,-	Kabupaten Sintang	DAU
		Pemberian kemudahan akses dan sumber permodalan Pasca Pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Para Pengangguran	Urusan Ketenaga kerjaan	0	0	48 Orang	330.000.000,-	48 Orang	363.000.000,-	48 Orang	400.000.000,-	Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Ketungau Tengah.	DAU
		Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan bagi masyarakat miskin dan rentan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Masyarakat miskin dan rentan	Urusan Ketenaga kerjaan	0	0	20 Orang	35.000.000,-	20 Orang	40.250.000	20 Orang	50.000.000,-	Kabupaten Sintang	DAU
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, khususnya kawasan transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pembinaan SDM di Pemukiman Transmigrasi	Bidang Transmigrasi	2 UPT	40.000.000,-	2 UPT	46.000.000,-	2 UPT	52.900.000,-	2 UPT	60.835.000,-	UPT. Transmigrasi Desa Nanga Bayan dan Desa Sebetung Paluk Kec Ketunggau Hulu	DAU
2	Koperasi dan UKM														

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
3	Kerawanan Pangan	Gerakan Menanam di Pekarangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah RT Miskin dan Rentan Miskin berpartisipasi menanam cabe/sawi di pekarangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	500	77000000	600	84700000	700	93170000			Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Kayan Hulu	
		Sosialisasi dan Pemberian Bibit untuk warga di desa P1 kerawanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah desa P1 yang diberi sosialisasi dan pemberian bibit	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	20	23000000	30	25300000	40	27830000			Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Kayan Hulu	
		Lomba Inovasi Pangan Lokal Tingkat Desa	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah inovasi pangan lokal desa yang berpartisipasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	30	40000000	50	44000000	100	48400000			Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Kayan Hulu	
		Pengembangan Pangan Lokal dengan melibatkan warga miskin	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah warga miskin dan rentan miskin yang berpartisipasi dalam proyek pengembangan pangan lokal (spesifik komoditas tertentu)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100	118000000	200	129800000	400	142780000			Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Kayan Hulu	
		Sosialisasi teknologi pengolahan lanjutan komoditas pangan lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah warga miskin dan rentan miskin yang mendapat sosialisasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	200	139000000	300	152900000	500	168190000			Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Kayan Hulu	
		Penyaluran bibit dan pendampingan	Program Peningkatan	Jumlah Poktan yang	Dinas Ketahana	50	54000000	75	59400000	100	65340000			Serawai, Ambalau,	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		pengelolaan produk unggulan desa	Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	mendapat bantuan bibit dan pendampingan	n Pangan dan Perikanan									Kayan Hilir, Kayan Hulu	
		Pengembangan bibit unggulan daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Poktan yang mendapat bantuan bibit dan pendampingan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	55	78000000	85	85800000	100	169400000			Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Kayan Hulu	
		Bantuan pengadaan sarpras	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa yang mendapat bantuan sarpras	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10	140000000	15	154000000	20				Serawai, Ambalau, Kayan Hilir, Ketungau Tengah, Dedai	
		Peningkatan infrastruktur jalan	Program Peningkatan Jalan	Panjang ruas jalan akses pertanian yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum									Ambalau, Kayan Hulu	
		Peningkatan infrastruktur jembatan	Program Peningkatan Jembatan	jumlah jembatan sebagai akses pertanian yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum									Ambalau, Kayan Hulu	
4	Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Bantuan penyaluran bibit padi unggul	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Poktan yang mendapat bantuan bibit padi unggul	Dinas Pertanian dan Perkebunan	50	209148000	60	421057080	70	463162788				
		Peningkatan jalan usaha tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang ruas jalan desa sebagai akses pertanian yang ditingkatkan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	150	490000000	300	3000000000	450	3300000000				
		Bantuan traktor	Program Penyediaan	Jumlah poktan yang	Dinas Pertania	10	609500000	20	715046000	35	786550600				

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
			dan Pengembangan Prasarana Pertanian	mendapat bantuan traktor	n dan Perkebunan										
		Pendampingan adopsi teknologi tepat guna pertanian	Program Penyuluh Pertanian	Jumlah poktan yang mengadopsi teknologi pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10	50000000	15	55000000	20	60500000				
		Pemberdayaan kelembagaan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah poktan yang didampingi	Dinas Pertanian dan Perkebunan	30	13720000	40	74079500	50	81487450				
		Pasar Tani	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah peserta pasar tani (Poktan/Kelembagaan)	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10	276151750	20	396073425	35	435680767				DAU
		Penerapan Izin Perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok Tani dan Perusahaan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	25	164866000	50	319458700	100					DAU
		Pengembangan Model Kehutanan Sosial	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani, Pengadaan Bibit Karet dan Sawit	Dinas Pertanian dan Perkebunan	20	1589500000	30	4631097925	45					DAU
		Pendampingan adopsi teknologi pemanfaatan olahan sampingan hasil hutan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan	25	13111000	50	71349000	60					DAU
		Bantuan sarpras perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan yang	Dinas ketahanan Pangan dan	2	50000000	3	55000000	5	60500000			Ambalau, Kayan Hilir, Serawai, Ketungau	APBD

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
				mendapat bantuan sarpras perikanan	Perikanan									Hulu, Kelam, Dedai	
		Pendampingan penerapan teknologi budidaya perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan yang menerapkan teknologi budidaya perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	50000000	3	55000000	5	60500000			Ambalau, Kayan Hilir, Serawai, Ketungau Hulu, Kelam, Dedai	APBD
		Pendampingan bentuk kerjasama produsen dan mitra	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Mitra yang bergabung dalam pola kemitraan budidaya ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	50000000	10	55000000	15	60500000			Ambalau, Kayan Hilir, Serawai, Ketungau Hulu, Kelam, Dedai	Kemitraan
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pendampingan dan analisa kelayakan jenis usaha BUMDes yang akan dilaksanakan	Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDes yang mendapatkan pendampingan dan analisa kelayakan jenis usaha BUMDes yang akan dilaksanakan	DPMPD	90%	#########	95%	#########	95%	#########	95%	#########	14 Kecamatan	DAU
		Pelaksanaan Bimtek dan Diklat bagi Pengelola Bumdes		Jumlah Pengelola BUMDes yang mendapatkan Bimtek dan Diklat											
		Peningkatan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi	Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan	DPMPD	91%	#########	92%	#########	93%	#########	95%	#########	14 Kecamatan	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
				pembangunan desanya											
		Pelatihan dan pendampingan Pengelolaan dana desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desanya	DPMPD	91%	#########	92%	#########	93%	#########	95%	#########	14 Kecamatan	DAU
		Pelatihan dan pendampingan identifikasi dan penyusunan produk unggulan lokal/desa (Prudes)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desanya	DPMPD	85%	#########	87%	#########	90%	#########	95%	#########	14 Kecamatan	DAU
		Mapping kelayakan usaha desa dan pengembangan Prudes													DAU
		Identifikasi dan penetapan desa wisata	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Desa yang diidentifikasi dan ditetapkan menjadi Desa Wisata	DPMPD/Bappeda	-	-	90%	#########	-	-	-	-	14 Kecamatan	DAU
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Desa Wisata		Tersusunnya dokumen Penyusunan Masterplan Pengembangan Desa Wisata											
		Pelatihan dan pendampingan penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan desa wisata; peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata (Pokdarwis); peningkatan minat investor	Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan desa wisata	DPMPD	90%	#########	90%	#########	90%	#########	90%	#########	14 Kecamatan	DAU

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana desa; Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur desa	Penataan Desa	Jumlah sarana dan prasarana dan infrastruktur desa yang disediakan	DPMPD/Dinas PU	90%	#########	90%	#########	90%	#########	90%	#########	14 Kecamatan	DAU
6	Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah	pelatihan digital marketing, pelatihan peningkatan kualitas produk dan kemasan	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	jumlah koperasi dan UMKM	DISPERINDAGKOP-UKM	5 unit usaha	51250000	5 unit usaha	52531250	5 unit usaha	53844531	5 unit usaha	55190645		
		pengadaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan uang representatif (pasar)	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah unit	DISPERINDAGKOP-UKM	1unit	224500000	1 unit	231137500	1 unit	236915938	1 unit	242838836		
		peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap berbagai laporan yang masuk	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, program Pengawasan pemeriksaan koperasi, program pemberdayaan UMKM	JUmlah Koperasi dan UMKM	DISPERINDAGKOP-UKM										
		mempermudah informasi dan jalan terhadap akses permodalan	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	JUmlah Koperasi dan UMKM	DISPERINDAGKOP-UKM										
		bimbingan teknis	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian, program	Jumlah Koperasi dan UMKM	DISPERINDAGKOP-UKM	12 unit usaha	153749662	12 unit usaha	157593424	12 unit usaha	161533260	12 unit usaha	165571591		

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
			pengembangan UMKM												
		mentransmisikan setiap informasi		Jumlah Pelaku Usaha	DISPERINDAGKOP-UKM										
7	Kawasan Hutan	Pemetaan HHBK dan pola pengembangannya (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Desa Dalam Kawasan Hutan yang difasilitasi	DISPERINDAGKOP-UKM	10		15		20		25		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	
		Fasilitasi dan Pendampingan Optimalisasi Potensi HHBK (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Desa Dalam Kawasan Hutan yang difasilitasi	DISPERINDAGKOP-UKM	10		15		20		25		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang dibentuk	DISPERINDAGKOP-UKM	2		3		4		5		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	
		Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi	DISPERINDAGKOP-UKM	2		3		4		5		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	
		Pengusulan Revisi Kawasan Hutan		Jumlah Dokumen Revisi Kawasan Hutan yang diterbitkan	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	1		1		1		1		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Pengusulan Revisi RTRW		Jumlah Dokumen Revisi RTRW yang diselesaikan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1		1		1		1		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	
		Sosialisasi dan Pendampingan Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Perhutanan Sosial di desa	DISPERINDAGKOP-UKM	3		4		5		7		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	
		Fasilitasi Perizinan Perhutanan Sosial (KELULUT (Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kerjasama Masyarakat))	Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Perhutanan Sosial di desa	DISPERINDAGKOP-UKM	3		4		5		7		Ambalau, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Tempunak	
Strategi 5: Penguatan sistem pendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan															

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
1.	Perencanaan dan Penganggaran	Kerja sama dengan perguruan tinggi													
		Menumbuh kembangkan inovasi pada OPD yang berkaitan dengan PK													
		Penguatan dalam pengelolaan data													
		Pemanfaatan data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan													
		Menyusun dokumen RAT PK													
		Menyusun dokumen RPKD													
		Penguatan pada proses verifikasi anggaran													
		Menyusun RKA Tematik Kemiskinan													
		Menambah alokasi anggaran dari berbagai sumber													
		Pengawalan terhadap target-target RPJMD													
		Melakukan rekonsiliasi data PK secara berkala													
		Updating data sasaran													
		verifikasi dan validasi data													
2.	Sistem Pendukung	menyusun agenda pertemuan secara berkala													
		Menyusun rencana aksi bersama													
		Membentuk tim penanggulangan Kemiskinan yang berisi multi stakeholder													

No	Bidang/ Urusan	Opsi Intevensi	Program	Indikator sasaran	Bidang/Urusan/OPD	Target								Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
		Penyusuna jadwal monev PK													
		Menyusun dokumen LP2KD													